# BALAIRUNG

EDISI KHUSUS/TH. VIII/1993

MAJALAH MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA Rp 3.000

# INDONESIA
## Masa Depan

**PRAMOEDYA:**

*"Saya pupuk bawang di LEKRA ..."*

ISSN : 0215 - 076X

Alam selalu mengajarkan manusia untuk berlaku arif, bijak. Ada pagi, ada siang, senja, kemudian malam hari. Tak mungkin pagi sepanjang hari. Sama halnya tak mungkin remaja selalu sepanjang masa.

Organisassi pun tak luput dari fenomena ini. Ada saat malam harus bersiap untuk digantikan pagi. BALAIRUNG pun demikian halnya. Kami selalu bersiap untuk menyambut pagi. Kaderisasi, regenerasi, adalah program yang wajib kami lakukan. Untuk menyegarkan suasana, merangkul orang-orang berkualitas, dan terlebih untuk menjaga kesinambungan lembaga. Sebab kami sadar, sebagai mahasiswa kami sangat dibatasi waktu hingga tak bisa terus-menerus bergulat dalam aktivitas pers mahasiswa yang terus-terang, sangat mengasyikkan.

Oktober lalu, bersama kerabat kami, SKM BULAKSUMUR, kami melakukan rekrutmen kepengurusan. Sekitar 120 peminat dari berbagai fakultas di lingkungan UGM menyambut undangan kami. Tentu saja kami harus menyaring, melalui serangkaian tes, memilih yang terbaik.

Dan kini, mitra kerja kami telah bertambah. Tentu saja, teman-teman baru hasil "saringan" ini harus lebih dulu melewati masa magang untuk berlatih dan menyesuaikan diri dengan irama kerja BALAIRUNG. Serangkaian program kami kemas dalam masa magang ini. *In house training*, diskusi buku, juga berbagai kepanitiaan.

PRAYUDI

*Mitra kerja baru kami ; yang akan mewarnai BALAIRUNG mendatang.*

Sukses seminar "Quo Vadis Intelektual Indonesia" yang kami selenggarakan beberapa waktu lalu dalam rangka memperingati 4 tahun wafatnya Soedjatmoko , dan penyebaran polling rektor yang melengkapi rubrik kemahasiswaan kali ini juga tak lepas dari peran teman-teman magang.

Dalam edisi kali ini, yang kami maksudkan sebagai edisi khusus memperingati sewindu BALAIRUNG, kami menampilkan sajian khusus. 16 penulis muda Bulaksumur menuangkan pikiran mereka tentang Indonesia 25 tahun mendatang. Kami kemas rangkuman tulisan ini dalam "Mozaik Indonesia Masa Depan".

Ada tujuan khusus ketimbang sekedar memperingati sewindu BALAIRUNG. Kami ingin lebih menggulirkan iklim dialog dalam proses pembangunan. Agar hubungan antara pemerintah dan masyarakat bukan sekedar hubungan searah antara "yang membangun" dan "yang dibangun".

Tentu saja, untuk mencapai iklim dialogis yang lebih segar itu dibutuhkan upaya. Seperti pesan terakhir Sokrates sebelum dipaksa meminum racun : "Jangan mau hanya jadi laba-laba. Sebab dia cuma bisa menunggu mangsanya terperangkap sarangnya."

Nah, Pembaca budiman, kami sembahkan edisi ini sebagai upaya bahwa kami tak ingin sekedar jadi laba-laba.

**Penjaga Dapur**

**BALAIRUNG**
MAJALAH MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

☐ **Diterbitkan oleh** Badan Penerbit Pers Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BPPM UGM) ☐ **Ijin Terbit** SK MENPEN RI No.1039/DIRJEN PPG/STT/1986, SK REKTOR No.UGM/UM/01/37 ☐ International Standard Serial Number (ISSN):0215-076 X ☐ **Pelindung**: Prof.Dr.Ir.Mochamad Adnan,M.Sc (Rektor UGM) ☐ **Penasehat:** Ir.Haryana,M.Arch. (Purek III UGM), Prof.Dr. Koesnadi Hardjasumantri,S.H., Drs.Amir Effendi Siregar,M.A., Drs. Jakob Oetama, Ir. Abdulhamid Dipopramono.☐ **Pemimpin Umum/PenanggungJawab**: Yuswohady ☐ **Sekretaris Umum:** Mardiyah ☐ **Pemimpin Redaksi**: Sunarto ☐ **Sekretaris Redaksi**: Suluh Pratithasari☐ **Pemimpin Perusahaan**: Dewi Ratnawulan ☐ **Sekretaris Perusahaan:** Rahmi Lestarini ☐ **Kabag.Iklan:** Dewi Nilasari ☐ **Kabag.Keuangan**: Hastarini ☐ **Litbang**: Bimo Nugroho. ☐ **Redaktur**: Mardiyah, Dewi R., Kurniawan, Sunarto, S. Pratitasari, Indriaswati D.S.,Danarti W., Anthony D.Martin, Bimo Nugroho, Rahmi Lestarini, Teguh Kresno Utomo (non aktif) ☐ **Redaktur Foto:** Suyono Prihantoro ☐ **Fotografer**: Kelik Supriyanto,Timbul Sunoto, Budi Fajriansyah ☐ **Redaktur Artistik**: Sisdaryono **Staf**: Pedy Artsanti ☐ **Reporter** : Ririn Fatmasari D., Frans Surdiasis, , Rinda Runi Anitasari ☐ **Staf Perusahaan**: Danarti W, Timbul Sunoto, Rinda RA, Imam B, Wardana ☐ **Magang Pengurus:** Eriyanto, Poppy SW, Peny Sekar, Efi Yuniarsih, Gutomo Bayu Aji, Friyanto, Nugroho Trisnu Broto, Arif Rahman Hakim, Agus Maulana, Djudjur T. Susila, La Hisaaba, Laits Abit, Lukman Hakim, Hugo Sunaryo, Nur Choiron, Ida Ayu Trisnawati, Aris Purnomo, Arif, Nasher MJA, Harri Prabowo, Tatang I, Azizah, Prayudi ☐ **Alamat Redaksi**: Bulaksumur B-21 Yogyakarta 55281, Telp.88688 psw 1071 ☐ **Percetakan:** Liberty Offset, Jl.Jayengprawiran 21Yogyakarta, Telp.2908. Isi di luar tanggung jawab percetakan

**Ketua Umum** : Kurniawan ☐ **Sekretaris Umum** : Sunarto ☐ **Bendahara Umum**: Sri Naida ☐ **Ketua Departemen Pengkajian dan Pelatihan:** Rommy Fibri ☐ **Ketua Bidang Pelatihan**: Yulianto Sigit ☐ **Ketua Bidang Pengkajian**:Taufiqurrohman ☐ **Ketua Bidang Data dan Informasi**: Suyanto ☐ **Ketua Departemen Majalah**: Yuswohady ☐ **Ketua Departemen Surat Kabar**: Israr Ardiansyah.

Redaksi menerima tulisan dan foto terutama tentang dunia mahasiswa. Redaksi berhak mengubah tulisan sepanjang tidak mengubah isi dan maknanya. Tulisan diketik rangkap 2-6 halaman folio. Yang tidak dimuat akan dikembalikan bila disertai perangko secukupnya. Isi tulisan tidak mesti sejalan dengan pendapat redaksi.

# Mozaik Indonesia Masa Depan

Halaman

17

*Sewindu perjalanan BALAIRUNG membekaskan tapak-tapak hitam-putih bagi dewasanya dunia mahasiswa.*

*Menyambutnya, kami mengumpulkan 17 orang muda Bulaksumur menyoroti mozaik – politik, ekonomi, budaya, hukum, agama, dan pendidikan – Indonesia masa depan.*

*Ikuti kumpulan artikelnya*

# Terminal di seberang lensa-lensa

*Pintuku memang tak berdaun pintu hingga kau dapat datang- pergi kapan kau suka dindingku cakrawala dan atapku langit... Sebuah karya perpisahan Kelik Supriyanto.*

Halaman 63



COVER : Amir Fatah Sofyan

TIMBUL SUNOTO

*Sangkar burung dan "sangkar burung" yang lain*

## Hubungan Baik

Menurut saya BALAIRUNG cukup independent, kritis, dan boleh dibilang obyektif. Kritik saya, walau BALAIRUNG boleh dikatakan obyektif, namun ia baru bisa obyektif pada satu sisi saja. Arti nya baru mampu mengamati satu fenomena saja dan ada fenomena lain yang belum bisa atau belum berani disentuh BALAIRUNG.

Selain itu di usia yang 8 tahun ini saya kira merupakan kerja yang tidak main-main untuk mencapai kondisi seperti ini, yang untuk pers kampus di usia itu belum apa-apa. Namun jangan dulu *gedhe rumangsa*, karena selain kerja utama BALAIRUNG kondisi tersebut juga karena adanya dukungan dari elemen civitas akademi ka seperti pihak rektorat, dosen, mahasiswa dan sebagainya. Oleh karena itu BALAIRUNG harus selalu membina hubungan dengan elemen- elemen tersebut. Akhirnya saya ucapkan selamat buat sewindu BALAIRUNG.

**]Elan Satriawan**
**KETUA UMUM SENAT MAHASISWA UGM**

## Kegenitan Aktivis

Kesan saya pada BALAIRUNG, penampilannya sudah jauh lebih baik, mulai dari rancangan cover, rancangan grafik, dan mutu cetaknya. *Lay out* nya juga cukup segar dan ada kemajuan artinya bukan hanya sekedar eksperimental. *Mengenai* tulisan-tulisannya saya kira masih mempunyai daya kritis dan kepekaan komitmen sosial politik yang tinggi. BALAIRUNG juga berani melakukan penyorotan yang mengarah ke arah yang agak mendasar dan konsepsional walaupun kadang-kadang kegenitan aktifisnya masih muncul.

Saya mengkritik BALAIRUNG yang memakai conter slogan yang mungkin sangat verbal dan sifatnya meladeni tingkat pola permainan politik penguasa tetapi dia kurang kreatif, kurang antisipatif, masih terlalu reaktif bahkan tidak betul-betul menciptakan alternatif. Walau alternatif itu sekedar bertolak dari ketidaksukaan pada kepincangan atau ketimpangan yang memang ada. Inilah yang saya maksud dengan kegenitan aktifis tersebut. Mereka merasa asal sudah berani seolah-olah semua syarat sudah terpenuhi. Menurut hemat saya, jika ingin menjadi pembaharu atau pemberi alternatif bisa dengan gaya tenang-tenang menghanyutkan. Jadi jangan hanya kenyaringannya yang dianggap penting.

**Aristides Katoppo**
**Wartawan senior, Jakarta**

## Belum Ada Apa-Apa

Tema yang disajikan BALAIRUNG cukup menarik dan cukup bagus dalam pengambilan *angle*. Dibanding pers mahasiswa lain, yang paling menarik dari BALAIRUNG adalah layoutnya. Artinya kreatifi tas pengurus BALAIRUNG untuk hal tersebut cukup lumayan. Kemudian yang saya kurang suka dan ini saya kira merupakan kelemahan BALAIRUNG yaitu cara pengungkapannya kurang mengena. Di sini BALAIRUNG mencoba menampilkan keterbukaan pers namun kelihatan sekali dipaksakan. Dari luar seolah-olah ia menunjukkan sesuatu

yang sangat berani tetapi setelah beberapa kali saya baca ternyata di dalamnya belum ada apa-apanya.

Mengenai bahasanya, menurut saya terlalu *ngepop*. Ketika ada permasalahan yang serius maka BALAIRUNG membuatnya ngepop sehingga tulisan tersebut memberi kesan tidak serius. Dan berbicara mengenai obyektifitas, dalam beberapa pemberitaan BALAIRUNG masih memiliki semacam arogansi. Hal ini tampak karena ia berada di perguruan tinggi yang katakanlah berada di atas menara gading. Padahal seharusnya hal tersebut tidak perlu.

**Hilal A.B.**
**Pemimpin Umum LPM HIMMAH UII**

## Jangan Banci !

Bagi saya kualitas nomor dua, yang penting generasi muda dapat berbicara dengan generasi muda. Kalau ada yang mengatakan BALAIRUNG terlalu berani, biar saja. Tapi kalau banci, *sorry* saja, itu bukan orang muda. Maka jangan menjadi majalah yang banci, yang tidak ada suaranya, yang semuanya mengangguk-angguk. Yang penting jujur dan jangan main hantam kromo. Mahasiswa kalau menulis kan lain dengan tukang pukul yang asal *ngawur*. Mahasiswa harus dengan pikiran. Ikuti hati nurani.

**Romo Mangun**
**Budayawan, Yogyakarta.**

## Membidik Isu

Berbeda dengan pers umum, Balairung tidak bisa mengikuti perkembangan setiap peristiwa dan setiap isu secara kontinu karena ia dibatasi oleh waktu terbit yang 6 bulan sekali. Sehingga hal terpenting di situ adalah bagaimana memilih isu yang tepat.

Persolannya adalah bagaimana membicarakan isu tersebut dalam konteks BALAIRUNG yang seharusnya memiliki kekhasan yang nantinya berbeda dengan pers umum. Atau sesuatu yang barangkali tidak bisa diungkap oleh pers umum, bisa diungkap secara kritis oleh Balai rung. Di situlah kemudian dibutuhkan kapasitas tertentu dari pengelola BALAI RUNG untuk membi-carakan isu itu, memeta kan perma salahan, memberi-kan sudut pandang, dan menja-dikan isu tersebut menjadi sebuah diskusi publik. Dengan demikian BALAIRUNG tidak meleset membidik isu yang dianggap penting padahal ternyata merupakan isu pinggiran. Dari situ saya pikir di BALAIRUNG perlu dihidupkan semacam forum yang membantu para pengelolanya untuk membicarakan *brain storming*nya sehingga nantinya menjadi semacam "Term of Reference" bagaimana menggulirkan diskusi itu dan bagai mana merancang pembicara sehingga lebih sistematis.

**Kuskhrido Ambardi**
**Staf Peneliti LP3Y, Yogyakarta**

## Seimbang

Secara umum bagus tetapi saya lihat bobotnya lebih banyak sosial politik. Saya menyarankan agar diseimbangkan antara teknologi, agama, sosial, budaya, ekonomi dan ekologi karena mengingat UGM adalah suatu universitas, bukan institut.

**DJaelani Anwar**
**R & D DIRECTOR PT (PERSERO) SEMEN PADANG**

## Obsesi

Terus terang saya belum banyak baca BALAIRUNG, tapi secara umum saya menilai sebagai majalah mahasiswa BALAIRUNG sudah sangat memadai. Secara visual tampilannya sangat baik, sementara dari isinya; pernyataan Gus Dur seperti ini (dia menunjuk salah satu contoh isi wawancara majalah BALAIRUNG, Red), tak bakal muncul dalam pers umum. Kalau bisa hal ini dipertahankan sehingga bisa berfungsi sebagai agen perubahan negara. Di sisi lain saya melihat untuk kepentingan sosialisasi dan aktualisasi pemikiran mahasiswa media seperti BALAIRUNG sangat strategis, saya sendiri sejak lama punya obsesi untuk menghimpun pemikiran-pemikiran mahasiswa dalam sebuah buku, temanya menyangkut berbagai masalah kenegaraan. Akan baik kalau BALAIRUNG bisa memulainya

**Mochtar Lubis**
**Budayawan, Direktur Yayasan Obor Indonesia**

## Pemilihan Rektor UGM:

# Tak Semudah Memilih Kepala Kampung

**Di kampung, arisan para bapak bisa jadi ajang paling sah memilih kepala kampung. Para ibu cukup tenang-tenang saja di rumah, senyampang mengawasi anak-anak bermain di halaman. Apakah sekarang, kampus sama dengan kampung?**

Tentunya tidak. Kampus jelas beda dengan kampung. Pun demikian pula ritual penobatan kepala kampus tidak sama dengan kepala kampung. Paling tidak dari segi bahasa, istilah-istilah di wilayah kampus terkesan lebih ilmiah, sebutlah semisal kepala kampus dijuluk dengan sebutan Rektor dan keluarga kampus dikenal dengan nama Civitas Akademika.

Tapi memang, hubungan antara rektor dan civitas akademika punya *greget* intimitas yang mengaduk perasaan. Apalagi di UGM yang masih kental atmosfir *ndeso*nya. Dahulu, ketika aksi mahasiswa 78-an lagi gencar-semarak, Prof. Dr. Sukadji Ranuwihardjo (Rektor UGM 1973 s.d 1978) bahkan bersedia digantung tatkala membela Dewan Mahasiswa yang ada di ujung tanduk kematian (Tabloid Gelora Mahasiswa, 1978). Sayang akhirnya sejarah disulam lain, Dema UGM tetap dieksekusi mati dan Sukadji terguling dari tahta rektorat. Namun toh, pelajaran sejarah itu tak mengurangi semangat Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri (Rektor 1986 s.d 1990) untuk mendampingi mahasiswa beraksi menentang SDSB di Gedung DPRD.

Memang kurang afdol rasanya bila kita membandingkan para rektor UGM, lantaran masing-masing punya keunikan pribadi dan zamannya sendiri-sendiri. Hanya saja, mahasiswa sebagai bagian dari civitas akademika tentu punya persepsi ideal tentang rektornya yang layak diangkat ke permukaan. Dan Majalah BALAIRUNG, dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, mencoba untuk mengakomodasikan persepsi mahasiswa UGM berkait-paut dengan mekanisme dan kriteria rektor yang diidamkan.

**Metodologi Dua Kaki**

Seperti jamaknya bila orang hendak memotret suatu fenomena, maka tebaran mata pandang dan perspektif bidik akan sangat menentukan sahih tidaknya sebuah kesaksian potret terhadap fenomena yang bersangkutan. Sebutlah itu dengan istilah metodologi.

Adapun perangkat metodologi itu bermacam jenisnya, semisal polling, wawancara dan studi pustaka. Dalam mengangkat lika-liku isu pemilihan rektor UGM, Majalah BALAIRUNG memadukan semua perangkat tersebut guna memformulasikan kecamuk pendapat yang berkutat di kalangan mahasiswa UGM.

Sebesar 450 eksemplar polling ditebar di lingkar kampus biru bulaksumur. Tiap fakultas (kecuali mahasiswa Pasca Sarjana) sama rata kebagian 20 eksemplar. Sisanya diisi para aktivis yang mangkal di Gelanggang Mahasiswa maupun yang eksis di luar orbit kampus, seperti kelompok diskusi dan Komite Pembelaan Mahasiswa yang sering menggelar aksi demonstrasi. Dari besaran jumlah tersebut, 441 eksemplar polling berhasil dijaring balik.

Sengaja polling ini berbasis dua kaki, satu sebagai representasi fakultas dan satunya lagi sebagai manifestasi aspirasi aktivis mahasiswa yang kerap berurusan langsung dengan pihak rektorat, mulai dari soal dana kegiatan sampai surat peringatan batas waktu studi.

Dan meski jumlah mahasiswa tak sama di masing-masing fakultas, jumlah polling yang dibagikan tetap sama untuk menghindari efek 'tak kenal maka tak sayang' yang sering menjadi alasan menguatnya primordialisme fakultas. Dengan demikian, sejauh mungkin dihindari kecenderungan memilih Dekannya sendiri menjadi calon rektor, lantaran mereka tak kenal dengan

Posisi rektor UGM di mata mahasiswa

calon- calon lain. Berikut ini hasilnya,

| | |
|---|---|
| 1. Prof. Dr. Ir. Boma Wikantyoso | 135 suara |
| 2. Prof. Dr. Moch. Adnan | 61 suara |
| 3. Prof. Dr. Achmad Soemitro | 56 suara |
| 4. Prof. Dr. Zanzawi Soejoeti | 53 suara |
| 5. Kotak kosong | 51 suara |
| 6. Prof. Dr. Soekanto Reksohadiprojo | 31 suara |
| 7. Prof. Dr. Moeljarto Tjokrowinoto | 10 suara |
| 8. Prof. Dr. Soenarjo Keman | 8 suara |
| 9. Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri | 7 suara |
| 10. Ir. Haryana, M.Arch. | 4 suara |
| 11. Dr. Bambang Purnama | 2 suara |
| 12. Dr. Ichlasul Amal | 2 suara |
| 13. Dr. Loekman Soetrisno | 2 suara |

Nominasi unggulan

SISDARYONO

**Dirindukan: Rektor yang Aspiratif**

Segenap responden nyaris sepakat -kecuali satu orang dan dua abstain- memandang bahwa posisi rektor UGM itu memang strategis. "Piye le ora penting?"(bagaimana tidak penting?) tutur Dr. Maria Sumardjono, Dekan Fakultas Hukum UGM, bilakala disambangi BALAIRUNG di ruang kerjanya, "Rektor itu tak hanya memimpin seluruh civitas akademika dan menjaga martabat kualitas UGM bersaing dengan universitas lain. Tetapi yang lebih *njlimet,* saya pikir adalah bagaimana dia harus menyeimbangkan berbagai kepentingan yang sering bertentangan? Nggak mudah itu. Makanya dibutuhkan seorang figur yang punya kapabilitas dan aksesibilitas."

Tanggapan lain dilontarkan Nirwan Ahmad Arsuka, budayawan muda yang masih kuliah di Teknik Nuklir FT UGM, "Begitu pentingnya posisi rektor, membawa konsekuensi dia musti punya visi yang kuat. Jadi tak sekedar administrator belaka. Konkritnya ketika dia harus menyikapi militer yang seenaknya menangkapi para demonstran mahasiswa yang sedang menyalurkan kritik sosial di boulevard UGM. Saya lebih prihatin lagi, intel militer sekarang sudah berani kurang ajar menyusup dalam diskusi intern mahasiswa di kampus. Ini tentu mengganggu kejernihan diskusi. Mereka jelas menginjak-injak kebebasan akademik yang dimiliki mahasiswa. Selayaknyalah Rektor harus usir mereka keluar kampus! Kalau kita yang usir, nanti dikira masyarakat sipil suka bikin-bikin perkara."

Rektor yang aspiratif, naga-naganya memang sedang dirindukan civitas akademika UGM. Hasil polling BALAIRUNG pun menunjukkan kriteria aspiratif sebagai kriteria pertama, beruntun sampai mantan aktivis jadi kriteria terakhir. Dimintai tanggapannya, Elan Satriawan, Ketua SM UGM menyatakan, "Rektor yang mantan aktivis justru berkemungkinan besar sangat aspiratif. Sebab aktivitas kemahasiswaan tentu telah menggodog dia untuk mengakomodasikan segala kepentingan."

| | |
|---|---|
| 1. Aspiratif | 1.618 |
| 2. Tegas & bertanggung jawab atas otoritas wilayahnya | 1.547 |
| 3. Mempunyai kemampuan manajerial yang baik | 1.544 |
| 4. Pernah menduduki jabatan struktural di UGM | 1.432 |
| 5. Populis | 1.411 |
| 6. Mantan aktivis | 1.373 |

Prioritas kriteria rektor

SISDARYONO

Senada dengan pijakan yang berbeda, Yussac F. Ananda, Pemimpin Redaksi Majalah SINTESA Fisipol UGM berpendapat, "Kapasitas rektor yang *qualified* itu diproses sejak masa mahasiswa. Pemimpin yang baik mestinya melewati tahapan-tahapan, tidak bisa dadakan. Pemimpin dadakan cuma lahir lewat revolusi, seperti kudeta misalnya."

Dari sekian kriteria, suara tertinggi hasil polling jatuh pilihan pada Prof. Dr. Ir. Boma Wikantyoso, Dekan Fakultas Teknik yang barusan dilantik jadi Guru Besar pada tanggal 23 September 1993. Apa jawaban Pak Boma tatkala di*tanting* BALAIRUNG? "Wah, kalian ini membuat saya tidak enak. Terus terang saya belum siap jadi rektor, belum saatnya. Masih banyak calon yang lebih pantas daripada saya."

Apakah Pak Boma didukung oleh jajaran mahasiswa FT UGM? "Tidak!" tegas Musta'in, orang nomor satu di Senat Mahasiswa FT yang menjabat Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UGM, "Siapapun orangnya akan kita dukung bila dia punya komitmen kerakyatan yang kuat. Sebab memang ke sana orientasi ideal UGM."

**Tidak Paham Mekanisme**

Setujukah mahasiswa dengan mekanisme pemilihan sekarang

SISDARYONO

Bisa dihipotesa, mahasiswa UGM menghendaki untuk dilibatkan dalam proses pemilihan rektor, 93,42% responden menguatkan kecenderungan tersebut. Di samping itu perlu digaris-bawahi pula, 88,43% responden menolak campur tangan dari luar institusi UGM yang mengotori proses pemilihan rektor.

Anehnya, mekanisme pemilihan rektor sekarang yang notabene sama sekali tidak melibatkan mahasiswa dan dikooptasi oleh Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan, justru lebih disetujui dengan 53,74% responden sepakat (7,48% sangat setuju dan 46,26% setuju). Hasil polling juga menunjukkan mekanisme kekinian dianggap sanggup menyalurkan aspirasi mahasiswa UGM, 16,1 % sangat setuju dan 41,5% setuju (total 57,6%).

Sampai di situ, polling mengindikasikan dua kemungkinan. Pertama, mahasiswa UGM merasa sudah terwakili oleh para guru besar yang mendominasi senat universitas yang selama ini menggodog bakal calon rektor. Atau kemungkinan kedua, mahasiswa UGM sesungguhnya tidak begitu paham dengan mekanisme pemilihan rektor saat ini.

Mahasiswa dilibatkan dalam proses pemilihan

Kemungkinan pertama gugur manakala pertanyaan kunci dilemparkan, apakah mahasiswa merasa terwakili bila mekanisme dipercayakan pada senat guru besar? Jawabnya 50,57% responden merasa belum terwakili dan 8,16% merasa sangat tidak terwakili (total 58,73%).

Barangkali ada baiknya, kita mahasiswa UGM merefleksi diri atas ketidakpahaman terhadap mekanisme pemilihan yang sekarang berlaku.

Agak janggal memang, mengapa selama ini Mahasiswa UGM tak banyak berdialog dengan mahagurunya? Atau barangkali, sejak lama telah terjadi kesenjangan komunikasi dalam civitas akademika di kampus ini?

**HegemoniKekuasaan dan Ketertutupan Senat Universitas**

Di arung perjalanan hidupnya, Statuta Gadjah Mada yang mengatur mekanisme pemilihan rektor telah banyak berubah. Pada statuta prima yang ditandatangani Assaat, Pemangku Djabatan Presiden RI, tertanggal 14 Agustus 1950, bab IX, Hal Presiden Universitit (yang sekarang disebut rektor), tertulis Pasal 31, ayat (2): "Presiden Universitit diangkat oleh Presiden RI, seberapa dapat dari antara guru besar **atas usul Senat Universitas** dengan mengingat pertimbangan Dewan Kurator buat waktu tertentu tidak melebihi empat tahun dan dapat diangkat lagi atas usul Senat Universitas dengan mengingat pertimbangan Dewan Kurator".

Sementara pada statuta terbaru yang (hanya) ditandatangani Menteri P&K, Fuad Hassan, tertanggal 18 November 1992, mekanisme pencalonan rektor disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 31).

Baiklah kita simak PP no 30/1990, pasal 38, ayat (1), tertera "Rektor universitas/institut yang diselenggarakan oleh pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden **atas usul Menteri**, Menteri lain atau pimpinan lembaga pemerintah lain setelah **mendapat pertimbangan senat universitas**/institut yang bersangkutan".

Pemilihan tanpa campur tangan pihak luar

Dari sisi pandang hukum, menurut Prof. Dr. Soedikno Mertokoesoemo SH, mahaguru *sepuh* FH UGM yang telah lama malang melintang di Senat Universitas UGM, ada perbedaan yang mendasar antara *mengusulkan* dan sekedar *memberi pertimbangan.* Terminologi usul jelas mempunyai posisi hukum yang lebih kuat dibanding memberi pertimbangan. Sebab pertimbangan itu bisa diterima atau ditolak terserah penerima pertimbangan (Menteri P&K), tetapi pemberi usul mempunyai kesempatan untuk membahas bersama, ada proses dialog dan dialektika.

Jadi dari situ bisa kita lihat, bahwa selama ini telah terjadi amputasi otonomi kampus dalam mekanisme pemilihan rektor. Fenomena inilah -meminjam istilah O'Donnel- yang disebut *korporatisme birokratis.* Di mana segenap unsur yang berpeluang menjadi *pressure group*, kemudian dikooptasi atau direngkuh masuk birokrasi pemerintahan. Walhasil, ordinasi kampus yang dahulu otonom dan kritis, kini dalam praktek kekuasaan Orde Baru, tersengal-sengal disubordinasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam perspektif lain, Nezar Patria, Pemimpin Umum Majalah PIJAR Fak. Filsafat UGM, menyatakan mekanisme tersebut dilegitimasi untuk mempertahankan status quo kekuasaan. Berpijak pada Teori Hegemoni Antonio Gramschi, kekuatan kuasa pemerintah telah merasuk dalam civitas akademika dengan memanfaatkan

Pemilihan rektor dipercayakan kepada senat Guru Besar, mahasiswa UGM merasa ...

birokrasi institusi kampus sebagai aparatus ideologis untuk memperkuat simbol bahwa pemerintah yang sekarang, dianggap masih layak 'dipercaya' untuk berkuasa.

Di tengah sedemikian pengapnya atmosfir kampus, senat universitas rupanya lebih memilih menjadi bangunan yang tertutup. Meski sudah dibantu Senat Mahasiswa UGM dengan surat himbauan pada rektorat untuk berdialog dengan BALAIRUNG, tulisan ini ayal merilis keterangan Prof. Dr. Ir. Moch. Adnan selaku Ketua Senat Universitas Gadjah Mada berkait paut dengan pencalonan rektor UGM.

"Ah, dari dulu pencalonan rektor itu memang selalu tertutup" cerita Djuwarto, ketua pungkasan Komisariat Dewan Mahasiswa Fak. Filsafat UGM, "tetapi biasanya selalu terbuka kemungkinan untuk dialog. Jaman saya, Pak Kadji (Sukadji Ranuwihardjo, red) sendiri yang menyuruh kami demonstrasi menentang NKK-BKK. Yang besar sekalian, biar beliau punya alasan kuat untuk menolak kebijakan menteri, karena memang sistem pendidikan yang ada sekarang sama sekali tidak cocok untuk mahasiswa".

**Mekanisme Alternatif**

Di negeri Jerman, yang sistem pendidikannya diagung-agungkan Habibie dan Wardiman Djojonegoro, menurut Prof. Dr. Hans Dieters Evers, pemerintah sama sekali tidak campur tangan dalam sistem pendidikan tinggi, apalagi dalam mekanisme pemilihan rektor. Sosiolog tamu UGM dari Universitas Bielfield ini menandaskan pentingnya otonomi kampus dihormati oleh pemerintah, termasuk dalam pemilihan rektor. Mengapa? Ya, karena kampus itu mengabdi pada integritas kebenaran ilmiah, bukan mengabdi pada kekuasaan. Dalam prakteknya, rektor itu benar-benar dipilih oleh warga universitas melalui sebuah sidang yang terdiri dari unsur staf pengajar, mahasiswa dan bahkan juga karyawan.

Berbeda dengan Sistem Jerman dan Eropa Daratan pada umumnya, Sistem Inggris yang kemudian sangat berpengaruh di Australia dan sebagian Amerika Utara, lebih menekankan fungsi rektor (di sana disebut Vice Chancellor) sebagai manajer organisasi universitas. "Maka terbuka kemungkinan orang luar civitas akademika melamar jadi pimpinan universitas, kalau memang kualitasnya bagus dia dipilih" kisah Dr. Lance Castles yang ditemui BALAIRUNG di pondoknya, "Tetapi satu hal tetap sama dengan Sistem Jerman, yakni pemerintah tidak dimungkinkan campur tangan secara langsung dalam mekanisme pemilihan rektor meski itu di universitas negeri sekalipun".

Terlepas dari relativitas kultural, otonomi kampus jelas merupakan kondisi yang mutlak (*conditio sine qua non*) dimiliki oleh civitas akademika. Menyimak pendapat Salman Dianda Anwar, aktivis mahasiswa Fak. Pertanian UGM, otonomi kampus dibutuhkan demi kebaikan Bangsa Indonesia sendiri, demi pendewasaan iklim ilmiah dan demi pendewasaan kesadaran politik, "Sewaktu SM UGM diketuai M. Choiri, kita pernah merintis adanya perwakilan mahasiswa di Senat Universitas. Tujuannya jelas, agar rektor terpilih benar-benar merupakan pilihan civitas akademika, sekarang ini kan belum!".



Setahun kemudian, pemikiran itu dirumuskan SM-UGM era Anies R. Baswedan dalam konsepsi Senat Paripurna, di mana mahasiswa mempunyai kedudukan yang sejajar dengan staf pengajar dalam setiap pengambilan keputusan penting yang menyangkut nasib civitas akademika UGM.

Masalahnya bagi kita civitas akademika UGM sekarang adalah bagaimana melakukan kerja politik untuk merealisasikan otonomi kampus tersebut? Sulit memang, tetapi bukan tidak mungkin.

**Bimo N. Sekundatmo**

**Suyono P, Sunarto, Mardiyah , Yuswohady.**
**TIM RISET:**
**Frans Surdiasis (koord), Abeng, Abit, Agus, Arif, Aris, Azizah, Bayu Aji, Choiron, Djudjur, Efi, Eri, Friyanto, Harri, Hugo, Ida, Lukman, Nasher, Peny, Poppy, Prayudi, Rahman, Tatang, Trisnu.**

# Suatu hari di B-21 ...

**05.48 WIB**

Bangunan itu tampak bisu. Masih belum ada tanda-tanda kehidupan di sana. Adalah rumah yang menyatu dengan perumahan dosen di Bulaksumur blok B nomor 21, merupakan markas Badan Penerbit Pers Mahasiswa (BPPM -UGM).

Di pagi itu ia masih lelap dalam tidurnya, selelap tiga manusia yang tergolek di dalamnya. Merekalah awak BALAIRUNG yang hampir setiap malam setia menjadi Satpam BPPM: Bimo, Narto, dan Iwan. Meski punya pondokan tapi mereka merasa lebih suka tidur beralas karpet kumal dan berselimut spanduk dengan ditemani mesin ketik dan tumpukan buku. Bukan lantaran bergaya hidup prihatin, tapi Be Dua Satu - sebutan akrab untuk markas BPPM - memang memberikan keasyikan tersendiri. Kantor yang lebih berasa rumah ini memang menyenangkan!

**06. 09 WIB**

Iwan *ngolet* seraya mengucek-ucek matanya yang masih berhasrat *merem*. Entah karena apa, belum lagi mentari menggelar sinarnya, bujangan asal Bengkulu ini sudah bangun. Di sampingnya Narto dan Bimo masih terkapar dengan manisnya.

Diputarnya sendi-sendi pinggangnya lantas bangkit dan merangkak ke arah compo SONY. Dengan dua rangkakan diraihnya benda berbentuk persegi itu dan ia sibuk *tune in* frekuensi, mencari-cari musik yang menggairahkan. Apa daya semua radio telah merelay warta berita. Akhirnya mahasiswa Filsafat yang ketua BPPM ini pun menyerah dan meninggalkan sang penyiar RRI.

Bikin kopi aja ah, pikirnya sambil berjalan ke arah dapur. Sesaat wajahnya menyiratkan kekecewaan ,tak setetespun air panas yang tersisa di termos. "Sialan!", umpatnya. Padahal semalam ia sudah menyisihkan sisa air di termos supaya paginya tak perlu repot-repot lagi menjerang air. Dengan malas penggemar musik 'yang membangkitkan' ini pun terpaksa mengambil air dan menancapkan saklar kompor listrik. Dalam hati **Kurniawan**, begitu nama komplitnya, menggerutu sambil menghitung berapa menit kira- kira air tersebut akan mendidih. Biarpun kompor ini produk teknologi modern -menggunakan tenaga listrik- tapi amit-amit, lama sekali mendidihkan seceret air saja. Nggak tahulah apanya yang salah, entah ada onderdilnya yang tidak beres atau memang karena dimakan usia. Maklum, warisan pendahulu BALAIRUNG. Tapi lumayan juga untuk pelengkap inventaris BPPM. Dan lagi, meskipun anak-anak sering dibikin mangkel oleh ulahnya yang lamban tapi toh mereka masih setia memanfaatkannya.

Selesai menyalakan kompor, Ione -begitu ia biasa menulis nama panggilannya- berjalan ke luar. Dengan sentakan-sentakan khas ia membuka pintu depan dan menyingkap gorden jendela ruang kerja BALAIRUNG dan BULAKSUMUR. Mampir ke kamar mandi sebentar, buang hajat yang sedari tadi ditahannya, lalu kembali ke belakang mencari sebatang Gudang Garam filter yang masih tersisa di tasnya.

Narto menggeliat sambil menguap lebar-lebar. "Jam berapa, Wan?" tanyanya di tengah kesadaran yang nyaris utuh. Yang ditanya tidak menjawab, sibuk menyalakan rokoknya.

"Waduh, tulisan saya belum selesai, *je*. Padahal jam sepuluh nanti harus ngasih materi...," katanya tanpa menghiraukan pertanyaannya yang tak sempat mendapat jawaban. **Sunarto** pun bergegas bangun, cuci muka kemudian tenggelam dengan mesin ketiknya.

Sejak menduduki kursi Pemimpin Redaksi menggantikan **Teguh Kresno Utomo**, mahasiswa Komunikasi angkatan '90 ini jadi sering mendapat job -mengisi materi untuk acara diklat jurnalistik. Tentu saja pendatang dari Bantul ini amat girang karena, menurutnya, pekerjaan tersebut dapat menambah wawasannya dalam bidang jurnalistik dan tentu saja melatih diri tampil di muka forum. Bujangan berusia 22 tahun yang gemar berdiskusi ini tak hanya mengiyakan setiap tawaran ceramah, tapi permintaan menjadi moderator dalam acara-acara di kampus pun disambut dengan senang hati. "Kondisi tersebut akan mengasah kemampuan saya mengakomodir perdebatan di tengah mahasiswa yang sangat plural," katanya suatu hari, lepas dari nada sok.

**07. 05 WIB**

Compo SONNY yang sudah berusia lewat tiga tahun itu menyiarkan berita lagi. Iwan masih setia menanti air yang dimasaknya mendidih sambil ditemani buku "Domination and The Art of Resistance" karangan James Scott. Narto masih juga menghentak-hentakkan mesin ketik dengan jari-jarinya. Sedangkan Bimo masih terlelap dibuai mimpi. Semalam ia pulang lewat tengah malam setelah seharian menguras pikiran dan energi untuk mengkonkritkan idenya dalam bentuk tulisan. "*Duit* saya menipis nih, saya harus segera *nyari* duit," katanya memberi alasan.

**Bimo Nugroho Sekundatmo**, nama lengkap pemuda 22 tahun asal Semarang ini memang sudah mulai memprofesionalkan kemampuannya menulis. Artinya, ia mencoba menuai hasil lewat pers umum setelah sekian tahun malang melintang di pers mahasiswa memberinya banyak pengalaman tanpa komisi. Baginya pers mahasiswa turut membantu mempertajam kreativitas menulis, sehingga tak heran jika beberapa tulisannya pernah dimuat di

media massa. Selayaknya memang begitu. Tapi lain halnya dengan **Suluh Pratitasari** yang akrab dipanggil Titha. Personil BALAIRUNG yang tercatat sebagai Sekretaris Redaksi ini malah mengaku menjadi tak produktif sejak bergabung dengan BALAIRUNG.

Sebelum terjun di dunia pers mahasiswa, beberapa kali tulisannya baik fiksi dan nonfiksi dimuat di majalah remaja terbitan Ibu Kota seperti *MODE*, *ANEKA RIA*, atau *HAI* Tekadnya masuk BALAIRUNG pun dilandasi kemampuannya menulis kecil-kecilan itu dan niat untuk mengembangkan bakatnya. Tapi setelah dua tahun di BALAIRUNG penggemar suara Axl Rose -vocalis Guns 'N Roses- ini belum menghasilakn sebuah tulisan pun.

Meski begitu, lulusan SMA Stella Duce yang mengaku lebih *sreg* berpenampilan maskulin ini tak merasa dirugikan BALAIRUNG. Di sisi lain ia beruntung karena BALAIRUNG mempercayainya menjadi penanggung jawab rubrik Humaniora. Di sini ia bisa mengupas sisi-sisi humaniora yang sudah barang tentu pas banget dengan ilmu Antropologi yang sudah menjadi incarannya sejak SMA.

**07. 42 WIB**

Iwan masih asyik dengan bacaannya, kali ini ditemani segelas kopi panas yang baru selesai dibuat. Compo SONY yang kini menjadi satu-satunya media elektronik di BPPM, karena televisi BW-nya rusak, tidak lagi menyiarkan berita RRI. Sebuah tembang asyik berjudul "All For Love" dari Bryan Adam-Sting-Rod Steward mengalun indah lewat radio , membuat Iwan menghentikan aktivitasnya dan ikut menyanyi. Volume pun ditambah, sampai- sampai Bimo membuka matanya. Hanya sesaat. Kembali direguk kenikmatan tidurnya yang sempat terpenggal.

.......

When ther's love inside

I swear, I'll always be strong

And there's reason why

I'll prove to you we belong

I'll be the wall that protecs you

.......

*"Eksekutif dan intelektual muda,"* suara penyiar di akhir lagu, *"Pembantu Rektor III Universitas Gadjah Mada memberi peringatan keras kepada Majalah BALAIRUNG UGM atas pemasangan spanduk yang berbunyi* ***Hasil polling Balairung: Prof. Dr. Ir. Boma Wikan Tyoso, M.Sc, rektor pilihan mahasiswa"*** suara merdu penyiar tersebut mengagetkan Narto dan Iwan. Mereka serentak pasang telinga serius, begitu juga Bimo yang lantas terbangun.

Kasus yang sempat membuat Majalah BALAIRUNG diisyukan bakal dibreidel tersebut memang sempat mengusik ketenangan redaksi. Seisi B-21 lantas sibuk kasak-kusuk soal *spanduk panas* itu. Siwo, panggilan akrab **Yuswohady**, yang duduk di pimpinan puncak Balairung menjadi sasaran para wartawan. Tapi mahasiswa Teknik Mesin ini tak *grogi* ketika memberi komentar dalam *press- release.* Ia malah menjadi curiga dengan teguran pihak Rektorat tersebut.

Untung- nya gaung kasus tersebut hanya sesaat, karena rektor kabarnya tidak berkenan bila kasus itu dibesar-besarkan. Siwo pun tak lagi dikejar-kejar kuli tinta, tapi ganti sibuk mengejar anak-anak buahnya supaya segera merampungkan garapannya sehingga BALAIRUNG cepat terbit.

Urusan kejar-mengejar pekerjaan seperti itu tidak hanya menjadi tanggung jawab Siwo sebagai Pemimpin Umum atau bagian redaksi yang menangani semua naskah. Bagian perusahaah pun tak ketinggalan. **Dewi Ratnawulan** sebagai Pemimpin Perusahaan termasuk orang yang paling *sewot* melihat BALAIRUNG *molor* terbitnya. Bagaimana tidak? Kalau terlambat terbitnya bagaimana dengan kontrak iklan? Begitu pula dengan jadwal percetakan yang ketat.

"Saya *pengin banget* melihat BALAIRUNG terbit tepat waktu. Sekaliii aja!" Katanya penuh harap dengan logat Sunda yang kental. Ungkapan gadis berjilbab ini mungkin sekaligus merupakan otokritik bagi seluruh awak BALAIRUNG. Entah kapan aktivis BALAIRUNG mampu mendobrak tradisinya yang sok demokratis, sehingga deadline pun ditawar.

**08.39 WIB**

Suasana di B-21 sesaat sepi. Orang-orang di dalamnya tenggelam dengan pikirannya masing-masing. Mereka asyik bermain dengan imajinasinya sendiri-sendiri, bergulat dengan persoalan yang tengah hinggap di benaknya. Tak ada kata. Tak ada perdebatan. Namun ini tak berlangsung lama.

**09. 17 WIB**

B-21 mulai marak. Aktivis BALAIRUNG tampak berdatangan. Ada yang hanya sekedar numpang ke kamar kecil dan setelah itu melesat kuliah, ada pula yang mulai asyik berdiskusi seperti halnya tiga dara manis dari fakultas Ekonomi yang datang hampir bersamaan: Hastarini, Dewi Nilasari, dan Danarti. Begitu tiba mereka langsung terlibat obrolan yang seru. Sesekali terdengar derai tawa, mewarnai ruang BALAIRUNG.

D'Nika, begitu ia biasa menyingkat **Dewi Nilasari**, yang pagi baru tiba dari Jakarta nampak menguasai pembicaraan dengan ceritanya yang berapi-api. Biasa, soal calon pemasang iklan yang kadang-kadang sok birokratis. Dara asal Semarang yang belum genap setahun aktif di BALAIRUNG ini memang termasuk pelobi iklan andalan. Bagaimana tidak? Entah sudah berapa kali ia bolak-balik Jogja-Jakarta menenteng proposal ke beberapa perusahaan. Dan ia tak pernah kelihatan capek.

Kegesitannya mencari iklan diakui berkat dukungan lingkungan. Iklim Semarang yang kota dagang menurutnya telah menempa dirinya untuk hidup dalam dinamika

kehidupan yang berritme cepat, "Nggak seperti orang Jogja yang lamban...," semburnya sambil nyengir.

Hastarini, yang merasa orang Jogja sedikit tertohok. Meski ia tak selincah Nila, tapi soal mengamankan uang BALAIRUNG Hasta paling piawai. Lantaran jabatan Kabag Keuangan ada dipundaknya, dara ayu yang punya hobi tersenyum ini menjadi hati-hati mendistribusikan uang. Ia pun pintar berkelit ketika ada awak BALAIRUNG yang minta *sangu* lebih ketika keluar kota. "Bukannya pelit tapi BALAIRUNG memang nggak banyak duit sih..."

**09. 40 WIB**

Narto kelihatan rapi jali. Dengan kemeja lengan panjang bergaris biru dipadu celana jeans dan sepatu kulit, ia tampil meyakinkan. Materi ceramah diklat jurnalistik di Fakultas Kedokteran sudah selesai setengah jam lalu. Ia pun siap memberi ceramah. "Jangan lupa nanti jam tiga, kita rapat! ," pesannya pada teman-teman yang tengah asyik ngobrol di ruang tamu. "Eh, Danarti, datang ya. Lama sekali kamu tidak ke sini," tegurnya ketika melihat sosok **Danarti**.

Gadis Magetan yang merasa dituduh itu cuma tersenyum. Harus diakui, kesibukannya sebagai Pemimpin Redaksi *ECONOMISI* terbitan Fakultas Ekonomi D III memang banyak menyita waktunya. Belum lagi pekerjaan tambahan sebagai tentor di sebuah lembaga pendidikan komputer.

**09. 43 WIB**

Amiek, yang bernama komplit **Rahmi Lestarini**, datang tergopoh- gopoh. Nyaris bertabrakan dengan Narto. "Mana *buneg*nya?" tanyanya, tak jelas arah pertanyaannya ditujukan pada siapa. Matanya yang bulat tampak berbinar begitu melihat buku ukuran folio bersampul kuning menyolok. Ia segera menyambarnya dan mencari tempat duduk di teras. Sesaat kemudian lulusan SMA 9 Yogya ini sudah sibuk menuliskan sesuatu. Entah apa.

Buneg tak lain adalah buku uneg-uneg, ibaratnya *diary* milik penghuni B-21. Lewat buneg segala uneg-uneg baik kritikan, tuduhan, umpatan dan segala ungkapan senang susah dituangkan di sana. Dan buneg pun menjadi bacaan alternatif di sela-sela menanti BALAIRUNG terbit.

"Uuuu... aktivis buneg!" ledek **Timbul** yang tiba-tiba muncul. Hasrat ingin tahu membawa kakinya menghampiri Amiek. Diam-diam ia berusaha mencuri kata-kata yang tengah ditulis mahasiswi Sosiologi tersebut. Tak berhasil. Akhirnya mahasiswa jurusan Komunikasi angkatan '92, asal Banjarnegara ini ngeloyor pergi seraya menyumpah lewat logat bahasanya yang ngapak-ngapak. Lucu ditangkap telinga. Lebih lucu lagi ulahnya ketika suatu hari ia kebagian job mencari iklan di Jakarta. Berdua dengan Frans, awak BALAIRUNG ini mengaduk-aduk kota yang kurang ramah ini. Bagi Timbul kerja kali ini memang harus mati-matian. Selain karena untuk yang pertama kalinya menginjak Ibu Kota, ia juga harus mampu menunjukkan kepiawaiannya dalam melobi.

Menjaring pemasang iklan memang berat. Minimal setiap awak BALAIRUNG harus merelakan waktu seminggu untuk keluar masuk pintu-pintu perusahaan di Jakarta. Dengan kata lain membolos kuliah selama seminggu! Suatu pengorbanan yang lumayan besar. Tapi lenggang lenggok Jakarta memang tampak menawan, hingga setiap orang tergoda untuk ke sana. Tak heran jika beberapa personil di luar bidang perusahaan juga tertarik mencoba. **Imam Bhaskara**, misalnya. Staf redaksi ini rela pontang-panting seminggu di Jakarta memburu pemasang iklan.

**10.36 WIB**

Tukang koran datang dengan sepeda ontelnya. Belum juga mengeluarkan koran, anak-anak yang nongkrong di teras berebut memburunya. Tapi sial, sudah keduluan Martin yang kebetulan datang bersamaan tukang koran. Mahasiswa Psikologi semester 6 ini pun melenggang sambil menyimak headline berita. Yang lain lantas nimbrung membaca, Bimo malah memaksa meminjam lembar kedua. Mungkin karena merasa risih, anak bungsu delapan bersaudara ini pun menyodorkan koran yang dipegangnnya.

Martin lantas melepas sepatu, masuk ruangan, dan mencari secarik kertas. Belakangan, pemuda bernama komplit **Anthony dio Martin** yang semula berada di jajaran redaksi mulai mencoba berkarir di bidang perusahaan. Meskipunn lobinya lebih sering gagal tapi tak jadi soal baginya karena itu akan melatihnya tebal muka di hadapan *orang gedhe*.

**11.43 WIB**

B-21 yang tadi cukup semarak kini kelihatan sepi. Cuma ada Kelik dan dua rekan lain dari BULAKSUMUR.

Lainnya entah ke mana, padahal ada beberapa motor terparkir di halaman. Mungkin sedang makan siang di warung milik Bu Harjo yang berjarak tak lebih 100 meter. Biasannya mereka memang lebih suka jalan kaki ramai-ramai, sambil ngobrol.

**Kelik** lantas sibuk dengan jaring kupu-kupu. Hobi baru membuat *pernak-pernik* dari *resin* dan *fiber glass* membuatnya rajin mengumpulkan kupu dan serangga. Setelah mendapatkan mangsanya, Si Pahit Lidah, sebuah julukan buatnya, ini lantas berkutat dengan bahan-bahan kimia yang disimpan di ruang belakang yang belakangan *diklaim* sebagai laboratoriumnya.

Soal kreativitas, pemuda bertampang jauh lebih muda dari usianya yang lewat seperempat abad ini memang layak diacungi jempol. Lihat saja, meski mengenyam pendidikan di Fakultas Geografi, ia handal masalah elektronika. Bongkar pasang televisi dan radio menjadi santapannya. Sampai-sampai televisi milik BPPM dijadikan obyek praktikumnya. Apalagi soal fotografi, Kelik memang jagonya. Jika Anda membuka rubrik JEPRET pada majalah ini, **Kelik Supriyanto** lah pembidiknya.

**13.01 WIB**

Kehidupan di B-21 kembali marak. Ada Narto yang baru pulang dari ceramah, ada Siwo, Hasta, Kelik, Frans, juga Diyah. Mereka tengah menyantap rujak di teras. Kata mereka rasanya lebih enak dari biasanya karena untuk sampai ke perut tak perlu merogoh kocek sepeserpun. Ya, Siwo hari ini ulang tahun.

**13.15 WIB**

Diyah yang nama komplitnya **Mardiyah,** mahasiswa Fakultas Biologi adalah orang yang paling antusias menikmati rujak. Bukan apa-apa, tapi gadis berjilbab yang dikenal sebagai orang kedua di BALAIRUNG karena menjabat Sekretaris Umum ini memang sudah sejak tadi ingin makan sesuatu yang kecut-kecut dan pedas-pedas. Malah, tadi arek Surabaya yang juga kerap menulis di media massa ini sempat mempunyai ide *rujakan* di B-21. Tapi tak ada yang menyambut, alias tidak ada yang mau diajak *bantingan* untuk membeli buah dan bumbu.

Cuma Frans yang kurang berminat dengan rujak. Bukan karena alergi buah, tapi buku filsafat tebal yang sejak tadi dibacanya lebih menarik perhatiannya. Anak Flores ini memang doyan filsafat meskipun kuliahnya di jurusan Komunikasi. Berfilsafat bukan lagi hal yang asing bagi **Fransiscus Sudiarsis**. Kehidupan seminari dan hobi membaca yang sangat kuat membuatnya begitu dalam memandang kehidupan.

**13.22 WIB**

Hasta pamit pulang, diiringi Siwo. "Jam tiga lho, Wo!" teriak Narto mengingatkan. Siwo cuma melambaikan tangannya membalas teriakan Narto, lantas *nggeblas* dengan Hondanya.

**14.36 WIB**

Narto yang punya gawe mengundang rapat redaksi mulai gelisah lantaran baru hadir Diyah, Frans, Ririn, Titha, Indri, dan Nita. Ada juga Apong yang baru turun dari bis kota sepulang mengurusi penjualan BALAIRUNG di toko buku. Pria jangkung kelahiran Denpasar dengan nama **I Made A. Dwiatmika** ini memang yang kebagian mengurusi distribusi BALAIRUNG.

Teman-teman magang juga lumayan banyak yang hadir, terutama magang reporter. Maklum, magang "jurusan" reporter memang paling banyak diserbu peminat tiap kali rekrutmen. Tak heran, reportase memang menjanjikan berbagai pengalaman unik, menarik, dan tak jarang bikin "sport jantung". mereka yang mengalaminya.

**15.00 WIB**

Rapat redaksi belum juga dimulai, karena cuma ada Diyah, Titha, Ririn, Indri, Nita, Sis, Bimo, dan Narto sendiri. Siwo yang sangat diharapkan kehadirannya malah belum menampakkan batang hidungnya. Akhirnya mereka terlibat *ngerumpi ngalor- ngidul.*

Nita, yang bernama lengkap **Dwi Soufnita,** mahasiswi Fakultas Sastra asyik mojok dengan Bimo di ruang belakang. Dua makhluk ini kalau sudah bertemu memang susah untuk disuruh ngobrol sebentar saja. Pasti maunya yang lamaaa. Bukan menggosip rekan-rekan yang lagi kena intrik-nya Narto, tapi diskusi "serius". Macam-macam saja yang mereka omongkan. Dari soal tradisi jam karet sampai urusan *state* yang memang enak dibicarakan.

Tak jauh dari tempat Bimo dan Nita ngobrol, si Titha terbaring dengan memelasnya sambil memegangi perutnya.

"Tiap hari kok sakit perut," sambung Narto. Titha tak menggubris, bergaya cuek. Bukan apa-apa, ia sendiri sebenarnya juga sudah bosan. Masa, hampir tiap hari sepotong perutnya itu merintih kesakitan! Saking bosannya, belakangan Titha punya cita- cita baru: mencari calon suami yang dokter! Hihi....

Tapi Ririn, yang duduk di sebelah Titha, malah punya ide lain. Mahasiswi MIPA Komputer angkatan '91 ini ingin membuat cerpen soal Titha yang selalu sakit perut. Memanfaatkan teman *dikit* tak apalah. Siapa tahu cerpennya bakal masuk peringkat lagi, sepeti tahun lalu. Asal tahu saja, gadis asli Yogya yang bernama lengkap **Ririn Fatmasari Dewanti** ini pernah menjadi juara harapan dalam lomba mengarang "Mengenang Bumi Kelahiran" tingkat nasional tahun 1993 lalu. Karangan yang kini dibukukan bersama karangan lainnya ini menceritakan sepenggal masa kecilnya di Parangtritis.

**15.07 WIB**

Indri yang sejak tadi memperhatikan Sis menggambar jam di buku uneg-uneg, kini memaksa Narto untuk segera memulai rapat.

"Lima menit lagi lah," tawar Narto. Ia masih berharap teman-teman

yang lain pada datang, begitu juga Siwo.

Indri pun asyik mengamati gambar Sis lagi. Bagus juga, pikirnya kagum. Cuma, ia tak paham mengapa dari dulu Sis selalu menggambar jam. Dari sekian jilid buku uneg-uneg, entah sudah berapa biji gambar jam yang dibuat Sis.

"*Mbok* sekali-kali menggambar yang lain, Sis!," protes **Indriaswati** yang mahasiswi semester 6 Fakultas Hukum.

Sis cuma nyengir. Cowok berzodiak Aries yang bernama lengkap **Sisdaryono**, mahasiswa Fisipol ini terus menggambar. Baginya menggambar jam itu memiliki kejenakan tersendiri.

**15.12 WIB**

Lima menit kemudian Narto menggelar rapat. Lumayan juga yang datang, tambah Wati, Loeloe, Rinda, Fahmi, Wawan, Nasir, Hendrasmo, Nila, Hasta, dan Timbul. Siwo baru muncul setengah jam kemudian karena ban motornya bocor di jalan, akunya.

**17. 03 WIB**

Selesai rapat Indri langsung bergegas pulang. Takut keburu malam, habis rumah gadis kelahiran Juni 1973 ini lumayan jauh, di Kalasan. Mana naik angkutan umum lagi.

Hasta, Ririn, dan Siwo juga menyusul pulang. Yang lainnya lebih suka menghabiskan waktu di B-21. Biasa, ngobrol. Yang jelas tiada hari tanpa ngobrol! Apalagi D'Nila dan D'Wati -kelompok 2D karena namanya sama-sama memakai Dewi- telah terlibat pembicaraan yang hangat dan seru.

Sis malah merayu Narto supaya mau diajak nonton film.

"Film apa?" tanya Narto ogah-ogahan. Ia ingin segera mandi dan habis itu tidur. Atau tidur dulu tanpa mandi?

"Bercinta dengan Maut!" jawab Sis mantap.

"*Wih,* asyik. Aku mau !" Titha malah yang menjawab. "Ayo, To rame-rame," ajak Titha langsung bangun. Tidak peduli dengan perutnya yang masih sakit. Kalau urusan film *beginian* Titha mau banget, meski pun tidak hobi. Tapi lumayan, buat refreshing.

Tapi Narto masih *ogah* juga. "Berdua saja sama Titha," katanya mencoba menghindar.

"Wah, nggak mau, tidak seru!". jawab Titha kecut, padahal tadi ia sangat bersemangat.

**18.25 WIB**

Sehabis sholat Maghrib Kelik, Narto, Bimo, dan Iwan makan malam di warung Semi, warung koboi yang tak jauh dari B-21. Sis nggak ikut, karena ada janjian dengan Pedy. Biasa, apalagi kalau bukan urusan setting dan lay out majalah. Dua makhluk ini memang *lay-outer* BALAIRUNG.

Sesaat kemudian mereka sudah sibuk menekuni *partitur* yang dibuat Sis. Job pun dibagi rata. Pedy kebagian tugas melay-out rubrik Laporan Khusus, Humaniora, Anekdot, dan Lingkungan. Meski mahasiswi MIPA yang komplitnya **Pedy Artsanti** ini hanya bermodal kemampuan menggambar tapi bukan berarti ia tak mahir melay-out. Bukan lantaran namanya yang sudah mengarah ke sana.Asal tahu saja, nama pemberian orang tuanya itu diilhami ayahnya yang sedang bertugas sebagai ko-as di bagian anak-anak alias pediatri saat Pedy lahir.

"Kita kerja sama saja ya, Sis," ajak Pedy yang dijuluki dijuluki "Gadis Perang Teluk " oleh teman-temannya lantaran *demen* mengenakan jaket doreng ala tentara. Sis mengangguk dengan mengajukan syarat melay-out malam hari selepas Isya'.

Pekerjaan artistik memang sering dilakukan di malam hari lantaran aktivitas di siang hari banyak menyita waktu. Karenanya jangan heran jika lewat tengah malam --dini hari-- mereka masih melotot di depan layar komputer.

Karena itu, tak heran bila militansi di jajaran artistik sangat dibutuhkan. Dan, karena awak artistik BALAIRUNG sangat terbatas, maka kerja artistik kerap di*garap keroyokan.* Selain *crew* artistik, Iwan, Diyah, Narto, Bimo, juga Siwo adalah peserta aktif begadang menjelang terbit.

**19.15 WIB**

Malam hari , ruang tamu yang diterangi lampu 100 watt nampak ramai. Ada tiga orang tamu aktivis pers dari Unibraw, Malang. Sekedar informasi, hubungan BPPM UGM dengan aktivis-aktivis pers mahasiswa se -Indonesia memang cukup akrab. Apalagi yang sama- sama di Jawa. Seperti dengan aktvis pers dari Unibraw itu misalnya. Sudah seperti saudara sendiri. Mereka sering menginap di B-21, begitu juga sebaliknya. Beberapa di antaranya malah ada yang

menjalin hubungan tak sekedar kawan.

Kelik tiduran di lantai sambil bercerita tentang pernak- perniknya. Iwan, Bimo, Narto, dan rekan-rekan dari Malang sibuk ngobrol soal *arus bawah* yang sekarang lagi naik daun. Sis dan Loeloe menjadi pendengar setia. Sesekali Loeloe ikut nimbrung sambil membanyol.

**20.37 WIB**

Mereka masih asyik bercengkerama ketika Jojo dan Budi datang. Dua fotografer ini baru saja memotret untuk ilustrasi salah satu artikel yang bakal dimuat BALAIRUNG. Setelah ber- *say hello* Jojo, panggilan akrab **Suyono Prihantoro**, langsung tidur di kasur tipis tanpa sprei. Capai banget mungkin. Sementara itu **Budi Fajriansah,** si cowok Bengkulu langsung pulang dan memilih tidur di pondokannya saja.

**21.09 WIB**

Jojo sudah lelap dalam tidurnya. Tubuhnya yang cukup gempal dengan berat 63 kg dan tinggi 170 cm itu langsung memenuhi kasur tipis milik seorang rekan dari departemen Pelatihan dan Pengkajian.

Teman-teman dari Malang nampak sudah tidak *mood* ngobrol, mungkin perjalan yang lumayan jauh itu membuat mereka capai. Iwan lantas menawari mereka untuk tidur duluan. Sementara itu, ia melanjutkan obrolannya dengan Bimo dan Narto. Kelik dan Sis sudah melaju ke bioskop di Shopping Center seperempat jam lalu.

Jika sudah malam seperti ini, B-21 mirip pondokan laki-laki karena gadis-gadis aktivis BPPM mulai pulang kandang. Tapi suasana ini tak berlaku setiap malam. Sering terjadi, B-21 tetap "menyala" sampai pagi dengan peserta yang bukan hanya berjenis kelamin pria. Terutama bila ada kasus atau momen yang segera perlu diantisipasi jajaran pimpinan. Maka, jangan heran bila suatu malam Anda menjumpai Diyah Wati menginap di B-21.

Sementara yang laki-laki tak punya jadwal yang ketat kapan mereka harus pulang ke rumah atau pondokannya. Tergantung perasaan saja, kalau ingin pulang ya pulang. Tapi kalau ingin menginap di B-21 tak bakal ada yang melarang. Malah berjasa karena B-21 punya satpam gratisan. Meski sudah ada yang menjaga seperti itu, maling masih saja hobi *menyatroni* B-21. Apa saja yang bisa dicuri bakal raib. Dari motor yang terparkir di depan, pakaian yang dijemur di belakang, hingga sepatu yang tergeletak di luar. Padahal, persis di belakang kantor BPPM adalah kantor Satpam UGM!

**22.46 WIB**

B-21 menggigil berselimut dingin.

**01.32 WIB**

Sepulang nonton film dengan Sis, Kelik hanya singgah sebentar di B-21. Setelah itu ia pulang ke kandangnya di daerah Karangasem. Iwan juga, kali ini ia memilih tidur di pondokannya. Bimo sudah tidur. Narto asyik membaca buku. Sis kebingungan mau berbuat apa, padahal ia belum ngantuk. Ingin mengajak ngobrol Narto, tapi tidak mendapat respon dari Narto. Akhirnya ia mengambil kertas, iseng-iseng mencoba menggambar desain cover untuk edisi mendatang sambil mendengarkan wayang kulit semalam suntuk dari radio swasta yang masih mengudara.

**03.02 WIB**

Narto sudah tergeletak dengan muka ditutupi buku. Sis berbaring di sisinya. B-21 nyenyak dalam tidur malamnya. Sunyi dari obrolan dan gelak tawa. Hanya dengkuran yang bersaing dengan suara dalang dari radio yang terdengar.

**Suluh Pratitasari**

# Mozaik



# INDONESIA



# Depan

# MOZAIK INDONESIA MASA DEPAN

Memasuki perjalanan sejarah 25 tahun ke depan Indonesia menghadapi sistem besar dunia yang kompleks, tak menentu dan tak terperkirakan. Ramalan tentang adanya *apocalypse* dari *club of Rome* telah lama lapuk dan ditinggalkan, struktur produksi dunia sudah sedemikian efisien dengan adanya fenomen-fenomen seperti *post fordism* (teknik produksi fleksibel dengan mesin-mesin yang dirancang untuk mampu mengikuti perubahan disain produk yang cepat) atau "sistem pabrik dunia" dalam format piramida dimana kolaborasi MNC-negara industrial mapan berada diujung atas piramida sementara kroco-kroco negara berkembang berada di dasar piramida sebagai *underdog* sistem tersebut. Sosialisme sebagai sebuah ideologi telah dipermalukan dalam kudeta gemilang (dengan keruntuhan tembok Berlin sebagai saksi sejarah), yang menghasilkan regim tunggal; kapitalisme. Serta merta mesin-mesin kekuasaanpun dibentuk; Kolaborasi PBB-AS sebagai polisi Polkam (baca, Bakorstanas-dunia) dan trio Bank Dunia-IMF-WTO (World Trade Organization: organisasi multilateral malihan GATT), sebagai polisi ekonomi dunia, yang terus menjaga negara besar- kecil berada dalam rel kapitalisme.Dalam konstelasi dunia macam ini skenarionya bisa kita tebak; terjadinya arus marginalisasi negara-negara berkembang dalam pesta besar persaingan global yang kapitalistik dan tentu, semakin kurusnya bumi kehilangan daya dukungnya.

Puncak dari revolusi bumi adalah era Sibernetika dengan teknologi informasi di garda depan yang membuat bumi seperti kampung kecil dengan saling ketergantungan yang semakin intens. Dalam sistem besar 'Sibernetika' dunia tersebut Indonesia merupakan sistem kecil yang -- tak tertawar lagi -- tercebur dan larut dalam arus jungkir baliknya sistem besar tersebut tanpa ampun. Perkembangan di satu negara akan berimbas ke negara lain demikian cepat, begitu pula sebaliknya. Dalam konteks macam ini maka yang terjadi adalah bahwa kebudayaan, identitas-kepribadian bangsa, nasionalisme, struktur sosio-ekonomi Indonesia akan berbenturan secara dialektis, bergeser dan mengalami transformasi mencari keseimbangannya, campur aduk.

Era ini pula telah membawa Amerika dan negara-negara eropa menyongsong babakan baru dalam dunia politik, yaitu dimungkinkannya penerapan demokrasi langsung menggantikan demokrasi representatif atas 300-an juta rakyatnya seperti yang dilakukan "segelintir" warga Athena kuno, melalui *information highway.* Berkoinsidensi dengan tingginya tingkat pendidikan (yang meniadakan jurang kapasitas pemilih dari wakilnya), dan lumatnya konfrontasi ideologi dunia berikut varian-variannya, AS memasuki tahap parktek kenegaraan yang ideal. Ini semua adalah hasil dari proses masifikasi peradaban yang berjalan dalam tingkat akselerasi yang tak terbayangkan di ujung pergantian millenium saat ini. Dalam atmosfer global macam ini Indonesia hidup , dalam atmosfer macam ini pula Indonesia -- terpaksa -- bertempur dalam arena perlombaan diantara negara-negara penghuni bumi.

Dalam menapaki arus besar diatas, berbagai agenda dan kerja besar Indonesia masa depan lalu mengemuka. Dibidang ekonomi eksternalitas global akan menggerus demikian keras. Pembangunan harus diarahkan pada peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan perubahan secara mendasar dalam orientasi penciptaan nilai tambah disatu sisi, sementara disisi lain tuntutan akan penciptaan pemerataan dan demokrasi ekonomi akan semakin mengeras melalui mekanisme yang lebih signifikan . Industrialisasi membutuhkan penuntasan dari struktur industrialisasi rawan-rapuh- kolusif kepada struktur industrialisasi yang dewasa, tangguh dan mandiri. Dalam kaitan ini bangunan industri Indonesia haruslah bermuka dua yaitu; industri dalam kaitan eksternalitas global dan orientasi internal dengan tekanan pembentukkan struktur industri yang merata, saling terkait dan egaliter. Dicelah-celah berbagai permasalahan tersebut tempelan-tempelan permasalahan lain muncul; utang luar negeri dan pembiayaan pembangunan, desentralisasi pengelolaan ekonomi, konglomerasi, dll.

Dalam lapangan politik, tuntutan ke arah demokratisasi tidak bisa dihindari. Disamping faktor desakan opini internasional, tuntutan demokratisasi juga merupakan dinamika internal dari proses kesadaran berpartisipasi rakyat yang selama ini terabaikan. Karenanya dominasi peran negara yang dicerminkan dalam sentralitas kekuasaan di tangan eksekutif harus berangsur diimbangi dengan mekanisme kontrol, baik dari rakyat melalui lembaga legislatif yang terbentuk melalui pemilu yang bersih, maupun dengan mengembalikan hak-hak dan netralitas lembaga yudikatif. Untuk itu segala bentuk tertib hukum yang melegitimasi kekuasaan harus dikembalikan menjadi alat kontrol yang membatasi kekuasaan dari kesewenang-wenangan. Demokrasi juga berarti adanya pergantian kekuasaan yang periodik dengan memberikan kesempatan yang sama pada masing-masing kekuatan politik untuk menyiapkan kader-kadernya. Hal ini bisa dicapai kalau partai politik diberikan ruang gerak yang sama dibandingkan Golkar.

Praksis pendidikan dimasa datang masih terus akan dihadapkan pada tarik menarik antara fungsi pendidikan dalam kapasitas sebagai unsur perkembangan sosial, dan integrasi nasional dengan fungsi pragmatis pendidikan dalam transformasi negara menghadapi transnasionalisasi teknologi, dimana kecenderungan kedua akan terus menguat. Dibidang kebudayaan kita melihat ekspresi kebudayaan lokal-daerah semakin periferal digerus oleh adanya tuntutan identitas dan kebudayaan nasional yang tak lain hanyalah kepanjangan tangan bagi mengerasnya budaya pasca-nasional, budaya mondial. Dalam kondisi macam ini maka yang kita perlukan adalah sintesa dialektis budaya lokal-nasional-mondial secara seimbang dan proporsional untuk menghasilkan format budaya yang menjadi acuan dalam bernegara.

Memperingati sewindu perjalanan sejarahnya Majalah BALAIRUNG mengajak mahasiswa pemikir kampus Bulaksumur untuk melakukan refleksi, proyeksi dan menyusun konsepsi pemecahan terhadap berbagai problematika dan tantangan-tantangan diatas. Upaya ini bertepatan dengan akan dimasukinya paruh kedua pembangunan nasional 1 april 1994 bulan depan. Terangkum 17 tulisan sesuai dengan proyeksi puncak-puncak problematika yang akan dihadapi Indonesia di masa datang dalam berbagai dimensi; ekonomi, sosial- politik, kebudayaan, pendidikan, teknologi dan hukum. Perumusan dan penggodokkan tema-tema tulisan dilakukan oleh tim Redaksi BALAIRUNG yang terdiri dari; **Sunarto (koordinator), Mardiyah, Suyono Prihantoro, Bimo Sekundatmo dan Yuswohady.**

**Yuswohady, Sunarto**

# Mempersiapkan Masyarakat Industri

**Penaklukan merupakan alat perubahan yang paling besar dalam sejarah manusia. Perubahan bagi yang menaklukkan dan yang ditaklukkan (perubahan sendiri merupakan keniscayaan).**

Alexander Edwin S.,

Mahasiswa Fakultas Filsafat angkatan 1990, dan staf pada Lembaga Pemajuan Budaya (LPB), Yogyakarta.

## PENDAHULUAN

Penaklukan merupakan alat perubahan yang paling besar dalam sejarah manusia. Perubahan bagi yang menaklukkan dan yang ditaklukkan (perubahan sendiri merupakan keniscayaan). Demikianlah buku besar sejarah manusia di dunia selalu berisi kisah-kisah konfliktual, yang dari- nya akan ditentukan bagaimana perubahan masyarakat itu menjadi dan bagaimana gerak sejarah sesudahnya akan berlangsung dan menentukan perubahan berikutnya. Dalam terang kesadaran sejarah, kita bisa membaca bagaimana kisah-kisah itu dipenuhi pertarungan sengit dalam dialektik tegangan-tegangan prosesual perkembangan masyarakat sepanjang jaman.

Homogenitas kondisi mendasar yang ada dari proses perjalanan sejarah-sejarah lokal nusantara telah mengarahkannya sampai pada semacam suatu ruang terminal kedatangan dan keberangkatan. Di satu sisi mempertemukan suku-suku bangsa dalam persatuan Indonesia yang seakar- persoalan, dan di sisi lainnya memperlihatkan agenda perjalanan sejarah selanjutnya yang menegaskan dengan siapa dan antara siapa kemudian mereka bertarung. Artinya, pencapaian cita-cita masyarakat Indonesia akan ditentukan sesuai dengan dinamika berbagai kekuatan sejarah di dalam maupun di luar dirinya.

## PENAKLUKAN DAN PERLAWANAN

Kekhususan sejarah Indonesia ditandai dengan terjadinya perubahan dalam corak produksi masyarakatnya. Datangnya kolonial Belanda segera saja mulai menghancurkan syarat-syarat berdirinya tatanan masyarakat feodal waktu itu, yang berarti pula mulai melenyapkan corak produksi pra-kapitalisasi. *Colonial mode of production*, yang kemudian menggantikannya, sebagai tahap introduksi ke kapitalisme, menggerakkan restrukturisasi susunan masyarakat pada waktu itu. Alhasil, terjadilah proses proletarisasi terhadap rakyat (Clifford Geertz, 1976) dan transformasi kelas bangsawan ke dalam struktur birokrasi pemerintahan kolonial (B. Schrieke, 1955). Hal ini terutama karena dijalankannya *plantation system* oleh kaum kapital Belanda, yang sepenuhnya berada di bawah proteksi politik ekonomi penguasa kolonial -- sebagai penjamin tersedianya tanah dan buruh upahan yang murah.

Dengan beragam komoditi yang dihasilkan seperti cengkeh, tembakau, karet, gula dan lain-lainnya, Indonesia diseret masuk ke dalam jaringan pasar dunia (kapitalisme internasional) karena memang basis pasar komoditi tersebut di luar negeri. Semua pemilikan terkonsentrasi dan terintegrasi pada semua sektor yang didominasi Belanda. Tersudutlah partisipasi rakyat Indonesia dalam perekonomian di negerinya sendiri.

Kemudian diperparah oleh komersialisasi pedesaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Agraria tahun 1870 yang mengijinkan pemilikan tanah pribadi. Jelas ini adalah strategi kaum kapital untuk menghentikan intervensi negara kolonial dalam proses produksi, yang dengan demikian melapangkan jalan mereka menguasai tanah rakyat. Liberalisasi demikian menjadikan kekuatan kapitalis semakin hebat menindas perekonomian rakyat.

Adapun perubahan-perubahan terpenting dalam kurun waktu awal abad ke-15 hingga akhir abad ke-19 tersebut menghasilkan :

1. Tumpasnya basis produksi feodalisme dan perbudakan.

2. Menjamurnya pabrik-pabrik milik kapitalis Belanda.

3. Lahirnya kelas buruh upahan dengan sistem kerja penuh.

4. Berdirinya berbagai institusi pendidikan modern sebagai wujud politik etis.

Saat itu kelas kapitalis industrial yang berkuasa di tanah jajahan menggantikan monopoli merkantilis. Negara kolonial benar-benar melayani segala kepentingan mereka. Dengan administrasi, birokrasi dan juga militer. Di negeri Belanda sendiri mereka adalah tulang punggung pemerintah mengatasi krisis ekonomi yang berakibat bangkrutnya kekuasaan kapitalis pedagang. Kekuasaan ekonomi telah berada pada investasi kapital, yakni industri dan perbankan, yang menentang modal-modal dagang pribumi maupun non pribumi ( R. Higgot dan R. Robison (ed.) 1985). Borjuasi dagang pribumi yang mendirikan Sarekat Islam tidak dapat menjadi kelas ekonomi yang kuat. Sama seperti para pedagang Cina, mereka tidak dapat mengakumulasi dana bagi industrialisasi di tanah air dan usahanya pun bersifat lokal.

Merebaknya kapitalisme dunia yang mengakibatkan perlombaan mencari daerah sumber bahan baku bagi industri, mencari pasar bagi komoditi dan pasar bagi ekspor kapital yang menguntungkan, telah menimbulkan perebutan tanah jajajahan diseluruh belahan dunia hingga terjadi perang pembagian wilayah di antara negara-negara imperialis.

Karena tidak cukup kuat dalam hal militer, teknologinya tidak seberapa , takut Indonesia dicaplok negara imperialis lain, maka Belanda melaksanakan politik ekonomi terbuka pada tahun 1905. Sejak saat itu Indonesia bagai madu yang tak akan habis-habisnya dihisap sepanjang jaman bagi beruang imperialis: sumber bahan baku murah, tenaga kerja murah, pasar bagi komoditi apa saja dan ladang investasi modal asing -- *comparative advantage* mereka menyebutnya dan jaman pembangunan mengafirmasi lantang.

Para pemuda terpelajar dengan pendidikan tinggi tampil ke medan perlawanan, mengorganisasi diri melakukan perlawanan bersama kekuatan rakyat juga borjuasi dengan cara-cara dan visi modern sejak tahun 1905 : SS- Bond, VSTP, Boedi Oetomo, Sarekat Islam ,Perhimpunan Indonesia, ISDV, front Radicale Concentratie, dan yang lain-lainnya -- yang nasional, radikal, berwatak politik tegas, militan, menuntut Indonesia merdeka. Hasilnya, organisasi yang progresif-revolusioner jadi meluas di kalangan rakyat. Pendidikan dan partisipasi politik meningkat dengan berdirinya sekolah-sekolah , penerbitan bacaan, surat kabar, pertemuan, rapat-rapat akbar, pemogokan hingga ke pemberontakan 1926 di Jawa dan 1927 di Sumatera.

Itulah suatu zaman pencerahan akal budi yang memunculkan sekaligus menggerakkan kesadaran sejarah dan tradisi radikal, sebagai kekuatan utama bagi pembebasan manusia atas penindasan dan penghisapan dirinya oleh manusia lain . Setiap orang dibukakan matanya pada kebenaran. Beratus tahun terus disalahkan, dibodohi, dibungkam, dimiskinkan dan dikalahkan. Kebenaran itu menguatkan, meyakinkan dan menggerakkan jiwa yang ditaklukkan untuk melawan. Bangsa kita telah dan terus belajar, mengevaluasi kelemahan budayanya. Budaya nusantara yang sudah kalah dan takluk pada keunggulan budaya barat harus mulai ditinggalkan menyongsong fajar budaya pembebasan.

Tapi ini semua ditumpas Belanda. Dengan provokasi yang bertubi-tubi, penangkapan dan pembuangan terhadap para pemimpin, pemecatan yang mogok, pelarangan terbit surat kabar, juga pembubaran sekolah dengan menggunakan tentara, kitab hukum kolonial, *devide et impera*, gerombolan teroris, dan demoralisasi.

Tahun 1928 semakin solid lagi dengan kumandangnya Sumpah Pemuda. Kesadaran sejarah dan tradisi radikal para pemuda dalam berpikir, bersikap dan berbuat telah membimbing mereka ikut memperkokoh fondasi bagi *nation building* Indonesia, *in statu nascendi*, di kemudian hari.

Kesadaran dan tradisi semacam itulah yang terus hidup ketika elite terdidik Indonesia menggantikan kekuasaan kolonial setelah kemerdekaan 1945 mengenyahkan fasis-imperialis Jepang. Para pemimpin politik berkeinginan kuat merealisasikan cita-cita mengenyahkan bentuk-bentuk kapitalisme dan imperialisme yang mencengkeram perekonomian tanah air. Semangat dan cita-cita ini juga yang membakar perjuangan memukul imperialis sekutu pemenang Perang Dunia II antar imperialis.

**PEMBANGUNAN**

Tetapi tidak terjadi perubahan tatanan sosial dan ekonomi yang cukup berarti pada era kemerdekaan. Tak terjadi revolusi sosial saat itu. Struktur susunan masyarakat tak bergeser, ekonomi rakyat tetap menempati stratum terbawah. Tak pelak lagi negara menjadi satu- satunya institusi yang dapat memediasi proses mobilitas vertikal semua faksi elite baru Indonesia. Artinya, tubuh negara menjadi ajang pertarungan politik elit, ajang yang merepresentasikan pertarungan ekonomi.

Situasi seperti itu bukan saja telah gagal memunculkan kelompok dominan yang memimpin, tetapi juga gagal mencari jalan keluar dari sistem tersebut. Tapi Soekarno berhasil. Dengan Demokrasi Terpimpin ia kobarkan "revolusi belum selesai". Negara di bawah Soekarno memperoleh legitimasinya lewat mobilisasi rakyat. Ada gairah lagi bagi perekonomian rakyat yang terhimpit oleh pertarungan elit dan eksploitasi modal itu. Namun saat itu juga , sesudah mematahkan gerakan-gerakan separatis, militer telah berhasil mengkonsolidasikan dirinya. Konsolidasi Angkatan Darat berlogika negara dan berkepentingan memainkan peran sosial-politik aktif berbasis kepentingan ekonomi serta *American Connection* akhirnya mengatasi kekuatan Soekarno dan menumpas PKI. Tak ayal radikalisme rakyat pun dihancurkan. Selanjutnya politik adalah trauma . Orang pun jadi *ogah* sama politik. Keengganan dan ketidakmengertian orang atas persoalan bangsanya menjadi massif. Bicara yang lain *aja, deh.* Sekarang jaman pembangunan.

Orde Baru berkuasa dengan legitimasi itu. Setelah memformat politik yang mengkonsentrasikan kekuatan politik dan ekonomi pada dirinya, maka berjalannya strategi pembangunan serta segala apa yang bernama

dan demi pembangunan (mesti demikian!) sejak 1967, dengan diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing, mulai mentransformasikan masyarakat Indonesia ke dalam sistem kapitalisme -- yang tambal sulam. Lantas, eksistensi dan dinamika pembangunan menjadi sangat dependen terhadap modal asing (termasuk transfer teknologi dan akses ke pasar internasional yang disyukuri lebih mudah jadinya) dan terhadap logika pertumbuhan.

Walaupun kondisi kehidupan penuh ketidakpastian, rakyat tetap diwajibkan rela berkorban bagi pembangunan. Tidak rela berarti mementingkan diri sendiri, meresahkan masyarakat, mengganggu kepentingan nasional dan itu

jelas membahayakan stabilitas. *Security* "primitif" *approach*-lah yang pada akhirnya selalu dapat mengetuk hati rakyat: sawah, ladang, pekarangan, rumah, juga kuburan di Kedung Ombo, Badega, Belangguan, Sei Lepan, banyak lagi, sampai nyawa segala (!) di Nipah. Kuliah Etika Pancasila jelas mencatat kegiatan pembangunan yang merenggut nyawa dan penghidupan rakyat memang tidak bermoral sedikit pun.

Paham "demokrasi yang stabil" telah membentuk sebagian besar pembicaraan mengenai "pembangunan" dan "mo- dernisasi" yang diterima sebagai suatu proses dengan mana masyarakat agraris secara gradual menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan, nilai-nilai dan institusi yang dimiliki masyarakat industri dewasa ini. Faktor khusus dalam paham ini adalah bahwa ia memberikan suatu tempat yang lebih besar bagi diterapkannya unsur paksaan demi komitmen umum terhadap *common values*, untuk memprodksi dan mereproduksi suatu bentuk masyarakat khusus. Penggunaan kekerasan (baik fisik maupun simbolik lewat cara-cara persuasif) yang efektif dalam menjamin kesinam-

bungan suatu sistem sosial yang mapan berasal dari seperangkat kompleksitas kondisi yang meliputi dominasi ekonomi, pengawasan atas reproduksi nilai-nilai budaya dan paguyuban besar kaum minoritas (Tom B. Bottomore, 1992).

Memang itulah yang dibutuhkan oleh kapitalisme. Semua kekayaan alam yang dimiliki bangsa kita termasuk sumber daya manusia dan kekayaan budaya dikuras, dipekerjakan dan digosok hingga berkilau eksotis bagi akumulasi laba dan reproduksi modal tanpa henti. Pada sistem inilah sesungguhnya masyarakat berada dalam mekanisme pasar , yakni terjadinya perimbangan antara produksi dan konsumsi yang terus-menerus meningkat. Mekanisme ini benar-benar penting (sepenting kuliah pertama mahasiswa sekolah bisnis atau ekonomi belajar hukum permintaan, penawaran dan ekuilibrium) sehingga cara-cara pemerintah menggerakkan pembangunan serta memelihara hubungan-hubungan produksi yang ada tanpa disadari telah diiyakan oleh masyarakat dalam kesadarannya. Alhasil, masyarakat menjadi teralienasi terhadap dirinya sendiri karena nyatanya yang menyebabkan mereka berproduksi bukan diri- nya sendiri melainkan segenap *policy* dan slogan-slogan pembangunan pemerintah. Seperti itulah teknorasi berjalan, mengharuskan negara menjadi lebih produktif dan pada saat yang sama menjadi lebih efisien (Eduard Batalov, 1985).

Rasionalisasi pembangunan memang terbukti dapat mengembangkan suatu kesadaran kolektif pembangunan semu (*pseudodevelopment*). Rasionalisasi semacam ini di dalamnya tidak berlaku rasionalitas itu sendiri, melainkan suatu bentuk tertentu kekuasaan politik terselubung atas nama rasionalitas. Sementara pengalaman kita menunjukkan bahwa gejala ke arah sikap kritis selalu dianggap menyimpang. Sikap kompromis dan afirmatif dalam budaya kalah yang direproduksi itu tentu dengan sendirinya akan menghambat setiap kritisisme sosial yang tumbuh.

Ketiadaan sikap kritis semacam ini juga yang merupakan ciri manusia massa, manusia yang mudah dihanyutkan arus ke mana saja--seolah *natural look*, padahal hasil rekayasa kekuatan hegemonik. Suatu budaya yang menutup jendela pemahaman intelektif atas realitas yang bekerja di luar dirinya dan terhadap dirinya sehingga tak mampu berefleksi atas dirinya sendiri untuk menemukan mekanisme-mekanisme apa yang eviden maupun insiden agar mampu mengatasinya. Budaya massa yang merupakan "anak kandung" kapitalisme ini sangat transparan dalam gaya hidup golongan *the so-called* kelas menengah perkotaan, yang mekanismenya menjadikan mereka sebagai *trend-setter* bagi lapis di dekatnya serta dominan dalam menentukan gaya hidup lapis di bawahnya (peniruan). Ini jelas sekali terjadi dalam era globalisasi modal sehingga tak aneh sekarang ini telah berlangsung mapan transnasionalisasi gaya-gaya hidup. Penikmatan musik contohnya, harian Kompas pernah mencatat bahwa dari omset sebesar 20 milyar dollar per tahun industri rekaman musik di AS 70 % di antaranya berasal dari luar AS. Ini mengindikasikan secara kuat bahwa budaya massa dipersiapkan menjadi budaya universal yang memuluskan jalan ekspansi imperium budaya industri maju.

Jangan pernah meremehkan budaya pop. Dengan dukungan teknologi informasi ia bisa mengalihkan 180 derajat perhatian orang banyak dari persoalan-persoalan yang langsung berkaitan dengan dirinya ke gosip-gosip *trendy* impor dari Amerika . Karena halus (citranya sangat *human*, menyentuh, sensual, serba terbaik , serba menyenangkan, eksentrik, macho, anggun, heroik, kreatif-inovatif-rekratif) maka menjadi tidak terasa belitan ekonomi politik-

nya, akhirnya wujud produk ekspansi budaya malah didambakan kehadirannya dan dielu-elukan sebagai apapun yang mengidola atau menjadi kesukaan yang pokoknya *keren, oke punya, lagi musimnya nih, wah boleh juga tuh* sebagai ciri yang digandrungi kalau mau dibilang modern, atau bahkan karena interaksinya memperlihatkan suatu keunggulan tertentu maka bisa dianggap suatu pengayaan budaya bangsa.

Dalam bidang politik, bukankah dalam dialektika proses sejarah penaklukan hingga demokrasi terpimpin sebenarnya budaya politik emansipatoris sudah berjalan pada relnya? Rupanya rel sejarah perkembangan budaya politik kita terputus. Gerbong-gerbong bermuatan asset politik bangsa pada loko demokrasi partisipatoris terhempas ke dalam jurang pemusnahan otoriter. Demokrasi menjadi barang langka di negeri ini. Sementara depolitisasi massa masih kuat. Bisa dipahami bagaimana praktek itu selama ini meramaikan "revolusi diam" yang mengakibatkan terjadinya pengunduran diri dari konflik-konflik yang sesungguhnya. Semakin suburnya kelompok-kelompok mistik, sufistik atau fundamentalisme religius (termasuk di bidang kesenian) yang tekun mengusung tema-tema eskatologis sampai ekstase , menjadi suatu daya tarik eksklusif di tengah masyarakat. Apakah ini eskapisme? Apakah ini ketidakpedulian ? Atau cuma absurditas? Ajukan pertanyaan yang sama

terhadap budaya esoterik di lapangan ilmu pengetahuan, kesenian maupun sastra. Belum lagi ada jawaban yang benar karena pertanyaan seperti itu selalu bisa saja kemudian menjadi salah, bukan pada tempatnya atau tidak tepat untuk ditanyakan.

Berkaitan dengan itu, sebaliknya, menarik sekali mengamati proyek *empowerment* masyarakat oleh kelompok- kelompok yang merasa cukup mampu untuk itu -- karenanya banyak juga menaruh harap pada mereka. Ada sementara penilaian bahwa gerakan LSM/LPSM saat ini masih banyak yang belum didukung oleh pengetahuan dan informasi yang memadai tentang konteks ekonomi politik dan struktur- struktur yang bekerja di balik berbagai problem pemiskinan rakyat. Penilaian seperti ini bisa menunjukkan pada masyarakat bahwa teori dan praktek mereka selama ini ternyata tidak berakar historis pada kondisi dan persoalan konkret rakyat yang sejatinya, yang telah beratus- ratus tahun itu. Seharusnyalah mereka menyatu dengan rakyat, tidak cuma "kenal dekat" demi proyek. Perlu juga dievaluasi berbagai metode kerja. *Advocacy*, misalnya, apakah memang hanya bermakna *"plea for support"* saja?

Sudah hadir juga di antara kita asosiasi kecendekiawanan. Apakah ini yang dibilang orang sebagai kecenderungan "selalu ingin dekat dengan kelompok"? Kalau ya, adakah itu usaha mengkonsolidasikan diri sebagai atau pada kelas borjuasi tertentu dalam masyarakat? Sampai sejauh ini rakyat tidak mengetahui apa guna dan manfaat kecendekiawanan dan asosiasinya itu bagi mereka; walau mereka tahu, karena sejarah mengajarkan, bahwa mereka selalu membutuhkan intelektual yang tumbuh dan berdiri bersama mereka. Wajar saja bila masyarakat selalu mempertanyakan kepentingan politik mereka yang sebenarnya. Hendak dikatakan di sini, secara umum, untuk apa sebenarnya terus melanjutkan organisasi penjarakan (distansi) dari rakyat? Mengelompok-menjarak-menjauhi-meninggalkan rakyat?

Lewat bahasa pun praktek depolitisasi cukup terasakan. Diluncurkan *Newspeak* untuk memanipulasi makna suatu kata atau istilah oleh sebuah pemerintah guna menyesatkan kesadaran orang kebanyakan akan kenyataan yang ditunjuk dengan kata/istilah tersebut. Hal ini jelas merupakan suatu obskurantisme bagi pemahaman lazim masyarakat atas kenyataan yang ditunjuk oleh sebuah kata/istilah tersebut. Amerika Serikat adalah tempat di mana hampir tidak ada penyensoran harfiah, tetapi pengendalian pikiran merupakan industri yang subur di sana. Sudah barang tentu ini akan berlaku sebagai hal yang harus ada dalam sebuah masyarakat yang didasari prinsip bahwa hanya *the rulling elite* yang berhak mengambil keputusan dan prinsip kepatuhan rakyat (pasivitas). Syarat-syaratnya bisa dipenuhi dengan mereifikasi pikiran dari yang mendamba hidup subsisten (lapisan Marsinah) hingga pikiran yang berusaha untuk terus memewahkan hidup (lapisan pembunuh Marsinah). Dalam praktek serupa ini termasuk juga di dalamnya adalah praktek akomodasionis. Biasanya, terjadi ketika tuntutan arus bawah tak mungkin lagi di bendung, sembari melemahkan misi, tujuan dan jurus-jurus politiknya.

Dengan kata lain, seluruh superstruktur pembangunan menuju masyarakat industri direkayasa untuk tidak menegasikan infrastruktur kapitalistik. Gejolak sosial-kultural yang muncul ujung-ujungnya akan sampai pada suatu penerimaan semacam "kami sudah paham aspirasi saudara-saudara sekalian, sekarang silakan bubar dengan tertib". Di sisi lain terdapat kecenderungan kuat di tengah masyarakat industri untuk mentransformasi segala perkara politik ke dalam masalah-masalah teknis (Juergen Habermas, 1970). Akhirnya semua persoalan tampak menjadi *routine affairs* yang bersifat teknis: pengendalian inflasi, peningkatan produktivitas nasional, pelaksanaan kebijaksanaan pendapatan termasuk pajak, neraca pembayaran luar negeri dan sebagainya. Konteks seperti inilah yang mengkhawatirkan dalam program *depauperization process* (pengentasan kemiskinan) di mana hari kesetiakawan sosial dapat menjadi ritualisme rutin yang menyelubungi persoalan sesungguhnya yaitu struktur-struktur sosial yang tidak adil. Sesudah ritus selesai dilaksanakan orang yang melaksanakannya akan merasa puas dan beres. Dengan cara demikian inilah stabilitas diabadikan sebagai nilai politis yang paling tinggi, yang secara utuh terlihat dalam politik masyarakat industri.

Kini, dalam bahasa GBHN, titik berat pembangunan Repelita VI sebagai awal dari PJP II tetap pada bidang ekonomi, tetapi diiringi oleh pengembangan sumber daya manusia dan dalam kaitan yang lebih intensif dengan bidang-bidang lain. Perbedaan dengan sebelumnya terletak pada bobot teknologi dan industri serta dalam hasrat kemandirian. Dengan kata lain pembangunan selanjutnya menggunakan strategi industrialisasi melalui teknologi canggih yang didasarkan atas *human capital formation*.

Ramailah diskursus yang kompleks tentang bagaimana agar sistem pendidikan nasional dapat *link and match* untuk kebutuhan itu di kalangan pakar, birokrat serta kalangan borjuasi industrial-- di mana diskursus itu berhulu dan bermuara. Para orang tua sendiri hanya mencemaskan perbedaan antara institusi pendidikan dan alternatif ekspansi lahan bisnis , juga ketersediaan lapangan kerja bagi putra-putrinya. Sementara para pelajar dan mahasiswa sendiri disihir untuk berlomba menempati jenjang struktur korporatif perekonomian masyarakat.

Industrialisasi dengan mempergunakan teknologi canggih sebenarnya bisa dikatakan sebagai barang baru dalam kebudayaan Indonesia. Belanda sendiri dulu tidak meninggalkan teknologi canggih karena memang waktu itu tertinggal dibanding negara Eropa lainnya. Karena itu jangan sampai proses yang telah digariskan itu hanya menjadi perpanjangan tangan modal asing, yang artinya didikte oleh negara industri maju mengikuti kebutuhan industri yang memperbesar modal dan keuntungan mereka. Ini akan memaknai sekaligus membuktikan bagaimana hasrat kemandirian yang dimaksud.

Memenuhi hasrat itu, yang berhadapan dengan tan- tangan politik dan perekonomian intervensionis dan ekspansionis, maka tidaklah bijaksana menyingkirkan mega proyek mencerdaskan kehidupan bangsa untuk memberi tempat seluas-luasnya bagi proyek industri *link and match* memproduksi *service class"* sebanyak-banyaknya.

Memang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk tujuan terwujudnya negara industri akan selalu bergantung pada dunia pendidikan. Namun pengembangan dan aplikasi iptek yang serba canggih bagaimanapun harus berlandaskan pada suatu basis sosial, yakni keadilan, ke makmuran dan kesejahteraan rakyat, yang berarti mensya- ratkan suatu persiapan berupa perubahan-perubahan infrastruktur dan suprastruktur yang dengannya akan bisa diharapkan partisipasi rakyat semakin meluas karena mereka sadar bahwa itu tak lain adalah untuk kepentingan

mereka.

**PENUTUP**

Sejarah mencatat bahwa demokratisasi di seluruh bagian dunia berjalan lambat. Dari awalnya proses ini dijalankan dengan perencanaan dan penyediaan penghambat- nya oleh golongan yang tengah berkuasa. Bagaimana kemudian hubungan proses ini dengan proses industrialisasi?

Tugas di depan kita adalah mempersiapkan kebudayaan industrial. Sebuah masyarakat industrial memerlukan sikap kritis dari masyarakatnya. Untuk terpenuhinya hal ini maka pertama sekali yang harus dilakukan adalah membebaskan rakyat dari belenggu yang melemahkan kesadaran mereka atas realitas kehidupan yang mereka hadapi. Karenanya harus diciptakan, diluaskan dan terus didorong maju suatu budaya pembebasan. Di sini dibutuhkan suatu filsafat pembebasan yang mampu bertarung dengan filsafat kekuasaan-kekuasaan besar, artinya memiliki koherensi praktis di dalam dirinya sehingga mampu mendorong masya- rakat berbuat rasional secara konkret dan komprehensif menghadapi kekuatan yang memenjarakan dan mengalienasi kehidupannya. Pengalaman proses industrialisasi di Barat menunjukkan bahwa proses tersebut selalu disertai dengan munculnya kekuatan pelawan yang terus-menerus melakukan koreksi terhadap perkembangan masyarakat.

Budaya Indonesia modern haruslah mengandung kekuatan yang lugas dan ilmiah, kekuatan yang terus menerus membuat kita maju. Akar persoalan ekonomi tak bisa tidak harus menjadi target untuk diatasi. Sesungguhnya, sudah lama saatnya pasal 33 UUD 1945 seharusnya menjadi bukti. Bangsa kita sendiri adalah bangsa yang lahir dari penindasan, karenanya sampai kapan pun ia akan akan selalu peka dan menolak setiap bentuk penindasan macam apapun. Memang sejarah sendiri telah menunjukkan bahwa tidak ada bangsa bisa dijajah tanpa bantuan bangsa itu sendiri. Belajar dari situ tak akan ia membiarkan mayoritas berada pada struktur bangunan masyarakat terbawah. Bila minoritas tetap mengendalikan jalannya perkembangan masyarakat maka bentuk masyarakat yang tercipta nantinya adalah hanya penyempurnaan dari refleksi masyarakat borjuis sekarang ini, *new society of leisure and enjoyment* di atas orang kebanyakan para sahaya.

# Modernitas Ilmu-Ilmu Manusia dan Sastra

**Pada tahun 1784 - dari kotanya yang kecil Konigsberg, Immanuel Kant tergerak untuk menanggapi sebuah pertanyaan besar yang terpampang tebal di surat kabar harian Berlin: Was Heiss Aufklarung ?**

Seno Joko Suyono
Mahasiswa Fakultas Filsafat UGM

Pertanyaan ini diturunkan sehubungan dengan keadaan Eropa saat itu yang penuh diwarnai gejolak-gejolak perubahan. Seperti kita ketahui Eropa kurun tersebut tengah memasuki puncak-puncak penemuan baru dalam berbagai bidang pengetahuan dan pemikiran. Masyarakat tiba-tiba dilanda suatu gairah dan optimisme baru akan kemampuan mereka menaklukkan masa depan secara gemilang. Kata pencerahan mungkin ketika itu sama massif dan sugestifnya dengan kata globalisasi yang sehari-hari gemuruh lalu-lalang di lalu-lintas indera pendengaran kita. Tanpa perlu suatu propaganda yang resmi atau seorang orator yang kampiun, kata tersebut tumbuh subur memenuhi udara perbincangan umum. Essai Kant yang dimuat kemudian berusaha memberikan gambaran dan pegangan tentang apa yang sebenarnya tengah terjadi. Kant yang sakit-sakitan itu dalam semangat yang kurang lebih sama menulis bahwa pencerahan merupakan zaman keberanian digunakannya rasio. Ibarat sebuah *post-criptum* yang mengklimaksi apa yang dipercakapkan orang, Kant menegaskan e-ranya adalah era Eropa mencapai titik kematangan pera-daban.

Dua ratus tahun kemudian persoalan mengenai duduk perkara kematangan ini muncul kembali dalam polemik mengenai modernitas (Dreyfus,1986;109). Atas undangan mendiang Michel Foucault di tahun 1984 - Jurgen Habermas bersama para *scholar* filsafat Amerika antara lain Hubert Dreyfus, Paul Rabinow, Richard Rorty, dan Charles Taylor hadir dalam suatu konferensi khusus yang mendiskusikan essai Kant tersebut. Essai itu di mata Foucault mempunyai arti penting terutama karena dilihatnya essai tersebut merupakan sebuah kesaksian dan refleksi situašional langsung atas suatu titik transisi sejarah yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Eropa. Yaitu tahun-tahun saat Eropa mulai menampakkkan dirinya dalam kancah modernisme. Foucault melihat karenanya essai Kant itu dapat dipakai sebagai batu loncatan untuk masuk dalam perdebatan soal apakah yang disebut kematangan atau kedewasaan dalam pengertian modernitas. Bertitik tolak dari essai tersebut diskusi kemudian berlangsung tajam dan diakhiri dengan perbedaan berkepanjangan antara Foucault dan Habermas. Keduanya sepakat dengan pernyataan Kant bahwa kematangan merupakan cermin dari keadaan masyarakat yang melalui rasio mekar menentukan nasibnya sendiri. Keduanya juga sepakat bahwa tahapan modernitas ditandai oleh hilangnya otoritas metafisika dalam kehidupan publik. Akan tetapi ternyata keduanya berdiri dalam pengertian modernitas dan kedewasaan yang secara radikal saling berlawanan.

Bukan maksud tulisan ini untuk turut membenamkan diri dalam diskusi berlarut-larut yang disodorkan keduanya. Tema sentral yang ingin

dikemukakan di sini justru mengenai sastra dan kesenian. Persoalan yang hendak dilihat - atau tepatnya ditawarkan adalah persoalan yang bagi sementara orang mungkin bisa kedengaran *kenes* - yaitu persoalan yang membicarakan sastra dan kesenian sebagai sebuah alternatif perlawanan; terutama pada apa yang disebut hegemoni makna. Perlunya mengetengahkan tema ini dengan didahului pembicaraan mengenai modernitas adalah semata-mata untuk memperlihatkan bahwa potensi kebinalan dan pembangkangan terhadap realitas yang dimiliki sastra atau kesenian ternyata memainkan peranan yang penting serta bisa disebut vital bagi pembentukan kematangan suatu modernitas. Perbedaan antara Habermas dan Foucault dalam memahami kedewasaan patut untuk ditampilkan karena melaluinya nanti dapat secara orientatif dilihat di titik ordinat mana dalam modernitas, sastra dan kesenian sesungguhnya dibutuhkan kehadirannya sekaligus diharapkan mau memposisikan dirinya. Presentasi perbedaan itu dengan demikian mengandung resiko yang sudah disadari sebelumnya untuk akhirnya menempatkan tulisan ini pada salah satu pandangan. Kendati demikian perlu dicatat pilihan ini bukanlah suatu pilihan yang tegas tapi cair sifatnya. Artinya, tak ada pretensi untuk melihat pandangan tersebut sebagai semacam *blue-print* estetik bagi kreativitas sastra dan kesenian . Pandangan itu diperlukan hanya sebatas memberikan arah yang kemudian terbuka bagi segala bentuk pengucapan artistik.

Arah ini dimulai dari mempertimbangkan pikiran Foucault. Bagi Foucault kematangan suatu peradaban tidak hanya ditentukan oleh beroperasinya cara-cara pendirian yang bertendensi heroik dalam sejarah - tapi juga oleh cara-cara pendirian yang bersifat ironik terhadap situasi kekinian yang dimiliki masyarakat. Foucault merasa Habermas dalam menakar kematangan masih tak bisa melepaskan diri dari kecenderungan heroisme itu. Kekukuhan Habermas untuk melihat satu-satunya alternatif menembus krisis dan erosi-erosi akibat tekanan rasio instrumentalis dengan ganti menekankan perlunya perealisasian rasio komunikatif berbagai gramatik kehidupan adalah bagian dari kecenderungan tersebut. Habermas bersiteguh perealisasian potensi komunikatif akan mampu membebaskan matra-matra etis modernitas dari tindasan matra-matra teknis kapitalisme dan kemudian membuka jalan bagi terciptanya proses komunikasi bebas paksaan atau suatu konsesus komunikatif. Dalam berbagai segi, tawaran Habermas itu mengandung kebenaran. Akan tetapi - di samping sifatnya yang terlalu heroik dan terang - *lucidly* dalam mempercayai kemampuan rasio menanggulangi krisis; tawaran itu juga menurut Foucault seperti ditulis David Ashley dalam sebuah makalahnya yang membandingkan Habermas dan Foucault (Turner,1991;94), terkesan terlampau utopis. Obsesi Habermas mengenai adanya suatu komunikasi bebas penguasaan - suatu situasi perbincangan ideal tanpa paksaan, halangan, bersih dari distorsi-distorsi ideologis - suatu situasi yang memungkinkan kesalingpengertian universal menurutnya merupakan obsesi yang naif.

Cara pendirian yang bersifat ironik sebaliknya tak punya pretensi untuk memberikan suatu solusi pengganti. Bilamana Habermas terlihat berusaha membangun suatu Aufklarung baru di atas Aufklarung lama yang telah cacat maka cara pendirian ironik sama sekali meninggalkan motivasi seperti itu. Identifikasi kedewasaan peradaban bagi pendirian ini terutama lebih ditentukan oleh keberanian mencari dalam setiap kondisi kekinian terobosan-terobosan pengertian yang dapat memungkinkan lahirnya suatu arah baru bertindak guna mengimbangi atau menandingi bertahannya standardisitas kebenaran-kebenaran tertentu. Usaha demikian relatif lebih empiris dan praktis daripada mencita-citakan suatu fase universal yang steril terhadap perselisihan-perselisihan. Maka, daripada mengangankan terjadinya suatu komunikasi bebas distorsi; bagi perspektif ini bahasa akan lebih membawa implikasi kedewasaan jika ia dipakai sebagai kendaraan untuk merongrong realitas. Dalam melihat potensi-potensi bahasa Foucault tak mengikuti kecenderungan umum yang berlaku dalam narasi-narasi yaitu sekedar menggunakan bahasa sebagai alat untuk merepresentasikan realitas. Kecenderungan ini dianggapnya jatuh dalam bahaya. Sebab tak menyadari bahwa realitas yang kita mengerti adalah selalu beresiko realitas sebagaimana diwacanakan kekuasaan. Agar bahasa mampu melepaskan diri dari ketidaksadaran sebagai alat pereproduksi kekuasaan, terhadap realitas bahasa karenanya harus diartikulasikan secara subversif.

Pada titik inilah pembicaraan mengenai sastra dan kesenian,menemui relevansinya. Dalam sastra dan kesenian bahasa mempunyai peluang untuk digunakan sebagai alat menteror dan merongrong realitas. Atas dasar asumsi tersebut tulisan ini selanjutnya berisi uraian yang memperlihatkan sebuah kemungknan posisi sastra dan kesenian dalam menghadapi tekanan rezim ilmiah ilmu-ilmu. Dibanding kekuasaan monarkial di era feodal yang diatasnamakan seorang person, rezim ini impersonal dan karena berada di tingkat pengetahuan sifatnya lebih penetratif serta ekstensif. Melalui rezim inilah modernitas tumbuh membangun dirinya. Deskripsi mengenai intervensi ilmiah ilmu-ilmu ke dalam tubuh kebudayan berikut ini akan mengawali uraian mengenai sebuah kemungkinan perlawanan yang kita bicarakan itu.

## II

Mengutip Barzun - dalam makalahnya mengenai hubungan kebudayaan dan ilmu-ilmu sosial Wiratmo Soekito (1992) pernah mengeluhkesahkan betapa para ilmuawan telah mengaburkan pengertian kebudayaan. Barzun sendiri mendasarkan pendapatnya itu pada artikel Nietzsche berjudul *Wil Gelehrten* (Kami Ilmuwan-Ilmuwan). Menurut Barzun, timbulnya kekaburan pengertian kebudayaan dimulai oleh para antropolog. Mereka memakai kata kebudayaan untuk menamakan obyek studinya yang sebetulnya berbicara mengenai masyarakat, yaitu kehidupan suku-suku primitif. Namun karena istilah masyarakat telah lebih dulu diambil dan menjadi klaim studi sosiologi maka kata kebudayaan seterusnya digunakan. Barzun melihat dari para antropolog itulah publik awam mengambil kata kebudayaan dan lalu sampai kini menerapkannya secara tidak tepat, untuk berbagai maksud.

Uraian Barzun ini memberi gambaran bagaimana pengetahuan yang kita pungut sehari-hari banyak berakar dari sikap arbriter ilmu- ilmu dalam mempersepsi realitas. Kegusaran Wiratmo adalah kegusaran khas seseorang yang lebih memahami kebudayaan dari dalam. Terlalu banyaknya campur tangan kategori-kategori diskursif bagi orang-orang seperti ini dirasa akan mereduksi vitalitas dan kepekaan alamiah yang dimiliki kebudayaan dalam arti sesungguhnya. Kegelisahan yang sama

misal juga dapat kita baca dalam tulisan Seno Gumira Ajidarma (1982) - yang mencoba membandingkan implikasi pendekatan ilmu-ilmu empiris dan pendekatan "kesenimanan" (istilahnya untuk menyebut kreativitas yang ada pada setiap subyek) ketika menghadapi kebudayaan. Pendekatan diskursif tudingnya - meski memberikan informasi yang akurat dan sistematik tapi cenderung hanya akan menampilkan reportase yang fisik dan verbal sifatnya. Pendekatan demikian menurutnya tidak sempat membuat kebudayaan tersebut "bicara sendiri" dan sedikit membawa pengaruh yang mampu merangsang tumbuhnya tenaga hidup baru bagi kebudayaan itu.

Berbeda misal dengan yang ditempuh oleh Sardono. Ketika ia mengunjungi masyarakat Dayak Apo Kayan di Kalimantan mulanya suasana penerimaan terasa formal penuh kecanggungan. Namun saat dari kampung ke kampung ia berinisiatif ikut terjun menari dan ternyata mampu melakukan gerakan sebaik mereka. Serta melakukan improvisasi yang dapat membuat mereka terpingkal-pingkal. Saat itu juga suasana berubah cair dan akrab. Sampai-sampai memancing turut menari jagoan-jagoan uzur mereka yang telah bertahun-tahun tak menari. Tanpa tendensi diskursif tindakan ini sanggup membangkitkan gairah yang berharga bagi kelangsungan lingkungan hidup mereka.

Cara pandang diskursif yang menggelisahkan keduanya itu dalam skala luas sebenarnya merupakan cermin dari sebuah gelagat berpikir yang dominan dan sentral dalam modernitas. Dan bisa disebut menjadi ciri epistemologi modern yaitu representasi. Representasi merupakan basis pikir yang mendikotomikan segala sesuatu dan kemudian berusaha mengobyektivisir pihak satu di bawah yang lainnya. Representasi merupakan epistemologi obyektif yang beranggapan memiliki kemampuan untuk mereproduksi dan menduplikasi realitas eksternal. Bersama ciri ini modernitas tumbuh di atas altar panorama pikir yang secara bersama-sama menampilkan kepercayaan bahwa suatu obyek apakah itu konsep, masyarakat, ruang atau waktu dapat dihadirkan kembali, *re-present*, tanpa dikhawatirkan kehilangan isinya atau merusak intensinya. Manifestasi demikian dapat kita amati dalam berbagai hal. Katakanlah mulai dari prinsip keserupaan seni lukis: di kanvas lukisan merepresentasikan penglihatan pelukis, replika pada fotografi: potret merepresentasikan objek, repitisi dalam teks: penulis menuangkan di kertas kata-kata yang merepresentasikan idenya, subsitusi dalam dunia hukum, politik, bidang-bidang publik seperti direpresentasikannya rakyat pada proletariat. Sampai dalam ideologi objektif metodologi-metodologi disiplin empiris yang implikasinya membuat gusar keduanya tadi.

Gejala representasi ini dalam istilah Baudrillard membawa modernisme berkubang dalam suatu dimensi *simulacrum*. Yaitu dimensi yang sarat dengan fakta-fakta dan realitas-realitas copy-an yang tak lagi dapat menghasilkan orisinalitas karena antara realitas dan model tak bisa dijumpai perbedaan atau distingsi (Rosenau,1992;95). Modernitas dipandang hidup dari copy ke copy. Antara copy yang satu kemudian mengcopy yang lain, antara representasi yang satu mereferensi representasi yang lain. Saling bertingkapnya kenyataan-kenyataan tiruan tersebut mengakibatkan modernitas jatuh dalam dimensi yang menepikan otentisitas.

Bila kita runut sejarah - setidaknya seperti yang telah diperlihatkan Foucault dalam bukunya *The Order of Thing* (1977). Selama kurang lebih dua ratus lima puluh tahun yaitu masa-masa antara tahun 1650 sampai 1800 - sebuah masa yang mencakup periode Aufkarung dan sering kita sebut era Klasik itu - Eropa dapat dikatakan sepenuhnya oleh representasi. Akan kita temukan seluruh bidang-bidang pengetahuan dan sistem tanda di abad itu tanpa tersadari merepresentasikan pola-pola atau aturan-aturan relasi tanda seperti yang terdapat dalam *grammar*. Terutama tata-bahasa atau grammar yang dibakukan oleh Port-Royal Logic (Poetzl,1982;172).

Bahasa memang menempati posisi penting di masa itu. Di era rasionalisme tersebut bisa disebut bahasa belum dilihat sebagai substansi organis yang berdiri sendiri. Bahasa masih sekedar didudukkan sebagai fungsi, yaitu sebagai fungsi dari pikiran. Atau dengan kata lain bahasa dipahami hanya menjadi alat untuk mempresentasikan pikiran. Boleh dikatakan karenanya bahasa waktu itu identik dengan pikiran. *Language is thought* (Sheridan,1980;55).

Grammar dalam pandangan Port-Royal Logic dilihat tak ubahnya seperti sebuah sistem tanda dalam logika. Sistem yang membagi tanda secara dikotomis antara: yang menandai dan yang ditandai. Dan kemudian yang lebih menitik-beratkan perhatian pada sisi ekstrinsik tanda, yaitu pada sisi apa yang ditandakan. Atas dasar sistem tanda demikian melalui sistematika model *nomenclature*, sistematika berdasarkan urutan nama-nama, Port-Royal Logic memverbalisasikan bahasa sebagai keteraturan ketat yang tiap-tiap elemennya memiliki fungsi-fungsi spesifik. Di sini grammar ditentukan berdasarkan serangkaian pemilahan identitas dan perbedaan. Dari diferensiasi dan persamaan ini Port-Royal Logic menempatkan unit-unit bahasa dalam klasifikasi fungsi-fungsi secara pasti dan *distinct*. Di tangan Port-Royal Logic jadinya hubungan antar elemen menjadi *rigorous* dan *visible*. Dengan visibilitas ini bahasa oleh Port-Royal Logic dibangun agar benar-benar menjadi sebuah instrumen analisis dan kombinasi serta dalam sistem tanda logika dapat menjadi simbol-simbol buatan atau alat operasionalisasi logika yang universal. Tata bahasa yang sangat menekankan segi keteraturan luar ini kemudian yang membayang dan menjadi konfigurasi epistemologis pemikiran-pemikiran di abad Klasik. *The order of words represented the order of things* tunjuk Foucault. Dari keteraturan grammar keseluruhan pengetahuan periode Klasik membentuk keteraturan rasionalitas umum atau mathesis universal.

Lanskap ketidaksadaran penggunaan cara berpikir model grammar dalam narasi intelektual abad Klasik tersebut dapat kita telusuri sejak dari traktat-traktat pemikiran para pemikir bebas seperti Hobbes, Berkeley, Hume, Condillac. Argumentasi Hume menolak kausalitas dalam bukunya: *A Treatise of Human Nature* serta buku Descartes *Meditation* agaknya bisa dijadikan contoh baik tersendiri. Hume menyebut argumentasinya dibangun berdasar metode geometris. Metode ini menentukan kepastian pengetahuan melalui cara perbandingan ide, dari ide sederhana bergerak ke yang kompleks. Tiap-tiap komponen ide menurutnya harus dapat dibuktikan atau disesuaikan dengan pengalaman. Bila tidak ide itu dianggap Hume tidak absah bagi pengetahuan. Juga Descartes sebelumnya. Gejala ini bagi Descartes demi mencapai suatu pengertian yang tak dapat kita sangsikan lagi kebenarannya harus dianalisis berdasar kesesuaian logisnya dengan konstruksi pikiran. Kebenaran dengan kata lain bagi keduanya, seperti tata-bahasa, harus ditentukan melalui ukuran yang jelas dan nyata. Penyusunan tanda berpola grammar ini lebih jauh dilihat Fou-

cault paling kuat terepresentasi pada bidang studi sejarah natural dan analisa kekayaaan. Dua bidang yang kita sebut sekarang dengan biologi dan ekonomi.

Di dalam studi sejarah natural misalnya tata keurutan dan visibilitas model nomenlaktur bahasa tersebut tercermin dalam taxonomi. Untuk mengkarakterisasikan jenis-jenis tumbuhan Linnaeus di masa itu menempuh prosedur observasi yang bersifat *partes extra pates.* Artinya analisa difokuskan pada elemen-elemen yang jelas, nyata, terang dan berbeda. Mengobservasi berarti melihat sesistematis mungkin dari hal-hal yang paling umum sampai yang paling spesifik. Bentuk, kuantitas, cara elemen didistribusikan serta jarak karenanya menjadi titik berat studi tumbuhan di era itu. Bila orang mempelajari organ-organ reproduktif sebuah tanaman contohnya, maka ia akan menghitung jumlah serbuk, buah sari dan putiknya atau mencatat kehilangannya; kemudian berturut-turut akan menganalisa bagaimana posisi geometris tersebarnya putik dan serbuk sari itu di bunga: apakah segitiga, hexagon atau lingkaran. Akibat kecenderungan ini di masa itu dokumen untuk biologi bukanlah berupa teks atau catatan-catatan, namun suatu ruang besar di mana orang bisa leluasa mengidentifikasikan perbedan dan persamaaan tumbuhan yaitu: herbarium serta kebun-kebun botani.

Sejalan dengan visibilitas biologi itu dinamika diskursus ekonomi waktu itu tidak mendasarkan dirinya pada pengertian hubungan-hubungan produksi tapi pada pengertian uang dan pertukaran. Uang menjadi lebih dominan daripada produksi karena uang berfungsi sebagai instrumen representasi. Beda dengan abad sebelumnya nilai mata uang semenjak timbul arus merkantilisme di abad itu tidak lagi diukur dari materi yang menyusunnya, namun lebih dari cap atau stempel bertera raja yang melekatinya. Koin atau matauang-matauang logam menjadi berharga bukan karena nilai intrinsiknya - tapi karena fungsi ekstrinsiknya yang merepresentasikan sejumlah nominal kekayaan. Di era Klasik seperti dikatakan Foucault," *All wealth is coinable*". Adanya struktur internal yang tak tersadari dari bahasa sampai ekonomi ini membuat, bukanlah suatu kebetulan, apabila kita dapatkan dikurun itu ekonom semacam Turgot dan Adam Smith menulis persoalan bahasa. Sedang grammarian dan filsuf seperti Condilac dan Destrue de Tracy mendiskusikan perdagangan.

Pada saat itu studi mengenai manusia atau ilmu-ilmu manusia belumlah lahir. Yang dimaksud dengan ilmu-ilmu manusia adalah ilmu-ilmu yang sekarang ini kita kenal dengan: psikologi, sosiologi, kriminologi dan sebagainya. Apa yang membedakan ilmu-ilmu ini dengan ilmu-ilmu lain seperti filologi, biologi atau ekonomi adalah dalam ilmu-ilmu ini manusia diletakkan sebagai objek pengetahuan sekaligus subyek pengetahuan. Sedangkan dalam filologi, biologi, atau ekonomi manusia dilihat hanya dari sudut fungsi, yaitu fungsi bahasa, fungsi biologis dan fungsi kerja. Lahirnya ilmu-ilmu ini sekaligus menandai terjadinya keretakan epistemologis yang memutasikan arkeologi pengetahuan abad Klasik menuju ambang modernitas.

Boleh dikatakan Kant yang risalahnya di tahun 1784 menjadi perdebatan di atas turut mendorong berkembangnya ilmu-ilmu ini. Seruan lantang Kant: *Sapere Aude!* Beranilah memakai akal budimu sendiri ! menyebabkan barat mengalami revolusi Kopernikan kedua kalinya yaitu revolusi yang sekarang mengakibatkan subyek menjadi pusat segalanya. Berkat antroposentrisme Kant ini, kini manusia sendiri mengundang perhatian untuk dijadikan obyek penelitian. Lebih awal dari Kant, akan tetapi sesungguhnya bila kita periksa secara kongkrit dalam sejarah benih awal atau embrio lahirnya ilmu-ilmu manusia ini, tak dapat kita pisahkan dari persoalan kekuasaan dan politik. Lahirnya ilmu-ilmu manusia tidak bisa dilepaskan dari cara berpikir serba representasional dan diskursif abad Klasik. Terutama ketika cara berpikir ini berkorespodensi dengan kekuasaan di dalam klinik dan penjara. Akan dapat kita lihat bagaimana pada masa-masa pembentukan awalnya ilmu-ilmu manusia berperan sebagai medium kekuasaan mengkonstruksi realitas menjadi seperti realitas yang sesuai dengan kepentingan kekuasaan. Pada konteks inilah pembicaraan kita mengenai adanya intervensi impersonal ilmu-ilmu ke dalam realitas sebagaimana diutarakan di atas diletakkan. Sebab seperti dikatakan Foucault, sampai sekarang ilmu-ilmu manusia tetap tak bisa melepaskan keberadaan dirinya dari matriks kekuasaan tersebut.

Fenomena berpikir dengan kecenderungan visibilitas itu di akhir abad delapan belas membuat dalam politik, Eropa memberikan perhatian yang besar pada tubuh sebagai objek politik. Dilatarbelakangi kepentingan kapitalisme yang tengah mulai berkembang saat itu, tubuh oleh mesin kekuasaan dituntut untuk menjadi instrumen penopang yang mampu memperkokoh produktivitas kapitalisme. Tubuh dikehendaki kekuasaan menjadi instrumen utilitarian yang memperlancar keberlangsungan proses ekonomi. Demi mencapai ini Eropa mengoperasikan rezim kekuasan berupa disiplin. Disiplin merupakan teknik dan taktik yang diterapkan kepada individu untuk menggiring dan membuat individu menjadi obyek yang bisa dibentuk. Disiplin bertujuan menempa tubuh individu agar dapat menjadi tubuh yang patuh dan tunduk terhadap desain besar politik. Melalui disiplin ini Eropa, seperti diistilahkan Foucault, menjalankan apa yang disebut politik anatomi, *a political anatomy of detail.* Suatu jenis politik yang secara regulatif serta manipulatif mengontrol tubuh individu sampai pada hal-halnya yang rinci dan privat.

Citraan paling sempurna dari tubuh yang patuh ini kemudian adalah tubuh militer. Kekaguman pada tubuh militer ini dikarenakan tiap bagian tubuh militer merupakan unit-unit yang dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Tangan, kaki, atau mata misalnya, merupakan elemen-elemen yang bisa bertindak otomatik dan reflek dalam menunaikan tugas. Tiap detail tubuh militer adalah unit-unit yang *intelligible* dan *useful.* Bukanlah sesuatu yang sulit kita bayangkan apabila di era stadium awal kapitalisme tersebut Eropa memimpikan keteraturan dan ketertiban masyarakat model militer. *A military dream of society*, suatu mimpi indah tentang masyarakat yang serba tertata rapi dan terkendali di mana tiap warganya secara kontinyu terlatih memberikan kontribusinya, mengekstrasikan tenaganya kepada negara. Citraan ideal mengenai kepatuhan tubuh ala militer ini yang kemudian menjadi basis "estetis" Eropa mengoperasikan proyek disiplinnya.

Ciri essensial pelaksanaan politik anatomi tersebut sebagaimana dapat dilihat bekasnya dalam peninggalan-peninggalan arsitektural bangunan-bangunan abad Klasik di seantero Eropa adalah disiplin diterapkan melalui serangkaian prosedur-prosedur kontrol ruang. Seluruh institusi-institusi Eropa apapun dari lembaga-lembaga khusus seperti penjara sampai pranata-pranata sosial umum se-

perti sekolah, rumah sakit dan pabrik-pabrik dapat ditemukan peng-organisasian atau pola pembagian ruangnya didesainn sedemikian rupa hingga memungkinkan tiap penghuninya tanpa pernah merasa sadar bisa diawasi dan diobservasi terus secara konsisten. Prinsip pengawasan disiplin seperti ini dinamakan Foucault sebagai prinsip pengawasan optik. Dengan mekanisme optik sedemikian, kekuasaan di akhir abad delapan belas ibarat sebuah mikroskop tingkah laku (Foucault,1982;173). Ia mampu memantau dan menginspeksi perkembangan disiplin dengan jelas dan seteliti-telitinya tapi ia sendiri tersembunyi tak terlihat. Ia mampu mengontrol tiap gerak individu secara cermat tanpa pernah dirasa kehadirannya.

Di bawah tatapan optik mata kekuasaan yang anonim dan impersonal, individu ditempatkan sebagai objek yang secara terus menerus dianalisi serta diinterogasi. Tidak ada satu pun kekeliruan individu yang luput dari pandangan pemeriksaan dan monitor kekuasaan. Tiap detail kelakuan individu karenanya seluruhnya mempunyai potensi untuk dihukum. Sejak dari kesalahan waktu, gerak, ucapan, kelalaian-kelalaian sampai tindak-tanduk seksualitas. Pengawasan optik pendeknya seperti melakukan suatu pembukuan hukum. Berdasar teknologi *micro-penalty* tersebut kekuasaan berusaha mewujudkan standardisasi atau normalisasi yang berniat menghomogenisasikan kelakuan-kelakuan. Tatapan mata penyidikkan kekuasaan oleh sebab itu mengenal obyek hanya secara biner atau divisional. Antara baik-buruk, waras-tidak waras, normal-tidak normal, berbahaya-tidak berbahaya. Individu tak lebih dipandang hanya dalam perspektif *the same-the other*.

Karakteristik kekuasaan dengan ciri utama investigasi dunia pribadi secara rinci dan dikotomisasi individu ini seperti dikatakan tadi tak dapat kita pisahkan asal-usulnya dengan tumbuhnya rasio representasi secara praktis di dalam klinik. Sama halnya dengan kecenderungan verbalisme dalam tata-bahasa, di akhir abad delapan belas itu dalam dunia kedokteran berkembang suatu cara pandang medis baru terhadap kesehatan yang arah pemahamannya didominasi oleh pengertian kejelasan. Kajian-kajian medis diartikulasikan atas dasar identifikasi penyakit yang ketat dan visible batas-batasnya. Setiap penyakit dihierarkiskan ke dalam banyak famili, genus atau spesies. "Jangan obati penyakit tanpa pernah merasa pasti jenis spesiesnya" kata-kata Gilbert seorang dokter di abad delapan belas ini mungkin dapat dipandang sebagai motto dunia medis saat itu. Foucault menyebut corak analisis medis demikian dengan nama *anatomo-clinical method.*

Secara sosial pendekatan anatomo-clinis ini membawa dampak tiranik ketika di tengah arus ekonomi era tersebut kesehatan publik menjadi salah satu status ekonomi baru yang dibutuhkan masyarakat kapitalisme awal. Ketika rumah sakit-rumah sakit telah kedapatan sesak tak kuasa menampung jumlah pasien, dan saat ongkos perawatan semakin tinggi serta saat beberapa penyakit menular mulai menjangkiti pasien-pasien secara massif, atas anjuran kaum borjuis Eropa didirikan semacam *home care* (rumah-rumah perawatan) yang menggantikan kedudukan rumah sakit. Rumah sakit kemudian hanya menjadi tempat tinggal pasien-pasien yang terkategori miskin, gelandangan, atau pasien marjinal lainnya. Konsekuensi lanjut dari pergeseran ini rumah sakit kini tak lagi semata berperan sebagai sebuah balai pengobatan namun lebih berperan sebagai sebuah laboratorium sosial dengan prioritas *research oriented.* Negara menyediakan hukum dan undang-undang serta dana untuk kepentingan ilmiah ini. Sedang orang-orang kaya juga mengalirkan dukungannya lewat subsidi-subsidi. Jadilah rumah sakit secara legal menjadi lembaga penelitian yang memungkinkan dokter melakukan eksprimentasi serta eksplorasi-eksplorasi anatomis atas penyakit secara lebih ilmiah dan terencana. Prestasi-prestasi medis diburu dengan riset yang menggunakan orang-orang miskin sebagai tumbal percobaan (Wuthnow,1984;147).

Kondisi diatas menyebabkan di abad delapan belas pemeriksanaan dan pengawasan pasien menjadi ritus paling utama di rumah sakit. Sebagai sebuah laboratorium di samping dokter dan perawat- perawatnya para siswa merupakan aparatus pemeriksa terpenting. Secara reguler mereka mengunjungi pasien dan melakukan analisis-analisis. Tiap tubuh pasien dipandang sebuah *"case study"* yang harus diklasikasi-klasifikasikan. Pasien dikelompok-kelompokkan dalam ruang-ruang tertentu dan mendapat perlakuan berbeda-beda. Rumah sakit dimasa itu menjadi sebuah sentrum institusi yang mengelaborasikan kriterium kebenaran tertentu mengenai kehidupan manusia. Status dokter dipercayai sebagai status yang memiliki otoritas kebenaran. Dokter mempunyai akses untuk melakukan intervensi atau mengambil keputusan atas masalah apapun. Hampir seluruh lapisan masyarakat dari pasien sampai komunitas-komunitas lain membutuhkan peran dokter sebagai penasehat, supervisor atau pelindung. Diskursus kesehatan klinik oleh karenanya tidak hanya terpusat pada rumah sakit sendiri, tapi tersebar luas secara massal diluar batas-batas otonomi disiplin keilmuan kedokteran. Diskursus-diskursus klinis dapat ditemui resapannya atau biasnya mulai dari aturan-aturan administrasi, proyek-proyek pengawasan orang miskin sampai pada aturan-aturan kewajiban buruh. Dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan makro yang menyentuh mayoritas publik seperti masalah pengaturan kependudukan lebih-lebih campur tangan dokter terasa dominan (Foucault, 1972 ; 51).

Tanpa disadari tipologi relasi dominatif antara dokter dan pasien di rumah sakit yang kemudian merembes dan digunakan kekuasaan sebagai strategi untuk mewujudkan obsesi militeristiknya. Tehnik-tehnik inquisitorial dan terapeutik dunia klinis dalam mengawasi tubuh pasien dipakai oleh kekuasaan sebagai tehnik mengawasi dan mengkolonisasikan disiplin kedalam kehidupan individu warganya. Mekanisme pengawasan optik di penjara misalnya secara jelas mencerminkan tipologi itu. Para narapidana di abad delapanbelas sesuai denah yang dirancang oleh filsuf Jeremy Bentham ditempatkan dalam sel-sel berkeliling yang satu sama lainnya saling tersekat tidak bisa melihat tapi bisa dilihat oleh pengawas dari sebuah menara yang dibangun di tengah-tengah arena. Tak ubahnya seperti pola inquisitorial medis yang mencoba mencari tahu bagaimana eksperimen-eksperimen pengobatan menimbulkan efek pada tubuh-tubuh pasiennya, pengawas dari tempat yang tersembunyi berusaha mengamati bagaimana hukuman berbeda-beda yang sedang diujicobakan pada narapidana-narapidana sesuai dengan tingkat kriminalitas dan jenis karakternya dapat memberi pengaruh pada tindak-tanduk mereka. Pengawas tanpa terlihat, secara seksama dapat membanding-bandingkan dan kemudian menentukan hukuman mana kiranya yang berfungsi paling efektif. Penjara oleh karena itu, seperti halnya rumah sakit, merupakan laboratorium kuratif yang bertugas mengoreksi dan mentransformasi laboratorium biografi individu agar

selaras dengan skenario besar kekuasaan.

Dari penjara tehnik-tehnik inquisitorial klinis ini dengan berbagai modifikasi menyebar dan menjadi bagian dari institusi-institusi lain. Terutama tehnik itu diadopsi oleh institusi-institusi berkomunitas publik seperti institusi pendidikan dan pabrik. Disini yang menjadi obyek terapeutik adalah murid-murid dan buruh-buruh. Lahirnya ilmu-ilmu manusia menurut Foucault tak dapat kita pisahkan dari situasi ketika di abad delapanbelas tubuh tampil sebagai target diagnosis kekuasaan ini. Kecenderungan metodologi ilmu-ilmu manusia sebagaimana kita lihat sekarang menggunakan model inquisitorial untuk menggali informasi dan menghimpun fakta-fakta lain tumbuh dari cara-cara investigatif kekuasaan mengawasi kehidupan disiplin individunya. Psikologi, demografi, sosiologi, antropologi, krimonologi, kesehatan masyarakat dan seterusnya terbentuk dari situasi intervensif yang berkembang dalam lokal-lokal kekuasaan seperti rumah sakit, pabrik dan penjara. Setiap ilmu memang pada akhirnya mempunyai model serta mengembangkan aturan-aturan spesifiknya sendiri-sendiri, akan tetapi ilmu-ilmu itu hanya menjadi mungkin oleh adanya kondisi tersebut. Jika Nietzsche pernah mengatakan bahwa pengetahuan di Barat bersifat *pudenda origo* artinya memiliki asal muasal yang rendah. Senafas dengannya Foucault melihat ilmu-ilmu manusia ternyata memiliki masa lalu yang hina. Analisis ilmu-ilmu ini terhadap manusia dan realitasnya oleh karena itu dapat jatuh dalam bahaya tetap tak bisa keluar beringsut-ingsut jauh dari batas- batas realitas yang dipatokkan oleh kekuasaan. Pada konteks itulah realitas akan mengalami gejala penyempitan serta pendangkalan.

III

Sekarang apakah yang bisa diberikan sastra untuk mengimbangi ancaman penyempitan realitas ini? Di tahun 1801 seorang bajingan dan penzinah besar bernama Marquis de Sade ditangkap dan kemudian dijebloskan kedalam rumah sakit jiwa Charenton Perancis atas tuduhan mengarang dan menyebarluaskan sebuah karya sastra sadistik berjudul *Justine and Juliette.* Tahanan memang bukan tempat yang asing untuk orang ini. Hampir selama tigapuluh tahun hidupnya dihabiskan dari penjara ke penjara mulai dari Vincennes sampai penjara angker seperti Bastille. Semua kriminalitas yang dilakukannya adalah kriminalitas seksual. Bajingan ini pernah menoreh tubuh perempuan hingga luka dan kemudian meneteskan lelehan lilin panas ke sekujur luka perempuan malang itu. Bajingan ini juga pernah diadukan oleh serombongan pelacur muda Marseille karena meracuni mereka dengan *basish* Spanyol dan memaksa melakukan deviasi seksual. Selama tahun-tahun kurungannya itulah ia menulis sastra yang kemudian menteror dan menghantui banyak orang karena isinya yang brutal, penuh fantasi-fantasi erotisme dan sadisme. Di dalam kungkungan jeruji-jeruji Vincennes tahun 1782 ia misalnya menulis *Dialogue Between a Priest and a Dying Man,* sebuah kisah jorok yang besettingkan perdebatan moral antara seorang Pendeta dan seorang yang dirudung ajal. *Justine and Juliette* dipublikasikannya secara ano-nim di tahun 1791. Buku ini dengan teramat mencekam berisi cerita tentang pengakuan-pengakuan serta pembenaran-pembenaran kebiadaban dan penderitaan seorang narapidana pembunuh bernama Justine kepada seorang pengunjung hotel bernama Juliette. Bagai seorang penganjur, Justine secara panjang lebar menguraikan betapa baginya hidup dengan penuh kekejaman dan kemalangan merupakan suatu jenis kehidupan yang penuh kejujuran serta kebajikan. Buku dengan gagasan mengerikan ini meski anonim, anehnya mengalami sukses dan popularitas yang luar biasa. Hingga tercetak ulang sampai enam kali. Hal yang sama kemudian juga terjadi pada buku sadisnya yang lain berjudul *Coelina or The Child of Mystery.* Di tahun 1798 buku ini laku sampai 1,2 juta copy. Setiap orang yang tidak buta huruf di zaman itu artinya, hampir dipastikan membaca semua buku tersebut. Imaji-imaji Sadė ini akhirnya dianggap membahayakan politik. Saat ditahan dalam rumah sakit jiwa Chanton bahkan Napoleon sendiri menegaskan bahwa ia harus diisolasikan dari orang-orang lain. Di penghujung akhir abad kedelapanbelas itu sedemikian hebatnya pengaruh Sade sehingga menurut Foucault menggoyahkan sistem berpikir representasi abad Klasik .(Poetzl, 1982 ; 159).

Tentu ini merupakan contoh yang vulgar dan buruk mengenai kemungkinan perlawanan yang bisa diberikan sastra. Akan tetapi, seperti dikatakan Ilhab Hasan misalnya (1982), fenomena Sade ini untuk selanjutnya, lepas dari segala kelakuannya yang menjijikkan kita itu, mendorong keberanian sastra modern untuk mengarungi dan melakukan penjelajahan-penjelajahan menemukan realitas "baru". Sehubungan dengan Sade sendiri sebenarnya Camus pernah menilai bahwa dibanding kejahatan para borjuis ketika itu Sade sebenarnya relatif lebih moralis. Sebab menurutnya Sade menolak kriminalitas legal seperti di mana-mana dipraktekkan kalangan Borjuis. Bagi Sade membunuh dengan kekerasan karena nafsu adalah sesuatu yang masih bisa dimengerti. Namun, membunuh dengan cara sopan, tenang dibawah dalih kehormatan martabat borjuisme, itu yang sukar dipahami. Agaknya ini diluar persoalan kita. Persoalan kita adalah bagaimana sastra ataupun kesenian berhadapan dengan kecenderungan-kecenderungan representasi ilmu-ilmu, sehingga mampu membuka kemungkinan "baru" realitas.

Seperti dikatakan Bataille, terhadap realitas, sastra dan kesenian sesunguhnya menyimpan kekuatan bahasa transgresif. Apa yang dimaksud Bataille dengan transgresif ini ? Untuk memahaminya lebih dulu dulu kita harus melihat letak spesifik sastra dan kesenian di tengah ilmu-ilmu. Jagad sastra dan kesenian adalah jagad tempat secara kreatif terjadi proses penciptaan. Proses ini membuat sastra tidak menjadi sebuah unikum yang hanya berhenti sebagai cetak ulang realitas, tapi sastra merupakan suatu dunia yang bahkan sanggup menciptakan realitas-realitas. Betapapun demikian itu bukan berarti sastra berurusan dengan sesuatu yang "*wishfull-thinking*" sifatnya, tapi sastra sering justru mengajak kita menyelami wilayah-wilayah yang sering tak terduga. Wilayah yang dalam bahasa Max Milmer, seorang Freudian (1992), dikatakan menjadikan sastra mampu menyajikan kebenaran, namun suatu jenis kebenaran yang tak diakui, suatu kebenaran yang direpresi. Transgresifitas menurut Bataille adalah kondisi dimana bahasa pada sastra dan kesenian dibawa masuk kedalam pengalaman menerobos atau melewati limit-limit pengetahuan serta kekuasaan.

Transgresifitas merupakan situasi yang mencoba menggali pengalaman bukan dari pusat-pusat dunia atau

manusia, tapi dari marjin-marjin kehidupan. Berhadapan dengan representasi realitas oleh ilmu-ilmu yang tanpa disadari tetap tak bisa membebaskan diri dari limit-limit yang dipancangkan kekuasaan, transgresifitas berarti upaya melampaui limit-limit itu. Transgresifitas berarti usaha untuk melakukan perongrongan dan pelebaran terus menerus terhadap limit-limit pengetahuan yang menjadi pondasi berpikir modernitas. Bataille sendiri misal melihat limit itu terdapat dalam persoalan seksualitas. Secara ironik ia menilai kooptasi kekuasaan mengakibatkan seksualitas jatuh dalam dimensi yang sekedar instrumental dan biologis. Ikhwal instrumentalisme seks ini bila kita kaitkan dengan Foucault memang tidak bisa kita lepaskan dari wacana disiplin. Demi mampu menguras energi manusia untuk kepentingan produksi maka kekuasaan ikut mengatur kehidupan privat seksualitas individu. Melalui kontrol administratif atas vitalitas tubuh, hal-hal yang bersangkut paut dengan usaha keturunan kemudian menjadi target utama kekuasaan. Dalam publik, seks akhirnya tumbuh sekedar narasi yang utilitaris dan prokreasi. Bataille bermaksud membawa bahasa melampaui limit ini. Erotisme yang terpencar dari seks baginya merupakan pintu masuk kearah dunia yang sakral dan religius. Erotisme adalah wilayah tempat manusia menemukan keabadiannya yang hilang atau dipertautkan kembali dengan kekekalan. Ditengah erotisme segala pola kemapanan dan keteraturan sosial yang masih merupakan bagian dari keterputusan modus eksistensi duniawi manusia akan runtuh. Erotisme maka dari itu menurut Bataille adalah dasar pijak bagi tindakan politik yang paling fundamental. Bahasa yang ditransgresifkan menuju erotisme dengan demikian akan sekaligus mengatasi dan menggenapi limit kebudayaan (Lamert, 1982 ; 26). Lukisan-lukisan Bataille seluruhnya merupakan usaha eksperimentasi transgresif ke arah itu. Melalui transgresi, sastra dan kesenian mencoba membuka cakrawala peradaban . Dan sekaligus memberikannya dialektika kematangan.

Terjemahan kongkrit lain dari usaha transgresi ini mungkin biasa kita perlebar dalam dataran sejarah atau sosiologis. Transgresifitas disini lalu berarti suatu usaha untuk membawa masuk bahasa kedalam areal-areal historis dan sosiologis yang selama ini kita anggap sebagai "*the other*". Bahasa dibawa menerobos patok-patok historis dan sosiologis normal menuju medan-medan gelap sejarah dan sosiologis yang terperi-feralisasikan dalam medan asing yang sering tak terjamah atau diabaikan ilmu-ilmu lain. Bahasa dibawa masuk dalam "*terra incognita - terra incognita*" tempat dimarginalisasikannya komunitas-komunitas sosiologis dan historis tertentu. Bila kita amati salah satu kekuatan novel *City of Joy* misalnya yang kemudian dilayar perakkan itu justru terletak disini. Persoalan kekuasaan yang dihadapi Hasari - penarik *rickshaw* dalam cerita tersebut sebetulnya merupakan cerita yang klise dan biasa. Tapi cerita itu menjadi hal yang luar biasa karena setting konfliknya mengambil lokasi masyarakat penderita lepra serta kusta di India. Kita akan terkejut - takjub misalnya membayangkan betapa bisa sebuah bagian tubuh seorang penderita copot dan kemudian hilang dilarikan anjing. Sebuah dunia asing diam-diam merambat menggedor cakrawala sosial kita.

Lantas seberapa jauh transgresifitas ini mendapat tempat dalam dunia sastra dan kesenian kita sendiri? "Aku buka tubuhku sampai kepada kemungkinan yang paling mustahil", diktum tetater SAE itu agaknya bisa dianggap mewakili. Ketika kekuatan mega media-negara, pasar dan massifikasi media elektronik telah sedemikian rupa memiliki pengaruh besar dalam pembentukan masyarakat di negeri ini. Ketika politik kesatuan telah tanpa terbantahkan melakukan vokalisasi narasi pembangunan yang tak memungkinkan tiap komunitasnya mengalami individualisasinya sendiri di orde ini. Maka teater dapat menjadi sebuah mata air kecil untuk menemukan kembali dunia pribadi yang telah hilang sekaligus menjadi sebuah cara berpikir diluar cara berpikir resmi pendidikan atau ilmu-ilmu. Transgresifitas SAE kemudian adalah transgresifitas yang mencoba keluar dari zona-zona normatif dan tertutup dalam memandang manusia. "Dalam teater, tubuh kini bisa berpikir tanpa kata", ucapan Afrizal Malna ini menunjukkan betapa titik transgresi yang digeluti SAE adalah titik yang berusaha membebaskan tubuh dari dominasi diksi kekuasaan dan bahasa tema-tema besar. Tubuh disitu lalu tumbuh menjelajah menciptakan ruang, situasi-situasi, asosiasi-asosiasi dan komunikasi-komunikasi. Suatu komunikasi pribadi yang tak mungkin tersentuh oleh ilmu-ilmu manusia baku.

Bersama teater ini masing-masing diri kita akan diundang untuk mengalami interaksi pemaknaan yang plural sekaligus personal. Tubuh dan ruang komunikasi yang terbentang membangkitkan kita menjadi produsen dan mendorong kita untuk menghasilkan arti. Ditengah situasi modernitas yang serba monoartikulasi. Sementara ilmu-ilmu manusia atau sosial tetap tak berani melakukan penjelajahan-penjelajahan. Maka interaksi demikian adalah interaksi yang mahal. Akhirnya, bila persoalan modernitas, ilmu-ilmu manusia dan sastra ini kita tujukan pada iklim kesenian dan sastra kita. Agaknya yang ditulis Iwan Simatupang pada Utuy Tatang Sontani di tahun 1961 itu masih relevan. Bahwa tugas revolusioner sastra terhadap kondisi Indonesia kini mau tak mau adalah Mencipta! "Bukan mencipta omong kosong, bukan mencipta fantasi vulgar! Bukan mengorganisasi pencipta/ciptaan, tapi : Mencipta! Kebangkitan Indonesia kini, adalah kebangkitan dalam penciptaan, dalam kesegaran, dalam orisinalitas, dalam fantasi yang berani ".

BALAIRUNG 1985 1993 8

# Dialektika Ilmu dan Transformasi Sosial Keagamaan

## (Perspektif Pemikiran Islam)

**"Agama merupakan suatu visi tentang sesuatu yang ada di atas, dibalik, dan didalam hal-hal yang senantiasa berubah atau bersifat sementara ini; sesuatu yang nyata, tetapi tetap menunggu untuk dinyatakan; ...**

*... sesuatu yang merupakan kemungkinan yang masih jauh, tetapi sekaligus juga merupakan kenyataan besar yang sudah terwujud sekarang ini; sesuatu yang memberi makna kepada segala sesuatu yang berlalu, namun juga sesuatu yang selalu lepas dari pengertian; sesuatu yang bila dimiliki merupakan harta terakhir yang tak ternilai, tetapi juga sesuatu yang selalu mengatasi segala usaha untuk menggapai; sesuatu yang merupakan ideal tertinggi yang pantas dicita-citakan, tetapi sekaligus juga sesuatu yang mengatasi segala dambaan..." (Alfred North Whitehead)*

Perry Umar Farouk
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Menurut beberapa futurolog terkemuka dunia, termasuk juga futurolog dari Indonesia, yaitu Dr. Soedjatmoko, masa-masa mendatang merupakan masa kebangkitan spiritualisme dimana agama- agama akan mendapatkan peran yang semakin besar dalam perikehidupan manusia. Proyeksi ini boleh jadi merupakan angin segar bagi agama-agama, tetapi juga dapat menjadi angin yang menyesakkan, karena beberapa hal yang menyangkut keberadaan agama-agama sekarang ini. Yang terutama perlu diperhatikan adalah masalah kesiapan agama-agama itu sendiri dalam merespon secara cepat namun tepat fenomena kebangkitan spiritualisme manusia dan masyarakat modern, yang sudah tentu berbeda dibandingkan dengan kebutuhan spiritualistis masyarakat pra-modern. Dengan lain kalimat dapat disebutkan permasalahan ini, yaitu: Mampukah agama- agama memenuhi tuntutan perikehidupan manusia dan masyarakat di jaman modern ini? Pertanyaan itu sebagai garis bawah bagi hipotesis Dr. Soedjatmoko yang dituliskan dalam makalahnya yang berjudul "Agama Dan Tantangan Zaman", yaitu bahwa *suatu agama yang tidak bicara kepada masalah moril pokok zamannya akan menghadapi bahaya, dia berangsur-angsur akan menjadi irrelevan (Soedjatmoko, Agenda Permasalahan Abad 21, 1993)*

### Permasalahan-Permasalahan Pokok

Sebagai *mainstream* dari jaman modern yang telah dan sedang berlangsung terus menggejala mempengaruhi seluruh segi kehidupan manusia dan masyarakat adalah rasionalisme dan materialisme. Dalam kaitan ini tidak dapat dibedakan antara apa yang dikenal sebagai kapitalisme-liberalistik dengan sosialisme-komunistik yang dipercaya merupakan paham-paham yang membelah dunia menjadi dua secara berlawanan, karena pada hakekatnya kedua paham tersebut lahir dari rahim yang sama, yaitu materialisme - rasionalisme yang disebutkan tadi. Paham materialistis dan rasionalistis mempunyai alat yang ampuh sebagai juru penerang kenyataan-kenyataan fenomenal alam dan kehidupan manusia, yang pada gilirannya mampu mengikis bahkan meniadakan peran media lain yang secara historis dipergunakan oleh manusia seperti mitologi- mitologi dan agama. Alat ampuh tersebut adalah sains dan teknologi.

Tetapi tanpa diduga sebelumnya penaklukan secara membabi buta terhadap alam oleh manusia dengan bantuan kehebatan sains dan

teknologi berbalik menjadi penaklukan manusia terhadap kehidupannya sendiri. Sains dan teknologi yang mulanya diharapkan menjadi senjata ampuh untuk menguak misteri keberadaan manusia sedikit demi sedikit berubah menjadi bumerang yang memotong dan memisahkan manusia dari kemanusiaannya yang utuh. Ia menurut seorang filsuf Madzhab Frankfurt, Herbert Marcuse, tinggal menjadi manusia satu dimensi, makhluk yang kehilangan bagian-bagian dirinya yang paling luhur. Dan lebih parah lagi, sisa keberadaannya itu menjadi bulan-bulanan permainan benda-benda buatannya sendiri (hasil-hasil sains dan teknologi), yang mendiktekan sebuah kehidupan yang absurd, kehidupan tanpa nilai dan tujuan yang jelas.

Fenomena tersebut pada hakekatnya tidak berbeda dengan kehidupan pemberhalaan. Kehidupan seperti ini menyeret manusia ke alam perbudakan bagi dirinya sendiri. Dan pada tingkatnya yang paling parah, manusia menjadi penyembah dan mendewakan hasil kreasinya sendiri. Secara dramatis keadaan kehidupan pemberhalaan dan akibat-akibatnya yang menyengsarakan itu digambarkan oleh Erich Fromm, psikoanalis terkenal, dalam bukunya "The Sane Society", yaitu:

Manusia telah menciptakan suatu dunia dari barang-barang buatan manusia yang tidak pernah ada sebelumnya. Ia telah membangun permesinan sosial yang ruwet untuk mengatur permesinan teknis yang ia bangun. Namun seluruh kreasinya itu tegak di atas dan mengatasi dirinya sendiri. Memang ia merasa dirinya sebagai pencipta dan pusat, tapi juga sebagai budak sebuah berhala golem yang ia buat dengan tangannya sendiri. Semakin kuat dan besar kekuatan yang ia lepaskan, semakin ia merasa dirinya tak berdaya sebagai manusia. Ia menghadapi dirinya sendiri dengan kekuatan dirinya yang dikandung dalam benda-benda yang ia ciptakan, yang terasing dari dirinya sendiri. Ia dikuasai oleh kreasinya sendiri, dan telah kehilangan kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Ia telah membuat sebuah patung anak sapi emas dan berkata: "Inilah dewamu yang membawa kamu keluar dari Mesir (Nurcholis Madjid, Ulumul Quran vol iv no 1, 1993).

Kutukan terhadap pemberhalaan oleh manusia terhadap benda buatannya sendiri dalam kehidupan mikrokosmos adalah alienasi atau keterasingan pada diri pribadi. Keadaan seperti ini pada gilirannya membawa bahaya yang berlipat ganda, yang karenanya kehidupan semesta bisa terancam. Keterasingan merupakan kebuntuan dimana manusia kehilangan makna dan arah dalam hidupnya. Kebingungan manusia untuk mengerti kehidupan mikrokosmosnya seolah seperti bom waktu yang setiap saat bisa meledakkan seluruh kehidupan makrokosmos. Manusia pun tidak saja menjadi musuh bagi dirinya sendiri tapi bagi seluruh kehidupan di bumi.

Penderitaan yang paling parah menghinggapi manusia modern adalah krisis eksistensial. Kehebatan sains dan teknologi yang telah berhasil membebaskan manusia dari kesulitan-kesulitan fisikal hidup dan memuaskan kebutuhan-kebutuhan biologisnya, ternyata terus dihantui sebuah pertanyaan klise namun teramat menggoda, yaitu: Apakah manusia sudah cukup berbahagia?

Menara ilmu yang menjulang tinggi menggantung manusia yang membangunnya di atas ruang hampa dan hanya memberikan pandangan luas gurun tandus tanpa kesegaran. Menara itu membuat manusia dengan angkuh bertepuk dada, tetapi juga mengurungnya dalam pesimisme. Secara hipotetis, Dr. Sudjatmoko menyebutkan bahwa tingkat kemajuan sains dan teknologi berbanding terbalik dengan kemampuan survival umat manusia. Beliau mencontohkan kehebatan teknologi militer, pada dasarnya dapat dilihat sebagai meningkatnya kemampuan basmi sekaligus kecepatan basmi dari persenjataan modern. Dengan demikian kemampuan survival umat manusia jadi terancam (Soedjatmoko, Op. cit).

Kemudian secara global, hasil-hasil sains dan teknologi yang berupa mesin-mesin mendikte manusia dalam memperlakukan alam lingkungannya. Hal inipun membawa pengaruh yang tidak kecil terhadap makna eksistensial kehidupan manusia, karena dapat dimaklumi bahwa salah satu bagian kehidupan adalah dialog manusia dengan berbagai segi fenomenal alam. Kesalahan yang terjadi di sini adalah bahwa mesin-mesin yang dimaksudkan sebagai alat mengenal (memanfaatkan) berkembang menjadi yang mendiktekan tujuan-tujuan.

Ketidakterdugaan tersebut di atas selanjutnya membuahkan gelombang dahsyat humanisme yang merusak alam dan tanpa samasekali bermuatan transendental. Keseimbangan dan kelestarian kehidupan semesta menjadi korban yang paling parah kondisi yang seperti itu. Pada akhirnya manusia menjadi tidak betah hidup dalam bangunan-bangunan fisik dan sistem sosial yang dirancang dan diciptakannya sendiri. Karena semuanya itu seperti telah disebutkan di muka tidak memuaskan kerinduan eksistensial yang secara cukup dapat membahagiakan.

Sebagai makhluk yang tidak bisa bertahan lama membohongi dirinya sendiri, manusia untuk melengkapi pengertiannya secara utuh membutuhkan sentuhan-sentuhan lain selain sains dan teknologi. Sains dan teknologi hanya menyentuh sisi perikehidupan yang paling luar.

Secara historis sentuhan yang paling kuat terhadap fenomena kehidupan manusia, selain ilmu pengetahuan adalah agama. Hanya dapat disesalkan bahwa pada kenyataannya selama sekian waktu perjalanan sejarah, antara ilmu dan agama tidak bergerak dan berkembang secara damai saling memperlengkapi, bahkan cenderung ingin saling meniadakan. Manusia dalam hidupnya seolah-olah dipaksa memilih hanya salah satu diantara keduanya, ilmu atau agama.

**Agama Yang Dituntut Manusia Dan Masyarakat Modern**

Bila kita melihat agama sebagai sebuah pemikiran yang secara historis sudah baku atau mapan (agama sebagai ideologi), kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan pokok manusia dan masyarakat modern yang telah dikemukakan pada bab Permasalahan- Permasalahan Pokok, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada satu pun agama di dunia ini yang telah cukup sempurna mampu menjawab atau memberikan jalan keluar bagi seluruh permasalahan yang ada atau diramalkan akan terjadi dalam masyarakat modern sekarang ini maupun masa yang akan datang. Asumsi seperti itu boleh jadi merupakan gugatan bagi paham-paham secara simplistis menyatakan bahwa agama adalah serba meliputi dan serba sempurna. Tetapi dengan beberapa dasar pikiran, tidak perlu hal tersebut diartikan sebagai pelecehan terhadap kebenaran konsep-konsep normatif agama. Dasar pikiran yang terutama untuk menjustifikasi gugatan di atas adalah bahwa pada tahap kontekstualisasinya konsep-konsep normatif agama sebagai simbol-simbol profetis (pewahyuan) memerlukan pemahaman akal manusia yang samasekali terbatas,

baik segi pencerapan akal itu sendiri secara intrinsik maupun berhubungan dengan konteks ruang-waktu kehidupan manusianya.

Konteks kehidupan kontemporer dan kemungkinan juga untuk masa-masa selanjutnya tidak dapat dan memang tidak perlu dilepaskan dari sains dan teknologi. Permasalahan-permasalahan yang timbul berhubungan dengan sains dan teknologi tidak boleh dimengerti bahwa sains dan teknologi samasekali tidak bermanfaat (mudharat) bagi kehidupan. Kita harus menganalisis kembali kesalahan-kesalahan kita dalam filosofi memperlakukan dan mempergunakan sains dan teknologi dalam kehidupan kita.

Berhubungan dengan pernyataan tersebut, maka agama di jaman modern dan masa depan harus mampu mengambil selain kebenaran-kebenaran sains dan teknologi dalam menjelaskan kenyataan-kenyataan, juga segi positif sifat kharismatik ilmu pengetahuan, yaitu sifat revolusioner dalam usaha menemukan kebenaran dan serba terbuka cara serta prosedurnya. Ilmu pengetahuan bisa dijadikan penjelasan-penjelasan bagi *positive statement* yang terkandung dalam konsep normatif agama (pernyataan-pernyataan tentang 'yang ada' atau aspek-aspek fenomenal dari alam dan kehidupan manusia).

Kemudian menyangkut faktor eksistensial kehidupan manusia, baik secara individual maupun sosialnya, agama harus mampu merekapitulasi kegagalan-kegagalan sikap hidup atau falsafah materialisme-rasionalisme dalam membahagiakan manusia dan untuk selanjutnya mampu memberikan alternatif-alternatif sebagai jawaban. Tanpa kemampuan ini agama hanya akan berfungsi sebagai obat pelarian semata (terapi simptomik), ditengok secara sepintas lalu ditinggalkan kembali.

Itulah sebagai pengantar bagi tema pokok yang dimaksudkan untuk bab ini. Kini akan disebutkan secara umum kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh agama agar relevan dengan moral pokok jaman modern. Perlu diingatkan berkaitan dengan hal tersebut, bahwa disini tidak dimaksudkan sebagai mendiktekan keinginan-keinginan manusia terhadap agama, tetapi mengkerangkakan atau menempatkan agama sebagai pedoman abadi kehidupan manusia yang tentunya menampung segenap persoalan-persoalan moralitas yang telah, sedang dan akan ada atau terjadi sampai akhir jaman nanti.

Kriteria-kriteria tersebut dikutip dari pendapat filsuf Amerika Serikat, Alfred North Whitehead, yaitu seperti di bawah ini:

1. Agama yang mampu menjadi sumber visi dan motor perjuangan. Pada kenyataannya karena terlalu menekankan fungsinya sebagai penjaga atau pengatur hidup moral, agama seringkali bukannya menjadi sumber visi ke depan dan motor perjuangan yang memberi keberanian untuk bertualang dan mengambil resiko, melainkan sebagai sumber kekolotan. Oleh karena itu kehidupan modern yang mempunyai semangat modernitas dan avonturisme tidak akan memberi nilai yang tinggi terhadap dogmatisme dan konservatisme.

2. Agama yang mampu memberikan rasa damai. Dalam hal ini agama harus mampu menyediakan dasar yang memberi jaminan bahwa perjuangan yang tidak kunjung habis untuk menyempurnakan hidup di dunia ini, tidaklah sia-sia. Seperti telah disinggung di muka bahwa penderitaan manusia modern adalah akibat krisis eksistensial yang berkaitan dengan ketiadaan makna kebahagiaan yang langgeng. Agama harus mampu menyediakan jawaban atas kerinduan eksistensial tersebut untuk bisa memberikan rasa damai (J.Sudarminta, filsafat Proses, 1991).

******

Sebagai respon terhadap permasalahan dalam bab ini; bagaimana hubungan yang paling mungkin antara dua kekuatan umum yang amat mempengaruhi kehidupan manusia, ilmu pengetahuan dan agama, bab selanjutnya akan mencoba mempertimbangkan ide Kuntowijoyo, yang menyatakan bahwa antara pandangan dunia (agama) dengan teori sosial (ilmu) terdapat hubungan. Teori-teori sosial menurutnya dibangun atas dasar paradigma (Kuhn), skema konseptual (Kant), ideologi (Marx), atau cagar bahasa atau Wittgenstein (Kuntowijoyo, Paradigma Islam, 1991). Oleh karena itu ada kemungkinan untuk mengupayakan teori sosial alternatif berdasarkan pandangan dunia Islam, yang disebutnya sebagai ilmu sosial profetis.

### Hambatan Penerapan Konsep Normatif Islam

Ada suatu hipotesis yang menyatakan, bahwa konsep teoritis ilmu pada perkembangannya dapat menjelma menjadi ideologi. Ideologi disini dalam pengertiannya yang paling longgar, yaitu prinsip yang mendasari tingkah laku seseorang atau suatu bangsa didalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Oleh karena itu kebalikan dari fenomena tersebut mungkin terjadi; konsep normatif Islam (yang merupakan ideologi) dapat ditransformasikan menjadi teori-teori.

Dasar ontologis Islam adalah kehidupan, obyek atau tema maha besar yang menampung sekaligus hal-hal dan kejadian-kejadian yang fenomenal dan ajaib. Jadi tidak melulu memperhatikan yang terindera, tetapi juga yang transendental. Sedangkan ilmu berobyek hal atau kejadian-kejadian yang bersifat empiris, yang terindera semata. Dari kondisi tersebut tersirat keharusan mengobyektifikasi wilayah transformasi apabila konsep normatif Islam hendak ditransformasikan menjadi teori-teori. Hanya yang fenomenal yang secara relatif dapat ditransformasikan. Yang transendental di luar jangkauan ilmu.

*******

Secara kronologis, pertanyaan yang pertama kali perlu kita jawab berhubungan dengan bagaimana menerapkan konsep normatif Islam adalah mengapa konsep normatif Islam belum juga bisa diterapkan? Ada banyak jawaban bagi pertanyaan tersebut. Yang pada akhirnya berujung pada fenomena stagnasi atau kemandegan yang menimpa kehidupan beragama. Ini terungkap, misalnya dari sikap konservatisme dan sikap defensif kaum agamawan dalam menghadapi perubahan-perubahan masyarakat yang diakibatkan oleh perkembangan sains dan teknologi. Berhubung demikian konsep normatif Islam dalam pengertiannya sebagai upaya-upaya dan hasil- hasil historis (klasik maupun kontemporer) dari ijtihadz menjadi tidak kontekstual, membuat kehidupan individual dan sosial manusia (Muslim) kontemporer menjadi arena perebutan pengaruh antara kemajuan dan modernitas, yang diklaim sebagai hasil gemilang rasionalisme dan materialisme, dengan konservatisme dan absolutisme dogmatis, yang dituduhkan dan pada kenyataannya memang benar merupakan sikap dan perjuangan sebagian besar pemikir atau tokoh-tokoh agama. Yang satu menyuruh manusia hidup di hari ini dan masa depannya, yang terakhir seolah-olah menyuruh manusia hidup ke masa lalu. Yang satu sains dan terknologi, yang lain moralitas, dan dogma-dogma. Yang satu sosialisme-materialisme, yang lain individualisme-agama.

Dari kondisi dan gejala itulah sebetulnya terjadi dikotomi mutlak ilmu

dan agama dalam kehidupan kontemporer, yang kelanjutan logisnya menimbulkan apa yang terkenal dengan: sekularisme. Agama menjadi spasial, terpisah dari unsur-unsur kehidupan sosial dan kenegaraan.

Hal seperti itu sebetulnya tidak harus berpengaruh banyak terhadap Islam, selain fenomena tersebut merupakan khas responsi Barat (negara-negara Eropa) terhadapnya sejarahnya yang setelah munculnya rasionalisme merupakan saat-saat pertarungan hebat antara dua ekstrimitas; gereja dan materialisme, yang kedua- duanya pada tingkat aro-gansinya ingin saling meniadakan. Juga etiket keilmuan dan modernitas telah melekat pada kehidupan sosiologis Islam dari sejak awal keberadaannya. Ilmu adalah Islam, jika merupakan avonturisme dalam wilayah fenomenal untuk mencapai Tauhid (Meng-Esakan Tuhan). Islam tanpa ilmu adalah Islam yang tereduksi menjadi sekedar agama, padahal Islam adalah cara hidup total mencakup agamawi dan duniawi. Oleh karena itu pemahaman secara filosofis dalam pengertiannya yang paling kasar, menurut Alija 'Ali Ijetbegovic dalam bukunya "Membangun Jalan Tengah: Islam antara Barat dan Timur", Islam adalah materialisme dalam persfektif umum agama dan adalah agama dalam persfektif materialisme. Islam adalah jalan tengah, jalan keseimbangan. Keseimbangan itu tergambar dalam keseluruhannya. Yang paling sempurna dicontohkan dalam shalat, ibadah yang tidak melulu rohani, tetapi mewajibkan terpenuhinya aspek-aspek duniawi. Tidak ada shalat tanpa kebersihan fisik (wudlu) dan gerakan-gerakan fisik (sebagian rukun shalat). Ada ilustrasi sederhana namun menarik tentang ini, yaitu pengalaman Leopold Weiss, setelah masuk Islam bernama Muhammad Asad. Ketika melihat kaum muslimin shalat berjamaah di suatu desa Afganishtan, ia bertanya kepada Imam desa itu, "Apakah Tuan sesungguhnya percaya bahwa Tuhan menghendaki supaya Tuan-tuan memperlihatkan kehormatan kepadaNYA dengan berulang-ulang ruku' dan sujud kepadaNYA? Tidakkah lebih baik apabila hanya melihat ke dalam hati dan menyembahNYA secara diam-diam?" Imam desa itu menjawab, "Betapa pula kami harus menyembah Tuhan? Bukankah DIA menciptakan manusia dalam bentuk jasmani dan ruhani? Dan karena itu, tidak patutkah orang menyembah DIA dengan ruhani dan jasmani pula? (M.Hashem, Islam Rasional, 1991).

Kembali ke tema pertanyaan di atas, konsep normatif Islam karena merupakan ideologi mempunyai unsur-unsur utama atau ciri- ciri pokok mengandung usaha mengarahkan masyarakat untuk menerima secara yakin perangkat paham serta rencana kerja yang diturunkan dari perangkat paham tersebut dan ada usaha untuk menjangkau lapisan masyarakat seluas mungkin, maka diperlukan tafsiran dan penjelasan-penjelasan. Penjelasan-penjelasan yang menyangkut wilayah fenomenal sangat relevan dengan pemakaian konsep-konsep teoritis ilmu. Dasar pembenarannya ialah bahwa berfikir secara keilmuan mengandung maksud menghilangkan cara-cara berfikir mitis, superstition (percaya takhyul-takhyul) dan mitologis atau dogma-dogma artifisial, yang kesemuanya itu wajib dihindari dalam etika berfikir monoteistik.

Perlu dipahami juga ilmu disini adalah pada tahapnya sebagai proses yang tiada henti *(unfinished project)*. Karena apabila ilmu itu dipahami sebagai hasil akhir, akan menimbulkan kecenderungan bahwa konsep normatif Islam dapat diragukan kebenaran absolutnya. Suatu konsep teoritis ilmu tidak boleh secara ketat dijadikan tafsiran atau penjelasan yang mutlak dan komprehensif dari nash atau hadits. Dalam Al-Quran surat Al-'Alaq 6-7, Tuhan berfirman: *Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena melihat dirinya serba cukup.*

Ilmu pada tahapnya sebagai hasil mengandaikan adanya asumsi-asumsi generalisme, statisme dan determinisme dari obyek-obyek empiris. Jadi terdapat proses simplifikasi yang ketat dan analogi-analogi yang mungkin tidak relevan, misalnya mendefinisikan manusia sebagai hewan dengan bermacam diferensia atau profiumnya (ciri pembeda dan ciri khusus). Contohnya, manusia sebagai hewan berakal, berbudaya, berpolitik dan lain- lain. Mengidentifikasikan manusia dengan hewan walaupun disertai penambahan predikabelitasnya adalah satu spekulasi yang besar. Dan karena menyangkut konsep normatif Islam, spekulasi tersebut mempertaruhkan luas lingkup dan kedalaman kebenaran fakta-fakta dan Kehendak Tuhan.

**Menuju Penerapan Konsep Normatif Islam**

Sebelum sampai ke masalah penerapan, perlu diadakan beberapa penegasan dan pelurusan me- nyangkut hubungan antara Islam dan ilmu. Diantaranya yang terutama adalah pentingnya mendamaikan kembali avonturisme keislaman dengan ilmu yang pada perjalanan sejarah selama ini bergerak saling menjauhi, kemudian keduanya harus berupaya kuat saling membantu dan memperlengkapi. Apabila itu tercapai, identitas Islam yang tepat tidak memisahkan yang fenomenal dari yang transendental akan kembali sempurna. Ini sejalan dengan pemikiran Whitehead, bahwa salah satu masalah yang penting dan perlu ditanggapi oleh generasi manusia abad ini adalah masalah hubungan antara sains dan agama. Dikutipkan darinya: Bila kita memikirkan apa itu agama bagi umat manusia, dan apa itu sains, bukanlah suatu hal yang dibesar-besarkan untuk mengatakan bahwa jalannya sejarah masa depan akan tergantung dari keputusan generasi sekarang ini tentang bagaimana hubungan antara keduanya (J.Sudarminta, op. cit).

Keduanya, penting untuk memahami ilmu sebagai hasil pencerapan akal (intelek dan intuisi) yang bersifat relatif dibandingkan dengan konsep normatif Islam sebagai wahyu (nilai-nilai profetis baik yang langsung maupun tidak langsung) yang bersifat mutlak. Pemahaman bersifat masa atau kontekstual dibandingkan dengan keabadian. Hal ini menyangkut kelebihan dan kekurangan ilmu dalam menjalain kebenaran. Dalam sebuah sajaknya Maulana Iqbal mengatakan:

Beta mengeluh atas
ketamakanMU, O-Tuhan!

Kau simpan keseluruhan ruang dalam
DiriMU

Dan KAU batasi aku dalam tiga dimensi

(Miss Luce-Claude Maitre, Pengantar ke Pemikiran Iqbal, 1989)

Ketiga, konsep-konsep normatif Islam harus dimengerti dalam konteksnya (pemahaman kontekstual nash-nash atau hadits) dan dimengerti secara kaaffah dengan kontradiksi-kontradiksinya (kontradiksi harafiah). Ini untuk menghindari dua kutub ekstrim penafsiran; pemahaman terlalu harafiah atau penta'wilan yang sewenang-wenang terhadap nash-nash Quran atau Hadits dan mereduksi maksud-maksud kebenaran sehingga Islam disudutkan ke pola pikir ekstrim.

**Tafsiran dan Penjelasan Keilmuan**

Seperti telah disebutkan, antara avonturisme keislaman dengan ilmu dalam kenyataan sosiologis bergerak saling menjauhi. Sebagian besar masyarakat kontemporer yang paling merosot dipandang dari sudut peradaban, keilmuan sebagai kultur dominannya, adalah masyarakat muslim. Antara avonturisme keislaman dengan ilmu terdapat jurang sangat dalam yang memisahkan keduanya. Untuk menimbun jurang tersebut bukanlah pekerjaan kecil dan gampang. Diperlukan kreatifitas yang berwawasan dan bersungguh-sungguh, serta kesabaran bertahan dalam waktu yang panjang.

Warisan keilmuan sudah tidak terhitung lagi kuantitasnya dan ketinggian kualitasnya. Untuk menyeleksinya secara detil dan akurat, kemudian menjadikan tafsiran atau penjelasan konsep-konsep normatif Islam tidak dapat dipenuhi oleh tulisan ini. Ini karena disamping kompleksitas tema yang terkandung dalam keseluruhan konsep normatif Islam, juga pengetahuan penulis untuk melakukan usaha tersebut belum memadai. Hanya sebagai contoh sederhana disingkatkan disini telaah Kuntowijoyo tentang "Paradigma Islam tentang Transformasi Sosial":

Paradigma penting yang berkaitan dengan transformasi sosial dapat ditemukan pada Durkheim, Weber dan Marx. Persfektif Islam lebih dekat pada paradigma Durkheimian ketimbang pada dua lainnya. Konseptualisasi transformasi sosial adalah hubungan kausal, dimana struktur budaya menentukan struktur sosial; dan selanjutnya: struktur sosial menentukan struktur teknik. sentimen kolektif menentukan diferensiasi struktural, kemudian, diferensiasi struktural menentukan kepemimpinan. Kerangka ini digunakan untuk membaca Islam bahwa kepemimpinan atau kekuasaan dalam Islam ditentukan oleh umat (keluarga, jama'ah, atau komunitas); sedangkan, umat ditentukan oleh sistem nilai atau kesadaran normatif. Karena itulah, transformasi sosial harus diawali dengan rekayasa terhadap struktur budaya, yang dalam Islam adalah Iman, atau sistem nilai tauhid. Dengan kata lain, perubahan keimanan masyarakat akan berpengaruh terhadap struktur umat; pada gilirannya, perubahan struktur umat akan berpengaruh terhadap kepemimpinan umat (Saiful Muzani, Islam Dalam Hegemoni Teori Modernisasi, Prisma no 1 th xxii,1993).

Sampai sejauh ini telah dikemukakan hubungan yang paling mungkin antara ilmu dan agama. Untuk mengaitkannya dengan diskursus mengenai transformasi sosial keagamaan, di bawah dibahas peran ulama sebagai agen perubahan sosial yang penting bagi masyarakat Indonesia.

**Peran Sosial Politis Ulama Yang Telah Ada dan Yang Dicita-citakan**

Ketika Khomeini mendapat ejekan sebagai seorang 'Kyai Politis', dia mengatakan: "Tidakkah Nabi SAW itu seorang tokoh Politik ? (Edward Mortimer, Islam dan Kekuasaan,1994) Ulama dalam pengertian umum orang saat ini telah cenderung menyempit sekedar sebagai orang-orang yang hanya mengurusi masalah ritualistik dan dogma-dogma agama saja. Diluar itu ulama tidak mempunyai kewajiban apa-apa. Oleh karena itu ejekan terhadap Khomeini seperti disebutkan di atas menjadi bisa dimaklumi adanya. Tetapi apakah kebenarannya seperti itu?

Ulama secara etimologis berarti orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mempunyai pengetahuan lebih. Dalam muatan primordialnya ulama tidak dibedakan sebagai seorang yang mempunyai pengetahuan agama atau non agama seperti terjadi belakangan ini. Ulama adalah orang-orang yang mengerti kehidupan baik yang agamawi maupun duniawi, seperti bisa dilihat dalam kenyataan sejarah abad keemasan Islam, dimana tokoh-tokoh agama (pemikir-pemikir agama) sekaligus juga sebagai tokoh-tokoh dalam bidang-bidang yang dipandang non agama (duniawi). Diantara mereka ada yang merupakan ahli kimia, kedokteran, sosiologi, ilmuwan- ilmuwan eksakta dan lain-lain. Pengertian ulama tersebut relevan dengan apa yang disebutkan oleh M. Dawam Rahardjo dalam bukunya "Intelektual, Intelegensia, dan Perilaku Politik bangsa; Risalah Cendekiawan Muslim", yaitu seperti disingkatkan dibawah ini:

Saya menafsirkan, bahwa "ulama" disini bukan hanya para ahli agama yang menguasai fiqih dan ilmu-ilmu keislaman tradisional, tetapi juga ahli ilmu pada umumnya, sepanjang mereka menjiwai ilmunya dengan pesan-pesan Al- Quran dan Sunnah Rasul. Dengan kata lain, dalam derajat yang berbeda-beda, para cendekiawan Muslim, setidak-tidaknya merupakan bagian dari ulama. Oleh sebab itu, para cendekiawan Muslim dapat disebut juga sebagai pewaris nabi, sepanjang mereka itu berjuang untuk membawa risalah nabi (M.Dawam Rahardjo, Jurnal Islamika no 1,1993).

Perkembangan kemudian yang menyebabkan terjadinya isolasi peran ulama dalam bidang-bidang sosial politis merupakan perkembangan yang tidak disengaja dikarenakan berbagai hal. Untuk Indonesia fenomena tersebut, menurut beberapa sosiolog agama (misalnya: Clifford Geertz dan Nurcholis Madjid) adalah sebagai akibat dari kenyataan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia diperkirakan terjadi pada saat kemundurun peran sosial politis Islam dalam kehidupan masyarakat dan kenegaraan, tekanan kaum kolonial dan kekuatan politik kelompok abangan setelah Indonesia mencapai kemerdekaan. Memang di awal-awal tahun kemerdekaan peran sosial politis Islam meningkat, tetapi untuk selanjutnya karena terjadi salah perhitungan dari pejuang-pejuang dan aktifis- aktifis sosial politis Islam sendiri dan banyaknya desakan serta kecurigaan dari pihak luar, terutama kaum abangan, peran tersebut merosot secara drastis. Pada puncaknya kemudian dialog yang tidak menguntungkan Islam terutama secara politis tersebut memunculkan strategi gerakan yang dikenal secara retoris "Islam Yes, Partai Islam No!"

Sekarang untuk lebih baiknya, para pejuang dan aktifis gerakan sosial Islam tidak perlu lagi menderita historisisme, berlarut- larut meratapi kesalahan-kesalahan dan kelemahan-kelemahan dalam sejarah. Toh pada kenyataannya, kegagalan-kegagalan masa lalu yang dialami ternyata selalu membawa suatu berkah tersembunyi *(blessing in disguise)*. Sedikitnya gerakan sosial Islam bisa lebih berhati-hati, efektif, efisien dan berwawasan luas. Kehidupan sejarah pertengahan orde baru di Indonesia mungkin lebih dapat menerima apa yang bisa disebut sebagai politik muslim, gerakan kulturalisme Islam; mengembangkan kualitas komunitas Islam, daripada politik Islam, gerakan strukturalisme Islam; kekuatan partai politik Islam.

Dengan segala keterbatasan dan keleluasaan yang terdapat dallam strategi gerakan politik muslim, ulama harus mendapatkan banyak pelajaran untuk meningkatkan peran positifnya. Ini supaya tidak terjadi lagi salah perhitungan dan berpikir secara picik dalam bergerak. Hanya mengagungkan niat saja, tanpa memperhitungkan cara atau strategi yang

tepat dalam mewujudkan niat baik tersebut adalah langkah mundur yang mungkin akan mengkambuhkan kembali ketakutan traumatis terhadap Islam.

Selama ini ulama telah cukup berhasil mempertahankan besarnya komunitas Muslim secara kuantitatif. Sekarang yang diperlukan adalah pendekatan baru, dimana komunitas Muslim kualitasnya meningkat, kaum santri harus diusahakan lebih besar jumlahnya daripada kaum abangan (kalau kita mau memakai term yang diajukan Clifford Geertz). Dan kesadaran ulama harus segera dikembalikan kepada kesadaran primordialnya, bahwa ia disamping sebagai tokoh di bidang agamawi juga harus menjadi tokoh gerakan sosial duniawi. Dalam buku "Islam dan Kekuasaan", Edward Mortimer mengisyaratkan tentang ini dengan menghubungkannya dengan Qur'an surat Ali Imron ayat 110:

Tugas seorang muslim bukan semata-mata membantu orang yang membutuhkan bantuan, melainkan membangun masyarakat yang baik dimana hukum Tuhan diberlakukan. Al-Qur'an memerintahkan kepada mereka: "Kalian adalah umat terbaik yang diturunkan di lingkungan manusia, yang mendorong kepada kebaikan dan melarang kejahatan, dan beriman kepada Allah." Dengan mandat Ilahi semacam itu, tanggung jawab politik tidak mudah dihindari (Edward Mortimer, op. cit).

Untuk memenuhi harapan seperti itu disyaratkan adanya kepekaan sosial ulama terhadap kehidupan yang melingkupi dan mempengaruhi sekitar ummahnya. Tanpa kepekaan sosial itu bisa terjadi dua kemungkinan yang tidak diharapkan, yaitu:

1. Agama yang dikhutbahkan cenderung menjadi sesuatu yang tidak fungsional. Agama yang menjadi atribut kesalehan pribadi; dan tidak pernah menjadi kekuatan yang dapat memotivasi terjadinya perubahan sosial untuk memperbaiki situasi obyektif ummatnya. Dalam kaitan ini, agama lalu mengalami isolasi struktural, yaitu nama lain dari sekularisasi.

2. Secara politis, karena kelas mustadh'afin dan golongan dhu'afa "ditinggalkan" oleh agama, bukan tidak mungkin mereka direkrut oleh gerakan-gerakan sosial lain yang mempunyai program yang jelas untuk memperbaiki nasibnya yang bisa jadi gerakan-gerakan sosial lain itu merupakan kekuatan-kekuatan anti agama (Kuntowijoyo, op. cit).

**Transformasi Sosial Yang Islami**

"Inilah mu'jizat Islam, ia membinasakan berhala, dan inilah tragisnya orang-orang muslim, mereka membuat agamanya menjadi berhala. Mereka yang terbuka bagi dunia modern dirugikan imannya, sedang mereka yang terbelenggu pada formalisme jumud membanggakan dirinya sebagai muslim sejati (Edward Mortimer, Op. cit).

Kutipan di atas adalah komentar Ayyub Khan atas masyarakat Muslim Pakistan yang kolot, yang kalau diamati secara seksama mungkin kenyataannya bisa jadi lebih meluas; lukisan di atas mengenai keseluruhan komunitas muslim yang ada di dunia. Mereka (ic. ulama) yang terbuka bagi dunia modern seringkali dicurigai, seolah-olah dunia modern adalah tanah larangan yang samasekali wajib dihindari. Transformasi sosial menuju kemodernan pada akhirnya pun tidak lepas dari kecurigaan-kecurigaan sebagian besar orang muslim. Padahal terlepas dari keyakinan seperti itu mereka mau-tidak mau harus ikut terlibat pula dalam proses transformasi sosial tersebut, karena merujuk pada pendapat Nurcholis Madjid, kemodernan atau modernitas disamping merupakan hal yang tak terelakkan juga merupakan pula keharusan sejarah *(historical necessity)*. Apakah modernitas sebuah fitrah? Banyak hal yang bisa membenarkannya, terutama kalau kita melihat kembali sejarah ilmu ppengetahuan; modernitas adalah salah satu item proses pewarisan dan pengembangan lebih lanjut ilmu pengetahuan, yang secara garis besar terangkai dari mulai jaman Yunani ke Islam kemudian Barat. Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat diambil satu silogisme, bahwa kalau Islam kontemporer menghindari modernitas, ia telah berjalan di luar fitrah; ia meninggalkan keharusan sejarah. Dan konsekuensi terburuknya bisa dilihat abad-abad terakhir ini, Islam menjadi ideologi dan *'way of life'* marjinal, bahkan hampir tersingkirkan di antara dua posisi ideologis ekstrem kapitalisme dan sosialisme. Untuk memperbaiki dan mengembalikan semangat modernitasnya, Islam perlu menghayati kembali kefitrahannya, dimana inklusifitas terhadap sejarah adalah syarat pokoknya.

**Penutup**

Mempertimbangkan masalah transformasi sosial di Indonesia dengan persfektif khasanah pemikiran keagamaan, menghadapkan berbagai potensi dan kecenderungan baik yang positif maupun negatif. Hal ini wajar karena setiap perubahan atau pemunculan fenomena baru tentu menghadirkan pula harapan-harapan dan tantangan-tantangan baru. Menggejalanya perkumpulan cendekiawan keagamaan misalnya. Sementara pendapat memandangnya sebagai hal yang positif sehingga konstruktif. Pendapat lain memandangnya sebagai hal yang negatif sehingga destruktif terhadap perkembangan bangsa Indonesia. Mana yang dapat dinilai secara pasti belum ada contoh-contoh aktualnya.

Tulisan ini sebagai pengantar bagi dialog yang masih terbentang jauh, tidak berpretensi memberikan sebuah kajian yang mencukupi perihal hubungan dialekstis antara ilmu pengetahuan (sains) dan khasanah keagamaan, dalam hal ini adalah konsep normatif keagamaan dan peran ulama sebagai agen transformasi sosial yang menjembatani dialektika yang terjadi antara ilmu dan agama dengan kehidupan ummat. Dengan mengemukakan potensi-potensi positif dari semua aspek yang sengaja dituangkan dalam tulisan ini bertujuan khusus membangkitkan kembali agama dalam proses transformasi sosial, sehingga agama seperti dijelaskan oleh Roger Geraudy tidak lagi menjadi apologi, menjadi ideologi justifikasi, tetapi sebagai metode pengambilan jarak *(detachment)* secara kritis dari yang sudah baku, suatu instrumen untuk mencari dan membuat kemungkinan-kemungkinan baru (Ashgar Ali Engineer, Islam dan Pembebasan, 1993).

Pengenalan terhadap ilmu, agama dan peran intelektualnya pada gilirannya tentu akan sangat membantu pula perjuangan secara serius problem bipolaritas spiritual-material kehidupan manusia kontemporer dengan menyusun kembali tatanan sosial menjadi tatanan yang tidak eksploitatif, adil dan egaliter. Suatu kehidupan yang dimudahkan oleh bantuan sains dan teknologi, dan diarahkan oleh kebenaran agama.

# Pendidikan Berorientasi Nilai

**Berbicara tentang sumber daya manusia yang berkualitas, maka sangatlah erat kaitannya dengan masalah pendidikan. Sejauh manakah pendidikan kita mampu memberikan jawaban atas persoalan-persoalan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas?**

IwanSatriawan
Mhs. FakHukum UGM Ketua Komisi Pendidikan dan Penalaran SM UGM.

Seperti yang dicanangkan di dalam GBHN, pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJPT II) ini, titik berat pembangunan pada bidang ekonomi yang mendukung sektor industri. Yang perlu menjadi catatan adalah bahwa sektor industri tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Berbicara tentang sumber daya manusia yang berkualitas, maka sangatlah erat kaitannya dengan masalah pendidikan. Sejauh manakah pendidikan kita mampu memberikan jawaban atas persoalan-persoalan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas tersebut? Pertanyaan ini membutuhkan jawaban yang tidak sederhana seperti semudah membalikkan telapak tangan. Karena persoalan pendidikan adalah persoalan yang sangat komplek. Apakah kaitannya dengan dunia kerja, pengangguran, penguasaan iptek dan sumbangsihnya kepada pengembangan masyarakat.

Semakin pesatnya perkembangan peradaban manusia, kesadaran masyarakat akan pentingnya perolehan ilmu pengetahuan semakin tinggi pula. Ketatnya persaingan dalam mempertahankan kehidupan yang penuh tantangan, semakin menyadarkan masyarakat bahwa tidak ada peluang bagi orang yang tak berilmu untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Dalam masyarakat global dan industrial persaingan iptek sangatlah ketat. Indonesia dalam kancah ini, mau tak mau harus terus mencoba mengejar ketertinggalannya dari negara lain. Dan persoalan mendasar yang perlu segera dituntaskan dalam menjawab agenda-agenda di atas adalah bagaimana membenahi dunia pendidikan nasional kita.

**Pendidikan Berorientasi Iptek**

Sejarawan terkemuka, Arnold Toynbee mengatakan bahwa teknologi itu tidak bersifat netral. Teknologi di satu sisi dapat menimbulkan kemandirian, tapi di sisi lain juga dapat menimbulkan ketergantungan pada suatu bangsa. Dalam kontek ini, maka penyerapan iptek sangat ditentukan oleh masyarakat penggunanya.

Ilmu pengetahuan telah melahirkan produk teknologi yang memberikan kemudahan tertentu pada manusia. Tapi pertanyaan yang muncul, apakah iptek cukup memperbaiki kesusilaan manusia ? Apakah iptek justru akan menimbulkan masalah baru bagi masyarakatnya ?

Ada beberapa hal yang harus dihadapi masyarakat dalam transformasi teknologi. Teknologi yang tidak netral akan kepentingan membawa muatan ideologi, politik dan penetrasi kebudayaan. Pertanyaan yang mun-

cul adalah apakah masyarakat kita sudah siap dalam menghadapi alih teknologi tersebut ? Kenyataan dalam masyarakat tampaknya menunjukkan bahwa diperlukan beragam perubahan untuk menuju masyarakat industri. Diantaranya, dibutuhkan perubahan kultural dan perubahan sikap sosial. Mulai dari kesiapan hukum sampai kesiapan politis. Penahapan teknologi, dilihat dari aspek sumber daya manusia harus pula dibenahi. (Bisnis Indonesia, 13 April 1993).

Dari deskripsi di atas dapat dilihat bahwa persoalan alih teknologi bukanlah persoalan sederhana. Minimal ada beberapa resiko yang harus dihadapi ketika alih teknologi tidak diimbangi oleh penumbuhan nilai-nilai kritis masyarakat terhadap teknologi itu sendiri. Pertama, ketika masyarakat tidak kritis terhadap teknologi tersebut, maka masyarakat akan terjebak ke dalam suatu kondisi sistemik dari struktur global yang menjadi pusat dari teknologi tersebut. Kedua, implikasi dari alih teknologi tersebut yang tak terelakkan adalah transfer nilai dari nilai-nilai yang dibawa oleh teknologi tersebut ke dalam tatanan masyarakat yang menerima teknologi. Kondisi ini akan melahirkan destruksi nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat itu sebelumnya ke dalam sistem nilai baru yang meungkin asing bagi masyarakatnya. Apakah masyarakat sudah siap menghadapi perubahan sistem tersebut ? Apakah kita masyarakat Indonesia sudah betul-betul menyadari pilihan sikap yang kita ambil dalam mensikapi alih teknologi ini ?

Oleh karena itu, langkah terbaik yang mungkin dapat mengantisipasi persoalan-persoalan di atas adalah bagaimana kita dapat menata kembali struktur masyarakat kita ke arah yang anti dengan iptek. Tapi, sebagai bangsa yang ingin maju, penyerapan iptek harus diimbangi dengan sikap kritis terhadap iptek itu sendiri. Kesadaran dan kekritisan masyarakat akan iptek harus ditumbuhkan lebih dulu. Sehingga masyarakat kemudian tidak hanya menjadi penikmat-penikmat iptek dan sekrup-sekrup teknologi, tapi dapat menjadi aktor-aktor di bidang iptek.

Dalam hal ini, tugas dunia pendidikan adalah memberikan bekal kepada seseorang agar potensinya berkembang secara sehat, wajar, optimal dan bersifat adaptif. Sehingga sifat dasar manusia yang eksploratif dan kreatif bisa berkembang dan menemukan artikulasinya di dalam wadah pendidikan. Lulusan yang eksploratif dan kreatiflah yang harus diupayakan serta menjadi bahan antisipasi sistem dan perencanaan pendidikan apapun dan bagi bangsa manapun bila mereka ingin bertahan dalam persaingan dan maju. Tak terkecualai bangsa Indonesia. (Bisnis Indonesia, 3 Mei 1993).

Dalam penerjemahan konsep ini, barangkali di sini terjadi perbedaan antara Menristek Habibie dan Mantan Mendikbud Fuad Hasan. Perbedaan ini terletak pada orientasi dan tujuan pendidikan. Konsep Fuad Hasan tampaknya memandang pengembangan sumber daya manusia dari aspek pendidikan dan diorientasikan pada aspek nilai. Dengan asumsi, institusi pendidikan bisa memberikan arah atau pelajaran pada dunia pasar kerja, pendidikan bersifat bebas nilai atau tidak terkontaminasi nilai-nilai ideologi tertentu. Secara sosiologis, institusi pendidikan diharapkan bisa menjadi agen perubahan sosial.

Sedangkan konsep Habibie lebih menekankan pada kemampuan teknis individu keluaran pendidikan untuk beradaptasi dengan tuntutan teknologi dan industri. Institusi pendidikan dengan sendirinya tidak lagi bersifat netral, melainkan lebih sebagai instrumen dari golongan atau kelompok yang mendominasi modal dan pasar kerja. Lembaga pendidikan menjadi pabrik yang diharapkan dapat memproduksi manusia yang dibutuhkan oleh industri. Konsep Habibie sebenarnya mengantisipasi ketertinggalan dunia pendidikan yang cenderung kalah bersaing menciptakan teknologi dengan institusi di luar pendidikan. Artinya, perkembangan ilmu dan teknologi lebih pesat terjadi di luar lingkungan pendidikan.

Konsep Habibie ini, dalam taraf tertentu memang dapat memecahkan persoalan ketertinggalan dunia pendidikan akan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesatnya. Namun persoalan lain akan muncul, yaitu ketika ilmu pengetahuan dan teknologi sudah makin maju dan tenaga manusia secara nisbi sudah banyak tergantikan oleh teknologi industri semisal robot. Maka pada saat itu manusia akan termarginalisasi oleh teknologi, oleh lingkungannya yang arti fisial, lalu teralienasi dari lingkungan sosialnya, termasuk teralienasi dari dirinya sendiri. Artinya dalam praksis pendidikan yang hanya berorientasi pada penyerapan dan penghasilan iptek tanpa diiringi oleh penanaman akan hakekat iptek itu sendiri, hanyalah memecahkan satu masalah yang kemudian memunculkan masalah baru yang mungkin lebih sulit. Dalam hal ini, tampaknya perlu kita cermati kembali konsep yang dimiliki oleh Mantan Mendikbud Fuad Hasan bahwa pengembanagan sumber daya manusia hendaknya diarahkan untuk menciptakan kreativitas individu peserta didik dan produknya. Peserta dan produk pendidikan diharapkan dapat memiliki kemampuan berpikir kritis tentang fenomena sosial, ekonomi, politik di tempat ia berada dan sekaligus bertanggung jawab terhadap masyarakatnya. Misalnya melakukan perubahan kalau kondisi yang ada tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Ini berarti, pendidikan menekankan pada ketrampilan berpikir kritis bukan keterampilan praktis.

**Link and Match**

Bila terjadi ketidak sesuaian antara produk pendidikan dengan tuntutan dunia kerja, maka hal itu harus dikembalikan pada kenapa kemudian produk pendidikan tersebut tidak mampu secara mandiri membangun dunia kerja mereka sendiri ? Tanpa harus tergantung pada lapangan pekerjaan yang tidak memberikan kebebasan bagi mereka untuk meemilih ? Atau apakah itu tidak bisa dianggap sebagai ekspresi kebebasan bagi peserta didik untuk menentukan pilihan mereka sendiri ? Atau apakah tuntutan dunia kerja akan produk pendidikan yang siap pakai tersebut sebuah *conditio sine qua non* ? Kenapa tidak dibiarkan dunia pendidikan sebagai tempat mengolah pola pikir dan penanam nilai-nilai ?

Dari segi perencanaan, konsep Link and Match mau tidak mau mendorong penguasa pendidikan kita harus melakukan perencanaan pendidikan dengan model man power need approach. Di dalam pendekatan ini banyak pitfall (jebakan) yang dapat menyesatkan bagi para pengambil kebijakan. Pendidikan dianggap sebagai penghasil manusia-manusia yang terampil yang menguasai teknologi dan pengetahuan yang memang benar-benar dibutuhkan oleh sektor formal modern. Dari sini kita akan terjebak jika selalu memusatkan perhatian kita untuk kebutuhan tenaga kerja yang modern dari berbagai sektor formal (Kompas, 1 Mei 1993).

Pertanyannya, pendidikan harus dikaitkan dan disesuaikan (Link and Match) dengan kebutuhan teknologi masyarakat yang mana ? Jawabannya akan ditentukan oleh pertimbangan

politik, sosial, budaya dan ekonomi yang sangat kompleks.

Perbaikan sistem pendidikan dan perencanaan pendidikan bukan berarti pendidikan harus menghasilkan lulusan yang siap pakai, seperti yang diributkan orang. Kalau yang dimaksudkan dengan term siap pakai ialah kemampuan lulusan untuk mengenali dan menguasai semua permasalahan rutin, serta menerapkan ilmu yang dipelajarinya di sekolah, bukan tempatnya hal itu diajarkan di lembaga pendidkan formal. Yang patut diajarkan oleh lembaga pendidikan formal adalah memberikan bekal kepada anak didiknya agar memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi persoalan rutin di bidang yang dipelajarinya dan mengembangkan cara baru untuk mengatasi persoalan sejenis yang sudah berkembang derajat kualitasnya. (Bisnis Indonesia, Mei 1993).

Dengan sistem dan perencanaan pendidikan yang mampu memberikan bekal kemampuan berpikir kritis dan kemampuan menyesuaikan diri yang kuat, diharapkan lulusan pendidikan menjadi percaya diri dan punya jiwa mandiri. Kemandirian tersebut akan meningkat lebih cepat setelah mereka mendapatkan pengalaman praktis yang lebih banyak lagi di luar insitusi pendidikan formal.

Jadi, dari ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa tugas dunia pendidikan sebenarnya harus lebih diarahkan pada pengembangan kepribadian dari anak didik, menumbuhkan kedewasaan berpikir dan kemampuan menumbuhkan jati diri. Orientasinya tetap kepada aspek nilai. Kemudian, permasalahan tuntutan kebutuhan dunia kerja, untuk menempa kemampuan praktis dan keterampilan lulusan pendidikan harusnya diambil alih oleh sektor-sektor di luar instansi tertentu, kursus-kursus yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta. Pihak swasta dalam hal ini bisa mengambil peran yang lebih banyak dan harus mempunyai tanggung jawab dalam mengatasi persoalan peningkatan kemampuan lulusan dalam hal kemampuan praktis dalam bidangnya. Kemampuan pola pikir, kedewasaan, kepercayaan diri, jiwa mandiri yang dilengkapi oleh nilai-nilai mental yang baik membutuhkan proses. Dan proses itu membutuhkan waktu dan wadah yang kondusif. Sedangkan kemampuan praktis dapat diciptakan dalam waktu yang relatif lebih singkat. Artinya, biarlah pendidikan mengambil peran lebih dalam pengembangan nilai-nilai dan potensi kreativitas peserta didik.

Link and Match sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam dunia pendidikan. Dari dulu orang selalu mengeluh akan ketidaksiapan lulusan pendidikan ketika bekerja dan berimplikasi juga pada tingginya angka pengangguran golongan terdidik di Indonesia.
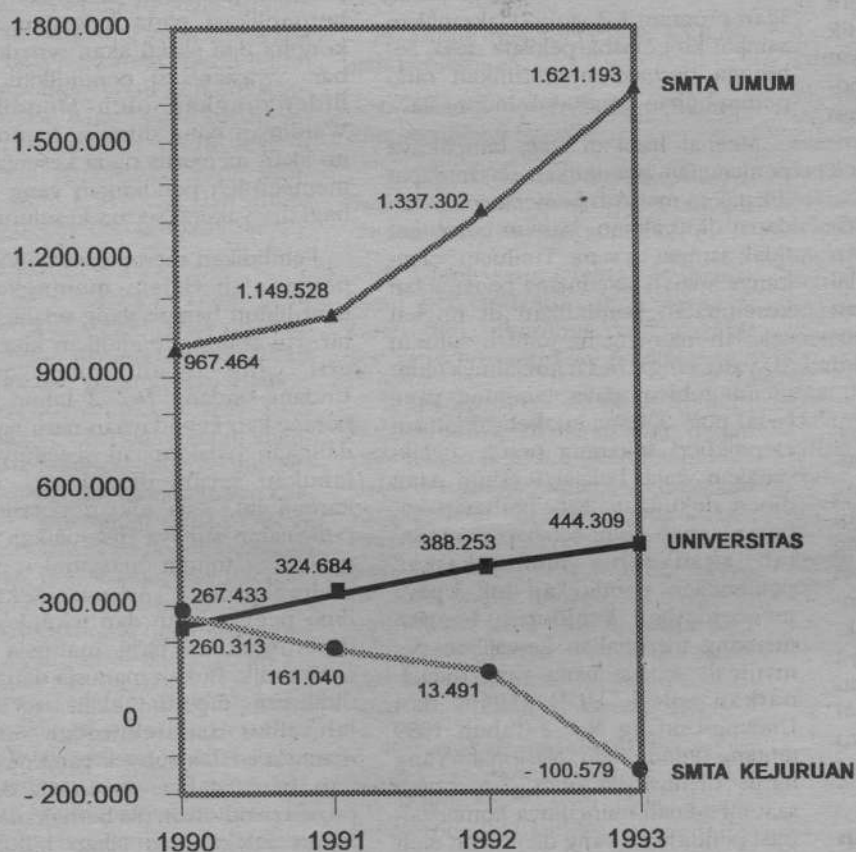
Sebenarnya, ketika permasalahan pengangguran itu muncul, maka tidaklah arif kalau hanya menyalahkan dunia pendidikan. Tapi harus dilihat juga faktor lainnya. Minimal ada 2 faktor yang bisa kita cermati. Pertama, faktor internal bahwa orientasi pendidikan kita sebagian besar adalah mencari kerja. Fenomena ini dapat kita lihat betapa orang tua lebih senang anaknya menjadi pegawai negeri. Ini juga tidak lepas dari aspek kultur masyarakat. Pendidikan juga belum mampu berbuat optimal dalam menumbuhkan kepercayaan diri, mental wiraswasta dan jiwa mandiri dari peserta didik. Dapatlah dibayangkan, bagaimana tidak akan terjadi pengangguran ketika orang yang mencari kerja rasionya tidak seimbang dengan jumlah orang berani membuka lapangan pekerjaan. Produk pendidikan tinggi sebenarnya harus mengambil peran yang lebih besar dalam mengatasi persoalan ini. Kedua, faktor eksternal, juga harus dilihat adalah, selama ini swasta belum

mampu mengambil peran yang optimal dalam pemecahan masalah pengangguran ini. Yang terjadi, swasta terlalu banyak menuntut pada produk pendidikan. Sementara swasta sendiri dapat melihat realita pendidikan Indonesia. Apalagi peran pemerintah yang kadang terbatas dalam penyediaan lapangan pekerjaan.

Konsep yang digelindingkan Depdikbud saat ini, seperti yang disampaikan oleh Dr. A. Watik Pratinya dalam Panel Forum BEM UGM 3 November 1993 lalu perlu kita cermati. Konsep antisipatif tersebut adalah bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi Perguruan Tinggi, maka ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh dunia pendidikan tinggi, yaitu kompetensi profesional, kompetensi adaptif, kompetensi kecendikiaan dan kompetensi nilai. Kompetensi profesional akademik menunjuk pada kemampuan untuk mengembangkan keahlian dalam bidang tertentu yang disertai dengan pengetahuan dan sikap yang relevan. Keahlian di sini maksudnya adalah keahlian dalam menguasai pengetahuan, ilmu dan teknologi, menejemen dan kemandirian. Kompensasi adaptif menunjuk pada kesiapan untuk menghadapi perubahan alam dan zaman. Dalam hal ini, peserta didik diharapkan dapat memahami hakikat perubahan dan mengantisipasi perubahan untuk seterusnya mampu berprestasi. Kompetensi kecendikiaan menekankan pada aspek kepekaan terhadap permasalahan kehidupan nyata dan mampu memberikan perhatian yang nyata akan nilai-nilai sosial. Dan kompetensi nilai melihat pada peningkatan kesadaran untuk hidup secara berbudaya dengan mengembangkan nilai- nilai agama, moral dan estetika.

Kalau dilihat dari konsep di atas, sepertinya Depdikbud mencoba memadukan konsep Fuad Hasan yang menekankan pada aspek nilai dan budaya dengan konsep Habibie yang menitikberatkan pada aspek ilmu dan teknologi. Sekarang kita tinggal mengamati secara serius apakah kebijaksanaan pendidikan kita khususnya pendidikan tinggi, betul-betul diarahkan pada keempat kompetensi tersebut. Berikan Depdikbud waktu dan kesempatan untuk membuktikannya.

**Demokratisasi dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan**

Berbicara tentang demokratisasi pendidikan, maka kita minimal akan melihat dua hal yaitu, pertama, kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dan kedua, hak untuk turut serta dalam menentukan kebijaksanaan pendidikan mana yang akan kita pilih.

Seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945, khususnya pasal 31, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan suatu sistem pendidikan yang mampu menjangkau seluruh lapisan rakyat Indonesia. Dengan kata lain, pemerintah dihadapkan pada pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan mencakup dalam dua pengertian. Pertama, tersedianya fasilitas pendidikan yang cukup sesuai dengan jumlah anak usia sekolah, termasuk pemerataan dalam arti geografis. Kedua, tersedianya kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menikmati jenis dan jenjang pendidikan yang diinginkannya.

Dari data yang ada diketahui bahwa lebih dari 95 % anak usia sekolah dasar sudah tertampung pada sekolah- sekolah yang ada, bahkan dibeberapa daerah angka tersebut sudah menunjukkan 99,5 %. Justru sekarang ada sekolah dasar (SD Inpres) yang mengalami kekurangan murid atau bahkan ditutup karena tidak ada murid. Ini mungkin karena keberhasilan program KB yang dilaksanakan sampai ke pelosok-pelosok desa. Sehingga berhasil menurunkan ratio pertumbuhan penduduk Indonesia.

Melihat hasil di atas, tampaknya pemerataan pendidikan dasar dapat dikatakan masalah pemerataan sudah dapat dipecahkan. Namun persoalan tidak sampai di sana. Tuntutan selanjutnya adalah bagaimana pemerataan kesempatan pendidikan di tingkat sekolah menengah. Jumlah lulusan SD yang sangat besar jumlahnya tentu membutuhkan daya tampung yang besar pula. Karena itu, kebijaksanaan Depdikbud sekarang untuk melaksanakan wajib belajar 9 tahun patut diberi dukungan. Kita berharap bahwa setahap demi setahap pemerintah akan terus meningkatkan pemerataan pendidikan ini. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, memang merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional. Yang harus diantisipasi oleh pemerintah saat ini adalah munculnya komersialisasi pendidikan yang dilakukan oleh pihak swasta tertentu. Sementara fenomena lain di dalam masyarakat menunjukkan bahwa dibeberapa institusi pendidikan negeri yang disubsidi oleh pemerintah, justru banyak diisi oleh golongan ekonomi menengah ke atas. Artinya, dalam hal ini pemerintah mensubsidi masyarakat yang sebenarnya tidak membutuhkan subsidi oleh karena itu untuk lembaga pendidikan negeri perlu juga mempertimbangkan faktor ekonomi masyarakat lemah yang secara potensial sebenarnya mampu. Persaingan dunia pendidikan cenderung hanya menguntungkan golongan ekonomi kuat. Karena kesempatan memperoleh pendidikan juga ditentukan oleh kekuatan ekonomi. Bagaimana mungkin masyarakat yang berekonomi lemah, dengan fasilitas yang sangat terbatas seperti buku, mengikuti bimbingan tes dengan uang yang cukup besar dan dalam kondisi gizi yang memprihatinkan mampu bersaing dengan golongan masyarakat yang mendapatkan fasilitas yang sangat mencukupi-untuk memperebutkan sebuah peluang yang sama. Kedua fenomena di atas, menunjukkan bahwa bagaimana kondisi ekonomi mempengaruhi tingkat pendidikan dan tingkat pendidikan berimplikasi pada kemampuan ekonomi. Artinya kalau pemerintah tidak dapat mengambil peran dalam hal ini, maka kesenjangan kesempatan memperoleh pendidikan yang berimplikasi pada kesenjangan ekonomi dan sosial akan semakin lebar. Swastanisasi pendidikan yang didengungkan oleh Mendikbud Wardiman patut dikritisi, karena hal itu akan menjurus pada kesenjangan memperoleh pendidikan yang layak bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pendidikan merupakan kewajiban pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup bangsa yang sejahtera lahir dan bathin. Pendidikan kita, seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1989 berasaskan kebudayaan nasional, sedangkan pelaksanaan sistemnya dilakukan secara demokratis. Oleh karena itu, asas tujuan pendidikan pengajaran supaya disesuaikan dengan asas tujuan masyarakat yang melingkupinya. Artinya, sekolah, ilmu pengetahuan dan teknologi itu diperuntukkan bagi manusia dan anak didik. Bukan manusia dan anak didik yang diperuntukkan bagi sekolah, ilmu dan teknologi. Sebab, manusia adalah subyek yang otonom dan bermartabat. Sehingga dalam proses pendidikan dia berhak menentukan seleksi dan sikap hidupnya sendiri. Tugas dunia pendidikan adalah membebaskan manusia dari kekacauan dan dog ma, agar manusia menemukan kebenaran sejati,

khususnya mengenai kebaikan dan kebajikan (Socrates).

Maka, demokratisasi pendidikan tidak hanya meliputi lebih banyak pengajaran bagi jumlah individu yang lebih banyak (pemerataan) saja. Akan tetapi, juga bagaimana agar lebih banyak orang yang ikut dalam menentukan kebijaksanaan dan pengurusan pendidikan. Artinya perbaikan sistem pendidikan tidak hanya menjadi urusan pemerintah dan para politisi saja, tapi menjadi urusan seluruh rakyat. Sebab, keinginan dan kehendak rakyatlah yang menjadi landasan konstitusional dalam penentuan politik pendidikan dan sistem pendidikan.

**Strategi Pendidikan Nasional**

Masa depan pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, cepatnya pertumbuhan masyarakat serta perekonomian; kedua, globalisasiyang cepat dalam bidang informasi, komunikasi dan tranformasi; ketiga kebutuhan tenaga terdidik pada berbagai tigkat pendidikan dan yang keempat tuntutan mutu tenaga pendidik. (Mimbar Pendidikan No. 2 tahun XI Agustus 1993).

Untuk mengantisipasi persoalan di atas, maka dibutuhkan suatu strategi pendidikan nasioanal yang terencana dengan baik. Strategi pendidikan harus dapat menyiasati perkembangan masyarakat yang begitu cepat. Sehingga diharapkan tidak terjadi kemubajiran pendidikan yang disebabkan oleh ketertinggalan mutu pendidikan dari tuntutan perkembangan masyarakat.

Dalam dua GBHN terakhir, yaitu GBHN 1988 dan 1993, jelas disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. GBHN 1988 menekankan pada peningkatan kualitas manusia Indonesia dipandang dari segi intelektualitas, moralitas dan keterampilan. Sedangkan dalam GBHN 1993 menekankan pada pemeratakan pendidikan dan kualitas pendidikan yang dapat menghasilkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri.

Kemudian, dalam tingkat kebijakan pendidikan, mau tidak mau kita memang tidak terlepas dari tuntutan perkembangan masyarakat global. Perubahan kurikulum secara periodik merupakan hal yang tak terhindarkan. Karena itu adalah tuntutan perkembangan masyarakat yang selalu berubah-ubah. Hanya saja perubahan-perubahan yang terjadi hendaknya jangan sampai mengorbankan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam pendidikan itu sendiri. Pendidikan yang hanya menuruti masyarakat global hanya akan melahirkan tukang-tukang profesional, jika tanpa diiringi dengan pemahaman prinsip dasar dan hakekat pendidikan tersebut.

Reformasi di bidang pendidikan harus bermakna bahwa masa depan pendidikan didasarkan pada perubahan waktu dan perkembangan masyarakat. Pendidikan harus mampu mendewasakan peserta didik agar mampu mengembangkan kemampuannya secar intelktual, budaya dan tidak menutup diri terhadap perkembangan dunia. Oleh karena itu dalam setiap tingkatannya pendidikan harus memiliki prinsip- prinsip sebagai berikut :

1. Untuk mengembangkan personalitas setiap peserta didik.

2. Untuk menumbuhkan dasar-dasar kejiwaan yang matang.

3. Untuk menumbuhkan kreativitas subjek didik kemampuan berpikir dan menumbuhkan jati diri.

4. Untuk menumbuhkan kesempatan yang terbuka dalam memilih masa depan.

5. Untuk memanusiakan lingkungan pendidikan.

6. Untuk meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

7. Untuk secara bertahap menyadari bahwa subjek didik adalah bagian dari masyarakat dunia.

8. Untuk secara bertahap memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berpikir secara *information oriented society*.

Prinsip-prinsip tersebut di atas, bukan hanya dilaksanakan dalam pendidikan sekolah, akan tetapi juga dalam berbagai sistem pendidikan yang selama ini berlangsung dalam masyarakat. Kenyataannya, peranan peningkatan mutu sumber daya manusia bukan hanya hasil tempaan pendidikan jalur formal, tetapi juga tidak kecil artinya pendidikan informal dan non formal (Mimbar Pendidikan, No. 2 tahun XI Agustus 1992).

Barangkali menarik apa yang dilontarkan oleh Mutrofin dalam Bisnis Indonesia 7 April 1993, bahwa format pendidikan ideal untuk Indonesia dewasa ini adalah kombinasi gagasan Fuad Hasan dan Habibie. Sebab, ketika proses tranformasi kebudayaan begitu ditekankan dalam pendidikan, yang terjadi adalah keterlambatan mengejar ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi. Sementara orientasi pendidikan yang terlalu menekankan pada sumber daya manusia padat modal yang syarat dengan keterampilan, menimbulkan kekeringan kemanusiaan pada peserta didiknya.

Yang paling penting diingat adalah bagaimanapun perubahan yang terjadi dalam masyarakat, apakah masalah pengangguran, ketidaksiapan lulusan pendidikan ketika memasuki dunia kerja, janganlah dijadikan alasan untuk segera mengadakan perubahan dalam dunia pendidikan. Hakekat pendidikan tidak bisa dikorbankan hanya untuk kepentingan sesaat yang dalam jangka panjang belum tentu memecahkan permasalahan secara global. Artinya, hakekat pendidikan sebagai wadah pengembangan pribadi, pematangan kedewasaan dan komitmen pada budaya dan peradaban haruslah merupakan hal substansial yang harus dipertahankan dalam dunia pendidikan.

Jadi, dalam penerapan strategi pendidikan nasional, dalam dunia pendidikan ada aspek yang harus selalu dipertahankan, yaitu aspek nilai, budaya dan peradaban yang mengakar pada kebudayaan nasional kita. Sedangkan untuk mengantisipasi ketertinggalan pendidikan dalam mengejar ilmu pengetahuan dan teknologi, maka peserta didik juga harus diberi bekal kemampuan dan keterampilan dalam penguasaan ilmu teknologi tersebut. Aspek ilmu dan teknologi inilah yang kemudian selalu mengalami perubahan atau penyesuaian seiring dengan perkembangan masyarakat. Dengan kata lain, penanaman nilai, budaya dan peradaban yang berorientasi pada kekritisan dan kedewasaan peserta didik, dalam dunia pendidikan harus tetap diberikan secara konsisten. Sedangkan dalam mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia pendidikan juga harus dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian.

# Menyoal Utang Luar Negeri Indonesia

**Indonesia sebagai negara berpendapatan rendah, sebenarnya telah menjadi "donor" bagi negara-negara kreditor**

Zaki M. Mansoer
Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UGM

Ramainya perbincangan mengenai masalah seputar utang luar negeri terasa tidak akan mereda. Utang luar negeri selalu akan menjadi topik yang hangat serta atraktif untuk dibicarakan, terutama mengenai membengkaknya jumlah kewajiban pembayaran cicilan utang dan bunga yang terus meroket. Menurut laporan Bank Dunia yang memaparkan lewat World Debt Tables 1992, Indonesia sekarang adalah negara peminjam ketiga terbesar di dunia. Dengan jumlah utang sebesar US$ 84 milyar, maka Indonesia hanya dibawah dua kampiun utang, yaitu Brasil (US$ 121 milyar) dan Meksiko (US$ 113 milyar). (Tabel 1)

Hal ini menunjukkan bahwa utang luar negeri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari data perekonomian Indonesia, karena utang luar negeri merupakan salah satu sumber dana pembangunan. Bahkan untuk mencapai posisi keseimbangan dalam struktur anggaran, utang luar negeri selalu dianggarkan dalam pos penerimaan. Tanpa komponen utang luar negeri anggaran pemerintah akan selalu defisit. Jadi sejak tahun 1969 sampai sekarang utang luar negeri selalu dibutuhkan untuk menutup defisit anggaran negara, yang berfungsi untuk pembiayaan pembangunan.

Sejak dua dekade terakhir, hutang luar negeri merupakan dana tambahan untuk mempercepat laju pembangunan Indonesia. Selama itu, pembayaran hutang luar negeri belum merupakan beban ekonomi nasional karena sebagian besar cicilan hutang masih terdiri dari pembayaran bunga pinjaman. Tetapi sejak beberapa tahun terakhir, cicilan pokok pinjaman harus mulai dibayar sehingga total cicilan jauh lebih besar daripada pinjaman baru setiap tahunnya. Dengan kata lain transfer netto modal keluar (*Net Resource Transfer*) semakin besar. Transfer modal keluar tersebut "dibiayai" dengan hasil dari pengetatan konsumsi dalam negeri dan pengeluaran pemerintah sehingga kemampuan keuangan pemerintah untuk membiayai infrastruktur dan investasi sosial semakin terbatas. Permasalahan pilihan antara kewajiban membayar hutang dengan tekanan untuk membatasi pengeluaran dalam negeri, dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan, akan menjadi persoalan ekonomi yang penting pada tahun-tahun mendatang.

### Good Borrowers: Indonesia?

Indonesia sampai saat ini dinilai oleh banyak kalangan internasional sebagai peminjam yang baik ("*good borrower*"). Prestasi itu diraih Indonesia karena Indonesia selalu memenuhi kewajiban membayar hutang dengan baik dan tepat waktu. Tidak seperti negara peminjam lainnya, Indonesia juga belum pernah meminta penjadwalan kembali (*reschedulling*) pembayaran hutang kecuali pada

awal Orde Baru. Disamping itu, beban pembayaran hutang Indonesia masih dinilai dalam batas-batas yang dianggap *managable*. Oleh sebab itu, prestasi Indonesia sering diperbandingkan dan dinilai sebagai jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara peminjam besar lainnya seperti negara-negara Mexico, Brasil dan Argentina.

Dengan istilah lain Indonesia tidak dianggap sebagai negara yang "sarat utang" tetapi hanya dianggap sebagai negara yang "berutang sedang". Secara otomatis Indonesia tidak dikhawatirkan mengalami *debt trap*. Banyak pakar mengisyaratkan bahwa predikat baik yang dilekatkan pada Indonesia justru dapat menjadi bumerang. Sesungguhnya kasus *debt crisis* yang dialami oleh Meksiko, Brasil dan Argentina terjadi karena mereka mengeluarkan pernyataan atas ketidakmampuan membayar hutang. Jadi penilaian *debt crisis* tidak dilihat dari beban hutang negara debitur maupun besarnya hutang, melainkan dilihat dari ketaatan suatu negara dalam membayar cicilan hutang tersebut. Dengan demikian, selama cicilan hutang dan bunga yang harus dibayar selalu dipatuhi oleh Indonesia, maka kita tidak akan disebut sebagai negara yang mengalami *debt crisis* dan lebih lucu lagi negara kita dipuji sebagai "good borrower" atau peminjam yang baik.

Ada beberapa alasan lain menurut Wing Tye Woo & Anwar Nasution (1985) yang menunjukkan bahwa perbandingan antara Indonesia yang disebut sebagai "*good borrower*" dengan negara-negara seperti Meksiko, Brasil dan Argentina sebagai "*bad borrower*" tidak tepat dan kurang relevan. Pertama, sebagai negara-negara berpendapatan menengah, Meksiko, Brasil dan Argentina dapat bertahan lebih baik dalam arti porsi penurunan pendapatan perkapita kalau terjadi *debt crisis* dibanding dengan Indonesia yang berpendapatan perkapita rendah. Kedua, struktur peminjaman Meksiko, Brasil dan Indonesia (*kepiye iki kok* Indonesia?) yang berbeda. Ketiga, pengalaman *debt crisis* negara-negara Amerika Selatan secara garis besar disebabkan oleh tingkat bunga internasional. Keempat, adalah bahwa ternyata proporsi hutang dengan GNP Indonesia lebih besar dari Meksiko. Dari Table 2 dan 3 dapat dilihat bahwa pada tahun 1991, DGNPR atau *debt to GNP ratio* Indonesia sebesar 69,5 persen dan melampaui Meksiko (52,5%) dan Brasil (36,1%) pada tahun 1982, tahun negara-negara tersebut mengalami

**Tabel 1**

| Tahun | Pinjaman Luar Negri Total | Pinjaman Jangka Panjang Total | | Pinjaman jangka Pendek |
|---|---|---|---|---|
| | | Pinjaman Pemerintah/ Dijamin | Pinjaman Swasta/ Tidak Dijamin | |
| 1969 | | | | |
| 1970 | 2.958 | 2.497 | 461 | 0 |
| 1971 | 4.248 | 3.461 | 651 | 0 |
| 1972 | 5.243 | 4.213 | 914 | 0 |
| 1973 | 6.564 | 5.255 | 1.286 | 0 |
| 1974 | 8.013 | 5.168 | 1.845 | 0 |
| 1975 | 10.371 | 8.002 | 2.369 | 0 |
| 1976 | 12.634 | 10.010 | 2.624 | 0 |
| 1977 | 16.477 | 11.710 | 2.842 | 1.925 |
| 1978 | 18.053 | 13.227 | 3.040 | 1.786 |
| 1979 | 18.632 | 13.384 | 3.140 | 2.108 |
| 1980 | 20.944 | 15.027 | 3.142 | 2.775 |
| 1981 | 22.762 | 15.909 | 3.579 | 3.274 |
| 1982 | 24.724 | 18.318 | 3.200 | 3.216 |
| 1983 | 29.121 | 21.484 | 3.652 | 3.530 |
| 1984 | 29.991 | 22.266 | 3.931 | 3.381 |
| 1985 | 34.314 | 26.778 | 3.858 | 3.633 |
| 1986 | 40.111 | 32.634 | 3.794 | 3.632 |
| 1987 | 49.854 | 40.908 | 4.493 | 3.637 |
| 1988 | 51.546 | 41.241 | 5.582 | 4.100 |
| 1989 | 53.972 | 41.089 | 6.625 | 5.350 |
| 1990 | 67.232 | 45.004 | 10.439 | 11.295 |
| 1991 | 76.113 | n.a | n.a | 14.380 |
| 1992 | 84.318 | n.a | n.a | 18.210 |

*) Estimasi IMF
Sumber:
World Bank, World Debt Tables 1993
Siti Aisyah Tri Rahayu, Bantuan Luar Negeri*Dampak dan Peranannya Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia Kurun Waktu 1969-1990, 1994*

*debt crisis*. Referensi tertulis juga mematok DGNPR yang baik adalah 40%. Jadi rasio diatas sebenarnya menunjukkan bahwa pertambahan hutang luar negeri terus melampaui kemampuan produksi Indonesia. Tabel 2 dan juga menggambarkan keadaan DSR (Debt to Service Ratio) Indonesia atau perbandingan antara pembayaran bunga dan cicilan utang dengan penerimaan ekspor. Pada tahun 1992 DSR melampaui 32% Patokan DSR sebesar 20% telah sering dikemukakan oleh para pemerhati utang luar negeri untuk mengukur derajat "*overborrowing*". Predikat *overborrowing* dapat juga ditentukan melalui pengamatan terhadap perbandingan jumlah hutang luar negeri dengan ekspor. Terulang, bahwa Indonesia telah melampaui indikator baik yaitu 200% dimana Indonesia harus menerima dengan 238 % pada tahun 1992.

### Transfer Netto Modal Keluar

Persoalan hutang luar negeri Indonesia mulai terasa agak serius setelah mulai terjadi transfer netto modal keluar sejak tahun 1985. Transfer netto modal keluar terjadi jika cicilan hutang luar negeri lebih besar daripada jumlah hutang baru setiap tahunnya. Transfer modal keluar tersebut cenderung akan lebih besar pada tahun-tahun yang akan datang karena pokok pinjaman dari hutang-hutang dekade sebelumnya sudah mulai jatuh tempo. Tambahan pula, tingkat bunga pada tahun-tahun yang akan datang diramalkan tidak akan turun.

Kecenderungan membesarnya transfer netto dalam sembilan bulan ini telah mencapai 42,5 trillium rupiah

| Tahun | Total Utang (juta dolar AS) | DSR (1) | DER (2) | DGNPR (3) |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | 36.750 | 29,6 % | 181,9% | 45,0 % |
| 1986 | 43.117 | 35,7 % | 268,8% | 60,3 % |
| 1987 | 52.581 | 37,8 % | 278,4% | 80,9 % |
| 1988 | 52.600 | 43,7 % | 246,6% | 69,0 % |
| 1989 | 53.111 | 35,2 % | 210,7% | 56,4 % |
| 1990 | 67.908 | 30,9 % | 229,4% | 64,4 % |
| 1991 | 76.113 | 32,6 % | 244,1% | 64,1 % |
| 1992 | 84.318 | 32,1 % | 2119,4% | 66,1 % |

Sumber:
- World Debt Tables, 1989-1992
*) Tahun 1989 dan 1990 berasal dari World Development Report, 1992; 1991
- Economist Intelegence Unit Quaterly Report.
**) Estimated

dengan RAPBN tahun ini mematok angka 7,9 trilliun rupiah. (Didik J. Rachbini, 1994).

Sejak tahun 1985, prestasi Indonesia sebagai peminjam yang baik, yang selalu membayar cicilan hutangnya tepat waktu, dicapai dengan menyedot sumber dana dalam negeri dalam bentuk transfer modal keluar. Pembayaran cicilan tersebut dapat dilakukan tepat waktu dengan cara menekan pengeluaran dalam negeri pemerintah. Hasil pengetatan konsumsi dalam negeri dan pengeluaran pemerintah itulah yang dipergunakan "membiayai" cicilan hutang dan transfer netto modal keluar.

Kenyataan diatas menunjukkan Indonesia sebagai negara berpendapatan rendah, sebenarnya telah menjadi "donor" bagi negara-negara kreditor yang merupakan negara-negara berpendapatan tinggi. Disatu sisi hutang Indonesia terus meningkat, utang baru yang diperoleh pun tidak cukup untuk menutup cicilan utang dan bunga pada pihak asing. Kondisi semacam ini Indonesia telah jelas masuk pada perangkap utang (*debt trap*) menurut kerangka yang telah dikemukakan oleh Samir Amin (Faruk Abdullah Akwyn, 1991).

Pembayaran hutang luar negeri membawa dampak yang cukup besar terhadap pengeluaran netto pe---merintah, yaitu total pengeluaran dikurangi cicilan hutang. Walaupun total anggaran meningkat terus sejak Repelita I, tetapi karena cicilan pembayaran hutang semakin besar, pengeluaran netto pemerintah secara riel turun dengan tajam sejak tahun 1985. Dalam bahasa sederhana, pengetatan pengeluaran pemerintah dan usaha-usaha meningkatkan pendapatan pajak belum berhasil meningkatkan pengeluaran netto pemerintah sejak tahun 1985 karena beban cicilan hutang yang semakin besar. Sebagai illustrasi, cicilan hutang luar negeri telah menyita penerimaan negara yang besarnya hampir separoh anggaran rutin (17,9 trilliun rupiah dari 42,35 trilliun rupiah pada RAPBN 1994/1995). Lebih dari itu, cicilan tersebut dua kali lipat besarnya dari anggaran untuk membayar gaji empat juta pegawai negeri (10,46 trilliun rupiah) di seluruh negara ini. Faktor inilah yang menyulitkan perbaikan gaji pegawai negeri. Dampaknya yang lain terasa dalam bentuk berkurangnya kemampuan keuangan pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan investasi sosial. Dalam rangka pengetatan pengeluaran tersebut, pemerintah telah mengurangi investasinya secara sistematis, mengambil langkah untuk mengurangi berbagai jenis subsidi, dan mendorong partisipasi swasta dalam pendanaan dan implementasi proyek-proyek pembangunan. Untuk menarik minat investasi swasta, pemerintah telah melakukan berbagai penyederhanaan regulasi dan dan birokrasi investasi.

**Hutang Non-pemerintah (swasta)**

Semakin pentingnya sektor swasta dalam perekonomian Indonesia juga diikuti dengan peningkatan pinjaman luar negeri oleh sektor swasta. Menurut Bank Dunia (World Debt Tables 1992), terlihat bahwa utang swasta kini sudah mencapai US$ 33 milyar

Tabel 3

## INDIKATOR UTANG L.N. INDONESIA

| Nomor Urut | Nama Negara | Jumlah Utang L.N. (Juta Dollar AS) 1970*) | 1990 |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 5.171,00 | 61.144,00 |
| 2 | Brazil | 5,132,00 | 116.173,00 |
| 3 | Mexico | 5.966,00 | 96.810,00 |
| 4 | Indonesia | 3.097,oo | 67.908,00 |
| 5 | Thailand | 726,00 | 25.868,00 |
| 6 | Malaysia | 440,00 | 19.502,00 |
| 7 | Philipina | 1.613,00 | 30.456,00 |

atau hampir 40% dari seluruh pinjaman luar negeri. Kemudahan pinjaman luar negeri oleh swasta dimungkinkan oleh penghapusan pagu kredit luar negeri oleh Paket Kebijaksanaan Maret 1989. Pinjaman luar negeri sektor swasta biasanya berjangka pendek (1-5). Di sisi lain, pinjaman swasta yang dijamin pemerintah rata-rata mempunyai beban bunga rata-rata 6,9 tahun, masa bebas cicilan yang hanya 3,6 tahun dan masa angsuran rata-rata 14,1 tahun dan berbunga relatif tinggi dibandingkan dengan pinjaman pemerintah. Tidak ada yang mengetahui dengan persis untuk apa pinjaman sebesar itu digunakan. Indikasi sampai saat ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil yang digunakan untuk mengembangkan kapasitas ekspor.

Sebagian dari dana pinjaman luar negeri tersebut digunakan untuk investasi dan spekulasi real estate, memperbaiki likuiditas internal perusahaan, pelarian modal (recycling pinjaman untuk luar negeri) dan dipergunakan untuk melakukan konsolidasi dan ekspansi pemilikan oleh kelompok-kelompok konglomerat. Hanya sebagian kecil yang benar-benar dipergunakan untuk investasi produktif untuk tujuan ekspor. Karena jika keseluruhan pinjaman swasta yang US$ 33 milyar tersebut dipergunakan untuk investasi untuk tujuan ekspor, maka swasta akan mampu membayar pinjaman luar negerinya dari pendapatan ekspor dan tidak menjadi beban tambahan neraca pembayaran. (Rizal Ramli, 1991)

Yang sangat dikhawatirkan adalah anggapan dari berbagai pihak bahwa hutang swasta yang telah diakui tidak digunakan untuk kegiatan peningkatan ekspor. Bukan hanya perusahaan mereka sendiri yang meningkat resikonya, tetapi lebih fatal lagi, neraca pembayaranlah yang lebih terpengaruhi. Pemerintah meminimalkan resiko-resiko di atas dengan membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri pada bulan september 1991, sebagian dari usaha untuk membatasi dan mengarahkan pinjaman luar negeri hanya untuk tujuan-tujuan yang produktif.

Disamping pengaruhnya terhadap neraca pembayaran, pinjaman luar negeri swasta juga berkaitan dengan tanggungjawab pembayaran hutang seandainya terjadi kredit macet atau *default*. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa swasta ternyata tidak selalu mampu menyinggung resiko itu sendiri. Seperti pada kasus-kasus hutang semen Cibinong, Pertamina, kasus P.T. Krakatau Cold Rolling MIll (CRMI), Bank Duta. Sebagai contoh, pada tahun 1985, perusahaan semen terbesar di Indonesia, yaitu Indocement mengalami kesulitan karena jatuhnya industri konstruksi sehingga mengakibatkan pemerintah Republik Indonesia menginjeksi dana sebesar US$ 325 juta atau pada waktu itu hampir mencapai 350 milyar rupiah. Dan yang terakhir siapa yang tidak tahu mengenai kesulitan yang dialami Pertamina pada tahun 70-an dan mengakibatkan pemerintah mengeluarkan mereka dari beban hutang. Apabila kasus-kasus di atas terulang lagi pada perusahaan-perusahaan lain, maka tidak bisa dianggap ringan bila Pemerintah dibebani tanggungjawab menyelamatkan para konglomerat hanya demi kekhawatiran akan turunnya kredibilitas perekonomian Indonesia dimata dunia internasional.

**Masalah Defisit Neraca Pembayaran**

Jika beban hutang makin besar, maka pembayaran cicilannya akan semakin besar, yang akan memperbesar defisit neraca pembayaran. Seperti diketahui, pembayaran bunga pinjaman akan tercatat dalam neraca transaksi berjalan. Sedangkan pembayaran pokok pinjaman akan tercatat sebagai komponen dalam *capital account* dalam neraca pembayaran. Sehingga beban hutang yang semakin besar, akan terus menjadi salah satu faktor penting penyebab defisit neraca pembayaran. Sering terjadi, laju kenaikan pembayaran hutang luara negeri yang merupakan "kebocoran" (leakage) jauh lebih besar laju kenaikan ekspor sehingga menghambat perbaikan posisi neraca pembayaran.

Gap ekspor dan impor yang terus membesar merupakan sebab kedua yang mengakibatkan besarnya defisit neraca pembayaran karena merupakan faktor penting dalam defisit neraca berjalan. Walaupun telah terjadi kenaikan yang luar biasa dari ekspor non-migas, tetapi neraca berjalan sektor non-migas masih merupakan sektor yang defisit. Dengan kata lain, walaupun selisih netto antara ekspor dan impor non-migas

## DIBANDING DENGAN NEGARA - NEGARA LAIN **)

| Ratio Utang L.N. Terhadap Ekspor (DER) | | Ratio Utang L.N. Terhadap GNP (DGNPR) | | Ratio Cicilan Terhadap Ekspor (DSR) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1990 | 1980 | 1990 | 1980 | 1990 |
| 242,40% | 404,60 % | 48,40 % | 61,70 % | 37,30 % | 34,10 % |
| 304,90% | 326,80 % | 31,20 % | 25,10 % | 63,10 % | 20,80 % |
| 259,20% | 222,00 % | 30,50 % | 42,10 % | 49,50 % | 27,80 % |
| 94,20% | 229,40 % | 28,00 % | 66,40 % | 13,90 % | 30,90 % |
| 96,80% | 82,00 % | 26,00 % | 32,00 % | 18,90 % | 17,20 % |
| 44,60% | 55,90 % | 28,00 % | 48.00 % | 6,30 % | 11,70 % |
| 212,30% | 229,20 % | 53,80 % | 69,30 % | 26,60 % | 21,20 % |

**) Sumber: World Development Report, World Bank, Washington, 1992

*) Dikutip dari makalah Dr. Nopirin, "Neraca Pembayaran Indonesia", (1993)

telah jauh berkurang tetapi masih tetap negatif.

Sebenarnya, bisa saja Indonesia dapat menanggulangi dan menutup defisit neraca pembayaran. Pencarian neraca pembayaran baru akar, menjadi hal yang menggiurkan. Ada beberapa pilihan cara untuk menutup defisit neraca pembayaran yang semakin besar. Jika diperkirakan bahwa defisit tersebut bersifat sementara, langkah yang paling tepat adalah mencari pinjaman baru untuk menutup defisit neraca pembayaran. Masalahnya, kalau defisit neraca pembayaran tidak bersifat jangka pendek atau secara lama, pencarian pinjaman baru hanya akan lebih mendorong timbulnya krisis secara pelan - pelan dengan tingkat kesulitan yang tidak akan berhenti dan terus membengkak.

Ada beberapa alasan mengapa neraca pembayaran Indonesia ini bukan hanya persoalan yang bersifat sementara. Pertama, karena beban kewajiban pembayaran hutang luar negeri makin lama makin besar. Kedua, defisit perdagangan makin besar karena laju pertumbuhan ekspor sudah menurun. Ketiga, penggunaan kapasitas produksi dan infrastruktur dalam negeri sudah maksimal. Investasi baru, memerlukan dana pinjaman luar negeri dan impor yang juga makin besar. Dengan sistem investasi dan alokasi kredit yang liberal, tidak ada jaminan bahwa investasi baru tersebut sepenuhnya digunakan untuk tujuan pasar ekspor.

Perbedaan penilaian apakah persoalan defisit neraca pembayaran adalah persoalan sementara atau persoalan yang lebih kronis, akan menentukan pilihan cara yang paling optimal untuk mengatasinya. Jika dinilai bahwa defisit neraca pembayaran merupakan gejala yang tidak sementara dan kronis sifatnya, biasanya diperlukan langkah-langkah "penyesuaian ekonomi" (*Economic Adjustment*). Lngkah-langkah penyesuaian ekonomi tersebut lebih sering merupakan respon terhadap ketidakseimbangan eksternal, yaitu krisis neraca pembayaran yang kronis, dan bukan respon terhadap ketidakseimbangan internal. Karena ketidakseimbangan eksternal,....?

Struktur pemilikan hasil ekspor Indonesia adalah salah satu aspek penting yang bisa mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk membayar cicilan hutang. Tahun 1986 merupakan awal perubahan struktur pemilikan pendapatan ekspor Indonesia. Sebelum tahun 1986, sebagian besar ekspor Indonesia berasal dari ekspor migas. Setelah tahun 1986, makin besar porsi ekspor non-migas keseluruhan ekspor Indonesia. Hanya sebagian kecil dari pendapatan ekspor non-migas tersebut yang masuk kas negara melalui mekanisme perpajakan. Implikasi dari perubahan struktur pendapatan ekspor tersebut adalah pada kemampuan pemerintah untuk membayar cicilan hutang, karena pendapatan pemerintah dari ekspor migas semakin kecil, diperlukan pengetatan pengeluaran dan peningkatan pajak yang relatif lebih besar. Hal ini merupakan dilema baru buat pemerintah Indonesia. Ketika era boom minyak, boleh dikatakan tidak ada trade-off antara kewajiban membayar hutang dan pengeluaran dalam negeri. Tetapi sekarang, ada kaitan langsung antara kewajiban membayar hutang dan tekanan untuk membatasi pengeluaran dalam negeri.

Barangkali usulan yang dikemukakan oleh Wing Thye Woo dan Anwar Nasution pada tahun 1988 dapat "dilirik sebagai" sebagai alternatif yang patut dipertimbangkan. Mereka membagi alternatif kebijaksanaan untuk menghindari kesulitan utang di masa mendatang bagi Indonesia menjadi dua kelompok. Pertama adalah kebijakan - kebijakan yang dapat mempengaruhi pelunasan pinjaman atau *debt service*, dan kedua adalah kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi pendapatan ekspor. Kelompok pertama mencakup: pemotongan defisit anggaran dengan mengendalikan pengeluaran pemerintah dan meningkatkan pajak, meninggalkan kebiasaan penyusunan anggaran yang berimbang sehingga dapat memungkinkan pendanaan defisit pemerintah dari dalam negeri, pemilikan badan usaha milik negara oleh kalangan swasta maupun asing, serta membuka kran deregulasi sektor riel dalam bidang manufaktur serta

**Tabel 4**

| | 1973 | 1975 | 1978 | 1980 | 1983 | 1984 | 1985 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEBT - SERVICE RATIO (%) | | | | | | | |
| Indonesia | 3.4 | 6.2 | 9.7 | 13.9 | 20.1 | 22.3 | 29.8 |
| Korea Sel. | 11.5 | 12.5 | 12.0 | 19.7 | 21.2 | 21.3 | 27.3 |
| Malaysia | - | - | - | 6.3 | 11.6 | 14.2 | 30.7 |
| Thailand | - | - | - | 18.9 | 24.0 | 25.7 | 31.9 |
| Filipina | - | - | - | 26.6 | 36.4 | 33.5 | 31.8 |
| Mexico | 28.7 | 30.3 | 64.9 | 49.5 | 51.7 | 52.1 | 51.5 |
| Brazil | 36.7 | 40.8 | 59.3 | 63.1 | 55.1 | 46.3 | 38.6 |
| Argentina | 19.9 | 31.9 | 41.6 | 37.3 | 69.7 | 52.4 | 58.9 |

- Posisi utang : Untuk tahun 1973 - 1978 adalah utang bersih, yaitu utang dikurangi cadangan devisetelah emas
- Ekspor = ekspor barang dan jasa

Sumber:
The World Bank, World Debt Tables 1991 - 92 untuk data 1980 - 1990 dan IMF,
The Origin of the Debt Crisis in Three Latin American Countries , November 1991 (Untuk data 1973 - 1978)

**GRAFIK I**

**Dampak Pembayaran Kembali Hutang Luar Negri terhadap Anggaran Negara (tahun fiskal 1969/70 -- 1988/89)**
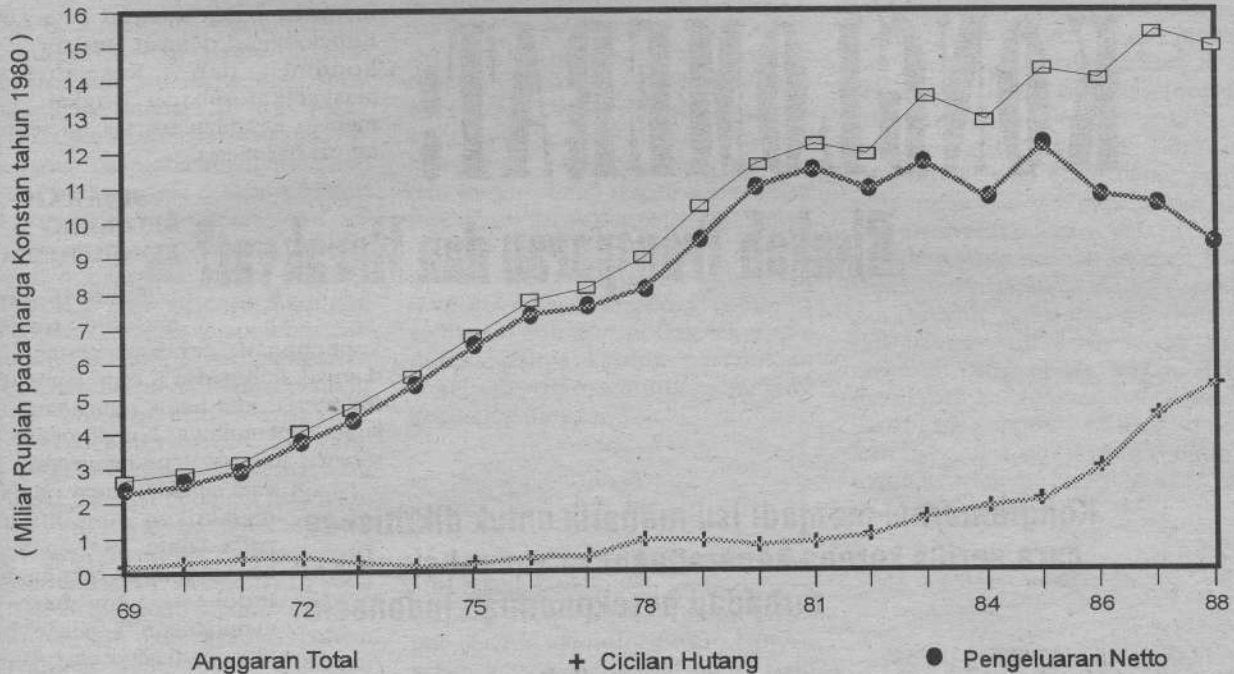
Dikutip dari: Rizal Ramli, "Hutang Luar Negeri Indnesia, Kontraksi dan Beban Ekonomi", dalam Prisma, No. 9 Tahun XX, September 1991, halaman 5

sektor pertanian. Alternatif kebijaksanaan untuk mempengaruhi pendapatan ekspor adalah dengan menghilangkan berbagai lisensi impor yang bersifat monopolistis, serta perluasan sektor tanaman seperti karet serta minyak kelapa.

Kalau kita telusuri lebih jauh, berbagai pendapatan mengenai pemecahan persoalan hutang luar negeri dan bahayanya telah banyak dilontarkan. Pemerintah juga telah mempertimbangkan kelayakan BUMN dijadikan salah satu alternatif dengan menwarkan saham mereka di pasar Internasional. Langkah ini tidak sedikit menentang dari argumentasi belum perlunya tindakan tersebut sampai dengan alasan politis. Negosiasi pelunasan hutang atau upaya permintaan *reschedulling* banyak diusulkan oleh kelompok akademisi. Faktor yang mendasarinya adalah bahwa dengan melihat keadaan secara jernih dan realistis, maka pertimbangan mempertahankan citra negara sebagai peminjam yang baik dapat dikesampingkan demi memperbaiki keadaan utang luar negeri pada generasi mendatang. Berbagai usulan maupun alternatif pemecahan di atas mempunyai *trade-off* sendiri-sendiri. Artinya langkah menuju pemecahan masalah hutang luar negeri dapat dilakukan dengan mempertimbangkan semua alternatif yang ada dan kemudian pemerintah sebagai otorita yang berwenang memulai. Tepat bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang pesat selama ini telah dapat dilihat di atas kertas, tetapi pertanyaan yang terus muncul adalah "Apakah pembangunan ekonomi yang telah berjalan harus meninggalkan warisan yang dapat memperberat usaha generasi yang akan datang?"

| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
|---|---|---|---|---|
| 38.7 | 38.7 | 41.2 | 35.0 | 30.9 |
| 26.7 | 32.3 | 14.8 | 11.8 | 10.7 |
| 22.5 | 21.2 | 23.3 | 16.0 | 11.7 |
| 30.1 | 22.0 | 20.2 | 16.3 | 17.2 |
| 34.6 | 38.0 | 32.0 | 25.3 | 21.2 |
| 54.2 | 40.1 | 48.0 | 37.9 | 27.8 |
| 47.0 | 41.9 | 48.2 | 29.8 | 21.8 |
| 76.2 | 74.3 | 44.5 | 36.2 | 34.1 |

# KONGLOMERAT:

## Bisakah Transparan dan Merakyat?

**Konglomerasi menjadi isu menarik untuk dikritisi secara serius karena keberadaannya sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia.**

Anies Rasyid Baswedan,
Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi UGM.
dan mantan Ketua Umum Senat Mahasiswa UGM 1992-1993.

Pertumbuhan konglomerat yang begitu pesat tidak dapat dilihat semata-mata dari sudut perekonomian nasional tetapi harus juga dilihat secara regional dan global. Perekonomian dunia yang mencapai nilai US $ 600 triliun pada tahun 1900, sekarang ini telah tumbuh tiap tahun dengan nilai pertumbuhan yang lebih besar dari nilai tersebut. Sementara itu Asia Pasifik telah menjadi wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi ter- tinggi dan tercepat dalam sejarah peradaban umat manusia. Kondisi yang demikian ini tidak mungkin ditiadakan dalam melihat tata konglomerasi di Indonesia. Hubungan internasional yang dibangun selama ini memiliki kekuatan untuk menggalang kegiatan bisnis raksasa.

Menguak semua persoalan yang ada di balik konglomerasi di Indonesia tentu bukan menjadi tugas tulisan ini, tetapi mencoba memberikan potret persoalan dalam kaitan dengan perbaikan nasib Bangsa, lebih tepat untuk dijadikan tujuan penulisan ini. Bahwa di luar negeri terjadi pertumbuhan yang luar biasa dan berdampak terhadap Indonesia itu tidak dapat dipungkiri akan tetapi pertanyaan apakah keberadaan konglomerasi di Indonesia memiliki kontribusi yang mampu untuk secara proporsional meningkatkan kekuatan ekonomi rakyat masih harus selalu didengungkan dan mereka jawab dalam bentuk "*action*". Tulisan ini mencoba untuk mencari keterkaitan Konglomerasi dengan Struktur Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat sebagai langkah awal menuju Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

### SEJARAH DI BELAKANG KONGLOMERASI

Untuk bisa memahami tingkat kepentingan, peran, kegiatan dan dampak keberadaa K ong- lomerat di Indonesia, kita harus memahami sejarah terbentuknya konglomerasi ini sebagai titik awal pe-ngamatan. Secara singkat, tanpa pretensi melakukan simpilifikasi, pada tahun 1930-an telah ada beberapa pengusaha Indonesia yang berhasil membangun "kerajaan" bisnis seperti Nitisenito, Agoes Dasaad dan Hadji Sjamsoeddin selain para keturunan Cina seperti Aei Tiong Ham dan Djie Sam Soe.

Pada masa revolusi kemerdekaan , sektor industri di Indonesia relatif tidak berkembang. Situasi ini makin menjadi parah ketika para industriawan Belanda hengkang dari Indonesia di awal dekade 1950-an selain telah mulai ada konflik secara terbuka antara para pedagang Cina dengan Indonesia. Untuk menyelamatkan kondisi yang demikian ini, pemerintah ketika itu mengeluarkan kebijakan; Investasi pemerintah melalui BUMN dan merangsang berkembangnya para pengusaha Indonesia dengan memberikan berbagai lisensi perdagangan, produksi dan import. Karena berbagai alasan ternyata program ini mengalami kegagalan. BUMN terjebak dalam konflik antar kepentingan politik. Rangsangan dan lisensi yang diberikan oleh pemerintah justru banyak dijual oleh para pemiliknya yang mayoritas pengusaha / birokrat pribumi.

Pada tahun 1957 terjadi berbagai kebijakan sebagai tanda perubahan kebijakan industri Indonesia. Pada saat ini pemerintah mulai mengambil alih pemilikan perusahaan Belanda. Dapat pula dilihat bahwa pada masa demokrasi liberal (1948-1957) pemerintah mendirikan 7 BUMN sementara

antara 1957 - 1966 terdapat 89 BUMN yang didirikan oleh pemerintah (World Bank, 1992). Sejak orde baru terjadi perubahan kebijakan investasi menjadi lebih terbuka terhadap dana asing. Dengan berbagai kebijakannya, sektor swasta mendapatkan kesempatan luas untuk berkembang.

Ada beberapa faktor yang sifatnya partikularistik dan patut diperhitungkan dalam kita menganalisa persoalan konglomerasi di Indonesia. *Pertama*, para keluarga dengan deretan nama perusahaannya memiliki hubungan yang erat secara "pribadi" dengan berbagai level birokrasi sesuai bidang garap bisnisnya. Mereka kemudian memiliki pengaruh tidak hanya pada proses penyusunan dan penetapan kebijakan tetapi lebih jauh lagi, sangat mampu mempengaruhi penerapan kebijakan. *Kedua*, Hampir semua konglomerat merupakan kelompok keturunan Cina yang memiliki hubungan emosional dan bisnis sangat kuat di dalam kalangannya sendiri. Faktor ini harus diposisikan dengan pandangan yang obyektif agar terhindar dari keterjebakan pada semangat primordialisme sempit. Harus diakui dan disadari bahwa keterlibatan kelompok keturunan cina ini memberi warna tersendiri bagi ekonomi Indonesia dan tidak bisa dihilangkan dari daftar persoalan. Sebagai ilustrasi, berdasarkan data hasil survey yang dikeluarkan Info Bisnis November 1993 ini dari 300 nama konglomerat yang tersaring berdasarkan kriteria pembayaran pajak, kemapanan usaha hanya 53 pengusaha Indonesia lebih jauh lagi dari 10 tertinggi pengusaha pribumi ini enam diantaranya memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Soeharto. Dari sini kita melihat betapa dominasi keturunan Cina dalam perekonomian kita sangat besar. *Ketiga*, Konglomerasi telah menjadi sebuah kenyataan dari sistem perekonomian Indonesia kontemporer. Setiap kebijakan ekonomi terutama yang menyangkut industri mustahil untuk meniadakan mereka dari pertimbangan. Sebenarnya, Indonesia beberapa waktu yang lalu masih memiliki pilihan untuk tidak meniru pola yang terjadi di Korea Selatan dimana industri dikuasai oleh beberapa grup perusahaan raksasa dan kuat tetapi meniru Taiwan yang pengembangan industrinya berbasis pada perusahaan kecil dan menengah dengan jumlah yang sangat banyak. Akan tetapi pada kondisi yang seperti sekarang ini maka tidak ada pilihan selain memperhitungkan keberadaan para konglomerat yang telah terlanjur berkuasa.

## . POTRET KONGLOMERAT INDONESIA

Bidang gerak para konglomerat ini merambah dari perbankan dengan segala jenis bisnis keuangannya, agribisnis, perkayuan, perikanan, manufaktur, perdagangan nasional dan internasional sampai dengan transportasi dan real-estate. Dalam konteks konglomerasi kita menyaksikan bahwa hubungan *intercorporate* dan interpersonal terjadi sedemikian rapat baik itu kepemilikan, keluarga maupun historis. Hubungan ini kemudian menyebabkan peningkatan interdependensi yang tinggi parahnya sering keputusan politik ekonomi dibuat hanya karena permintaan segelintir orang untuk segudang kepentingannya.

*****

Konglomerasi di Indonesia dapat juga diikaji secara lebih serius dengan melihat *"inside picture"* group tersebut dimana akan ditemukan banyak sekali persoalan, secara umum terlihat ada tiga persoalan yang perlu perhatian dan penanganan. *Pertama*, tidak ada kejelasan ttg "Core-Business". Bersamaan dengan perkembangan bisnis yang multi bidang tersebut para pengusaha umumnya terbawa arus ekspansi dan tidak lagi menyadari "core-business"-nya. Kelompok Darmala dapat merupakan contoh tepat persoalan ini. Kelompok Darmala tumbuh sebagai perusahaan perdagangan komoditi pertanian kemudian melakukan "backward integration" pada budi daya pertanian dan makanan ternak. Pada tahun 1980-an memasuki bidang real-estate, perkantoran dan konstruksi, uniknya lagi pada periode yang sama secara agresif memasuki bidang jasa keuangan baik perbankan, leasing dan investasi selain berbagai jenis bisnis asuransi. Akhirnya, sekarang telah mulai memproduksi, merakit dan menyalurkan kendaraan roda dua, memiliki usaha bakery, pabrik plastik, biro perjalanan tour dan jasa konsultan. Melalui potret ini pengamat akan mengalami kebingungan untuk menentukan bisnis apa yang sebenarnya menjadi bisnis intinya, bahkan lebih jauh lagi, sejauh mana terdapat hubungan antar bisnis unit dalam grup itu. Dari sini dapat pula dipertanyakan sejauh mana efisiensi dan efektifitas kegiatan bisnis yang dilakukan mendekati nilai optimum. *Kedua*, Struktur Organisasi. Melihat struktur organisasi konglomerat di Indonesia maka akan sulit untuk memperoleh gambaran perusahaan dengan baik karena struktur itu mengalami perubahan terus-menerus, selain itu pada prakteknya struktur organisasi yang digunakan lebih mendasarkan pada jaringan informasi yang ada dan sering tidak mengindahkan struktur yang telah dibangun sehingga pembagian otoritas yang telah dilakukan dapat dengan mudah dilanggar. *Ketiga*, Efisiensi. Tidak ada satupun set data yang dapat menggambarkan efisiensi perusahaan para konglomerat, akan tetapi mendasarkan pada sebuah laporan Bank Dunia, terlihat bahwa inefisiensi menjadi sebuah pemandangan normal. Hal ini menjadi lebih terasa pada mereka yang telah terlalu lama menikmati keleluasaan dan kemudahan bisnis sehingga efisiensi diabaikan begitu saja, karena mereka melihat adanya profit yang relatif tetap dan tinggi.

*****

## KETURUNAN CINA DALAM KONG-LOMERASI

Salah satu faktor yang perlu kajian tersendiri adalah dominasi keturunan cina dalam konglomerasi yang berkembang di Indonesia, pada komunitas ini terdapat keunikan yang berkaitan dengan sejarah perantauannya. Sementara pada pola kapitalisme yang mereka lakukanpun tidak hanya mengundang munculnya persoalan distribusi kesejahteraan tetapi secara konsepsipun memiliki keunikan sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Gordon Redding, seorang pakar bisnis dan ekonomi Cina, yang melihat adanya corak kapitalisme yang berbeda pada masyarakat Cina bila dibandingkan dengan kapitalisme yang kita pahami selama ini. Kapitalisme kolektif, istilah yang ia gunakan, membedakan dengan kapitalisme individual di barat. Kapitalisme Cina ini berkaitan dengan perilaku ekonomi Cina perantauan di luar daratan Cina.

Perilaku ekonomi Cina perantauan sangat dipengaruhi oleh tiga warisan utama. *Pertama*, Paternalisme, yang berasal dari Etika Konfusius yang melatar belakangi struktur masyarakat Cina dan memberi legitimasi hirarki berdasar rasa hormat terhadap atasan dan tanggung-jawab ke bawah. *Kedua*, Personalisme sebagai sebuah kekuatan yang berhubungan dengan

pembentukan hubungan kepercayaan inter-individu yang menggantikan ketiadaan hubungan dengan institusi dan struktur kemasyarakatan. *Ketiga*, Rasa tidak Aman, bagi sekelompok etnis Cina merupakan endemis. Pengalaman sosial mereka berkaitan dengan keberadaannya sebagai etnis minoritas merupakan faktor kunci dalam pembentukan visi ini (Manajemen, Agustus 1992). Ketiga kekuatan ini terbukti telah mampu memposisikan keturunan Cina ini pada posisi yang sangat strategis. Hal ini terlihat bahwa dengan populasi yang hanya 3 persen keturunan Cina ini telah berhasil menguasai 70 persen ekonomi nasional (InfoBank, Sept. 1990). Kerja keras, ulet, dukungan lembaga keuangan mungkin menjadi kunci suksesnya selain kerja pintastentunya. Tradisi perantauan dan kerja keras boleh jadi memang kunci sukses tetapi bila mengamati keberhasilan konglomerat maka kedekatan dengan birokrasi juga harus diperhitungkan sebagai faktor utama.

Bagi bangsa Indonesia sebenarnya sudah tidak perlu lagi ada kekhawatiran mengenai nasionalisme dan kecintaan para konglomerat keturunan Cina ini terhadap Indonesia, akan tetapi pengalaman empirik menunjukan betapa banyak kalangan mereka tidak hendak peduli dengan situasi masyarakat di sekeliling mereka dan tidak pula mau menerapkan etika dalam berbisnis dan bermasyarakat. Ketidak-pedulian ini bila dikoreksi secara jujur tidak terbatas pada kalangan keturunan Cina saja tetapi karena secara kolektif mereka memiliki *stereotype* ini maka untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat akan kebersamaannya sebagai satu bangsa masih saja sebuah perjuangan yang panjang, maka ketika para taipan dunia berkumpul di Hongkong beberapa waktu yang lalu, kecemasan segera menyebar, bisa jadi akan timbul kecemburuan luar biasa.

Barangkali, sudah waktunya saat ini bagi para pengusaha keturunan Cina untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa merekapun bagian dari masyarakat yang tidak semata-mata mencari laba tapi juga manfaat, maka kegiatan kemasyarakatan yang tanpa publikasi besar-besaran tetapi realistis dan kongkrit harus segera dimulai, apabila hal ini tidak segera dilakukan maka dalam jangka panjang akan muncul perasaan bahwa keberadaan mereka merupakan sebuah penjajahan bentuk baru yang tidak dapat dikategorikan sebagai kolonialisme secara hukum. Menjadi tugas semua pihak untuk kemudian menghindarkan terjadinya kesadaran macam ini melalui kegiatan konkrit dan merakyat.

*****

### BURUH DAN PARA KONGLOMERAT

Tidak lagi dikatakan bisnis bila tidak mencari untung. Memang benar, kini tidak mudah terdengar lagi seperti zaman kejayaan libelarisme klasik, bahwa maksimalisasi laba merupakan satu-satunya tujuan bagi sebuah perusahaan. Sekarang ini terdapat pandangan lebih luas lagi. Salah satu ungkapan yang sedang populer saat ini adalah menggeser konsep *The Stockholder's benefit* menjadi *The Stakeholder's benefit* atau manfaat bagi semua pihak. Persoalan konglomerasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan begitu saja dengan persoalan buruh. Kita melihat sebuah kenyataan dimana orientasi dan referensi ekonomi konglomerat kita lebih mengarah pada model etika bisnis barat yang tidak memberikan porsi yang layak pada persoalan buruh sehingga dalam aplikasi kehidupan bisnis di Indonesia Etika bisnis yang gunakan tidak memfasilitasi kehidupan para buruh, bahkan cenderung menekan. Bagi negara barat yang sudah mencapai taraf negara makmur, dimana hak kaum buruh sudah lebih terjamin dan kesejahteraan terealisasi. Bagi Indonesia saat ini yang terpenting adalah menghindarkan kesalahan kapitalisme-klasik sebagaimana yang terjadi di awal industrialisasi yang menghisap tenaga buruh. Karena itu masalah buruh seperti upah yang adil, keselamatan di tempat kerja, kesehatan dab sebagainya, perlu menjadi tema pokok bagi penciptaan atmosfir bisnis konglomerat yang labih manusiawi dan lebih meng- Indonesia

****

### "KEAMANAN" EKONOMI INDONESIA

Secara umum memang kita melihat kenyataan bahwa ekonomi kita memiliki struktur yang kokoh dan tangguh. Latar belakang dari fenomena ini adalah karena kuatnya dominasi dari para pengusaha kelas atas dalam percaturan Ekonomi Indonesia. Sementara pengusaha menengah dan kecil yang seharusnya menjadi pilar dan ujung tombak belum memainkan perannya sama sekali.

Ketidak seimbangan ini menurut Fajar Prasongko (Bisnis Indonesia, 1992) mirip dengan piramida terbalik. Segelintir orang menguasai bagian terbesar dari bagian ekonomi sementara mayoritas hanya menikmati sebagian saja. Situasi seperti ini akan dengan mudah menggoncangkan perekonomian Indonesia bila satu diantara konglomerat itu tumbang dampaknya akan meluas kemana-mana karena tidak bisa dipungkiri mereka telah terlanjur menguasai titik titik strategis perekonomian Indonesia, ini jelas kondisi yang tidak sehat.

Sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwa para pengusaha kelas atas memang memiliki banyak saluran dan kemudahan dalam menjalankan dan mengekspansikan bisnisnya. Tetapi yang menjadi persoalan kemudian adalah tidak adanya upaya kongkrit dari mereka untuk secara kolektif dan sistematis meningkatkan perekonomian masyarakat dengan membantu merangsang tumbuhnya kewirausahawanan di kalangan pengusaha kecil. Kalau kita melihat pada kekayaan dan omzet para konglomerat di tahun 1992 yang jumlahnya sekitar 300- an orang dengan 53 diantaranya pribumi kita melihat kekayaan sebesar Rp. 70 Triliun dan omzetnya sebesar Rp. 131 Triliun. Sebuah angka yang sangat mengagumkan. Bila dibandingkan dengan jumlah simpanan 3,5 juta anggota dan omzet koperasi di seluruh Indonesia ( 4000 unit ) yang hanya mencapai Rp. 2 Triliun dan Rp. 5 Triliun. (Info Bisnis, Nov. 1993)

Kondisi demikian ini menyebabkan kekhawatiran sebagaimana yang ditulis oleh Prof. Sarbini Sumawinata dalam Business News Oktober 1992, "struktur Sosial Ekonomi Indonesia cenderung memusat pada puncak pimpinan tertinggi baik nasional maupun regional/lokal", katanya, kondisi ini perlu segera dirombak terutama menyangkut pemusatan kekuatan ekonomi hanya pada segelintir orang baik di tangan pribumi atau pada keturunan Cina. Meskipun tidak ada data statistik yang akurat mengenai para konglomerat akan tetapi melalui penaksiran Bank Dunia sampai pada kesimpulan bahwa total Penjualan dari 5 group terbesar kira-kira sama dengan 10 % GDP Indonesia tahun 1990. Berangkat dari Kepedulian dan kekhawatiran akan persoalan ini bahkan Jendral (Purn)

A.H. Nasution dalam surat terbukanya pada menjelang hari HUT ABRI 5 Oktober 1993 mengatakan kekhawatirannya dengan mengingatkan bahwa sudah saatnya bagi ABRI untuk meningkatkan kemampuan kelompok menengah Indonesia agar dapat berperan dalam perekonomian nasional. Lebih jauh lagi dikatakan, "Kalau ABRI setia pada doktrinnya tidak ada jalan lain kecuali memilih strategi ekonomi nasional yang didukung oleh kelas menengah Indonesia yang meluas dan berakar." Terlepas dari pro dan kontra ide Nasution ini, dapat dilihat betapa rawannya ketahanan ekonomi Indonesia. Bencana ekonomi mungkin tidak terasa secara drastis dan dramatis tetapi lambat laun dan sistematis akan menggerogoti penopang perekonomian Indonesia.

**AGENDA YANG PERLU PERHATIAN**

Beberapa persoalan yang harus segera mendapatkan jawaban berkaitan dengan persoalan diatas adalah *Pertama*, Penguatan Sistem Hukum Dagang di Indonesia. Dengan mengevaluasi dan memperbaharui Hukum Dagang sebab yang saat ini masih berlaku merupakan peninggalan Kolonial Belanda yang sudah ketinggalan zaman. Selain itu, kárena pertumbuhan bisnis yang sangat pesat dalam beberapa dekade belakangan ini ditemukan masih banyak "wilayah" bisnis yang belum terjamah oleh regulasi/hukum. *Kedua*, Meningkatkan keterbukaan konglomerat mengenai bisnis yang dijalankannya sehingga masyarakat dan pemerintah dapat mengetahui. Hal ini tentu tidak akan dilakukan begitu saja oleh para konglomerat, sehingga diperlukan kekuatan penekan yang kuat untuk memposisikan agar konglomerat 'terpaksa' membuka kondisinya. Dengan sebuah kesadaran bahwa tidak semua informasi bisa dibuka, bagaimanapun kegiatan mereka adalah bisnis yang juga memiliki rahasia, tetapi apabila ternyata BKPM misalnya, memiliki data yang salah akibat para konglomerat tidak jujur maka persoalannya bisa menjadi lain. *Ketiga*, Kurangi hubungan antara penguasa dan pengusaha menjadi hubungan institusional tidak personal apalagi telah menjadi sebuah Kolaborasi. Hubungan dengan pemerintah telah menyebabkan munculnya monopoli oleh beberapa konglomerat. Pada tahun 1980-an, dibalik berbagai deregulasi yang dijalankan pemerintah, pada industri tertentu koneksi dengan birokrasi telah meningkat dan mengalami kesuksesan. Contoh yang sangat jelas misalnya pada karet dan Rotan dimana diperkirakan sewa yang telah ditangani oleh konglomerat mencapai nilai beberapa trilliun rupiah. *Keempat*, Swastanisasi bila dijalankan harus menggunakan perencanaan matang dan "kearifan" dengan berbasiskan pada efisiensi dan orientasi pasar bukan koneksi, karena bila hal ini terjadi maka swastanisasi tidak untuk mencapai peningkatan tetapi lebih untuk meningkatkan keuntungan segelintir orang. Hal ini bisa dilihat dari fenomena Penanganan perawatan pesawat Garuda yang selama ini dilakukan sendiri saat ini diberikan pada (baca=diambil alih oleh) SEMPATI. Atau pada kasus sama GARUDA harus melepaskan pesawat dan jalur penerbangannya.

Langkah kongkrit harus segera diambil,akan tetap di balik semua ini kemauan baik pemerintah maupun konglomerat untuk memperbaiki kondisi harus dimulai dengan kesadaran bahwa selama ini mereka telah diuntungkan oleh situasi ekonomi dan politik maka sudah saatnya untuk membalas budi dengan penyebaran kesejahteraan kepada semua lapisan masyarakat tanpa terbatas geografis. Tanpa usaha ini maka para konglomerat dengan tidak sadar sedang membangun kecemburuan dan kekecewaan kolektif masyarakat Indonesia yang sewaktu-waktu dapat meletus.

# Strategi Pengembangan Industri Kecil di Indonesia

**Nampaknya industrialisasi masih dipandang sebagai "obat yang paling mujarab" untuk mengobati keterbelakangan yang terjadi di Negara Sedang Berkembang (NSB).**

Rimawan Pradiptyo.
Mahasiswa Tingkat Akhir FE-UGM
Jurusan IESP

Pada kenyataannya industrialisasi hanya merupakan salah satu bagian dari strategi pembangunan. Posisi semacam itu menunjukkan bahwa industrialisasi hanya merupakan salah satu aspek dalam proses pembangun-an yang demikian komplek. Sebagai bagian dari suatu strategi dan proses pembangunan, industrialisasi tidak dapat berdiri sendiri untuk menanggulangi keterbelakangan yang ada. Meski demikian strategi industrialisasi banyak diterapkan, terutama di NSB, sebagai upaya untuk mengikis keterbelakangan yang ada.

Pembangunan industri dipandang suatu hal yang penting, karena sektor industri merupakan sektor yang memiliki keterkaitan terbesar dengan sektor yang lain. Keterkaitan yang dimaksud adalah keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan ke belakang (*backward linkage*), dengan sektor-sektor lain dalam perekonomian. Dengan demikian pembangunan sektor industri secara tidak langsung akan meningkatkan kinerja perekonomian secara umum, mengingat sektor lain juga akan tumbuh sei-ring pertumbuhan sektor industri.

## II. Industri Kecil dan Transformasi Struktural

Dalam GBHN disebutkan bahwa pemba-ngunan industri di Indonesia diharapkan mampu mendorong terwujudnya struktur ekonomi yang semakin seimbang dan kokoh antara sektor industri yang maju dan sektor pertanian yang tangguh. Sifat dasar masyarakat Indonesia adalah masyarakat agraris, sehingga ketergantungan terhadap sektor pertanian demikian tinggi. Untuk mewujudkan keseimbangan antara dua sektor tersebut, maka transformasi struktural harus dijalani. Transformasi struktural merupakan proses yang tidak mudah untuk dilalui. Transformasi struktural merupakan proses perubahan yang harus melalui tahapan-tahapan tertentu. Perubahan dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri tidaklah semudah membalik telapak tangan.

Sektor pertanian yang tangguh pada dasarnya merupakan faktor penunjang utama bagi masyarakat untuk dapat berkembang menjadi masyarakat industri. Di daerah pedesaan dengan sektor pertanian yang maju, akan memudahkan daerah tersebut untuk mengembangkan sektor industrinya. Pada tahap awal, industri yang dikembangkan di daerah agraris adalah industri dalam skala kecil yang memanfaatkan teknologi sederhana.

Perkembangan akumulasi modal dan perubahan tingkat teknologi yang digunakan dalam industri kecil, akan meningkatkan skala usahanya, sehingga lambat laun industri tersebut

akan berkembang menjadi industri skala menengah dan besar.

Pada industri dengan skala menengah dan besar, penggunaan teknologi telah bergeser dari yang sederhana ke teknologi canggih. Peningkatan penggunaan teknologi dilakukan sei-ring dengan perubahan skala industri dan proses pendewasaan yang terjadi pada usaha tersebut.

Jika ditinjau dari proses transformasi struktural tersebut, maka industri kecil memiliki peran besar dalam membantu perubahan yang terjadi. Dari sisi jumlah, industri skala kecil ternyata mendominasi jumlah industri yang ada di Indonesia. Data BPS menyebutkan bahwa dari 1.523.935 perusahaan di sektor industri pada tahun 1990, 93 % ternyata merupakan industri rumah tangga, 6,2 % adalah industri kecil, dan sisanya 0,8% adalah industri skala menengah dan besar. Ternyata sebagian besar kelompok industri rumah tangga tersebut berada di pedesaan.

Menurut definisi BPS, industri rumah tangga adalah industri yang mempekerjakan kurang dari 3 pekerja dalam usahanya. Industri semacam ini ternyata banyak tersebar di daerah pedesaan. Industri rumah tangga dan industri kecil diharapkan mampu berperan sebagai penyerap tenaga kerja di pedesaan. Peran ini tentunya tidak lepas kecenderungan penggunaan teknologi yang relatif padat karya dalam industri skala tersebut. Di pihak lain, industri rumah tangga dapat dijadikan sebagai pemimpin kemajuan perekonomian pedesaan, mengingat keterkaitan sektor tersebut dengan sektor lain relatif besar. Keberadaan industri rumah tangga di pedesaan diharapkan mampu meningkatkan aktivitas perekonomian desa, sehingga mampu menyempirkan jurang perbedaan pembangunan antara desa dan kota.

Sebagai badan usaha yang mampu menjembatani jurang perbedaan pembangunan antara desa dan kota, disamping sebagai wahana transformasi struktural yang ampuh, maka adalah hal yang wajar jika industri kecil dan rumah tangga mendapat porsi perhatian yang besar. Permasalahan yang muncul kemudian adalah strategi apa yang telah diterapkan pemerintah selama ini guna pengembangan industri kecil dan rumah tangga. Pada lain pihak perlu adanya evaluasi sejauh mana strategi tersebut berpengaruh terhadap peningkatan kinerja industri kecil. Hal yang terakhir yang perlu dipikirkan adalah strategi apa yang dapat diterapkan untuk pembangunan industri skala kecil di masa datang.

**III. Strategi Pengembangan Industri Kecil di Indonesia**

Di Indonesia sekarang ini seolah-olah terdapat tiga kelompok pemikiran dalam kaitannya dengan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memantapkan keberadaan sektor industri. Ketiga kelompok pemikiran tersebut adalah (Lincolin Arsyad, 1992):

1. Pengembangan sektor industri hendaknya diarahkan kepada yang industri yang memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*). Pemikiran seprti ini diwakili oleh kalangan ekonomi-akademis.

2. Konsep Delapan Wahana Transformasi Teknologi dan industri yang di kemukakan oleh Menteri Riset dan Teknologi, yang pada dasarnya memprioritaskan pembangunan industri-industri hulu secara serentak (simultan).

3. Konsep keterkaitan antar-industri, khususnya keterkaitan hulu-hilir. Konsep ini merupakan konsep Menteri Perindustrian.

Ketiga strategi pengembangan industri tersebut, khususnya industri skala kecil, akan memiliki arah dan konsekuensi yang berbeda. Jika strategi pertama yang dikembangkan, maka pengembangan industri yang berhubungan dengan sektor pertanian yang akan berkembang. Hal ini terjadi karena keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia berada di sektor pertanian, yaitu sektor yang telah sekian lama berkembang dan menjadi gantungan hidup masyarakat pada umumnya. Keunggulan komparatif akan muncul sejalan dengan peningkatan efiensi produksi suatu komoditas.

Sampai saat ini sektor pertanian merupakan sektor yang paling lama digeluti, dan telah terjadi efisiensi produksi pada komoditas hasil pertanian. Tentunya arah pengembangan industri, terutama industri skala kecil akan diarahkan pada produksi yang berhubungan dengan sektor pertanian. Jika strategi pertama yang dipilih, maka perkembangan industri akan relatif cepat, mengingat basis perekonomian sebagian rakyat

**Tabel 1:**

**Jumlah Industri/Kerajinan Rumah Tangga di Indonesia 1986 dan 1991**

| Lokasi | 1986 | Pangsa % | 1991 | Pangsa % | Pertumbuha % |
|---|---|---|---|---|---|
| DESA | 1252884 | 88.070 | 2065333 | 87.849 | 4.4372100 |
| KOTA | 169709 | 11.929 | 285651 | 12.150 | 4.6264471 |
| JUMLAH | 1422593 | 100 | 2350984 | 100 | 4.4599753 |

Sumber: Statistik Industri/Kerajinan Rumah Tangga, 1991, BPS dan Sensus Industri Kecil,1986,BPS, diolah.

adalah pertanian. Dengan demikian industri alat-alat bantu dan pengolahan hasil pertanian merupakan industri yang akan menjadi tulang punggung perekonomian.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah bahwa strategi tersebut tidak kondusif terhadap diversifikasi produk industri. Pembangunan industri yang menghasilkan produk baru tentunya sulit berkembang, karena tidak termasuk dalam industri yang memiliki keunggulan komparatif. Di sisi lain produk-produk pertanian umumnya mengalami penurunan *term of trade* dalam sistem perdagangan internasional. Apabila strategi ini tetap dipertahankan, maka dalam jangka panjang kondisi tersebut akan mengancam neraca pembayaran Indonesia. Hal ini merupakan salah satu kelemahan pengembangan industri menurut keunggulan komparatif yang dimiliki oleh suatu negara.

Strategi industrialisasi kedua adalah pengembangan industri hulu secara serentak, dan peningkatan nilai tambah dengan lompatan teknologi. Strategi kedua ini membawa konsekuensi pada peningkatan penggunaan teknologi modern dan canggih dalam sektor industri. Diharapkan dengan strategi ini maka nilai tambah barang-barang, terutama untuk keperluan ekspor, akan meningkat dan produk tersebut terhindar dari penurunan *term of trade*. Tujuan pembangunan industri hulu secara serentak adalah upaya untuk menurunkan *impor contain* produk dalam negeri. Diharapkan penciptaan industri hulu akan menurunkan ongkos produksi, sehingga daya saing produk Indonesia meningkat.

Nampaknya strategi kedua hanya cocok ditujukan bagi industri-industri skala menengah dan besar. Lompatan teknologi yang digunakan dalam proses produksi akan membawa akibat pada peningkatan biaya yang cukup besar. Dalam setiap lompatan teknologi terkandung pengorbanan yang besar. Semakin besar lompatan teknologi, maka modal yang dikorbankan untuk melakukan lompatan teknologi tersebut akan semakin besar. Tentunya hanya pengusaha industri skala menengah dan besar yang dapat melaksanakan hal itu. Permasalahannya terletak pada penguasaan kita terhadap teknologi sangat lemah. Sehingga lompatan teknologi yang ada hanya dapat dilakukan apabila kita memanfaatkan teknologi asing, atau kita mencuri teknologi tersebut. Kedua cara tersebut nampaknya masih sulit dilakukan oleh pengusaha industri terutama skala kecil. Di sisi lain besarnya kebutuhan modal untuk melakukan lompatan teknologi dan pembangunan industri hulu, dalam jangka pendek membahayakan bagi posisi neraca pembayaran kita. Penundaan mega proyek pada tahun 1991-1992 adalah cermin bahwa pembangunan industri hulu secara besar-besaran ternyata justru mengancam posisi neraca pembayaran.

Nampaknya dalam penetapan strategi kedua ini kita terkungkung pada suatu pengertian bahwa teknologi yang diterapkan harus bersifat *sophisticated*. Kiblat budaya kita yang selalu berorientasi ke Barat, merupakan penyebab munculnya pemahaman tersebut. Jika ditinjau lebih jauh, teknologi yang ada di daerah pedesaan, yang sering dianggap tradisional, pada beberapa hal mengandung penerapan teknologi tinggi. Masyarakat di pedesaan, terutama di Jawa ternyata mampu membentuk plat besi berbentuk bujur sangkar atau segi empat, hanya dengan memanfaatkan lidi atau benang sebagai alatnya. Teknik semacam ini umumnya disebut dengan teknik "mal", dan itu merupakan penerapan ilmu matematika yang relatif tinggi. Dengan menggunakan teknik sederhana dan didukung daya kreativitas yang ada, ternyata banyak industri kecil yang mampu menciptakan produk-produk impor yang dipandang mutakhir, dengan biaya yang jauh lebih rendah, misalnya antena parabola. Dalam kasus antena parabola, kelengkungan parabola yang dibuat di negara Barat dengan bantuan komputer, ternyata dapat dibuat oleh tenaga-tenaga terampil di Indonesia dengan harga yang jauh lebih murah. Dalam penerapan teknologi yang dipentingkan adalah bukan masalah canggih atau tidak canggihnya teknologi tersebut, namun yang lebih penting adalah bagaimana kemungkinan penerapan teknologi tersebut di Indonesia dan bagaimana perimbangan manfaat-biaya dari penggunaan teknologi tersebut. Teknologi yang diterapkan hendaknya bersifat tepat

**Tabel 2:**

**Jumlah dan Prosentase Industri Kerajinan/Rumah Tangga Yang Memiliki Bapak Angkat 1991**

| LOKASI | DESA | PANGSA % | KOTA | PANGSA % |
|---|---|---|---|---|
| MEMILIKI BAPAK ANGKAT | 17467 | 0.845723 | 17931 | 6.277240 |
| TIDAK MEMILIKI | 2047866 | 99.15427 | 267720 | 93.72275 |
| INDONESIA | 2065333 | 87.84972 | 285651 | 12.15027 |

Sumber: Statistik Industri Kerajinan/Rumah Tangga, 1991, BPS, Diolah.

**Tabel 3:**

**Sumber Permodalan Industri Kerajinan/Rumah Tangga di Indonesia 1991.**

| LOKASI MODAL | MODAL | MODAL SENDIRI | PINJAMAN SENDIRI + PINJAMAN |
|---|---|---|---|
| DESA | 2013032 | 10276 | 42025 |
| KOTA | 270299 | 2974 | 12378 |
| TOTAL | 2283331 | 13250 | 54403 |

Sumber: Statistik Industri/Kerajinan Rumah Tangga 1991,BPS, Diolah.

guna. Artinya teknologi tersebut sesuai digunakan dalam kondisi sosial-budaya di Indonesia, dan mampu dikuasai bangsa Indonesia, dengan pengorbanan yang seminimal mungkin.

Strategi pengembangan industri skala kecil yang terakhir adalah menciptakan keterkaitan antara indústri menengah-besar dengan industri skala kecil. Dalam rangka menciptakan keterkaitan antar industri, maka pemerintah menciptakan program Bapak Angkat-Mitra Usaha Industri Kecil (BA-MUIK) . Program keterkaitan industri menengah-besar dań kecil didasarkan pada PP No. 3/1983, Instruksi Menteri Perindustrian No. 301/M/SK/8/1984, dan kemudian dikukuhkan melalui UU RI No.5/1984 tentang perindustrian.

Program BA-MUIK merupakan pola kerjasama saling menguntungkan antara pengusaha besar dan kecil disektor industri, dan mencakup aspek pemasaran, manajemen, bahan baku/ penolong teknologi, keuangan, mesin dan sebagainya. Pola kerjasama BA-MUIK adalah sebagai berikut:

1. Pola Dagang;

Bapak angkat akan bertindak sebagai pemasar produk yang dihasilkan oleh mitra usahanya.

2. Pola Langsung (*Vendor*);

Dalam pola kerjasama ini produk yang dihasilkan oleh industri kecil akan digunakan oleh Bapak Angkat, tetapi produk tersebut tidak menjadi bagian produk yang dihasilkan oleh Bapak Angkat.

3. Pola *Sub-Contracting;*

Dalam pola ini produk yang dihasilkan oleh mitra usaha menjadi bagian dari produk yang dihasilkan oleh Bapak Angkat.

4. Pola Pembinaan;

Dalam kerjasama ini Bapak Angkat hanya melakukan pembinaan saja.

Secara finansial program tersebut kemudian didukung oleh :

1. Penyaluran dana meliputi 1-5% dari keuntungan bersih yang diperoleh oleh BUMN,

2. Pemilikan saham perusahaan besar oleh Koperasi,

3. Ketentuan penyaluran 20% dari kredit yang disalurkan oleh Bank-Bank Umum dalam bentuk Kredit Usaha Kecil (KUK) kepada pengusaha kecil, terutama di pedesaan.

Pola kerjasama BA-MUIK ternyata sebagian besar dilakukan oleh BUMN. Hal ini dapat dimaklumi karena BUMN adalah milik pemerintah, dan selalu sejalan dengan program yang dicanangkan pemerintah. Namun demikian ternyata pola kerjasama BA- MUIK kurang berhasil dilaksanakan oleh pihak swasta.

Terlihat bahwa jumlah industri rumah tangga yang memiliki Bapak Angkat sangat sedikit. Khususnya di pedesaan, hanya 0,846% dari total industri rumah tangga di pedesaan, memiliki Bapak Angkat. Kondisi industri rumah tangga di kota nampaknya lebih baik, karena baik dari sisi jumlah maupun prosentase ternyata lebih banyak memiliki bapak angkat.

Pola kerjasama *sub-contacting* merupakan pola kerjasama yang sulit dilakukan. Permasalahannya terletak pada tidak adanya standarisasi mutu dalam produksi yang dilakukan oleh pihak industri kecil. Pengusaha industri kecil pada umumnya tidak memiliki standarisasi mutu yang baku, baik dalam segi teknis maupun konsistensi mutu produk. Hal inilah yang menjadi penghambat pelaksanaan pola *sub-contracting.*

Di sisi lain Pengusaha besar lebih suka membeli *input* dari luar negeri daripada memesan dari para pengusaha indutri kecil di tanah air. Permasalahannya terletak pada kepraktisan pembelian input dari luar negeri. Sikap semacam ini adalah wajar bagi perilaku seorang pengusaha, khususnya dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, keterkaitan pola *sub-contracting* merupakan upaya bagi pengusaha besar untuk menurunkan ketergantungan produksinya dari pihak luar. Di sisi lain produk yang banyak bergantung pada bahan impor sangat rentan terhadap fluktuasi harga *input* di pasar

internasional. Nampaknya orientasi pengusaha besar dalam negeri masih terkungkung oleh proyeksi produksi jangka pendek, sehingga mereka masih enggan untuk melakukan *subcontracting*.

Kesulitan yang dialami oleh para pengusaha industri kecil dan rumah tangga umumnya terletak pada masalah permodalan, ketidakpastian pemasaran, dan standarisasi mutu produk. Pemerintah telah mencoba mengatasi permasalahan permodalan tersebut dengan penyaluran 1-5% keuntungan BUMN kepada pengusaha kecil. Program tersebut telah dilaksanakan dengan baik, mengingat pemerintah mampu mengontrol setiap sepak terjang BUMN. Meski demikian keterbatasan dana, menyebabkan jumlah industri kecil yang menerima bantuan keuangan masih terbatas.

Melalui PakJan 1990, pemerintah menetapkan ketentuan penyaluran 20% kredit yang disalurkan bank-bank umum dalam bentuk KUK kepada industri kecil. Program tersebut sampai saat ini ternyata belum optimal dilaksanakan. Tingkat aksesibilitas bank- bank umum yang umumnya berada di perkotaan, tidak mampu menjangkau pengusaha industri kecil yang umumnya berada di daerah pedesaan. BRI merupakan satu-satunya bank yang memiliki pengalaman banyak dalam hal penyaluran kredit kepada pengusaha industri kecil di pedesaan. Selain BRI maka tidak ada bank pemerintah terlebih lagi bank-bank umum yang memiliki aksesibilitas penyaluran kredit di pedesaan seperti halnya BRI. Bank-bank umum juga sulit untuk melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan resmi di pedesaan, karena minimnya pengalaman bank-bank umum dengan kredit semacam itu. Dampaknya penyaluran kredit justru diberikan kepada anak perusahaan-anak perusahaan pengusaha besar. Hal ini dimungkinkan karena definisi usaha kecil yang patut mendapat KUK adalah perusahaan dengan nilai asset kurang dari Rp 600 juta diluar tanah dan bangunan.

Kesulitan penyaluran kredit kepada pengusaha kecil juga dipengaruhi oleh faktor intern dalam sistem manajemen industri kecil itu sendiri. Rata-rata manajemen usaha dan konsumsi rumah tangga dari para pengusaha masih menjadi satu. Di sisi lain, pada umumnya pengusaha kesulitan saat menunjukkan kelayakan usahanya, pada saat mengajukan permohonan kredit kepada bank-bank umum. Sistem penilaian pemberian kredit kepada pengusaha kecil ditekankan pada kelayakan usaha dan karakter pengusaha. Untuk menunjukkan kelayakan usaha inilah, kebanyakan pengusaha akan mengalami kesulitan, karena umumnya tidak mengembangkan sistem pembukuan pribadi.

Guna peningkatan aksesibilitas penyaluran kredit dari bank-bank umum kepada pengusaha industri kecil, terutama di daerah pedesaan, perlu adanya mekanisme baru yang memungkinkan bank-bank umum untuk menyalurkan KUK melalui kerjasama dengan lembaga keuangan resmi di pedesaan (BPR, BKD, KBPR, KUD dan sebagainya). Sistem kerjasama tersebut diharapkan dapat meningkatkan penyaluran KUK kepada pengusaha industri kecil, disisi lain terjadi pola keterkaitan antara bank-bank umum dengan lembaga keuangan pedesaan, sehingga secara tidak langsung peningkatan kinerja lembaga keuangan pedesaan akan terjadi.

Penanganan masalah pemasaran dan standarisasi produk sebenarnya dapat diatasi jika pola keterkaitan dapat berjalan dengan baik. Uraian di atas menunjukkan bahwa selama ini program keterkaitan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Upaya yang dapat ditempuh pemerintah adalah menciptakan kesatuan kerjasama diantara industri kecil yang ada. Wadah penyatuan kerjasama antar industri kecil akan dapat dimanfaatkan oleh pengusaha yang bersangkutan untuk saling tukar menukar informasi mengenai teknik produksi, sistem pemasaran, bahkan permodalan. Kerjasama diantara pengusaha industri kecil semacam ini akan meningkatkan rasa kebersamaan diantara mereka dan kelompok tersebut akan berupaya menolong diri mereka sendiri. Tukar menukar pengalaman pada berbagai hal yang menyangkut industri kecil antar pengusaha tersebut ,merupakan sistem transfer informasi dan teknologi yang efisien, sehingga pada akhirnya kerjasama antar pengusaha tersebut mampu meningkatkan kinerja usahanya.

Sistem perdagangan internasional yang semakin tersekat-sekat oleh sistem proteksi dan blok-blok perdagangan, merupakan tantangan yang harus di jawab. Jika sektor industri diharapkan mampu berperan sebagai motor dalam pembangunan, maka pembangunan industri kecil harus berorientasi pada upaya menumbuhkan kemampuan daya saing di pasaran global.

Salah satu upaya menumbuhkan kemampuan daya saing industri kecil dapat dilakukan adalah penetapan kebijakan yang mampu memberikan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan industri kecil. Hal ini tentunya berkaitan dengan sistem pasar dan persaingan yang ada. Kecenderungan pasar di Indonesia yang berbentuk oligopoli, kurang menguntungkan bagi industri kecil untuk berkembang. Dalam pasar oligopoli, terdapat kecenderungan pengusaha besar dalam pasar tersebut untuk melakukan kolusi. Sayangnya di Indonesia kita belum menerapkan undang-undang yang dapat menjamin sistem persaingan yang sehat dan jauh dari sistem kolusi yang merugikan.

Upaya menumbuhkan daya saing membutuhkan strategi pengembangan industri yang multi dimensi. Segala permasalahan menyangkut industri kecil, mulai dari kecukupan modal, sistem pemasaran dan standarisasi produk, harus mampu dijawab dan ditanggulangi. Jika permasalahan tersebut telah berhasil diminimasi, maka upaya selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi produksi dan produktivitas faktor produksi. Untuk mencapai itu semua diperlukan strategi pengembangan yang melibatkan semua unsur terkait dalam pembangunan industri. Hal inilah yang sekarang perlu menjadi bahan pemikiran kita bersama.

# Indonesia Inc.

## Teknoekonomi dan Indonesia Masa Depan

**Memasuki babakan kedua pembangunan nasional april tahun ini Indonesia menghadapi kerasnya gerusan perubahan-perubahan dalam skala global akibat semakin lumatnya kampung kecil dunia.**

Kemutlakkan yang kemudian terjadi adalah tercebur dan larutnya Indonesia dalam laut besar perubahan global tersebut. Garda depan radikalisme perubahan tersebut tak pelak lagi adalah teknologi, dengan MNC (*Multy National Corporation*) dan negara industrial-mapan berada di menara gading dominasi. Term-term baru seperti, "*global factory*", "*post-fordism*", "*managed trade*", "*global merger & acquisitions*", adalah lonceng-lonceng nyaring yang menandai tergusurnya negara-negara periferal -- termasuk didalamnya Indonesia. Dominasi teknologi dunia oleh pemain utama diatas sudah sedemikian kuat sehingga menjadi urgensi negara-negara periferal untuk mengedepankan *econo-technonationalism* untuk membendung dominasi dan melakukan lompatan secara teknologis. Tulisan ini mencoba memberikan gambaran konsepsi upaya-upaya *econo-technonationalism* dalam usaha negeri ini mengejar ketertinggalan dibidang teknologi.

YUSWOHADY
Mahasiswa Teknik Mesin FT UGM
Pemimpin Umum majalah BALAIRUNG UGM

**PENGARUH-PENGARUH EKSTERNAL**

Terdapat beberapa kecenderungan teknologis dalam skala global yang mengharuskan Indonesia melakukan refleksi dan reorientasi dalam melaksanakan pembangunan. Kecenderungan-kecenderungan tersebut adalah, **pertama**; telah terjadinya perubahan karakter perdagangan global dimana sifat perdagangan tidak lagi menyerupai jenis pertukaran seperti digambarkan dalam teori ekonomi klasik, yang memandang bahwa perdagangan pada dasarnya adalah mekanisme negara untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan mereka (sumber daya, kondisi domestik,budaya). Jadi perdagangan didominasi oleh pertukaran yang merefleksikan kekuatan tertentu perokonomian (negara maju mengekspor barang manufaktur, negara berkembang bahan mentah). Kecenderungan yang belakangan terjadi adalah bahwa perdagangan merefleksikan keuntungan acak (random) dan sementara yang dihasilkan dari skala ekonomi (*economic of scale*) atau pergeseran kepemimpinan dalam persaingan dibidang teknologi yang ketat, Tylor (1986) dan Kruegner (1989)

**Kedua**: Adanya kecenderungan *Technoglobalism* dengan tiga dimensi; pasar global, kompetisi global, dan korporasi global. Kecenderungan ini ditandai oleh; 1. Perdagangan internasional 2. investasi asing 3. subkontrak internasional 4. lisensi internasional 5. Merger dan akuisisi lintas negara 6. *joint venture* internasional 7. kerjasama R&D internasional dan perjanjian intra perusahaan di tingkat global (Stevens, 1990).

Kolaborasi antar MNC Jepang dan AS meningkat dari hampir nihil pada tahun 1979 menjadi 50 tahun 1985, Jepang dengan EEC dari 5 menjadi 90, dan AS dengan EEC dari 10 menjadi hampir 200 kolaborasi (Hergest & Morris, 1988). Dalam industri semikonduktor kerja sama lintas negara dari 43 (1983) menjadi 90 (1985) dan lebih 100 (1989). Kecenderunag yang akan terjadi pada masa datang adalah persaingan antar blok MNC melawan blok MNC yang lain bukan antar MNC secara individual, juga gerusan negara berkembang dan terbelakang oleh

blok MNC. Kecenderungan *Techno-globalism* akan mendesak negara berkembang pada posisi yang semakin terbelakang secara teknologis. Musuh yang paling pelik dari negara berkembang seperti Indonesia, nantinya bukan lagi negara tapi aliansi MNC yang lebih rakus dan ekspansif.

**Ketiga:** Secara bersamaan terjadi pula kecenderungan *technonationalism* dimana terdapat arus kesadaran dari negara yang menganggap teknologi sebagai aset strategis perekonomian sehingga mutlak harus dilindungi. Indikasi dari kecenderungan ini adalah fenomena meningkatnya campur tangan negara dalam mengelola industri strategis berteknologi canggih dengan instrumen-instrumen; 1. Subsidi R&D 2. *Non-tariff barrier* 3. *Grey Area Measure* (macam *Non-tariff Barrier* dengan kuota atau mekanisme harga) 4. *Trade-Related Investment Measure* (misalnya persyaratan *Local content*) 5. *Trade-Related Intelectual Property Right Measure* (TRIPs, perdagangan-gan yang dikaitkan dengan hak cipta intelektual). 6. Pembiayaan ekspor (Stevens, 1990).

Beberapa pakar menyebut kecenderungan ini dengan istilah "*Managed Trade*" atau "*Strategic Trade*". Di AS misalnya, administrasi Clinton melaksanakan ini dengan program *clintontec* yang mengucurkan dana $ 17 milyar, yang membuat produk manufaktur berteknologi canggih AS menggeliat menghantam kompetitornya di Jepang. Ford-Taurus, Neon-Chrysler, Pentium-Intel begitupun teknologi HDTV adalah lambang kebangkitan industri AS hasil program *Clintontec*. Fenomena *Technonationalism* menjadi mengkawatirkan bagi negara berkembang, ketika negara-negara yang ekspansif melakukannya justru negara-negara industri maju yang mendominasi teknologi dunia.

Kesepakatan GATT 15 desember 1993 lalu memang akan mengikis kecenderungan *technonationalism*, hanya saja yang harus menjadi catatan kita, secara umum liberalisasi perdagangan akan merugikan negara-negara berkembang akibat terlambatnya negara berkembang melakukan industrialisasi. Keterlambatan ini membawa konsekwensi ketidaksamaan *start* dan tidak berimbangnya persaingan dalam pasar bebas. Berbagai kesepakatan baru GATT yang merugikan negara berkembang antara lain; kesepakatan baru mengenai perdagangan jasa, audio visual, pendirian "polisi ekonomi dunia" WTO (*World Trade Organization*) dan yang terpenting khususnya di bidang teknologi adalah dimasukkannya perlindungan terhadap hak milik intelektual (TRIAPR: *Trade Related Aspect of Intelectual Property Right*, meliputi; *trademark, service mark, industrial design, lay out & design of integrated circuit, trade secret & know how*, hak cipta dan paten) yang didominasi kepemilikkannya oleh negara industri maju dan menempatkan negara berkembang sebagai konsumen. Sebuah survai oleh Bank Dunia dan OECD (dikutib Sindhunata PDBI, 1993) menyimpulkan bahwa liberalisasi perdagangan dunia akan meningkatkan perdagangan dunia pertahun sebesar US$ 213 milyar di tahun 2002 (total perdagangan dunia sebesar US$ 48 triliun), dimana 66% diraih negara-negara OECD dengan keuntungan terbesar diperoleh ME, Jepang dan NAFTA, Sebaliknya, justru negara-negara berkembang me-

Diagram spektrum aktivitas R&D nasional. Disusun kembali oleh penulis dari berbagai ...
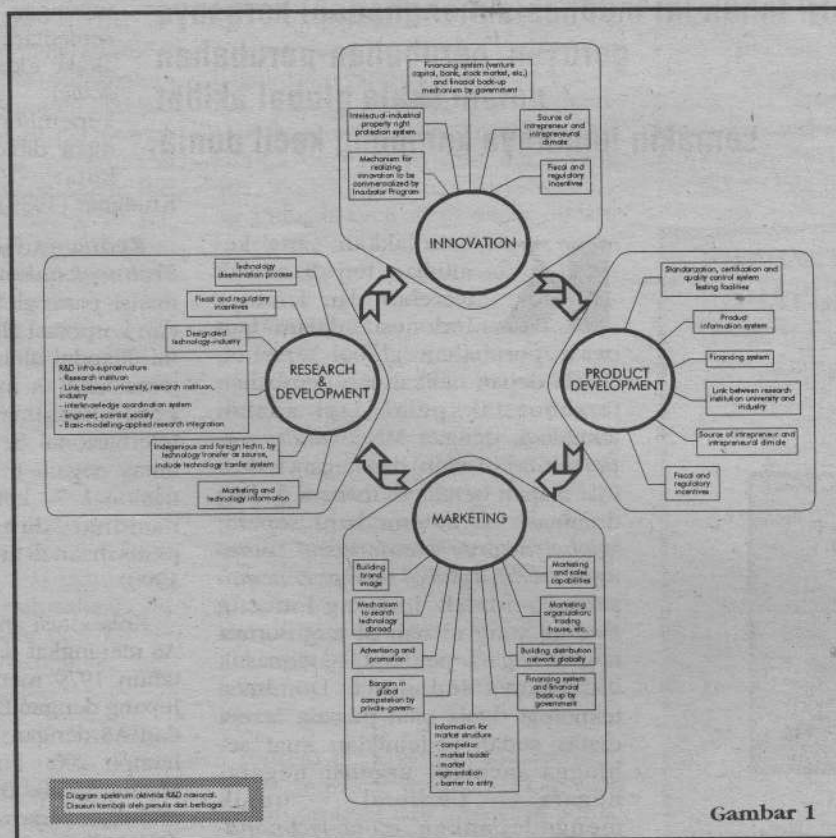
**Gambar 1**

ngalami kerugian. Indonesia misalnya, akan mengalami kerugian sebesar US$ 1,9 milyar pertahun.

**Keempat**: Sistem produksi dunia telah berkembang sedemikian radikal hingga kita kenal term-term seperti, *International Production, Global Factory* dimana proses penaikkan nilai tambah (*value adding*) produk oleh korporasi tertentu dilaksanakan melintas batas-batas negara. Ini timbul karena beberapa sebab seperti,
1. pengurangan biaya transaksi
2. spesialisasi dan pemanfaatan produsen lain untuk memperoleh biaya produksi kombinsi yang lebih murah.
3. Akibat disparitas upah internasional yang besar. 4. Atau menurut Raymon Vernom, karena terjadi obsolensi produk di negara asal yang berakibat korporasi yang bersangkutan menaikkan tingkat teknologi produk dan merelokasi produk yang telah obsolen ke negara lain. Sistem produksi dunia juga telah mengalami tranformasi dari sistem *Fordism* produksi barang standar dan masal ke *Post-Fordism* (Teknik produksi fleksibel dimana mesin produksi dirancang untuk mudah dimodifikasi untuk mengantisipasi *product life cycle* yang cepat. Sistem *Post-Fordism* memerlukan dana dan teknologi yang tinggi sehingga hanya perusahaan besar yang mampu melakukannya. Ini juga berarti mekanisme 'seleksi alam' dan '*barrier to entry*' bagi negara yang miskin secara teknologis.

Berbagai pengaruh eksternal-mondial diatas mendesak Indonesia untuk mengkaji ulang orientasi pembangunannya dengan memasukkan teknologi sebagai penopang. Dalam paradigma ini Indonesia harus menentukkan sektor-sektor strategis (sektor berteknologi canggih dengan orientasi komersial), melindungi dan mengembangkannya. Dari sektor-sektor strategis sebagai ujung tombak diharapkan perolehan nilai tambah dan efektifitas pembangunan akan maksimal dan kemenangan akan didapat dalam persaingan dipasar internasional. Perkembangan baik terjadi awal tahun lalu, ketika timbul diskusi mengenai perlunya antisipasi terhadap perkembangan-perkembangan diatas (polemik KOMPAS februari 1993). Bersamaan dengan itu terjadi perubahan yang mendasar dalam komposisi kabinet dimana teknolog mendapatkan porsi yang signifikan. Fenomena ini mengindikasikan adanya keseriusan dan komitmen politis pemerintah dalam membangun basis teknologi Indonesia.

Setidaknya terdapat dua alasan utama mengapa sektor strategis (sektor berteknologi canggih) harus dilindungi oleh pemerintah dan menjadi agenda nasional lintas sektoral.

**Pertama:** Dalam industri ini biaya cenderung menurun dan kualitas produk yang dihasilkan cenderung membaik sepanjang waktu. Disamping itu hasil (*return*) hasil dari kemajuan teknologi cenderung mengalami *spill over* ke berbagai sektor perekonomian lainnya. Dari hambatan untuk masuk (*barrier to entry*) oleh skala ekonomi (*economic of scale*), kurva belajar dsb. memberikan keuntungan buat perusahaan pertama yang memasukinya (*first comer*) yang cenderung dihasilkan dalam struktur pasar dengan persaingan tidak sempurna (*imperfectly market*). Sebagai hasil dari karakteristik ini keunggulan komparatif (*comparative advantages*) suatu negara di industri ini bukan merupakan fungsi kekayaan (*endowment*) faktor produksi nasional tapi sebagai fungsi interaksi strategis antara perusahaan dan pemerintah di dalam negeri dan di luar negeri. (Laura D. Tyson, 1990)

**Kedua**: kompleksitas yang inheren terdapat pada siklus inovasi teknologi dan aktifitas penanganan R&D yang menghasilkan produk yang sukses secara komersial di pasar. Kompleksitas siklus ini dijelaskan dalam uraian berikut.

**KARAKTER DAN KOMPLEKSITAS INOVASI TEKNOLOGI**

Inovasi teknologi berjalan menurut tiga urutan proses, dimana tiga urutan tersebut harus berjalan kait-mengkait dan simultan. **Pertama**: penyusunan konsep ide, *invention*, (*technology-push stimulus*) dan pengenalan kebutuhan pasar (*demand-pull stimulus*). Industri pesawat Boeing misalnya, memulai tahap inovasinya dalam memproduksi pesawat canggih terbarunya, dengan biaya R&D sebesar $ 5 milyar, Boeing 777, dengan memasukkan konsumennya sebagai "disainer". Disini pesawat yang menjadi tuntutan pasar adalah tujuan manajemen Boeing. Pada tahap pertama ini biasanya diikuti dengan identifikasi dan evaluasi *knowledge* dan ilmu-ilmu penunjang yang diperlukan. Setelah itu dikoordinasi lintas disiplin ilmu-ilmu tersebut untuk tujuan inovasi yang akan dilakukan. Disini dukungan *basic* maupun *applied research* -- baik *indigenous* maupun *foreign technology* melalui transfer teknologi -- sebagai sumber teknologi mutlak diperlukan.

**Kedua**: dilaksanakan analisa teknis, biaya dan potensi pasar yang dilanjutkan dengan pengembangan teknis, *problem solved, prototype* dan

JAPAN INCORPORATED
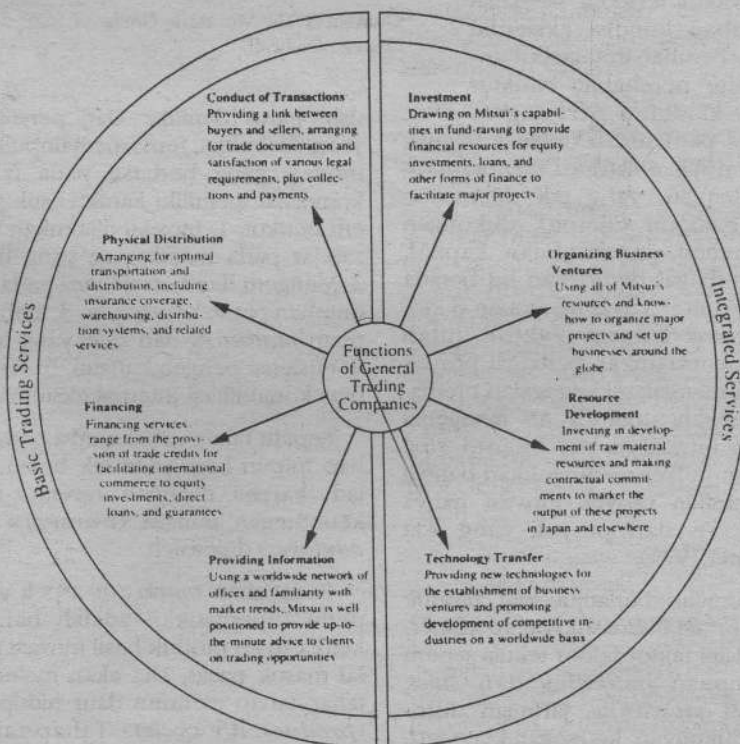
**Gambar 2** The function spectrum of the *Sogo Shosha*
*Source :* Mitsui & Co.Ltd.

CHARACTERIZATION OF THE MAJOR INDUSTRIAL GROUPINGS

**Gambar 3** The Mitsubishi Group
*Source :* Dodwell.

*testing.* Pada tahap ini bila kelayakan teknis dan potensi ekonomis memberi harapan, maka proses berlanjut ke tahap ketiga, yang meliputi; rekayasa disain, testing, produksi masal, *marketing* dan pelemparan produk ke pasar.

Kalau pada tahap 1 dan 2 lebih banyak dilakukan *researcher* dan *scientist* di institusi Litbang dan universitas, maka pada tahap 3 yang lebih berperan adalah *intrepreneur* dengan visi bisnis yang signifikan. Pada tingkat inilah proses memasuki tahap dengan resiko amat tinggi dengan investasi 10 kali lebih besar dari tahap 1 dan 2, meliputi investasi di bidang pabrik, peralatan, material, SDM, begitu biaya pula pengembangan pasar, pendirian jaringan distribusi, sampai *advertising* dan promosi. Tahap ini dimasuki setelah mengalami pengkajian, analisa dan perhitungan yang mendalam.

Tiga tahap diatas merupakan alur mata rantai dari berbagai bagian (*interface*) yang berbeda dimana kegagalan salah satu mata rantai berakibat pada kegagalan proses secara keseluruhan. Tiga tahap itu biasanya berlangsung selama 3-30 tahun dimana dalam rentang waktu tersebut berbagai perubahan kondisi eksternal terjadi. Perubahan tersebut antara lain; perubahan struktur pasar, karakter persaingan, regulasi pemerintah (ingat misalnya, program SDI, *Strategic Defence Initiatives* Reagan, yang tak diteruskan Bush maupun Clinton), dukungan manajemen, ketersediaan kapital, dsb. Berbagai perubahan ini berada diluar kontrol dan kemampuan si inovator/*intrepreuneur.* Faktor inilah yang menyebabkan berbagai proyek inovasi mengalami kegagalan prematur. Sebuah studi di AS mengenai proyek inovasi dalam industri sipil maupun militer menunjukkan bahwa keberhasilan proyek inovasi hanya terjadi 5% dari proyek yang ada (Haeffner,1973).

Kerumitan berlanjut saat produk hasil inovasi memasuki tahap komersial. Disini faktor-faktor teknis seperti kemampuan *marketing* dan *sales,* promosi-*advertising,* jaringan distribusi, dukungan keuangan,keunggulan kualitas-harga-waktu penyerahan (QCD), pemahaman struktur pasar dsb. harus dimiliki. Dari penelitian yang dilakukan, Jerfis menyimpulkan, inovasi yang berhasil pada tahap komersial memiliki karakteristik seperti berikut; 1. Inovasi dilakukan bersandar pada manajemen yang baik. 2. Mengerti dan berorientasi pada kebutuhan pasar/konsumen. 3. kemampuan *marketing* dan *sales* yang baik. 4. efisiensi pengembangan. 5. Efektifitas komunikasi internal-eksternal.

Seperti tahap sebelumnya pada tahap inipun kegagalan tak boleh terjadi karena disinilah *revenue* dari keuntungan transisi (*transitory advantages*) diperoleh.

Pada tahap *marketing* aspek yang perlu diperhatikan adalah bahwa, ketika suatu produk hasil inovasi mulai masuk pasar, Dia akan melewati tahap-tahap menurut daur hidupnya (*product life-cycle*). Tahap-tahap tersebut adalah; 1. *Embrionic,* saat produk mulai dilempar di pasar. disini pangsa pasar mulai diperoleh. 2. *Growth,* dimana pangsa pasar berkembang. 3. *mature,* dimana keuntungan puncak diperoleh. tahap terakhir adalah tahap *aging* dimana produk mulai meninggalkan pasar. Dalam konteks ini manajemen harus mampu memanfaatkan setiap tahap ini secara maksimal dan siap meluncurkan produk baru saat produk memasuki tahap *aging* agar penguasaan pasar terus berlangsung. Perusahaan MNC seperti GM,IBM,GE dll. mampu me-*manage* siklus ini sehingga dapat merajai pasar dibidangnya. Bahkan,dalam bidang industri tertentu dimana persaingan sangat keras, mati hidupnya perusahaan ditentukan oleh kemampuan manajemen perusahaan menggulirkan siklus ini.

Karena berbagai kompleksitas penanganaa R&D diatas, diatas maka pemenuhan dan pengadaan faktor-faktor berikut sangat diperlukan.
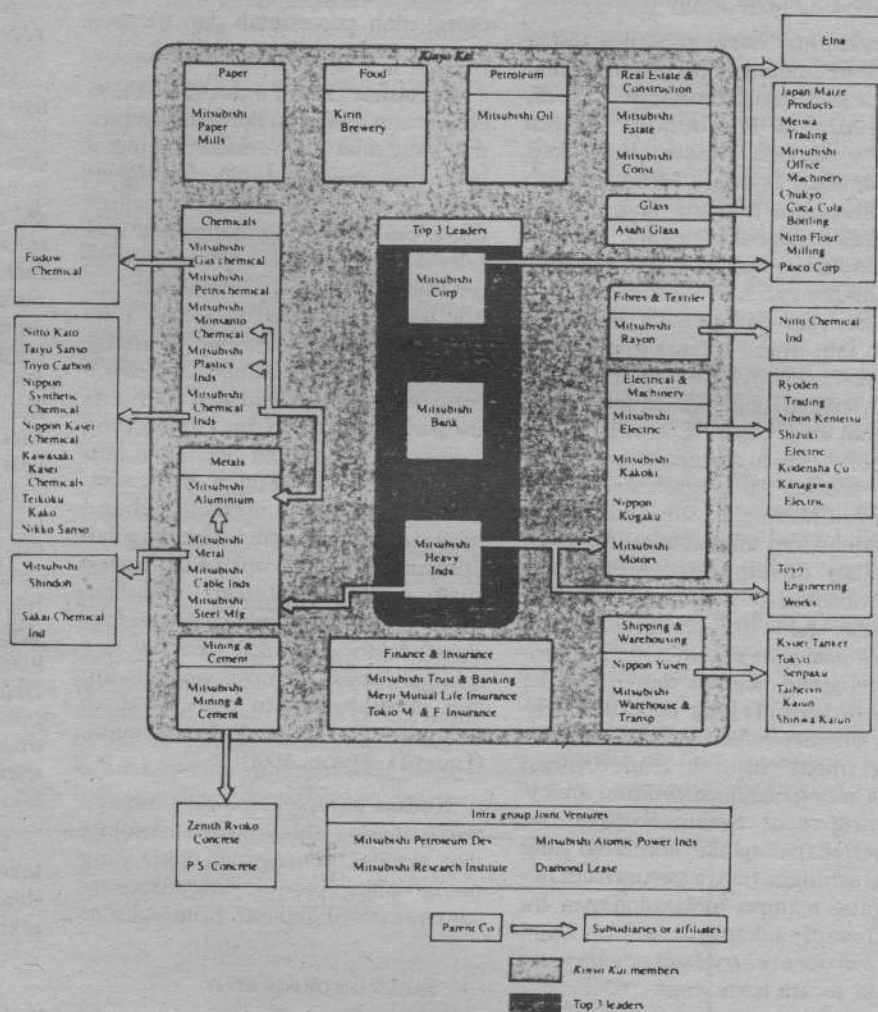
1. Infrastruktur R&D, meliputi;

- Sarana penelitian baik di universitas, litbang pemerintah maupun di industri. Di AS infrastruktur R&D dipusatkan dalam *Science Park/ Science Based Industrial Park* seperti Sillicon Valley dan Resarch Triangle Park, sementara di Jepang disebut *Science City* seperti Tsukuba Science City.

- Keterkaitan lembaga R&D di universitas-litbang-industri. Fadel Muhamad menyebut keterkaitan ini dengan "keterkaitan strategis Tripartit".

- Sistem organisasi/koordinasi *knowledge-know how* untuk mendukung sebuah proyek inovasi teknologi.

- Berbagai sistem hukum pendukung; *Industrial-intelectual property right*, UU mengenai alih teknologi, UU mengenai investasi dsb.

2. Kemampuan manajemen R&D yang baik.

3. Basis riset yang baik meliputi; *basic* dan *applied research*.

4. Kejelasan dan konsistensi strategi pengembangan teknologi strategis. Jepang misalnya, melalui MITI (*Ministery of International Trade and Industry*) menetapkan *steel, electric power, shipbuliding, dan chemical fertilizier* sebagai industri pilihan (*designated industry*) diawal industrialisasi jepang, MITI juga menetapkan *micrielectronics, new material, biotecnology, superconductivity, system technologies* dalam *aerospace* dan rekayasa kapal sebagai teknologi unggulan yang akan dicapai Jepang pada masa datang (MITI, 1987)

5. Sistem masukan informasi pasar untuk melihat trend kebutuhan pasar (*market need*) berikut teknologi pendukungnya, sebagai hulu dari proses R&D (*demand-pull R&D stimulus*)

6. Iklim kewirausahaan (*intrepreneurship*) yang memadai untuk merealisasikan inovasi teknologi kearah produk komersial. Di AS ini dilakukan dengan melaksanakan program yang disebut dengan *Incibator Program* yang mengambil tempat di Sillicon Valley dan *Route 128 Research-Industrial Complex*.

7. Dukungan finansial dan sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan yang strategis dan populer di AS adalah Modal Ventura (*Venture Capital*). Modal jenis ini memungkinkan para *researcher,scientist*, dan *intrepreneur* merealisasikan hasil penemuannya menjadi produk massal-komersial (lihat misalnya, kelahiran raksasa Apple atau Hawlett Packard).

8. Berbagai insentif dan kebijakan fiskal(pajak) yang kondusif.

9. Penanganan sistem standarisasi dan *quality control* baik nasional maupun internasional.

10. Kemampuan *marketing* yang baik terutama berorientasi ke pasar luar negeri.

11. Pemahaman mengenai struktur pasar (kompetitor, *market leader*, segmentasi pasar, tingkat konsentrasi pasar, tingkat campur tangan pemerintah, *barrier to entry* dsb.)

12. Membentuk *International Bargain*.

Di Jepang keempat fungsi diatas, dilaksanakan oleh *General Trading House* (*Sogo Sosha*), perusahaan dagang yang memiliki jaringan pemasaran di seluruh dunia dan memiliki kemampuan mensinergikan berbagai kepentingan dari perusahaan-perusahaan yang berada dalam kelompoknya (Keiretsu).

13. Secara bertahap menciptakan *"Brand Image"* (image merk) dalam pasar domestik maupun global.

14. *Financial Back Up* melalui keterkaitan strategis swasta-pemerintah dalam kerangka persaingan global. Beberapa pakar barat menyebut kunci keberhasilan Japan Inc. adalah adanya dukungan finansial tanpa batas dari bank-bank terkemuka yang terkenal dengan nama Zaikai (kelompok perusahaan yang berbasis pada bank seperti kelompok Daici Kagyo Bank, Industrial Bank of Japan dsb.)

— lihat bagan spektrum penanganan R&D nasional

**Gambar 4** Relationships among the industrial groupings
*Source* : Dodwell.

**STRATEGI INCORPORATED**

Istilah Incorporated berasal dari Japan Inc. – nama yang diberikan oleh kalangan barat terhadap perilaku dan strategi bisnis Jepang yang sangat nasionalistik terutama dalam menghadapi dunia luar (negara negara

industri mapan di era 60- an). Strategi ini dilaksanakan dengan menciptakan sinergi dan kolaborasi swasta-pemerintah dan mengerahkan segenap potensi nasional secara konvergen dalam membentuk kekuatan ekonomi negara dalam berhadapan dengan negara-negara yang telah maju secara ekonomi-industrial. Dalam kurun waktu 1-2 dasawarsa hasil dari Japan Inc. sangat spektakuler, dengan mengantarkan Jepang sejajar dengan negara-negara maju seperti AS dan Eropa.

Kunci keberhasilan Japan Inc. adalah apa yang disebut dengan, *Kigyo Keiretsu* (*Industrial grouping* = grup perusahaan) yang dikontrol secara ketat dan diarahkan oleh pemerintah melalui MITI (*Ministery of Industrial Trade and Industry*), MoF (*Ministery of Finance*), *Bank of Japan*, JETRO (*Japan External Trade Organisation*), *Ministery of Foreign Affair*, dsb. Di Jepang saat ini terdapat 80-100 grup perusahaan, enam besar (*Big Six Keiretsu*) diantaranya memiliki posisi strategis dan menentukan bagi industri Jepang. Dalam grup perusahaan tersebut terjadi ikatan yang spesifik seperti; *crossholding of shares*, pembentukkan dewan eksekutif anak perusahaan dalam grup, pertukaran eksekutif antar perusahaan dalam satu grup, pengangkatan eksekutif dari kalangan birokrat (biasanya dari MITI) dengan tujuan untuk mendekatkan hubungan dengan birokrasi, sumber pembiayaan yang selalu berasal dari bank milik grup (*core bank*), suport dari perusahaan dagang milik grup (*general trading house* = Sogo Sosha), kerjasama investasi anak perusahaan dalam satu grup khususnya dalam proyek-proyek investasi internasional.

Yang menarik dari grup perusahaan di Jepang adalah terdapatnya persamaan dalam struktur organisasi (Eli, 1990). Persamaan tersebut adalah, **pertama**; adanya *Presidential/Derectional Confrence* (Kais) dengan tujuan untuk mencapai konsensus antar anak perusahaan dalam kebijakan-kebijakan grup, proyek skala besar, strategi internasional, *credit support* dan *joint venture*, juga dalam pengangkatan eksekutif pada posisi-posisi strategis. **Kedua**; Adanya bank (*core bank*) sebagai penyedia kredit, pembiaya eksport-import, dan sebagai *risk taking guarantor*. Dalam operasinya bank-bank ini berada dalam kontrol, pengawasan dan asistansi dari MoF dan Bank of Japan. **Ketiga;** terdapatnya *General trading house* (Sogo Sosha) yang mensuplai *raw material* pada anggota grup, menjual dan mempromosikan produk baik di pasar domestik maupun di pasar internasional, melakukan transfer teknologi, mencari informasi pasar, dsb. (lihat gambar 2)

**Keempat**, perusahaan utama sebagai lokomotif dan inspirator grup. Misalnya *Keiretsu* Mitsubishi memiliki perusahaan utama Mitsubishi Heavy Industry, Keiretsu Mitsui memiliki Mitsui Real Estate and Development, Sumitomo dengan Sumitomo Metal Industry dsb. Format grup perusahaan di jepang terlihat pada gambar 3.

Sementara itu antar grup perusahaan tidak terjadi kompetisi yang kasar terutama di pasar domestik. Antar mereka terdapat saling pengertian dan kolaborasi dalam kerangka kepentingan nasional terutama dalam menghadapi kompetitor luar negeri. Misalnya dalam kerjasama investasi luar negeri (lihat misalnya proyek-proyek industri di Indonesia , selalu ditangani oleh konsosium Jepang), juga dalam pengamanan dan perolehan *raw material*, -mereka bekerja bersama-sama. Gambar 4 adalah deskripsi mengenai kerjasama antar grup perusahaan di Jepang.

Asistansi pemerintah terhadap grup perusahaan di Jepang dilakukan dengan berbagai cara. Melalui MITI pemerintah meluncurkan dua kebijakan bersejarah yaitu Kebijaksanaan Rasionalisasi Industri (*Sagyo goirako seisaku*) dengan mengadopsi teknik produksi baru, investasi dalam fasilitas dan peralatan baru, kontrol kualitas, pengurangan biaya produksi, dsb. Sedang Kebijaksanaan Struktur Industri (*Sagyo Kozo seisaku*) secara lebih radikal mengatur proporsi sektor pertanian, pertambangan manufaktur,dan jasa dalam produksi total negara. Di dalam bidang manufaktur, kebijakan ini secara khusus mengatur prosentase industri ringan, berat, padat karya (*labor-intensive*) dan industri padat pengetahuan *knowledge-intensive*). Jantung dari kebijakan ini adalah melakukan seleksi terhadap industri strategis yang akan dikembangkan oleh pemerintah. MITI mengatur valuta asing dan import teknologi (melalui paten,merk,dan kerjasama investasi) yang memberikan kepadanya kekuatan untuk memilih industri yang akan dikembangkan. MITI juga mengatur pelaksanaan preferensi pajak dan pembiayaan, proteksi dari kompetisi global, mengatur kompetisi antar perusahaan secara domestik, membantu industri terpilih mencapai skala ekonomi, melancarkan promosi ekspor dengan membentuk *Supreme Export Council* yang lansung berada dibawah perdana menteri. Melalui Bank of Japan mengatur dan mengon-
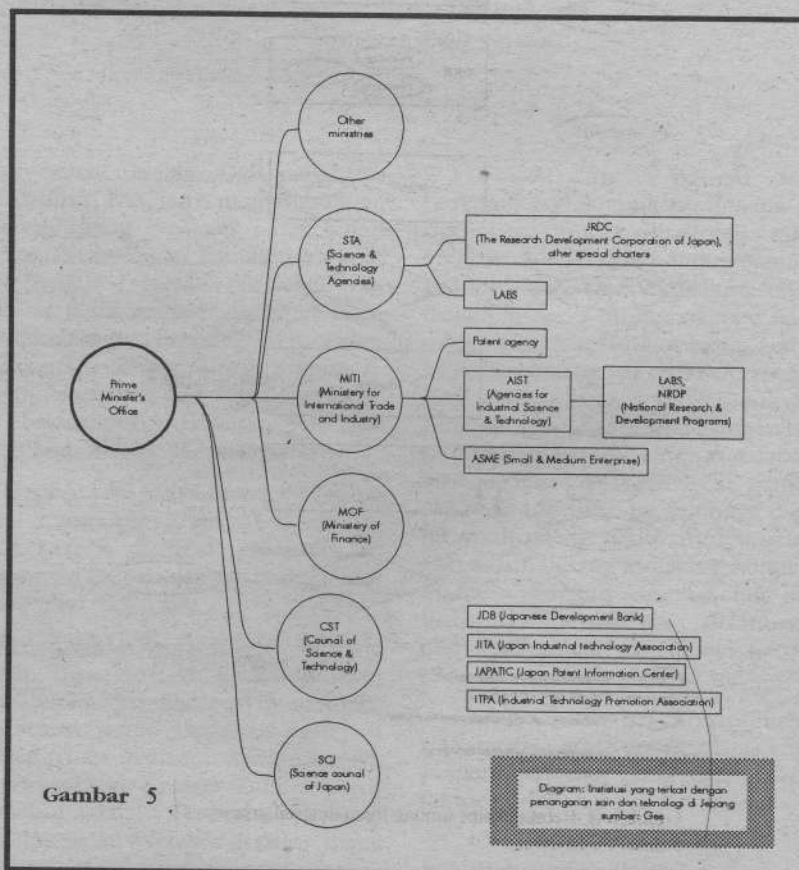
**Gambar 5**

# Pintu tanpa daun pintu

Hangatnya matahari membakar tapak kaki

Siang itu di sebuah terminal yang tak rapi

Wajah pejalan kaki kusut menguluk hari

Jari-jari kekar kondektur genit goda daki ............

(Iwan Fals)

Setiap pagi ketika kalian
belum bangunbeberapa temanku dengan setia
berbaris dengan rapi. Mereka antri untuk berlomba
menyusuri ruas-ruas aspal yang masih kedinginan
oleh udara malam.
Mereka membawa angka-angka yang menandakan
jalur tertentu yang mesti dilalui.
Teman saya yang rajin ini
Bis Kota namanya.
Sedangkan sahabatku yang lain
yang selalu datang dan pergi siang dan malam
sampai aku lupa kapan dia datang,
sekejap ia sudah pergi lagi.
Kulihat ia tak pernah merasa lelah. Makhluk yang
satu ini biasa dipanggil Bis Antar Kota.

Jika
jalan-jalan itu adalah
urat nadi dan bis-bis itu adalah
sel-sel darah. Maka
akulah jantung itu.
Kubiarkan darah mengalir deras
di rongga jantungku.
Pintuku
memang tidak berdaun pintu
sehingga aku tidak sempat
untuk menutupnya. Engkau dapat
datang kapan engkau suka
dan engkau dapat pergi
bila engkau mau.
Akupun sudah tidak ingat lagi
berapa jumlah jendelaku.
Setiap tamuku yang datang
mereka membawa
kamar sendiri.Dindingku
cakrawala dan atapku adalah
langit.

Kadang aku merasa malu
terhadap beberapa ulah kawanku
yang suka mengambil barang tamuku
tanpa permisi.
Memindahkan beberapa lembar rupiah
ke dalam dompetnya sendiri. Akulah
yang kena getah akhirnya. Tamuku
menuduh bahwa rumahku tidak aman.
Aku tahu bahwa perut anak istri
teman-temanku
ditumpukan kepadaku.
Maka kurelakan roda-rodanya
menggilasku dan menindihku.
Mereka kencingi
sudut-sudut ruanganku.
Mereka ludahi tamanku. Mereka tebar
kata-kata jorok dan makian
disetiap waktu.
Tapi aku tetap tersenyum.
Karena senyumku adalah harapan
sebuah Adipura.
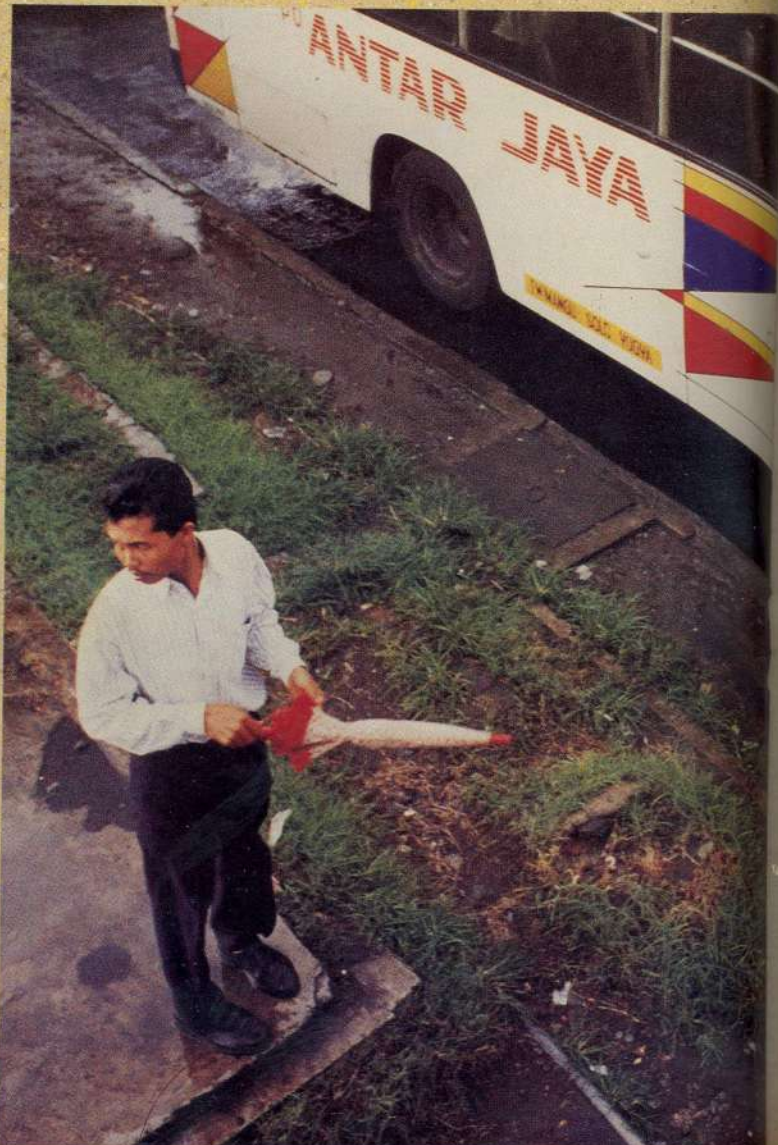
Narasi dan Foto Oleh Kelik Supriyanto

trol bank-bank yang masuk dalam *Big Six Keiretsu* (Mokudai Kigyo Shodan = Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, Fuyo, DKB, Sanwa), sebagaimana diketahui bank-bank ini adalah jantung dari *Keiretsu*. Sementara itu dalam bidang teknologi pengaturan dilaksanakan secara terpusat dan lintas kementrian yang langsung berada dibawah perdana menteri. (lihat gambar 5).

Johnson (1982) menulis bahwa keberhasilan Japan Inc. didukung oleh kondisi spesifik yang tipikal Jepang. Tak heran jika berbagai usaha untuk mengadopsi konsep ini mengalami kegagalan. Johnson menulis,

> *"...`beside three sacred treasures, the 'life-time' employment system, the seniority wage system and enterprise unionism, Japan also have others include; personal saving system, the distribution system, the 'descent from heaven' (amakudari) of retired bureucrats from the ministries into senior management positions in private enterprise, the structure of industrial grouping (keiretsu, or oligopolistic organization of each industry by conglomerate), the 'dual economy' with the elaborate structure of subcontracting it generates, the tax system, the extremly low degre of influence exercise over companies by shareholder, the hundreds-odd 'public policy company' and perhaps the most important of all, the government-controlled financial institution."*

Strategi Japan Inc. -- dengan berbagai modifikasi -- diterapkan oleh berbagai negara terutama negara-negara yang masuk dalam formasi "*lying geese*" (Korea,Taiwan,Hongkong dan Singapura). Korea misalnya memulainya di tahun 70-an dengan menggabungkan *Chaebol* (grup perusahaan) dengan pengarahan pemerintah. Melalui sekitar 33 *Chaebol*, Korea memiliki bargain internasional dan mulai menciptakan *brand image* dengan Hyundai, Samsung, dan Lucky Goldstar di ujung tombak. AS sendiri ketika menyadari kecolongan dari perusahaan-perusahaan Jepang, buru-buru meluncurkan *Clintontec* yang secara konseptual memiliki kesamaan dengan ide Japan Inc. (nasionalisme Teknologis). Sementara itu perusahaan-perusahaan terkemuka di AS seperti Ford,IBM,DEC dsb. melakukan restrukturisasi dengan melakukan aliansi strategis dengan meminjam ide Keiretsu (Businessweek, 1/1992).

Kalau Japan Inc. menempatkan kelompok peusahaan swasta sebagai pemain utama, lain halnya dengan Europe Inc. (istilah ini diberikan oleh penulis). Jantung dari Europe Inc. adalah grup perusahaan milik negara (BUMN) dengan nuansa *'welfare state'* yang signifikan. Contoh menarik terjadi di Spanyol dan Italia. Di spanyol BUMN dikelompokkan kedalam beberapa grup BUMN satu diantaranya yang terbesar adalah INI (*Instituto Nacional de Industria*). INI memiliki lebih dari 60 anak perusahaan dengan 170.000 tenaga kerja bergerak mulai dari kelistrikan (menguasai 1/2 total produksi negara), batubara (100%), industri dirgantara (100%), Shipbuliding, aluminium, sumber energi, mining, pulp, steel, dsb. Saat ini INI masuk dalam 10 besar korporasi terkemuka di Eropa. Seperti *Keiretsu* di Jepang INI memanfaatkan sinergi antar anggota grup, menciptakan skala ekonomi, dan membentuk bargain internasional melalui grup. Hal yang sama dilakukan IRI (*Instituto Recostruzione de Industriale*) yang memulainya justru dari institusi keuangan, sebelum menjadi grup perusahaan manufaktur yang disegani di Dunia.

**INDONESIA INC.**

Dalam menghadapi ekspansi *technoglobalism* dan *technonationalism* negara industrial-mapan serta kepungan blok- blok MNC, negara periferal seperti Indonesia harus berkomitmen untuk menempatkan pembangunan dibidang teknologi sebagai agenda nasional lintas sektor yang menuntut pemberdayaan seluruh kemampuan dan potensi bangsa. Dalam konteks ini menurut penulis, Japan Inc. sebagai sebuah strategi layak diadopsi tentu dengan berbagai modifikasi dan penyesuaian. Perlu diingat bahwa keberhasilan Japan Inc. berakar dari kultur Jepang yang spesifik dan adanya boom permintaan senilai US$ 2,47 milyar akibat perang Korea, disamping momentum yang tepat mengingat pada tahun 60-70-an dunia mengalami apa yang oleh para ekonom disebut dengan *Golden Age* yang saat ini sudah berlalu. Komitmen politis dari pemerintah sebenarnya sudah terlontar tahun 1989 melalui menteri perdagangan (Arifin Siregar waktu itu), tapi ide tersebut belum mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan. Alasan alasan yang mengemuka bagi penerapan strategi ini antara lain adalah; **Pertama**, Seperti diuraikan didepan, penanganan inovasi teknologi dan R&D nasional memiliki kompleksitas dan resiko yang tinggi dengan spektrum kegiatan yang amat luas lintas disiplin-sektoral. Ini berarti penanganan R&D tak bisa ditangani hanya oleh satu sektor atau kementrian tapi harus didukung segenap potensi bangsa. Konsekwensi yang kemudian timbul adalah prasarat peran ekspansif negara dalam mengerahkan segenap potensi tersebut.

**Kedua**, konsekwensi langsung dari usaha ini adalah masuknya Indonesia dalam rimba raya persaingan global dibidang teknologi. Kita akan secara frontal berhadapan dengan korporasi multinasional yang sudah meraksasa dan mapan dalam modal, manajemen, SDM dan kemampuan R&D. Pertarungan yang berimbang hanya dimungkinkan bila perusahaan-perusahaan kita menghimpun diri dalam skala grup atau korporasi. Fenomena *Keiretsu* dan *Chaebol* di tahun 50-70-an dan juga INI, IRI dalam menghadapi IBM, GM, P&G, Daimler Benz, menguatkan asumsi ini.

**Ketiga**, karena tradisi R&D masih baru di Indonesia asistansi dan intervensi (*market enhancing intervensioan*) pemerintah diperlukan untuk mengejar negara industrial-mapan yang sudah mentradisikannya puluhan tahun. Asistansi juga diperlukan dalam menciptakan iklim yang baik, infrastruktur R&D, penyiapan SDM, dan penopang bargain internasional.

Indonesia Inc. mensyaratkan partisipasi sektor swasta -- dengan pemain-pemain utama perusahaan besar (konglomerat) dan perusahaan kecil-menengah (*small/medium scale entreprise*) -- dan sektor pemerintah yaitu BUMN berikut berbagai bentuk asistansi negara. Dalam sektor swasta, grup dan konglomerasi industri dengan operasi keseluruh dunia memang sudah terbentuk seperti grup Salim, ASTRA, dsb. namun diakui bahwa peran konglomerat tersebut dalam memicu pertumbuhan industri nasional dalam kerangka pasar global belum begitu siknifikan. Bahkan penelitian terakhir oleh tim ekonom UGM menyimpulkan bahwa peran konglomerat sangat kecil karena hanya menjadi 'jago kandang' dan menikmati banyak kenikmatan proteksi pemerintah, sementara proteksi pemerintah sendiri mengarah pada *marketing empeding intervention.*

Dalam kerangka Indonesia Inc. pemerintah harus memiliki kemampuan untuk mengatur, mengontrol dan mengarahkan sektor swasta khususnya konglomerat besar sebagai ujung tombak dalam hal *marketing*, transfer teknologi dan akselerator pertumbuhan industri nasional secara umum. Misalnya keharusan dan dorongan agar mereka masuk dalam sektor industri strategis bagi ekonomi Indonesia masa depan. Sektor industri strategi tersebut menurut pengkajian BPPT meliputi; dirgantara, perkapalan, HANKAM, energi, elektronika

dan telekomunikasi, rekayasa, transportasi darat dan industri mesin dan alat pertanian. Dalam pelaksanaan intervensi pemerintah terhadap sektor swasta ada baiknya disimak pola yang berjalan di tiga negara, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan diawal boom ekonominya.

Ketiga negara tersebut menganut sistem finansial yang bertumpu pada kredit (*credit-based*) dimana perusahaan-perusahaan sangat tergantung pada kredit sebagai sumber pembiayaan (dibanding pasar modal). Hal ini dapat dilihat pada tingginya rasio utang terhadap modal yang menjadi ciri khas sektor perusahaan. Di Jepang pada tahun 50-70-an dan Korea Selatan tahun 1970-an, rasio ini mencapai 300-400% sementara di Taiwan lebih rendah dengan 160-200% (sebagai perbandingan untuk AS dan Inggris sekitar 50-100%). Pemotongan kredit akan membawa prospek pada segera dilikuidasinya perusahaan yang ada, akibatnya perusahaan sangat tergantung pada pihak yang mengendalikan kredit yaitu bank (Korea Selatan dan Taiwan) dan lembaga pemerintah (Jepang). Di Taiwan seluruh sistem perbankan dimiliki negara, begitu pula Korea sampai kurun 1980-1983, sedang Jepang sebaliknya, dimiliki swasta namun akses bagi deposito tambahan yang memungkinkan bank untuk memperluas pemberian kreditnyatergantung pada bank sentral. Di ketiga negara tersebut pemerintah berhak menetapkan tingkat suku bunga dan limit jaminan wajib, sehingga pemerintah dapat mempengaruhi pola investasi dalam perekonomian. Sistem ini dapat mendorong mobilitas sektoral dan memungkinkan pemerintah mengarahkan mobilitas tersebut dengan menggunakan 'insentif selektif' untuk berbagai sektor 'strategis'. Maka sistem ini merupakam mekanisme yang sangat ampuh bagi pemerintah guna mendorong perusahaan-perusahaan memasuki sektor industri strategis yang tidak akan mereka masuki tanpa adanya insentif. Pengendalian atas sistem finansial dan kerenanya atas perusahaan-perusahaan yang rasio utang terhadap modalnya tinggi (*highly leveraged firm*) telah digunakan oleh ketiga negara tersebut untuk membangun 'koalisi sosial' yang dibutuhkan guna menunjang sasaran pemerintah dengan menyadari bahwa para penentang akan mengalami kesulitan dalam memperoleh kredit (Wade, 1992).

Sementara di sektor negara sendiri, pemerintah juga harus menyusun strategi penanganan industri sektor negara. Sebenarnya embrio Indonesia Inc. sudah dirintis 5 tahun lalu dengan pendirian BPIS (Badan Pengelola Industri Strategis) yang menghimpun 10 industri strategis yaitu; IPTN, PAL, Pindad, INKA, Barata, BBI, INTI, LEN, Krakatau Steel, dan Dahana. Kelemahan mendasar dari grup perusahaan ini adalah penanganannya yang masih setengah-setengah dan sektoral karena kendala politis. Menurut penulis, BPIS ini layak ditempatkan dalam konteks agenda nasional dengan sektor-sektor terkait diintegrasikan ke dalamnya. Seharusnya BPIS dilegkapi dengan *Trading House*, bank milik grup, juga dipikirkan mekanisme subkontrak nasional yang melibatkan *small/medium scale enterprise* secara meluas. Dengan subkontrak nasional ini diharapkan berlangsung mekanisme *diseminasi* (penyebaran) teknologi dan asistansi manajemen,SDM,modal, dari perusahaan besar-strategis ke industri kecil dan menengah secara keseluruhan. Sementara dalam hal R&D keterkaitan strategis BPPT, LIPI dan universitas perlu diakomodasikan untuk menopang kapasitas teknologis. Ini masih harus di lengkapi dengan aliansi Kadin, kementrian Perdagangan, Luar Negeri dan Ristek dalam membentuk bargain internasional baik dalam *marketing* maupun dalam mencari teknologi luar negeri.

Christianto Wibisono (PDBI) berpendapat bahwa untuk memicu Indonesia Inc. pemerintah harus membentuk konglomerasi BUMN yang berbasis pada 7 bank terkemuka milik pemerintah (konsepsi ini meniru pola Zaikai di Jepang). Masing-masing konglomerat BUMN itu terdiri dari perusahaan-perusahaan dengan spektrum yang luas dari rekayasa, kertas, semen, elektronik, kimia, penerbangan, properti, jasa dsb. Konglomerat BRI misalnya mencakup perusahaan seperti Semen Gresik, Waskita Karya, Angkasa Pura, Rekayasa Industri, Petrokimia Gresik, Telkom, dan seterusnya. Tindak lanjut dari konglomerasi BUMN itu adalah aliansi dengan konglomerat swasta untuk menghimpun kekuatan bertempur di pasar internasional, misalnya konglomerat BNI melakukan aliansi dengan grup Salim, BRI dengan Bimantara, BBD dengan Sinar mas dan seterusnya (Wibisono, 1990).

Catatan akhir penulis mengenai strategi Indonesia Inc. berkait dengan strategi *marketing* produk hasil inovasi dalam pasar internasional. Orientasi yang selama ini dimajukan oleh kementrian Ristek-BPPT-BPIS adalah menghasilkan produk berteknologi secara lengkap. Dalam lini industri dirgantara misalnya strategi diarahkan untuk menciptakan sebuah pesawat ukuran kecil yang punya daya saing internasional. Lini industri *Shipbulding* diarahkan pada kapal dengan bobot tertentu. Menurut penulis kementrian Ristek-BPPT-BPIS hendaknya mulai memikirkan dan mengkaji orientasi baru dengan mengintegrasikan industri strategis nasional dalam sistem "*global factory*" melalui mekanisme subkontrak internasional. Dalam paradigma ini berarti produk industri strategis nasional diarahkan pada produksi subsistem produk (komponen-komponen) dari perusahaan mapan dunia (MNC). Untuk pesawat Boeing 777 misalnya, IPTN mengerjakan ekor, sedan Neon Chrisler ASTRA mengerjakan sistem suspensi dst. Subkontrak internasional merupakan trend global dan menjadi alternatif yang menarik bagi MNC karena alasan pengurangan biaya transaksi, pemanfaatan spesialisasi dan untuk memperoleh biaya produksi kombinasi yang lebih murah. Keuntungan dari strategi ini adalah risiko yang dihadapi relatif kecil, sementara dilain pihak transfer dibidang teknologi, manajemen, SDM, berjalan dengan baik dari MNC ke industri nasional dan terakhir, R&D bisa dipacu dan terfokus pada satu subsistem produk tertentu dimana dalam subsistem produk ini kita unggul secara internasional. Yang menjadi tantangan industri kita tentunya bagaimana mendapatkan kepercayaan subkontrak internasional tersebut.

**PENUTUP**

Dekade mendatang adalah era globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia -- dengan "trio polisi ekonomi dunia" ; World Bank-IMF-WTO -- dan dominasi negara-negara dunia pertama dengan teknologi sebagai mesinnya. Dua hal ini memberi ruang yang sempit bagi hidupnya nasionalisme ekonomi-teknologi dunia ketiga termasuk Indonesia. Akibatnya Indonesia harus bekerja hati-hati dengan nasionalisme ekonomi-teknologinya kalau tak ingin terjebak pada dampak yang justru merugikan. Dalam peluang sekecil apapun, secara bertahap Indonesia harus mampu melompat dari negara terbelakang menjadi negara industri yang mendominasi dunia seperti yang pernah secara gemilang dilakukan Jepang.

# Kontradiksi Internal

## Rezim Otoriterisme Birokratik

**Kerap keberadaan manusia dalam konteks perilaku yang mengejar kepentingan pribadi menciptakan masyarakat yang sarat konflik.**

I

Eric Hiariej
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM

Masyarakat menurut tradisi liberlisme merupakan kumpulan manusia-manusia yang bertindak. Kumpulan manusia ini terdiri dari pribadi-pribadi yang otonom, yang sadar dalam merumuskan tujuan-tujuan hidupnya, serta rasional dalam mengupayakan sarana pencapaian kepentingannya. Kerap keberadaan manusia dalam konteks pelaku yang mengejar kepentingan pribadi menciptakan masyarakat yang syarat konflik. Karena itu tugas yang paling utama dari sebuah masyarakat menurut tradisi liberalisme adalah menjelmakan konflik kepentingan menjadi kompetisi sehat, yang dapat dioptimalkan bagi kemaslahan seluruh anggota masyarakat.

Cara pandang masyarakat seperti demikian menjadi filosofi dasar model pembangunan kapitalis. Dalam model ini agen pembangunan adalah masyarakat sipil, yang meliputi pengusaha, wiraswastawan, intelektual, buruh dan petani. Pembangunan karenanya akan terwujud bila setiap anggota masyarakat menikmati kebebasan untuk mengejar tujuan-tujuan ekonominya. Peran negara dibatasi sekedar fasilitator yang menjamin kelangsungan hidup sistem ekonomi kapisitalistis. Negara menyediakan segala macam inftrastruktur yang memungkinkan aktualisasi agen-agen pembangungan, serta memagari kebebasan berkompetisi dari berbagai praktek ketidakadilan.

Hak untuk berusaha secara bebas dalam sistem ekonomi pada gilirannya mempengaruhi perilaku politik, menciptakan sistem politik yang demokratis. Kebebasan untuk menentukan usaha, pekerjaan atau penghidupan, dalam sistem politik ditranslasikan menjadi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, mengartikulasikan kepenting- an, berserikat, dan seterusnya. Masyarakat dalam hal ini dibiarkan bebas mengurus diri dan keperluannya. Sedangkan negara yang dipelajari perilaku-pe-rilaku ekonomi kapital-istis, eksis sebagai lembaga yang wajib melaksanakan kepentingan masyarakat.

Keterkaitan sistem ekonomi kapitalistis dengan sistem politik demokratis menjadi hipotesa yang lama mendominasi alam pikir teoritisi politik. Validitas hipotesa ini diperkuat oleh bukti-bukti empirik, seperti kasus-kasus negara-negara Eropa Barat. Tak satupun negara di kawasan ini yang menganut sistem ekonomi kapitalistis yang tidak mengembangkan sistem politik demokratis. Namun sayangnya, berkat pelacakan atas sejumlah kasus di luar Eropa Barat, hipotesa ini sepertinya berlaku persial. Meski telah diperkuat oleh Lipset melalui studinya yang mendalam dalam beberapa negara,

hubungan erat antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem politik demokratis ternyata menyesatkan bila digunakan sebagai sarana klarifikasi fenomena yang menggejala di Negara Sedang Berkembang (NSB). Di NSB sistem ekonomi kapitalis bergandengan tangan dengan sistem politik otoriter. Anomali ini meruntuhkan kemapanan teori-teori yang menghubungkan kapitalisme dengan demokrasi.

Sebetulnya kemampuan sistem politik otoriter dapat dimaklumi dengan mengingat kondisi pra rezim tersebut. Sistem politik ini merupakan jawaban atas tantangan atas peluang yang berkembang beberapa waktu sebelumnya. Walau akhirnya otoritarianisme merupakan tragedi sejarah yang harus diderita setiap NSB yang menginginkan pertumbuhan ekonomi cepat dengan menggunakan model pembangunan kapitaslistis. Ia adalah biaya sosial atas keberhasilan peningkatan pendapatan nasional, prestasi ekonomi yang hanya dinikmati segelintir orang dari sebegitu banyak manusia-manusia yang bertindak.

Umumnya diakui terdapat korelasi antara otoritarianisme dengan kapan suatu industrialisasi dimulai. Berdasarkan jumlah hasil studi, semakin terlambat suatu negara melakukan industrialisasi semakin besar tuntutan proses itu atas keterlibatan dan campur tangan negara.

Bertolak belakang dengan negara-negara yang melakukan industrialisasi tidak lama setelah revolusi industri, generasi belakangan industrialisasi membutuhkan lebih banyak modal. Di negeri-negeri yang terlambat melaksanakan revolusi industri ini -- sebagian besar NSB -- perwujudan industrialisasi tidak sekedar dengan alat pemintal benang atau alat tenun. Melainkan proses itu membutuhkan teknologi mutakhir dan basis dana yang tidak kecil. Padahal pengusaha-pengusaha di NSB secara ekonomi lemah. Mereka tidak memiliki sumber dana yang dapat dipercayakan untuk menyokong sektor industri. Industrialisasi karena memerlukan intervensi negara, terutama untuk menyediakan dan menghimpun dana ini belum mampu menyediakan dan menghimpun dana melalui bank ataupun perusahaan-perusahaan negara. Kalaupun pengumpulan dana ini belum mampu memenuhi target, negara masih tetap dituntut keterlibatannya untuk menghimpun dana-dana transnasional; modal asing dan modal multinasional. Berkenaan dengan penarikan dana luar negeri, peran negara dalam industrialisasi semakin penting artinya. Sering perpindahan dana itu disertai syarat-syarat kestabilan politik, yang membenarkan dominasi negara atas masyarakat sipil.

## II

Di Indonesia otoritarianisme rezim Orde Baru mengambil model otoriterisme-birokratik. Secara garis besar aturan main otoriterisme-biorokratik meliputi lima karakteristik pokok. Pertama; pemerintahan dikuasai oleh militer sebagai suatu lembaga yang berkolaborasi dengan teknokrat sipil. Militer disini tidak bertindak sebagai dikatator. Ia juga tidak menerapkan pendekatan militeristik dalam pengambilan keputusan. Kedua; pemerintahan didukung oleh *entrepreneur oligopolistic,* yang bersama negara berkolaborasi dengan masyarakat bisnis internasional. Kelas borjuis atas ini memiliki orientasi melampaui batas wilayah nasional. Mereka berkepentingan dengan arus perpindahan faktor produksi melewati batas negara, serta pengintegrasian ekonomi domestik ke dalam tatanan ekonomi global. Wawasan internasional borjuasi atas tampak dalam keinginan untuk mentransnasionalisasikan struktur produksi, yang menimbulkan dampak denasionalisasi. Ketiga; proses pengambilan keputusan rezim otoriterisme-birokratik bersandar kepada kaidah-kaidah biorokratik-teknokratik. Pendekatan politik yang mengambil bentuk bargaining antara berbagai kelompok kepentingan ditinggalkan. Masyarakat didepolitisir, sedangkan persoalan-persoalan sosial politik diselesaikan secara rasionalitas-teknis, yang dipandang obyektif dan netral. Keempat; otoriterisme-biorokratik merupakan suatu ekslusi politik dari sektor rakyat, yang sebelumnya berperan aktif. Ekslusi ini dibangun melalui pengharaman sektor-sektor rakyat tersebut atas saluran-saluran politik, yang dapat mempengaruhi proses pembangunan politik, yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Tuntutan-tuntutan politiknya tidak digubris, sementara pimpinan sektor-sektor rakyat yang vokal disingkirkan secara legal. Kelima; upaya penyingkiran sektor rakyat dilakukan dengan cara-cara yang represif. Penindasan seperti ini penting untuk mematikan demokrasi, yang sangat membantu dalam kelancaran proses pengambilan keputusan yang menerapkan kaidah biorokratik-teknokratik.

Selama ini logika dibelakang bermunculan rezim otoriterisme-biorokratik adalah kepentingan kapitalisme. Artinya otoriterisme-biorokratik merupakan reaksi politik terhadap ancaman kelangsungan hidup sistem ekonomi kapitalis. Rezim ini muncul dari krisis ekonomi, saat terjadi transisi dari industrialisasi subtitusi impor ke industrialisasi berorientasi ekspor.

Ketika tengah menjalankan industri subtitusi impor, negara bekerjasama dengan pengusaha memperkuat daya beli masyarakat. Penguatan daya konsumsi masyarakat ini meperluas jangkauan pasar domestik, yang memiliki arti penting bagi kelangsungan hidup sektor industri. Tapi malangnya industrialisasi subtitusi impor memiliki batas optimal. Kapasitas pasar domestik mencapai titik limit, menderita kejenuhan atas penawaran barang industri. Surplus produksi lalu menuntut pasar-pasar baru, dengan ancaman terjadi stagnasi ekonomi bila terjadi penumpukan out-put terus menerus. Untuk itu kegiatan penawaran barang harus dialihkan ke luar negeri. Kegiatan sektor industri karenanya harus diorientasikan pada pemenuhan pasar di luar batas negara.

Tapi pembangunan industri berorientasi ekspor tidak mudah. Di samping kesulitan perbedaan selera pasar, industrialisasi yang selama ini digalakkan menggantungkan proses produksinya pada impor modal dan barang setengah jadi. Kemampuan ekspor dengan demikian tergantung pada kemampuan memutuskan ketergantungan pada impor, melalui pembangunan pabrik-pabrik yang memproduksi kedua barang tersebut. Pengalihan industri dari produksi barang-barang modal dan setengah jadi ini, merupakan proses yang membutuhkan modal dan teknologi dalam jumlah besar.

Sementara kekuatan-kekuatan ekonomi domestik tidak mampu menyediakan modal dan teknologi yang dibutuhkan bagi industrialisasi berorientasi ekspor. Satu-satunya sumber yang yang dapat membantu dan bisa diandalkan adalah modal dan teknologi dari luar negeri. Namun sering pengadaan modal dan teknologi luar negeri mensyratkan stabilitas dan prediktabilitas ekonomi-politik. Persyaratan ini mendorong penerapan kebijakan-kebijakan ekonomi konservatif, yang menyebabkan tersingkirnya banyak

pengusaha kecil dan menengah. Penyingkiran sektor masyarakat ini menimbulkan krisis politik, yang diselesaikan oleh negara dengan menggunakan instrumen penindasan.

Berbeda dengan kecendrungan umum seperti yang dialami negara-negara otoriterisme-biorokratik di Amerika Latin, otoritarianisme Indonesia memiliki logika tersendiri bagi kelahirannya. Sebelum Orde Baru, Indonesia belum sempat mengecap industrialisasinya subtitusi impor. Rezim ini tidak muncul dari kesulitan-kesulitan periode transisi menuju industrialisasi beriorientasi ekspor. Rezim Orde baru lahir sebagai jawaban atas krisis ekonomi-politik warisan Orde Lama.

Sesudah sangat luas diketahui Orde Baru mewarisi inflasi yang kian meningkat, neraca pembayaran dan beban hutang yang begitu memberatkan, serta ketidakpastian politik akibat tingginya mobilitas politik masyarakat dan kekacauan politik pasca kudeta gagal PKI. Krisis-krisis yang maha berat ini masih diperparah oleh ancaman konflik dan oposisi-oposisi baru, yang muncul setelah penerapan kebijakan pemulihan ekonomi drastis pemerintah. Karena itu wajar bila koalisi penguasa baru memandang cara-cara demokratis dalam proses politik tidak efektif untuk membebaskan negara dari lilitan krisis. Persepsi semacam ini mendorong mereka menempatkan negara dalam posisi yang dapat memaksakan kehendaknya atas masyarakat luas.

## III

Rezim Orde Baru akhirnya dibangun di atas sendi-sendi otoriterisme-birokratik. Telah 25 tahun rezim ini bertahan dan memapankan diri. Penghargaan pantas diberikan kepada rezim Orde Baru atas resistensinya terhadap konflik, oposisi ataupun tekanan-tekanan ekonomi-politik internasional. Meski daya tahan ini harus dibayar dengan partisipasi pasif, konsensus diam-diam, demokrasi semu, dan kesewenang-wenangan ekonomi. Namun sampai sejauh apa daya tahan itu ? Sekuat apakah koalisi penguasa Orde Baru dalam mempertahankan keutuhan rezimnya? Bagaimana suksesi kepemimpinan nasional ? Apakah suksesi akan melibatkan rakyat atau sekedar hasil tarik menarik kepentingan elemen-elemen dalam koalisi pengusaha ?

Dalam beberapa hal resistensi rezim otoriterisme-birokratik tidak seampuh yang dirasakan. Berkenaan dengan ini O'Donnell dalam tulisannya, *"Tensions In The bureaucratic Authoritarian State anda The Question of Democracy"*, telah mengakui kerapuhan rezim ini. Menurut O'Donnell rezim otoriterisme-birokratik membangun legitimasi melalui paksaan dan konsensus diam-diam. Basis kekuasaan terbatas pada segelintir orang dalam koalisi pengusaha, tanpa menyertakan masyarakat luas yang terlanjur disingkirkan ketika rezim ini pertama kali berdiri. Karena keberlangsungan rezim otoriterisme-birokratik bergantung pada daya kreasi mempraktekkan sarana-sarana represif.

Namun tulisan ini tidak akan melihat interaksi antara negara yang dominan dengan rakyat yang tertindas. Tulisan ini coba membayangkan proses disentegrasi rezim dengan melihat dinamika internal rezim otoriterisme-birokratik itu sendiri. Ini bukan berarti terjadi penurunan kepercayaan terhadap kekuatan gerakan masa untuk merobohkan dominasi negara. Melainkan sekedar upaya menawarkan sudut pandang lain.

## IV

Pada dasarnya negara dapat dipahami dengan dua cara yang berbeda. Cara pertama adalah pemahaman menurut realitas analisis. Sementara cara kedua adalah pemahaman berdasarkan obyektifikasi konkret. Menurut realitas analisisnya, negara merupakan salah satu aspek dari hubungan dominasi sosial. Negara mendukung dan mengorganisasikan berbagai bentuk hubungan dominasi sosial dalam suatu wilayah tertentu. Sedangkan berdasarkan obyektifikasi konkretnya negara adalah seperangkat lembaga dan norma hukum.

Baik dengan pemahaman secara realitas analisis maupun obyektifikasi konkrit, negara memaklumkan dirinya sebagai aktor yang terlepas dan berada diatas masyarakat sipil. Posisi atas-bawah antara negara dan masyarakat ini menimbulkan dua persoalan. Pertama, negara membutuhkan legitimasi yang membenarkan tindakannya dalam mewujudkan aspek politik dari hubungan dominasi sosial. Kedua, kesenjangan posisi tersebut menutut tersedianya mediasi yang dapat digunakan negara untuk menampakkan dirinya dalam kesadaran semua orang. Legitimasi pada awalnya diperoleh dengan cara-cara menindas lewat sarana-sarana koersif. Tapi kemudian konsensus masyarakat menjadi basis legitimasi penting lainnya. Sementara paksaan dan konsensus dapat diwujudkan bila negara memiliki sumber keabsahan bagi tindakannya, yang berada diluar negara. Sumber keabsahan ini adalah kepentingan umum yang dilayani. Karenanya negara akan *legitimated,* bisa melakukan paksaan dan menciptakan konsensus dalam masyarakat, bila ia bertindak sebagai agen kepentingan umum.

Sampai batas-batas tertentu kepentingan umum merupakan abstraksi dari berbagai mediasi yang menghubungkan negara dan masyarakat. Mediasi ini adalah sarana yang digunakan negara untuk mendapatkan dan memperkuat legitimasinya, serta menampakkan aspek politik hubungan dominasi sosial terhadap masyarakat luas. Setidaknya terdapat beberapa mediasi penting, yakni bangsa, kewarganegaraan dan kesejahteraan. Tapi yang terpenting dari kerangka interaksi negara dan masyarakat adalah bangsa. Di sini bangsa diartikan identitas kolektif yang mendefinisikan "kita". Konsep "kita" merupakan jaringan solidaritas yang diangkat atas keanekaragaman dan antagonisme dalam masyarakat. Konsep "kita" juga mencakup pengakuan akan kebersamaan yang berbeda dari konsep "kita" yang membentuk bangsa lain. Melalui mediasi bangsa muncul identitas kolektif yang menggusur identitas-identitas yang berdasarkan kelas atau etnis. Tindakan negara dalam hal ini dianggap sah bila tindakan itu mengacu pada kepentingan identitas kolektif itu, atau kepentingan umum. Dengan lain perkataan, melalui mediasi bangsa, negara mendapat keabsahan menerapkan paksaan dan memperoleh konsensus, untuk mewujudkan kepentingan umum.

## *V*

Sejak awal keberadaan rezim otoriterisme-birokratik merupakan ekspresi dari ketidakpercayaan koalisi penguasa terhadap cara-cara demokratis dalam menyelesaikan krisis ekonomi dan politik yang mengancam eksistensi negara. karenanya basis legitimasi rezim ini dibangun atas dasar kaidah-kaidah non-demokratis. Seperti yang sudah diuraikan pada bagian II, rezim otoriterisme-birokratik melandasi kekuasaannya pada depolitisasi masa, demobilisasi politis dan penggunaan sarana-sarana represif. Dalam konteks realitas ana-

lisis, rezim ini mendukung dan mengorganisasi berbagai bentuk hubungan dominasi sosial, dengan basis legitimasi koersif. Akibatnya mediasi yang menghubungkan negara dan masyarakat terpaksa harus dipreteli sedemikian rupa agar mendukung kegiatan penindasan rezim. Ini berarti terjadi pendefinisian ulang terhadap bangsa -- dan karenanya kepentingan umum -- yang memberikan akses bagi aktivitas instrumen- instrumen penindasan rezim.

Di lain pihak beberapa unsur penting di kalangan pendukung utama rezim otoriterisme-birokratik menyadari sepenuhnya akan kerentanan negara yang melandaskan kekuasaannya pada paksaan. Mereka mulai melirik arti penting konsensus sebagai basis legitimasi alternatif. Untuk itu sebagian dari koalisi penguasa rezim ini coba mengembalikan penyimpangan makna bangsa ke definisi asli. Negara harus dikembalikan posisinya sebagai agen kepentingan umum sejati. Sayangnya, karena kontraksi kekuasaan yang demikian kuat, upaya ini tak lebih dari sekedar retorika. Rezim terpaksa harus mencari jalan lain untuk menghidupka kembali konsep bangsa yang telah tercemar.

Salah satu pilihan yang layak untuk diterapkan adalah pengikutsertaan negara dalam proses pembangunan. Negara secara ekonomi dan sosial menempatkan dirinya sebagai pusat perencanaan dan protek pembangunan nasional. Dalam hal ini rezim menambil jalan kapitalisme negara, yang pada kenyataannya bertentangan dengan transnasionalisasi struktur produksi dan arti penting peran modal swasta yang turut mendukung kelangsungan hidup rezim. Padahal kapitalisme negara hampir merupakan satu-satunya pilihan yang dapat mengembalikan posisi negara sebahgai agen kepentingan umum, tanpa disintergrasi rezim.

Sementara itu pada peringkat yang berbeda, rezim otoriterisme-birokratik dapat diuraikan menurut obyektifikasi konkrit atas beberapa lembaga. Lembaga-lembaga itu adalah teknokrat sipil, borjuasi kelas atas dan militer. Teknokrat sipil dan borjuasi kelas atas bertugas menyembuhkan krisis ekonomi. Sedangkan militer bertanggung jawab atas stabilitas politik.

Seperti yang sudah disampaikan pada bagian II, borjuasi kelas atas dan teknokrat sipil adalah dua lembaga dengan orientasi transnasionalisme yang kuat. Mereka sangat berkepentingan dengan transparasi batas-batas fisik negara, agar memudahkan upaya pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam tatanan ekonomi global. Derasnya hasrat transnasionalisme, yang terlihat dalam keyakinan maupun tindakan kedua aktor tersebut menimbulkan denasionalisme. Wawasan kebangsaan yang sempit, yang menekankan arti penting "kita", dianggap tidak relevan dan kondusif bagi perkembangan perekonomian nasional.

Di sisi lain, militer adalah lembaga yang cendrung nasionalis. Lembaga ini dibentuk atas dasar orientasi kebangsaan yang berwawasan ke dalam dan ekslusif. Bagi militer pencapaian ekonomi tidak boleh mengorbankan begitu saja ekslusifitas konsep "kita". Pengejaran tujuan-tujuan ekonomi tidak boleh selamanya mengancam doktrin keamanan nasional. Ini semua berarti; landasan nilai dan orientasi militer bertolak belakang dengan hasrat transnasionalisme teknokrat sipil dan borjuis kelas atas.

Sampai di sini pemahaman negara secara realitas analisis dan obyektifikasi konkrit mampu memberikan kerapuhan rezim otoriterisme-birokratik terhadap kekuatan-kekuatan disintegrasi, yang bersumber dari ambiguitas internal. Karena itu semestinya rezim ini akan runtuh dengan sendirinya, bila kekuatan-kekuatan kepentingan umum sejati tidak mampu mengkompromikan persoalan legitimasi. Rezim ini seharusnya berakhir dengan sendirinya, bila militer, teknokrat sipil dan borjuasi kelas atas tidak mampu menciptakan konsensus baru yang mampu menjebatani kesenjangan orientasi di antara mereka.

**VI**

Suksesi kepemimpinan nasional dalam kondisi ambiguitas rezim demikian ini, sepertinya akan mencakup beberapa pilihan skenario. Diantaranya:

Pertama: Jika pertentangan orientasi antara militer, teknokrat sipil dan borjuasi kelas atas terbatas pada lingkaran elit, dalam arti tidak melibatkan masyarakat luas, maka suksesi adalah proses tarik menarik kepentingan antar ke-3 komponen pendukung rezim tersebut. Hasil dari proses ini memiliki dua kemungkinan. Pertama; salah satu dari kedua kekuatan itu yang menang, sehingga mensubordinir pendatang baru dari dalam rezim itu sendiri, yang mampu menengahi kontradiksi internal.

Kedua; Jika pertentangan orientasi tersebut tidak melibatkan rakyat tapi menimbulkan krisis internal rezim; sementara kekecewaan telah tersebar luas, masyarakat telah terpolitisir dan terdapat pemimpin gerakan yang jelas, maka suksesi nasional dapat merupakan upaya penumbangan rezim oleh masyarakat. Rezim pasca suksesi kemungkinan besar demokratis, tapi dengan masa depan yang tidak jelas. Seperti pada kasus negara-negara Amerika Latin penguasa yang sebelumnya mempelopori upaya penumbangan rezim, selalu menemui kesulitan dalam meredakan atau mengalihkan mobilitas politik masyarakat yang meningkat ke arah kompetisi kepentingan yang menguntungkan. Kerap yang terjadi adalah instabilitas politik yang bermuara pada campur tangan kekuatan-kekuatan rezim lama yang belum sepenuhnya tumbang.

Ketiga; Jika pertentangan itu menjalar keluar ekslusifitas rezim dengan melibatkan massa rakyat, maka suksesi dapat berarti fragmentasi nasional, yang mengancam keberlangsungan hidup negara. Seperti yang sempat dicontohkan oleh kasus Rusia, silang orientasi dapat mengancam integrasi nasional, ketika melibatkan basis pendukung di luar rezim.

Dari ke-3 skenario di atas, skenario pertama memiliki resiko yang paling rendah, sementara skenario ketiga sebaliknya. Tapi semua pilihan ini mengandaikan ambiguitas internal rezim yang tidak terselesaikan. Jika militer, teknokrat sipil dan borjuisi kelas atas dapat berkompromi, maka suksesi kepemimpinan nasional adalah proses membangun kesepakatan baru dalam koalisi penguasa tanpa melibatkan masyarkat.

# Kemiskinan dan Ideologi Pembangunan Kita

**Panorama proses perubahan sosial yang dewasa ini menggejala di banyak negara dunia ketiga, sesungguhnya bukanlah fenomena yang samasekali baru.**

Yussac F. Ananda
Mahasiswa Sosiologi FISIPOL UGM
Pemimpin Redaksi Majalah SINTESA

Upaya untuk merealisasikan obsesi masyarakat yang dicita-citakan elit pengambil keputusan di berbagai negara itu, yang secara konseptual dirumuskan sebagai pembangunan, pertama-pertama adalah fenomena empiris. Sebelum pembangunan menjadi sesuatu yang dirumuskan secara definitif, sistematik dan periodikal, ia telah lebih dahulu sebuah fenomena alamiah.

Mengutip H.W. Arndt "ia telah berlangsung berabad- abad di Eropa, sebelum ada orang yang secara sadar mengemukakan *kemajuan material* sebagai sasaran yang diinginkan oleh kebijaksanaan negara" ( lihat H.W. Arndt, Sejarah Pemikiran Pembangunan Ekonomi,1993). Lebih dari itu, juga menurut Arndt "pembangunan dalam pengertian kecenderungan perubahan ekonomi dan sosial yang takdapat dibalikkan arahnya terjadi di luar Eropa, akibat dampak ekspansi orang Eropa, jauh sebelum ada orang yang membayangkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan itu bagi rakyat Eropa (H.W. Arndt, ibid).

Oleh karena itu, tidak heran jika pembangunan dalam operasionalisasinya menimbulkan banyak aral masalah. Justru karena karakternya yang merupakan tindakan artifisial, yakni sebuah rekayasa dari realitas yang sebelumnya berlangsung secara natural, evolutif dan genuin. Berbagai kesulitan itu muncul, bukan saja dikarenakan proses pembangunan itu memerlukan berbagai sarana dan prasarana (kapital, teknologi, ekspertise, manajemen dll) yang belum banyak tersedia di banyak negara berkembang. Akan tetapi, juga dalam prosesnya, ia menemui berbagai kendala nilai- nilai lokal yang belum tentu kondusif. Lebih dari itu, upaya transformatif ini seringkali harus berbenturan dengan struktur-stuktur ekonomi-politik yang telah lama bercokol. Karenanya, proses pembangunan dibanyak negara berkembang itu potensial untuk terjerat dalam serat-serat ketegangan.

Konsekuensi logis dari konfigurasi struktural dan kultural yang demikian, maka pembangunan mestilah dirumuskan dalam suatu perencanaan sosial tertentu . Yakni, disertai dengan wawasan historis-empiris dan kultur-filosofis yang tersedia. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan itu tidak semata-mata merupakan problem teknis melainkan juga meliputi dimensi etiknya. Hal ini, dikenal sebagai tindakan praksis.

Sejak dini, untuk melacak ke sejarah pemikiran, Soejadmoko telah berulang-kali mengingatkan hal ini. Dalam sebuah tulisannya, budayawan kita ini kembali menuturkan

"Didalam pelaksanaan pembangunan pun kita pada setiap langkah dihadapkan kepada pilihan-pilhan mengenai cara dan sarana pelaksanaan yang memerlukan pertimbangan moral yang tidak dapat dilepaskan dari sistem nilai kita. Setiap keputusan sudah barang tentu berdasarkan perhitungan- perhitungan ekonomis dan teknis... (tetapi keputusan itu juga harus menjawab)

siapa atau golongan mana dalam masyarakat kita yang menarik keuntungan dari keputusan itu....dalam jangka pendek atau jangka panjang " (Soedjadmoko, Etika Pembangunan,1984).

Tulisan ini bermaksud merekonseptualisasikan model ideal dari pembangunan. Yakni, dengan turut serta didalam proses perumusan pencapaian target-target pembangunan itu -- kalkulasi biaya kemanusiaan yang harus dibayar. Terutama selaras dengan problematika aktual yang ada, yakni kemiskinan, dan hubungannya dengan ideologi pembangunan kita.

**Dua Paradigma**

Dalam konteks demikian, seperti dikatakan Galtung, terdapat dua cara menjadi "Barat" ( lihat Dawam Rahardjo, Esei-Esei Ekonomi Politik,1985) yakni dengan Liberalisme atau marxisme. kedua ideologi inilah, yang kendatipun menurut Galtung, memiliki banyak kesamaan yakni berakar dari filsafat Barat, akan tetapi--dalam realitas eksistensialnya--justru saling berkompetisi merekrut (menyusui?) para pendukungnya. Dan dalam sungkupan kedua ideologi ini Negara-negara berkembang mengayunkan jalan hidupnya.

Dengan menancapkan akar-akar historisnya pada pemikiran Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Malthus serta Say paradigma ini berkeyakinan hanya dalam terpenuhinya kepentingan setiap orang (*egoism*), dengan dibiarkan mengejar kepentingan pribadinya (*free market*), kepentingan masyarakat luas dapat terpenuhi (Dawam Rahardjo, ibid). Paham ini kemudian menjadi embrio dari paradigma kapitalisme.

Pada stadium selanjutnya, kapitalisme awal (klasik) ini, mengalami metamorfosa. Dimana, dengan stagnasi kapitalisme di AS Negara mengambil alih dinamika ekonomi. Gagasan ini merupakan pikiran John Maynard Keynes, yang untuk selanjutnya menandai era baru kapitaslime modern. Sejak itu, intervensi Negara bukan merupakan kendala bagi bekerjanya sistem Kapitalisme, namun justru menjadi faktor dinamisatornya. Artinya, sebagaimana dijelaskan Arief Budiman, negara tidak turut campur tangan ketika mekanisme pasar bebas bekerja normal. Gangguan terhadap mekanisme ini, justru mengundang intervensi negara, bukan untuk mengganti pasar bebas melainkan menjaga keberlangsungannya .Gagasan ini dikembangkan oleh Nicholas Poulantzas dan dielaborasi Fred Block (Arief Budiman, Negara: Teori dan Gejalanya di Indonesia, Naskah untuk SPES, belum diterbitkan).

Sistem kapitalisme ini kemudian bagai menemukan momentumnya ketika bermunculan investigasi besar-besaran para tokoh ekonomi seperti Alvin Hansen, Seymor Harris dan yang sangat populer, Samuelson. Akan tetapi yang menjadi "pelatuk" bagi superioritas sistem ini adalah ketika diperkenalkannya teori pertumbuhan ekonomi oleh Sir Harrod dan Domar yang melahirkan ***growth-economics***. sejak itu perkembagan ekonomi sangat dipengaruhi pemikiran pertumbuhan ekonomi tersebut (Dawam Rahardjo, opcit).

Dari sana kemudian, dengan bekal pengalaman Marshall Plan yang sukses, negara-negara barat melancarkan program pembangunan ekonomi kenegara- negara berkembang melalui investasi besar-besaran agar perekonomian negara-negara tersebut dapat lepas landas. Antara lain, oleh Radnar Nurske, yang sangat populer, mengemukakan bahwa keterbelakangan negara berkembang disebabkan lingkaran persolan yang tak berujung pangkal yang berpusat dari rendahnya pendapatan yang menyebabkan mereka tak mampu menabung dan melakukan investasi , dan pada gilirannya kemudian, menyebabkan produktivitas rendah. Untuk mengatasi maslah tersebut, negara-negara industri melancarkan bantuan luar negeri berupa modal assistensi teknis dan pembangunan. Dengan demikian, sebagaimana dikomentari Prof. Bintoro Tjokroamidjoyo MA,--yang sekaligus merupakan refleksinya terhadap pembangunan Indonesia era orde Baru--"jelas dapat kita lihat bahwa perkembangan ekonomi adalah hasil kontribusi dari investasi yang dibiayai tabungan swasta, investasi yang dibiayai tabungan negara, dan pada akhirnya merupakan hasil daripada investasi yang dibiayai sektor internasional" (Bintoro Tjokroamidjojo, 1983).

Tabel I : PEMERATAAN PENDAPATAN DI INDONESIA

| Tahun Indeks | Gini | Prosentase Penerimaan 40% Lapisan Terbawah |
|---|---|---|
| 1961 | 0,30 | 25,3 |
| 1964 | 0,22 | 25,5 |
| 1971 | 0,30 | 26,8 |
| 1976 | 0,34 | 12,7 |
| 1980 | 0,46 | 10,4 |

Sumber : Hasibuan, 1984: 18

Disisi lain, paradigma marxis lahir dari kritik- kritik yang dilancarkan Karl Marx terhadap kapitalisme, yang lantas dielaborir oleh Hilfreeding dan Rosa Luxemburg, dan dipancangkan oleh Lenin dalam kasus Soviet serta --dewasa ini, dengan dijembatani oleh Paul Baran--direformasi oleh Gunder Frank, Paul Sweezy, Cardoso dkk . Disamping itu, dengan variasi yang beragam marxisme dimodifikasi di berbagai negara, antara lain,--salahsatunya yang penting, kalau bukan yang terpenting--adalah kasus pemikiran Mao Zedong di China. Namun demikian, kendati berbeda dan bervariasinya pendekatan marxisme ini, mengikuti kesimpulan Isaiah Berlin, penulis biografi Karl Marx, "originalitas sebuah gagasan tidak terletak pada salahsatu elemen yang membentuk berbagai gagasan itu,melainkan oleh Hipotesa sentralnya". Yakni pentingnya hubungan kemanusiaan dalam proses-proses hubungan produksi, dalam hal ini, hubungan buruh (labour-proletar) dengan majikan/pengusaha (borjuasi).

Jika diamati sistem ekonomi Indonesia, dengan pengamatan selintas, tampak lebih bercorak non-kapitalistik. Hal ini didukung oleh kenyataan antara lain dengan hadirnya beberapa perusahaan negara seperti BULOG dan PERTAMINA, dihidupkannya

koperasi-koperasi serta komitmen kerakyatan yang dipahat dalam dokumen resmi negara. Sehingga dapat dikatakan disana-sini bertaburan sikap dan tindakan semi sosialistik. Akan tetapi seperti dikuak dengan kritis oleh Sarbini Sumawinata, "kalau kita lihat pokok-pokok sikap dan politik ekonomi dan kita lihat hasilnya maka pada dasarnya ekonomi kita adalah ekonomi kapitalistik...(yakni) atas dasar alokasi sumberdaya yang ditentukan oleh **pertama**, tingkat pemerataan sumberdayanya maupun kekayaan negara dan **kedua**, penguasaan alat-alat produksi (Sarbini Sumawinata, 1989).

Dari data yang di paparkan oleh Hasibuan misalnya, Indonesia tergolong negara dengan tingkat pemerataan yang mencolok (*gross inequality*) pada tahun 1980, karena 40% penduduk lapisan bawahnya menerima kurang dari 12% Pendapatan Nasional (lihat tabel I). Meskipun demikian, ketimpangan pemerataan yang tinggi tidak berarti bahwa penduduk miskin bertambah miskin . Dalam kenyataannya, secara absolut kemiskinan berkurang (lihat tabel II).

Karakter kapitalisme di Indonesia ini semakin jelas manakala penghargaan tertinggi justru diprioritaskan kepada para pengusaha (kaum Borjuis) sebagai produsen "surpluse value". Karena itu, tidak heran jika rezim Orde Baru menerapkan model korporatisme negara dan birokrtisme otoriter. Dimana strategi pertumbuhan yang dilancarkan merupakan kualisi kuat dari para perencana (teknokrat), penyedia dana ( investor asing dan donor bantuan asing), pelaksana bisnis besar lokal dan internasional di dukung oleh birokrasi nasional, penjaga ketertiban dan keamanan (ABRI), dan diatas semuannya adalah "sang maestro" sendiri, Presiden Soeharto.

Maka wajar jika rakyat kecil tidak mendapat tempat dalam sistem kapitalisme ini. Dari sini tampak NOB bersikap ambivalen terhadap konstitusi yang jelas sosialistik. Yakni, kata Clause Offe, satu pihak negara (birokrat dan militer) harus mempertahankan proses akumulasi modal dan pemenfaatan sumber-sumber ekonomi oleh sektor-sektor swasta: dalam kenyataan dia harus mempertahankan kredibilitas sebagai perantara dari kepentingan-kepentingan kelas yang ada (netral) sehingga dilegitimasi rakyat. Karakter demikian, menurut Offe, merupakan karakter negara kapitalistik (Arief Budiman, Op.cit).

**Biaya Manusiawi.**

Sejarah umat manusia adalah sejarah penderitaan. Derita itu bukanlah akibat perilaku alam, melainkan tindakan dari kelompok manusia atau bangsa terhadap manusia atau bangsa lain. Dalam kalimat yang berbeda penderitaan itu adalah produk sebuah **sistem**. Implikasi logisnya, bagi Peter L. Berger adalah perlunya menarik hubungan ideologis antara kebijaksanaan dengan penderitaan. Berger mengemukakan bahwa tidak cukup digunaan analisa "*cost and benefites*" tapi juga dimensi etiknya.

Baik dalam sistem kapitalisme atau sosialisme ternyata terdapat biaya manusiawi yang besar disamping kesuksesan yang di tandurnya. Di balik gemerlap kapitalisme AS misalnya, sebagai prototipe kanan ini, kita menyaksikan mandeknya dinamika ekonomi sistem ini di tahun 1930-an. Akibatnya, kemiskinan menyeruduk kemana-mana. Fenomena yang menjadi embrio bagi munculnya kapitalisme modern, yakni dengan diserapnya gagasan intervensi negara oleh Keynes, berhasi menormalisasikan perekonomian AS. Sehingga John Kenneth Galbraith dengan optimis memproklamirkan berakhirnya kelangkaan tahun 1960-an.

Tetapi dengan mencuatnya karya Michael Harington tahun 1962, kemiskinan seolah-olah ditemukan kembali (*rediscovery of poverty*). Sejak itu benih kecurigaan telah ditanamkan dalam ideologi kapitalisme. Hal ini kemudian melahirkan kritik pedas Berger terhadap kasus pembangunan Brazil, sebuah negara "teksbook" bagi kapitalisme di negara berkembang. Kendatipun Brazil mencatat sukses makro dalam pembangunannya tetapi Berger menemukan pada 1970 sepertiga pendapatan nasional hanya ditangan 5% jumlah penduduk, sedangkan 40% hanya memperoleh 10% pendapatan nasioanal. Deretan tragedi pembangunan kapitalisme Brazil dapat diperpanjang lagi dengan jutaan orang Brazil yang menderita kekurangan pangan, maltrunisi, pencemaran lingkungan, dan seterusnya. Hal ini, pekik Berger, adalah kenyataan yang "membunuh" manusia, dalam pengertiannya yang gamblang (Pieter L. Berger, Piramida Pengorbanan Manusia, 1992).

Pada perspektif yang sama, tetapi dikutub yang berbeda, China merupakan model bagi pembangunan sosialisme. Menurut Ceng Shih "China adalah negara sosialis, tapi pada waktu yang bersamaan adalah sebuah negara yang sedang membangun. Dan karena itu China tergolong negara dunia ketiga" (Ceng Shin, lihat Dawam Rahardjo, op. cit). Di negara ini, sistem komune dan administrasi pembangunan pedesaannya menjadi refrensi utama bagi negara berkembang. Akan tetapi, kendatipun bahkan diukur dengan standar internasioanal China memiliki beragam kelebihan seperti tingkat pertumbuhan yang tinggi baik dibidang pertanian dan industri--apalagi dari segi pemerataannya--namun keberatan atas sistem ini dapat dibidikkan tajam-tajam dengan lensa

Tabel II :

KEMISKINAN, 1976 - 1987

| Tahun | Penduduk Miskin (juta) | Prosentase dari Populasi Total |
|---|---|---|
| 1976 | 54,2 | 40,8 |
| 1978 | 47,2 | 33,31 |
| 1980 | 42,3 | 28,56 |
| 1981 | 40,6 | 26,85 |
| 1984 | 35,0 | 21,64 |
| 1987 | 30,0 | 17,42 |

Penduduk miskin : Mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan, yakni mereka yang hidup dibawah 2100 kalori/hari, Sumber : Djojohadikusumo, 1989

pembesar etika kemanusiaan pada kekejamannya memproses berbagai keberhasilan itu.

Dalam kritik Berger yang pedas, China adalah sistem totaliter paling kuat abad 20 ini, bahkan sepanjang sejarah umat manusia. Dalam era land reform 1950-1952 misalnya diperkirakan sekitar 2 juta orang telah dihukum mati selama masa kampanye itu (Pieter L. Berger, op. cit ).

**Ideologi Alternatif.**

Ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial sesungguhnya sudah ada sejak perekonomian Indonesia belum mengalami pertumbuhan yang pesat. Namun dalam proses ekonomi dan sosial yang bertumbuh dengan pesat itu, tentu saja,--dalam kriteria pertumbuhan ekonomi--jurang ketimpangan dan kesenjangan bertambah dengan tajam. Hal ini, diulas Mubyarto, karena peluang-peluang ekonomi dan bisnis di manfaatkan secara amat cepat oleh kelompok ekonomi kuat. Pembangunan ternyata menjadikan rakyat kecil sebagai "korban- korbannya" bukan saja dalam pengertian yang simbolis tapi juga leksikal. Kemiskinan absolut, dan lebih-lebih lagi kemiskinan relatif bukan sekedar kritik tanpa bukti.

Namun demikian realitas ini, dalam PJPT I, belum diakui sebagai hal yang inheren dalam paradigma pertumbuhan (baca: kapitalisme). Ini sangat menonjol dari diupayakannya penanggulangan kemiskinan melalui program-program yang tidak langsung membrantas kemiskinan seperti program BIMAS/INMAS, KB Lestari, Eksport non-Migas dll (Mubyarto, RCTI, 21 Mei 1993).

Menurut Mubyarto, hal ini tidak dapat dibiarkan. Ia merambah jauh dengan meragukan pendekatan "neo-klasik" atau kapitalisme itu. Komentarnya, "karena teori-teori ekonomi neo-klasik yang banyak menggantungkan pada kekuatan pasar untuk melaksanakan alokasi sumberdaya dalam masyarakat dinggap para pengamat lebih banyak menumbuhkan golongan ekonomi kuat dan kurang mampu meningkatkan golongan ekonomi lemah". Tambahnya, dengan mencuplik pemikiran Keynes *"tujuan yang berbeda tidak dapat dicapai hanya dengan mengubah kebijakan-kebijakan serta strateginya tetapi harus dengan cara* ***merubah teorinya***".

Sayang sekali, seperti banyak dikritik--antara lain oleh Arief Budiman--Mubyarto tidak tuntas dalam memberikan model alternatif teoritisnya. Tetapi, sebagaimana ditunjukkan Nataatmadja dan Frans Seda, proses alternasi teori yang oleh Mubyarto dkk disebut Sistem Perekonomian Pancasila (SPP) menggunakan mekanisme pendidikan dengan negara sebagai pengawasnya. Bila dikritisi lebih lanjut dengan argumentasi teoritis yang bertumpu pada pendekatan kultural, gagasan ini tidak berbeda jauh dengan logika sistem kapitalisme. Dengan kata lain, Mubyarto terjebak dalam kekeliruan yang sama dengan paradigma yang dikritiknya.

Dengan semangat yang hampir sama, terutama dalam hasrat untuk mengganti model pembangunan yang dikenakan, Mochtar Mas'oed mengintrodusir era "moral sebagai panglima". Menurutnya, berbeda dengan pelaksanaan pembangunan sepanjang PJPT I yang menggunakan "politik dan atau ekonomi sebagai panglima" ia memilih ideologi populisme. Tipologi ini merupakan adaptasi dari klasifikasi Marc Nerfin. Dia menggunakan istilah "First System" untuk Politik sebagai Panglima, "Second System" untuk Ekonomi sebagai Panglima dan "Third System" untuk Moral sdebagai Panglima. Bagi Mochtar, pandangan yang menegaskan bahwa cara yang paling efektif untuk menangani persoalan kemiskinan yang dihadapi rakyat adalah dengan membantu mereka menemukan kekuatan mereka sendiri. Yakni dengan mengandalkan mekanisme kekuatan rakyat (*People's Power*). Seperti mengaktifkan kembali lembaga-lembaga komunitas lokal (LSM-LSM, misalnya). Ketegasan yang sama dalam perspektif ini telah pernah dilontarkan Sarbini Sumawinata, yang mengemukakan "makin kecil jumlah kelompok yang menguasai alat produksi, makin sulit mengadakan pemerataan karena bagian terbesar masyarakat yang tidak memiliki, tidak akan mampu meraih hasil- hasil produksi, *sekalipun* hasil-hasil produksi itu diusahakan untuk diratakan kembali.

Kendatipun dalam formulasi pendekatannya, Mochtar Mas'oed memiliki kesejajaran inspiratif dengan Mubyarto yakni sama-sama menggunakan term moral, tetapi secara substansial pendekatan ini lebih bertumpu kepada argumentasi struktural. Agaknya, pilihan term ini bukannya tidak disengaja. Mengingat ia tidak didukung oleh kekuasaan politik yang ada, hal yang diakui secara eksplisit oleh Mochtar Mas'oed. Tetapi juga, lagi-lagi diakui oleh Mochtar,--kendatipun secara implisit--modelnya adalah modifikasi dari rumusan-rumusan Marxis.. Menurut Mohtar Mas'oed, kepeloporan sarjana Marxis ini ditolak karena faeasibility resepnya mengenai revolusi semakin diragukan, sehingga argumen mereka kurang menarik. Konsep ini merupakan pencarian alternatif baru terhadap daya kritis yang sama.

Maka, berbeda dengan logika berpikir kapitalisme yang mengasumsikan pemerataan dapat diselesaikan dengan *invisible hand* (kapitalisme klasik) atau *laissez faire*, atau dalam bentuknya yang lebih mutakhir yakni *wellfare economics* yang bercorak karitatif dan tambal sulam. Istilah ini dikutip dari Arief Budiman, untuk menunjukkan pada jalan berpikir bahwa model pembangunan yang ada kalau ditambah demokrasi akan merupakan sesuatu yang ideal. Menurutnya "Kalau pada demokrasi, ini mungkin model pembangunan yang ada sekarang (kapitalisme) akan macet (lihat Arief Budiman, Makalah diskusi Forum Indonesia Muda, 1991).Atau juga, dalam konteks sistem sosialisme yang di pancangkan pada totaliterisme negara, yang dikomentari Sarbini Sumawinata,--dengan mengambil kasus RRC dan Rusia--menimbulkkan berbagai tekanan jiwa yang berat dan mengorbankan martabat manusia atau obsesi revolusi sosial kelompok neo- Maxis yang *utopis* dan *etnosentris*. Model sosialisme Indonesia adalah sosialisme demokratis, sosialisme yang berlandaskan pada nilai-nilai filosofis Pancasila. Dalam sosialisme jenis ini, upaya pemerkuatan masyarakat tidak didelegasikan pada Negara (*State*), atau para Pengusaha (*Borjuis*), melainkan oleh masyarakat (*Civil Society*). Juga, berbeda dengan solusi-solusi kelompok neo-marxis yang berpendapat--satu-satunya hanya dengan jalan--radikal-revolusionner, strategi ini diupayakan secara gradualism. Dengan jalan demokratis.

# Sistem Distrik : Membongkar Kemapanan Politik Wali

**Semenjak negeri ini lahir, telah enam kali mementaskan Pemilihan Umum. Yaitu, sekali di era Soekarno, dan lima kali di era Soeharto. Bagi negara-negara baru merdeka ini merupakan satu prestasi tersendiri. Karena salah satu kendala yang dihadapi oleh negara-negara baru, adalah pelaksanaan Pemilu yang rutin.**

Andi Arief
Penulis Mahasiswa dan Litbang
SINTESA Fisipol UGM

Meskipun demikian, Selama enam kali pelaksanaan Pemilu, tampaknya bukan secara otomatis negeri ini menjadi negeri yang demokratis. Terlebih di zaman Soeharto, pelaksanaan Pemilihan Umum masih ditandai dengan upaya-upaya untuk mempertahankan kekuasaan ketimbang upaya melakukan praktek demokratisasi. Prinsip-prinsip kebebasan, serta tingkat kompetisi antar partai sulit ditemui. Azas LUBER, hanya sekedar jargon-jargon sebagai upaya memelihara kekuasaan.

Kalau kita menengok kembali di era Soekarno, sebenarnya pemilu sebagai satu upaya operasionalisasi demokrasi sudah pernah dipraktekkan. Pemilu pertama tahun 1955, secara umum berhasil memperlihatkan betapa prinsip-prinsip dasar pemilu yaitu bebas, umum langsung dan rahasia, tidak hanya diselesaikan pada level jargon. Semua lapis masyarakat secara bebas menjadi peserta pemilu, bahkan melakukan kampanye-kampanye berdasarkan kebutuhan masing-masing kepentingan yang didukung. Materi kampanye tidak dilakukan dengan pola seragam, masing-masing partai bebas berkompetisi, serta bebas menggunakan strategi yang dianggap tepat ketika berkampnye.

Gambaran pemilu yang demokratis dan kompetitif di era Soekarno, ternyata dipandang negatif oleh penguasa negeri ini. Celakanya, sikap sinis tersebut terus menerus direproduksi, sehingga pemahaman terhadap praktek Pemilu tahun 1955 menjadi kabur. Pemilu 1955 dipandang gagal menghasilkan kekuatan politik mayoritas yang dapat diandalkan menjadi pengendali tunggal sistem politik hanya karena kegagalan konstituante menghasilkan kebijaksanaan yang diperlukan seperti UU dan UUD. Pemilu dinilai gagal melahirkan suatu pemerintahan yang kuat, atau dalam bahasa lain pemilu tidak mampu mendorong tampilnya sistem politik yang efektif (Arbi sanit, 1991).

Apa yang terjadi pada pemilu di era Soeharto dengan demokrasi Pancasilanya sebenarnya tidak lebih baik dari era Soekarno. Lima kali Pemilu di era Soeharto, hanya berhasil memantapkan legitimasi-legitimasi kekuasaannya. Fenomena kebebasan individu untuk memilih, tingkat kompetisi antar partai, serta netralitas birokrasi, tidak dijumpai dalam pemilu di era ini. Hal itu dilakukan dengan satu asumsi bahwa pemilu dilaksanakan untuk mengefektifkan sistem politik, karenanya pemilu untuk demokratisasi menjadi bagian yang tidak begitu penting. Fakta tersebut oleh Huntington (1991) merupakan gambaran Pemilu yang hanya sekedar menunjukkan bahwa pemerintahan yang sedang berkuasa bersifat demokratik. Dalam bahasa lain dapat ditafsirkan bahwa pemerintahan Soeharto melakukan Pemilu hanya ingin menunjukkan pemerintahannya bersifat demokratik.

Hegemoni Golkar selama lima kali

Pemilu, atau keberhasilannya menjadi "sang *single majority*", bukan berarti secara linier Golkar menjadi *The Rulling Party*. Partai beringin justru menampakkan dirinya menjadi *The Ruller's Party*. Praktis mereka hanya menjadi *single majority* secara statistikal, sedangkan secara fungsional Golkar tidak berdaya *vis a vis* militer dan Presiden Soeharto. Dua komponen terakhir ditambah mesin birokrasi adalah kekuatan tanpa tanding semenjak Orde baru dilahirkan. Kekuatan-kekuatan itulah yang kemudian menendang Partai Politik ke pinggir lapangan pentas politik nasional. Partai tidak lagi diperlakukan sebagai penentu kehidupan dan kebijaksanaan politik. Partai diarahkan sebagai elemen pendukung *(supporting element)* status Quo.

Kalau (Bung?) Harmoko sebagai ketua umum Golkar yang juga dikenal sebagai tokoh *kelompencapir* dengan bangga menyebut-nyebut *single majority,* sebenarnya dia sedang mengerosi makna *single majority* . Konsep *single majority,* bukanlah dilihat melalui mayoritas Pemilu saja, lebih dari itu berlanjut dalam keterlibatan luas sang *single majority*setelah Pemilu berakhir. Artinya, Golkar sebagai partai politik seharusnya memiliki tawar menawar yang relatif lebih kuat ketimbang militer, birokrasi ataupun Presiden.

Implikasi "lesu darahnya Parpol" yang juga muncul adalah menyangkut kualitas dan peran lembaga legislatif yang diproduksi melalui Pemilu. Lima kali Pemilu di era Soeharto, hanya menghasilkan lembaga legislatif yang disubordinat oleh kedigdayaan lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif tidak berdaya untuk mempergunakan hak-haknya terutama hak inisiatif. Ironis, sebab substansi Pemilu pada dasarnya adalah untuk memilih wakil rakyat untuk duduk di lembaga legislatif yang diamanatkan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan seluruh masyarakat. Keluguan sikap yang dipertontonkan oleh wakil rakyat, menjadikan lembaga legislatif hanya merupakan kumpulan orang yang siap bersikap mengiyakan keinginan pemerintah. Atas nama kepentingan pembangunan, wakil rakyat memanipulasi keinginan masyarakat banyak.

Karenanya, ketidakpercayaan masyarakat merupakan konsekuensi tersendiri dari ongkos sosial pembangunan yang selama ini diderita rakyat. Kalaupun derita rakyat yang terdengar oleh DPR, sikap bijaksana yang dipertontonkan paling banter di sekitar prihatin dan ditampung. Jelas, sikap demikian bukanlah sikap memperjuangkan kepentingan masyarakat. Secara prinsipil, tidak ada peningkatan kualitas dalam anggota DPR sejak Pemilu 1971 sampai dengan Pemilu 1992. Kalaupun peningkatan, justru terjadi pada upah mereka menjadi anggota DPR yang kini mencapai 3,5 juta rupiah perbulannya.

Ada berbagai macam upaya yang dilakukan untuk melihat bobot dari lembaga legislatif. Bobot yang dimiliki oleh lembaga legislatif dapat ditarik melalui level personal. Misalnya saja bagimana perjalanan karir politik anggota legislatif, apakah melewati proses kaderisasi yang tepat, ataukah sekedar karbitan. Kemudian juga dapat dilihat dari pendidikan, asumsinya tentu saja bahwa pendidikan sebagai perangkat modernisasi akan semakin membuat orang kritis atau tidak. Ukuran-ukuran lain yang juga cukup penting misalnya usia dan kemampuan ekonomi anggota legislatif.

Parameter itu rasanya belum cukup untuk menjadikan legislatif menjadi lembaga yang berbobot dan menjalankan hak serta fungsi yang dimilikinya. Karena itu perdebatan yang mengalir kemudian adalah sampai pada sistem Pemilu yang digunakan. Sistem pemilu dinilai bertanggung jawab terhadap "ketidak elegannya" anggota DPR. Resiko politik *(Political risk)*, loyalitas, keberfihakan, dan sejauh mana rakyat mampu mengontrol, dapat ditelusuri melalui sistem pemilu yang digunakan.

--

Antara demokrasi dan pemilu merupakan dua persoalan yang saling bertautan. Pemilu merupakan manifestasi nyata dari tatanan politik suatu negara di bawah payung demokrasi. Konsekuensinya, negara mana pun yang manamakan negaranya adalah negara yang demokratis, maka kehadiran Pemilu tidak mungkin terelakkan.

Demokrasi itu sendiri sering dianggap tipe ideal *(ideal type)* sebagai sistem politik yang harus diwujudkan oleh masyarakat dan negara. Teoritisi modernisasi berpendapat bahwa tujuan akhir pembangunan politik adalah pencapaian demokrasi yang stabil dan modern, sebagaimana halnya di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara. Oleh sebab itu demokrasi sering diklaim sebagai suatu norma yang telah dilaksanakan oleh semua negara. Setiap rezim mengklaim bahwa negaranya telah menganut sistem politik demokrasi, baik itu di negara-negara Dunia Ketiga maupun maupun negara-negara di bawah payung sosialisme dan komunisme.

Walaupun konsep Pemilu sangat beragam, dan ditentukan oleh sistem yang dipakai , namun ide dasar dari pelaksanaan Pemilu adalah memilih organ perwakilan rakyat. bahkan, dinegara yang paling otoriter pun Pemilu diadakan karena dipandang sebagai badan perwakilan dan atau transfer kekuasaan atau otoritas. Dengan demikian signifikasi Pemilu berbeda menurut sistem yang dianut. Begitu juga fungsinya disesuaikan dengan sistem tersebut. Sedangkan hakekat pemilu pada mulanya berarti persaingan dan kebebasan pemilih. Karena itu, para pemilih harus dapat memberikan suaranya secara bebas, yakni memilih di antara para calon atau partai-partai politik, di antara ideologi yang berbeda dan diantara program kebijaksanaan yang bermacam-macam pula.

Pada dasarnya ada beberapa makna pemilu yang sangat vital. Nohlen (1994) misalnya melihat Pemilu memiliki empat makna. *Pertama*, mambentuk basis konsep demokrasi. Tanpa Pemilu, tanpa persaingan bebas dan terbuka di antara kekuatan sosial dan kelompok politik dalam menuju kekuasaan politik, maka tidak ada demokrasi. *Kedua*, Pemilu melegitimasi sebuah sistem yang ada. *Ketiga*, mengabsahkan kepemimpinan politik. Serta *keempat* sebagai unsur pokok partisipasi politik.

Sementara itu senada dengan Nohlen , Nazarudin Syamsudin dan Alfian (1991) , melihat Pemilu merupakan suatu langkah untuk memenuhi prasyarat minimal bagi tegaknya tatanan demokrasi. Indikator adanya situasi demikian antara lain : *Pertama*, legitimasi yang memerintah didasarkan pada klaim bahwa mereka mewakilii rakyat. *Kedua*, Pengaturan bagi yang mengorganisasikan perundingan untuk memperoleh legitimasi dilaksanakan dengan Pemilu yang kompetitif. *Ketiga*, Sebagian besar orang dapat ikut serta dalam proses pemilihan baik sebagai pemilih maupun sebagai yang dipilih untuk menduduki jabatan penting. *Keempat*, masyarakat memilih secara rahasia tanpa paksaan. Serta *Kelima*, masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar, seperti kebebasan

berkumpul, berorganisasi dan kebebasan Pers.

Hal tersebut juga diamini oleh Dahl (1971), menurutnya Pemilu melibatkan dua dimensi, yaitu perlombaan *(contestation)* dan peran serta *(Participation)*. Prosedur demokrasi seperti ini mengasumsikan adanya kebebasan berbicara, menyebarluaskan pendapat, membuka perdebatan politik, kebebasan kampanye pemilu, dan keterlibattan masyarakat dalam penentuan calon pemimpinnya. Karena itu dalam Pemilu menurut Amir Santoso (1992), haruslah menjadi sarana untuk menguji penampilan calom pemimpin. Pemilu seharusnya menampilkan calon yang dikenal oleh masyarakat.

Pemilu merupakan sarana demo-krasi untuk membentuk kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat. Sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancarkan kewibawaan politik sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan perwakilan. Itu sesuai dengan ide sentral dalam demokrasi sendiri yaitu perwakilan, bagaimana suara rakyat dapat disalurkan lewat wakil- wakilnya di lembaga perwakilan seefektif mungkin.

Apa yang dikemukakan oleh Schumpeter (1950) tidak berlebihan, bahwa dalam suatu negara demokrasi, peranan rakyat adalah menghasilkan suatu pemerintah, dan oleh sebab itu metode pengaturan secara demokratis ialah pengaturan institusional untuk mencapai keputusan-keputusan politik dimana orang-orang mendapat kekuasaan untuk memutuskan lewat suatu pertarungan kompetitif untuk suara rakyat.

--

Ketika negara-negara Modern muncul, maka persoalan yang pertama dan terutama yang muncul adalah bagaimana seluruh kekuatan politik, kepentingan dan masyarakat keseluruhan terwakili dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Di samping itu, juga timbul masalah lain yaitu bagaimana Pemilu dapat berjalan secara demokratis, dan mengikutsertakan masyarakat yang tidak berhenti pada aras pemilihan, tetapi juga secara ketat terlibat dalam pencalonan bahkan mampu mengontrol calonnya yang terpilih

Persoalan di atas menghasilkan dua pilihan sistem pemilu, yaitu sistem proporsional *(proporsional representatif)* dan sistem distrik *(single member district pluralists)*. Dua tradisi sistem pemilu tersebut, masing-masing memiliki konsekuensinya masing- masing, baik secara teknis maupun produk yang dihasilkan melalui pemilu itu sendiri.

**Kalau (Bung?) Harmoko sebagai ketua umum Golkar yang juga dikenal sebagai tokoh kelompencapir dengan bangga menyebut-nyebut "single majority", sebenarnya dia sedang meng-erosi makna "single majority" .**

Secara teknis, pelaksanaan sistem pemilu proporsional mengasumsikan negara adalah satu daerah pemilihan besar, dengan berbagai pertimbangan seperti luas wilayah dan jumlah penduduk, maka negara dibagi atas daerah-daerah pemilihan. Masing-masing daerah pemilihan, memperoleh sejumlah kursi yang juga ditentukan dengan luas wilayah dan jumlah penduduknya. Adapaun pertimbangan lainnya menurut Sri Soemantri (1991), adalah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan politik yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

Sistem proporsional, seperti yang dikemukakan Arbi Sanit( 1992), Sri Soemantri (1991), maupun Riswandha (1990) secara umum memiliki dua keunggulan. Pertama, sedikit kemungkunan suara yang terbuang. Kedua, ada jaminan bahwa partai kecil akan terwaklili (mendapat kursi) di parleman.

Di samping memiliki keunggulan, sistem proporsional memiliki kelemahan yang utama yaitu wakil yang terpilih merasa dirinya dekat dengan partai. Kedekatan dengan partai dengan sendirinya mengakibatkan loyalitas kepada masyarakat sangat kecil. Kelemahan-kelemahan lainnya: *Pertama*, masyarakat tidak mengenal calon-calonnya, karena mereka bukanlah memilih orang, tetapi memilih partai. Partailah yang men-*drop* calon yang akan tampil. *Kedua*, Membuka peluang banyak partai (mempermudah fragmentasi partai) .

Sebaliknya, sistem distrik secara teknis dilakukan dengan membagi wilayah negara atas beberapa distrik yang jumlahnya akan sama dengan jumlah kursi yang akan diperebutkan di Parlemen. Karenanya setiap distrik akan memilih satu wakil dari sekian calon dalam satu satu distrik. Syarat yang harus dipenuhi oleh sistem distrik adalah bahwa jumlah pemilih yang mendiami suatu distrik kira-kira sebanding dengan jumlah pemilih di distrik lainnya.

Titik sentral dari pelaksanaan Pemilu dengan sistem distrik adalah bukan memilih partai politik, melainkan individu yang dicalonkan atau mewakili partai politik dalam suatu distrik. Sedangkan yang boleh diajukan menjadi calon adalah politisi-politisi yang berdomisili di distrik tersebut. Unsur drop-dropan dari luar daerah distrik tidak akan diperkenankan.

Kondisi objektif yang diperlukan bagi sistem distrik adalah sikap rasionalitas pemilih. Asumsinya, masyarakat akan mampu menentukan pilihannya secara rasional dan objektif. Kondisi lainnya adalah tingkat kesadaran politik masyarakat yang harus tinggi.

Satu kelebihan bahkan keunggulan sistem distrik adalah kedekatan dan loyalitas wakil kepada masyarakat pemilihnya. Dengan demikian, tidak sulit bagi masyarakat untuk mengontrol para wakilnya yang duduk di legislatif di kemudian hari. Dalam sistem ini tidak akan dikenal prinsip beli kucing dalam karung, strategi tipu menipu lewat *vote getter* tidak akan mungkin terjadi seperti dalam sistem proporsional. Yang paling menjadi kekuatiran dalam sistem distri hanyalah persoalan "hilangnya suara", sehingga ditakutkan tidak terwakilinya partai kecil di legislatif.

--

Sejarah Pemilu Orde baru adalah sejarah sistem Perwakilan berimbang *(proporsional representation)*. Hal ini setidaknya terlihat dari UU Pemilu yang digunakan dalam setiap pemilu. Sejak pemilu 1971 sampai 1992, secara substansi UU tidak mengalami

perubahan.

Hadirnya sistem proporsional, secara historis tidak terlepas dari rekayasa tertib sosial melalui konsensus nasional . Ketika G30S/PKI ditumpas secara besar-besaran oleh militer, maka sejak itulah timbul upaya-upaya mencapai kesepakatan membentengi Indonesia dari bahaya komunisme. Kesepakatan itu kemudian kita kenal dengan konsensus nasional.

Ada dua macam konsensus nasional, demikian menurut Nugroho (1991). *Pertama* , konsensus yang merupakan satu kebulatan tekad masyarakat dan pemerintah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Selanjutnya konsensus tersebut dinamakan konsensus utama. *Kedua*, adalah konsensus mengenai cara-cara melaksanakan konsensus utama. Kalau konsesnsus pertama merupakatan kesepakatan masyarakat (?) dan pemerintah, maka konsensus yang kedua merupakan kompromi maksimal antara partai politik, militer dan pemerintah.

Konsensus nasional (utama), sampai kini kelahirannya tidak dapat ditentukan secara pasti. Karena memang kelahiran konsensus nasional berawal dari berbagai macam dialog di masyarakat. Pada masa awal Orde baru, seminar-seminar, diskusi-diskusi dan semacamnya yang membicarakan upaya mempertahankan Pancasila menjamur dimana-mana. Karenanya saya sepakat dengan Harsono Tjokroaminoto (1981), bahwa Konsensus nasional bukanlah sebuah produk yuridis, konsensus nasional merupakan produk masyarakat dan produk politik. Konsensus tersebut lahir dari dialog-dialog di masyarakat. Sistem Proporsional, bukanlah hasil kesepakatan dari konsensus nasional utama. Perdebatan yang menghasilkan sistem proporsional berada pada konsensus mengenai pelaksanaan konsensus utama antara partai politik, militer dan pemerintah.

Kesepakatan untuk menggunakan sistem proporsional dalam pemilu didapat melalui perdebatan panjang antara ketiga unsur yang disebutkan di atas. Ada dua kubu yang muncul dari perdebatan mengenai sistem pemilu. Kubu pertama adalah kubu yang pro sistem distrik. Kubu ini justru adalah kubu pemerintah dan militer. Pihak pemerintah menginginkan agar rakyat memilih langsung wakil- wakilnya di daerah yang nota benenya betul-betul mereka kenal. Karena itu, sistem distriklah yang paling kemudian menjadi alternatif utama. Usulan pemerintah ini senada dengan keinginan Militer yang dirumuskan dalam Seminar II Angkatan darat bulan Agustus 1966. Tidak heran, jika kemudian militer menjadi pendukung utama sikap pemerintah tersebut.

Usulan sistem distrik yang datang dari kubu pertama, ternyata secara tegas ditolak mentah-mentah oleh kubu kedua yang diwakili partai politik terutama dua partai besar NU dan PNI yang kemudian didukung oleh Murba. Sedangkan Parkindo dan Partai katolik menghendaki kombinasai antara dua sistem pemilu. Sementara IPKI justru mendukung pemerintah dan militer untuk memakai sistem distrik.

Alasan partai politik terutama NU dan PNI adalah jika menggunakan sistem distrik, maka dengan sendirinya peran partai akan berkurang, sementara individu-individu yang akan menonjol. Alasan lain, karena massa dua partai besar tersebut berada di Jawa. Jika menggunakan sistem distrik, maka mengharuskan calon berdomisili di distrik pemilihan, otomatis distrik di luar Jawa akan dikuasai partai lain.

Tekanan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menggolkan sistem distrik, sebenarnya hanyalah bagian dari menyingkirkan peran politisi partai . Oleh Mochtar Masoed (1989), sistem distrik merupakan rekayasa kelompok *modernis* Orde baru yang termasuk dalam kelompok "reformasi sekarang". Kelompok itu menganggap perombakan sistem kepartaian yang ada secara radikal sebagai prasyarat keberhasilan orde baru. Karenanya, mekanisme yang paling efektif untuk melakukan reformasi seperti itu adalah mengubah sistem pemilihan menjadi sistem distrik.

Politisasi partai ternyata "cukup berani" untuk secara *frontal* menolak usul tersebut. Mereka tetap pada pendiriannya untuk menggunakan sistem proporsional. Melalui proses tawar menawar yang cukup alot, sikap ngotot yang diperagakan oleh politisi partai dapat diterima oleh pemerintah. Tetapi, memang watak pemerintah yang tidak ingin merugi, maka mereka mengajukan kontra usul yakni harus ada anggota yang diangkat disamping yang dipilih. Kompromi maksimal selanjutnya melahirkan empat kesepakatan. *Pertama*, Pemilu dilaksanakan dengan sistem proporsional seperti yang dikehendaki partai. *Kedua*, Keanggotaan DPR menjadi 460 orang (sebelumnya 347 orang). *Ketiga*, Pemerintah berhak mengangkat 100 anggota DPR (75 dari militer dan 25 dari sipil non-partai dan 1/3 anggota MPR. *Keempat*, ABRI melepaskan hak pilih mereka dalam Pemilu.

Tawar-menawar pelaksanaan sistem Pemilu menggambarkan betapa kuatnya posisi tawar Partai Politik. Fenomena tersebut mungkin sulit ditemui dalam realitas politik kontemporer. Tetapi, dibalik kekuatan posisi tawar tersebut, politisi partai terlihat teledor. Kepentingan yang sangat pragmatis, ternyata memabukkan politisi partai sehingga alpa memandang ke depan. Kekuatan militer dan Presiden di satu sisi dan hampir hilangnya legitimasi pada tingkat *grass roots* bagi partai di sisi lain, merupakan sesuatu yang hilang dari perhitungan. Partai Politik sebagai komponen utama pemenang Pemilu 1955, menganggap "perjalanan panjang" pengesahan UU pemilu akan memberikan ruang kesempatan untuk meraih kemenangan baru dengan merebut semua suara yang ditingggalkan oleh PKI. Di fihak lain militer memiliki perhitungan lain, Militer tidak akan rela bila kendali politik yang sudah digenggam akan tegelincir ke tangan Partai Politik.

--

Saat ini, praktek sistem proporsional membawa dampak yang cukup berarti bagi kehidupan lembaga legislatif khususnya maupun sistem politik umumnya. Dampak yang muncul memperlihatkan --sistem proporsional menjadikan wakil rakyat lepas dan tidak bertanggung jawab-- terhadap masyarakat. Argumentasi

**Yang mengenaskan, ketidakberdayaan legislatif terlihat ketika mereka melakukan tawar menawar politik dengan penguasa menyangkut suatu kebijaksanaan misalnya. Akan nampak jelas kemana keberfihakan anggota legislatif.**

yang dibangun diperkuat dengan meka-nisme dan prosedur yang dipergunakan dalam sistem proporsional membenarkan kebesaran otoritas pimpinan partai untuk menentukan siapa yang pantas dicalonkan. Karena itu, konsekuensinya wakil rakyat diikat oleh konsensus partai ketimbang apa yang diinginkan masyarakat. Kasus RK Sembiring maupun Sri Bintang Pamungkas, membuktikan betapa kebebasannya untuk berbicara lantang harus "loyo" dihadapan aturan fraksi ataupun partai.

Yang menggenaskan, ketidakberdayaan legislatif terlihat ketika mereka melakukan tawar menawar politik dengan penguasa menyangkut suatu kebijaksanaan misalnya. Akan nampak jelas kemana keberfihakan anggota legislatif. Anggota DPR membuat inisiatif, saran dan keputusan, bukan berlandaskan aspirasi masyarakat yang diketahui secara langsung dan terwakili. Mereka cenderung berinisiatif, bersikap dan menghasilkan keputusan perdasarkan pertimbangan pribadi. Meminjam istilah Gilbert Abcarian , mereka menggunakan pola perwakilan *politik wali* (*trustee*). Dalam politik wali, anggota DPR tidak terdorong untuk lebih peka dan konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Mereka cenderung otonom terhadap rakyat yang diwakilinya sambil menciptakan ketergantungan kepada partai/fraksi di satu fihak dan penguasa di fihak lain. Mereka enggan untuk menanggung resiko politik *(political risk).*

Kalau kemudian muncul upaya mempercantik dan memfungsionalkan DPR, menurut saya tidak cukup dengan proyek tambal sulam misalnya memperbanyak jumlah pakar, ataupun menaikkan upahnya sebagai wakil rakyat. Upaya tambal sulam seperti itu tidak secara simultan menghasilkan DPR yang berpenampilan menarik. Penelitian beberapa pakar seperti Arbi sanit, Yosef Riwukaho dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa kalaupun tingkat pendidikan, distribusi umur sangat memberi peluang untuk mengefektifkan fungsi DPR,tetap saja hal tersebut belum cukup jika tidak berani menanggung resiko politik terutama dihadapan pemerintah.

Resiko politik yang tidak didapat dalam politik wali, hanya akan dapat didorong melalui kontrol yang besar oleh masyarakat kepada para wakilnya. Tidak ada keterputusan jarak antara keduanya, sehingga wakil rakyat cukup tanggap terhadap aspirasi, wakil rakyat akan memainkan politik yang responsif . Hal tersebut hanya akan didapat melalui sistem distrik. Dalam sistem distrik, pola perwakilan akan berubah menjadi **politik Utusan** (*delegation*) yang tidak semata-mata memberikan kebebasan kepada anggota legislatif sekehendak hatinya menntukan pilihan kebijaksanaan. Wakil rakyat harus mengkompromikan dengan masyarakat luas.

Keberatan penerimaan sistem distrik yang selama ini terus dipelihara seperti mengingkari Konsensus nasional, rendahnya kesadaran politik, ataupun adanya kekuatiran partai kecil tidak terwakili, kini tidak relevan lagi. Mengubah sistem proporsional menjadi sistem distrik bukanlah bentuk pengingkaran terhadap konsensus nasional. Konsensus nasional adalah produk masyarakat dizamannya, keberadaannya tidaklah "sakral", karena pada dasarnya, setiap zaman berhak untuk membentuk konsesnus nasional yang sesuai dengan zamannya. Begitu pula,jika yang dikuatirkan adalah rendahnya kesadaran politik masyarakat. Anggapan tersebut justru "subversif" karena itu menghina produk pembangunan politik Orde Baru. Pada dasarnya masyarakat kita cukup kritis, hanya saja persoalannya sikap kritis tersebutlah yang selalu "diblokkir" oleh penguasa. Sedang persoalan teknis terhadap luas wilayah dan penyebaran penduduk, dapat diatasi dengan memberlakukan peraturan khusus pada daerah atau distrik tertentu.

# Pemberdayaan Politik:

# Meretas Kultur Oposisi

**"Marilah , sekarang ini bersama-sama kita menguburkan semua partai !". Inilah seruan presiden Soekarno pada 28 Oktober 1956, ketika suasana politik semakin keruh dan sistem Demokrasi Parlementer di ambang kejatuhannya.**

Budi Irawanto
Mahasiswa FISIPOL UGM dan aktivis pada Majelis Sinergi Kalam ICMI Yogyakarta.

Seruan yang agaknya hari ini justru menemukan realitasnya. Partai politik (parpol) telah terhukum sebagai "cacat" sejarah perpolitikan di Indonesia. Karena itu, sesungguhnya sistem politik Indonesia dibangun di atas endapan-endapan trauma politik masa lalu.

Atmosfer politik kepartaian telah digantikan oleh konsensus dan "penyerderhanaan parpol". Pertikaian ideologis -- yang dulu menciptakan hiruk-pikuk antar parpol -- telah digeser oleh orientasi parpol yang lebih programatis dan pragmatis. Barangkali ini sekadar afirmasi prognosa dari Daniel Bell dengan jargonnya "the end of ideology".

Di kalangan para cendekiawan sendiri parpol tidak lebih sebuah potret buram dari politik masa lalu. Setidaknya, menurut Mohtar Mas'oed (1989), sebagian cendekiawan modernis menganggap para pimpinan parpol mengidap tiga jenis penyakit. *Pertama*, mereka terlalu menekankan pertimbangan ideologis dalam menilai kebijakan umum, sehingga mereka memperburuk konflik dalam suatu masyarakat majemuk. *Kedua*, mereka dituduh hanya memperhatikan kepentingan orang-orang dekat, dan menggunakan dukungan populer untuk melindungi kepentingan - kepentingan tersebut. Akhirnya, mereka biasanya direkrut melalui penunjukan oleh pimpinan nasional, sehingga pimpinan partai menjadi sebuah oligarki yang tak perlu mempertanggungjawabkan diri pada pemilih .

Dengan kata lain, parpol sesungguhnya telah direnggut legitimasi dan kontrolnya terhadap kebijakan eksekutif. Karena itu, parpol telah kehilangan *raison d'etre* dalam konstelasi perpolitikan Indonesia. Melalui politik "massa mengambang" (floating mass) parpol tidak hanya kehilangan akar di tingkat massa akar rumput, tetapi ia telah berubah sekadar interior bagi kekuasaan pemerintah. Parpol tetap ada tetapi hampir tanpa makna.

Situasi ini memang memiliki akarnya pada sejarah politik Indonesia di masa lalu. Ketika kekuatan-kekutan politik -- dengan basis idelogis yang beragam -- mengorganisir dirinya ke dalam partai, percaturan politik nasional ditentukan oleh tegangan berbagai ideologi. Juga ketika pemilihan umum (pemilu) dilakukan memberikan peluang bebas pada rakyat memilih wakil-wakilnya melalui pluralitas parpol. Dewan perwakilan yang terpilih benar-benar menjadi representasi dari kekuatan yang hidup dalam masyarakat. Memang kemudian konsensus tidak gampang dicapai terhadap sebuah

kebijakan. Tetapi, kontrol dan koreksi parpol terhadap kebijakan eksekutif (pemerintah) sangat kuat. Di samping itu, parpol juga memiliki representasinya di dalam kabinet sehingga mampu mempengaruhi kebijakan eksekutif.

**Arkeologi "Kematian" Parpol**

Pada pemilu pertama sejak Indonesia merdeka (1955) -- dengan jumlah parpol saat itu mencapai 36 -- beberapa kontestan sesungguhnya mewakili pelbagai kekuatan dan "aliran" dalam masyarakat. Meskipun situasi negara belum sepenuhnya stabil partisipasi politik masyarakat cukup tinggi. Mereka yang menggunakan hak pilihnya sekitar 87,65 persen dari jumlah pemilih 43.104.446. Suara yang diberikan cukup beragam sebarannya pada parpol yang ada. Meskipun kemudian berakibat pada jatuh bangunnya kabinet karena seringnya muncul mosi tidak percaya. Pada masa inilah pertikaian ideologis antar parpol sangat tajam, sehingga realisasi program menjadi tercecer.

Namun, bagi Jamie Mackie (1993) sisi positif dari periode 1950-an justru relatif berfungsinya DPR sebagai forum perdebatan bebas dan mekanisme yang mendorong pemerintah bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan penting (Inside Indonesia, March 1993 : 9). Ini karena Pemilu 1955 merupakan pemilu -- sepanjang sejarah Indonesia -- dimana rakyat secara murni memilih dengan bebas tanpa tekanan dari kekuasaan lokal maupun nasional. Sehingga menciptakan pola distribusi kekuatan parpol yang bisa diandaikan representasi masyarakat.

Kejatuhan Demokrasi Parlementer (Liberal), menurut Daniel Lev (1993), sesungguhnya disebabkan oleh angkatan bersenjata (Inside Indonesia, ibid ). Angkatan bersenjata saat itu tidak sekadar berada dalam bayang-bayang kekuasaan parlemen, tetapi secara perlahan tumbuh menjadi kekuatan politik yang penting. Karena memang sejak semula angkatan bersenjata memiliki sifat ambisius, berpamrih, asertif dan berkemauan keras. Ia cukup mampu mempertautkan pelbagai kepentingan yang beragam dalam sistem politik saat itu.

Sulit ditampik kenyataan bahwa periode 1950-an telah terjadi kebuntuan politik, kebangkrutan ekonomi, dan ketegangan sosial. Tetapi, inilah awal dari hilangnya penghargaan terhadap hak asasi, demokrasi dan konsep negara konstitusional yang secara efektif membatasi dan mengontrol kekuasaan pemerintah. Semua gagasan ini dianggap konsep Barat ( yang anehnya hari ini ternyata tetap menjadi dasar argumen pemerintah untuk menunda proses demokratisasi) dan bertentangan dengan budaya dan kepribadian Indonesia. Yang terjadi sesungguhnya: disemainya benih otoritarianisme dalam praktik politik di Indonesia. Maka, lahirlah kemudian sistem Demokrasi Terpimpin -- dengan pemusatan kekuasaan pada presiden Soekarno. Pendeknya, menyitir Ruth McVey (1993), " Tahun 1950-an dapat dimaknai tidak hanya era timbulnya perpecahan dan disorganisasi, tetapi periode yang menjadi prakondisi positif bagi terciptanya "negara yang menguat" pasca 1965.

Setelah Soekarno membubarkan Konstituante (yang sesungguhnya menjadi forum bagi perdebatan bebas beragam konsep kenegaraan) karena dianggap gagal melakukan tugasnya, kekuasaan menjadi semakin sentralistis . Ada aroma otoritarianisme yang kuat dalam kekuasaan Soekarno. Parpol kehilangan daya koreksi dan kontrolnya di bawah ideologi "Nasakom" serta ajaran "Soekarnoisme". Untuk mengkooptasi parpol -- mengacu pada ideologi "Nasakom"-nya -- Soekarno melakukan penciutan jumlah parpol dari 25 menjadi 10. Mewakili ideologi nasionalisme (PNI, Partindo, IPKI), Islam (NU, PSII, Perti), Kristen (Parkindo dan Partai Katholik), serta Marxisme (PKI dan Murba).

Tetapi, periode ini agaknya tidak berumur lama, karena adanya tekanan dari angkatan bersenjata akibat suasana politik yang kian memburuk setelah peristiwa "G 30 S PKI". Terjadilah transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto -- dengan "surat sakti" SUPERSEMAR -- yang kemudian mengambil alih kontrol politik nasional. Partai Komunis Indonesia (PKI) dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang. Tetapi , menurut Daniel Dhakidae (1981), peristiwa ini justru menjadi semacam ironi sejarah. Dalam kata-kata Daniel Dhakidae, "Ketika partai-partai politik merayakan kemenangan besar-besaran dengan membubarkan partai terbesar nomor empat di dalam pemilihan umum pertama yaitu *Partai Komunis Indonesia,* pada saat yang sama pula partai-partai politik di luar kesadarannya sedang merayakan kekalahan dan upacara kematian bagi dirinya sendiri".

Pembersihan dari unsur-unsur komunis di DPRGR dan MPRS terus dilakukan Soeharto dan kemudian mengisinya dengan orang-orang dekatnya. Di depan sidang MPRS Soeharto -- sebagai Pejabat Presiden -- menyampaikan laporan tertulis tentang penundaan pelaksanaan Pemilu yang seharusnya diselenggarakan pada 6 Juli 1968 sesuai Ketetapan MPRS. Laporan ini ternyata menjadi rujukan Sidang MPRS tanggal 27 Maret 1968 yang menetapkan Soeharto sebagai Presiden dan penundaan pemilu paling lambat sampai tanggal 5 Juli 1971. Tak pelak keputusan ini menimbulkan kontroversi di kalangan parpol dan angkatan bersenjata. Bagi parpol ini berarti hilangnya momentum untuk memobilisasi dukungan massa lewat Pemilu setelah pembubaran PKI. Sebaliknya, angkatan bersenjata tidak cukup berani mempertaruhkan kontrol politik yang ada ditangannya lepas karena Pemilu.

Adanya kebutuhan dari angkatan bersenjata untuk memiliki perwakilan dalam DPR mendorongnya mengkooptasi Sekber Golkar (Sekretariat Bersama Golongan Karya) -- yang dulu menjadi alat perlawanan terhadap PKI -- dengan menempatkan orang- orangnya pada puncak pimpinan organisasi. Maka, dilakukanlah restrukturisasi terhadap Sekber Golkar dengan menyederhanakan organisasi-organisasi di dalamnya. Praktis Golkar menjadi ekstensi dari kekuasaan pemerintah. Apalagi dengan Permen No. 12 tahun 1969 melarang pegawai negeri menjadi anggota parpol dan mengharuskan "mono-loyalitas" pada pemerintah. Melalui penugasan perwira militer sebagai pengelola cabang-cabang lokal Sekber Golkar di seluruh negeri, secara efektif organisasi diperkuat dan meratakan jalan ke pemilu.

Pemilu 1971 memberikan kemenangan fantastis pada Golkar dengan memperoleh 62,8 persen suara, jauh melampaui perolehan suara "partai-partai tradisional" (NU, Parmusi, PNI). Dengan menguasai mayoritas kursi -- ditambah anggota- anggota lain yang diangkat pemerintah -- profil dewan perwakilan hampir sepenuhnya monolitik. Stabilitas politik berhasil dipertahankan, dan potensi-potensi parpol bisa dilumpuhkan. Isu tentang "penyederhanaan partai", melalui fusi beberapa partai, kembali mencuat setelah Pemilu 1971. Bahkan, dalam sidang MPR -- hasil Pemilu 1971 -- diputuskan tentang penyederhanaan parpol dan dinyatakan de-

ngan tegas hanya ada tiga kontestan dalam Pemilu 1977.

Penyederhanaan partai inilah yang semakin mempercepat proses menuju "kematian" parpol . Upaya ini sesungguhnya telah dimulai ketika Presiden pada 27 Februari 1970, mengadakan pertemuan dengan para pimpinan parpol, yang menyarankan pengelompokan partai. Argumen resmi yang dikemukan: pengelompokan ini bertujuan semata-mata mempermudah kampanye pemilihan, bukan untuk "melenyapkan" partai. Hasil dari pertemuan ini adalah pembentukan dua kelompok koalisi -- yang kelak berlanjut pada pembagian fraksi -- di dalam DPR pada Maret 1970 : Kelompok Demokrasi Pembangunan (PNI, Parkindo, IPKI, Murba, dan Partai Katholik) serta Kelompok Persatuan Pembangunan (NU, Parmusi, PSII, dan Perti). Pada Januari 1973 Kelompok Persatuan Pembangunan menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Kelompok Demokrasi Pembangunan menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Inilah sesungguhnya mulai disemainya konflik laten dalam parpol. Konflik antar unsur dalam parpol baru ini memang bisa karena perbedaan sikap dalam menentukan kebijakan politik partai keluar, atau berebut porsi kekuasaan di dalam.

Maka, mulai berlaku sistem kepartaian yang hegemonik dimana Golkar mendominasi kekuataan PDI dan PPP. Sistem ini , menurut Mohtar Mas'oed (1989), terus dipertahankan dengan pelbagai cara. Salah satu cara adalah mekanisme *recall*, yang memungkinkan pimpinan partai menindak anggotanya di DPR kapan saja atas saran pemerintah. Cara lain ialah persyaratan bahwa anggota partai manapun yang menginginkan posisi pimpinan harus mendapatkan izin dari pemerintah. Metode lain yang efektif adalah intervensi pemerintah dalam muktamar partai guna mecegah naiknya pemimpin yang tidak bisa diajak bekerja sama. Juga adanya larangan bagi pegawai negeri masuk menjadi anggota partai, kecuali melalui ijin yang sulit dari pimpinan.

Akhirnya, pemerintah telah mencegah partai untuk beroraganisasi di pedesaan atau di luar kota kabupaten -- akibat kebijakan *floating mass* -- kecuali pada kampanye Pemilu setiap lima tahun. Sistem ini semakin diperkukuh dengan pembentukan – meminjam istilah Phlippe Schmitter -- kelompok-kelompok kepentingan korporatis dalam jaringan Golkar. Karena itu, bagi Daniel Dhakidae (1981), parpol tak ubahnya "partai para pengurus" atau partai yang hanya sibuk di dalam pemilu dengan menjadi *voters' assaciation*. Ia hanya menunjukkan keberadaannya pada saat menyiapkan pemilu serta telah kehilangan akarnya pada massa pemilihnya setelah pemilu usai.

**Meretas Kultur Oposisi Parpol**

Hegemoni Golkar dalam sistem kepartaian Indonesia tanpa disadari mengundang tumbuhnya oposisi dari dua partai yang lain. Sebagaimana sebuah kekuasaan yang totaliter sesungguhnya selalu menyediakan celah bagi sebuah "perlawanan".

**Hak untuk berpendapat barangkali memang awal dari kebebasan, tetapi kebutuhan untuk mendengarlah yang menjadikan hak itu penting.**

Apalagi dalam semangat zaman saat ini yang diwarnai gelombang demokratisasi kebutuhan akan sebuah oposisi semakin sulit ditampik. Menurut Walter Lippman ( 1939) dalam sistem demokrasi oposisi tidak hanya ditolerir oleh konstitusi, tetapi seharusnya dipertahankan karena ia kenyataan yang tak tergantikan. Sistem yang demokratis tidak akan mampu berjalan tanpa adanya oposisi yang efektif.

Acapkali argumen yang menolak oposisi – terutama dari kalangan pemerintah -- hampir sama dengan penolakan gagasan demokrasi, hak asasi manusia, yang dianggap konsep Barat. Dan dengan sendirinya tidak sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsa Indonesia. Kepentingan tersembunyi dari argumen kultural ini adalah justifikasi terhadap praktik otoritarian yang berlindung dibalik keluhuran kepribadian bangsa. Juga penafsiran yang subjektif dan sepihak dari pemerintah atas konstitusi (UUD '45) serta Pancasila yang dianggap tidak mencantumkan keberadaan oposisi. Semua ini sesungguhnya bermuara pada gagasan "negara integralistik" sebagai model hubungan kekeluargaan antara pemerintah dan rakyat. Konflik terbuka dianggap tabu dan perbedaan pendapat dicap sebagai sikap pembangkangan.

Padahal kebebasan berpendapat dan bersikap secara berbeda menandaskan kebutuhan untuk menemukan kebenaran bersama. Sebagaimana ungkapan populer dari Voltaire, " Saya tidak setuju sepenuhnya apa yang anda katakan, tetapi saya akan membela sampai mati hak anda untuk mengatakan itu". Sudah tentu, dalam kenyataannya hampir tidak ada orang yang membela hak orang lain sampai mati : jika mereka tidak setuju dengan pendapat orang lain, mereka setidaknya akan menekan orang lain itu sepanjang mereka mampu. Karena itu, esensi dari kebebasan berpendapat tidaklah sekadar persoalan toleransi, tetapi di dalam perdebatan yang toleran : tidak hanya menyampaikan gagasan tetapi mengkonfrontasikannya.

Hak untuk berpendapat barangkali memang awal dari kebebasan, tetapi kebutuhan untuk mendengarlah yang menjadikan hak itu penting. Dalam kata-kata Walter Lippman, " Setiap negarawan yang baik, seperti juga setiap kemanusiaan yang peka, senantiasa belajar banyak dari lawan-lawannya ketimbang pada para pendukunganya yang buta. Para pendukung yang buta hanya akan mendorong seseorang ke arah bencana hingga lawan-lawannya menunjukkan padanya di mana letak bahaya itu."

Konstitusi (UUD '45) pada dasarnya , menurut Ismail Suny (1978) , memberi ruang bagi keberadaan oposisi. Dalam pasal 6 tentang pemilihan presiden dan wakilnya oleh MPR dengan suara terbanyak serta pasal 37 tentang perubahan UUD '45 melalui persetujuan 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir. Kedua pasal ini memungkinan dilakukannya pemungutan suara yang berarti diakuinya perbedaan pendapat dan hak beroposisi. Melalui hak beroposisi MPR dan DPR dapat melakukan koreksi dan kontrol terhadap pemerintah.

Akan tetapi, yang mengganjal bagi munculnya oposisi adalah masih monolitiknya profil MPR yang tidak sepenuhnya menjadi representasi dari pelbagai kekuatan dalam masyarakat. Ini akibat dari besarnya anggota yang diangkat (sekitar 60 persen) ketim-

bang anggota yang dipilih melalui secara demokratis lewat Pemilu. Kabinet -- yang pembentukannya menjadi hak prerogatif presiden -- juga tidak merepresentasikan kekuatan parpol kecuali Golkar. Karena itu, keterlibatan parpol dalam proses politik semakin mengalami marginalisasi.

Barangkali kritik dari Andrew Macintyre (1991) tentang absennya institusi politik dalam demokratisasi di Indonesia cukup masuk akal. Dengan mengambil perbandingan Korea Selatan, Macintyre mengatakan, "Partai politik di Indonesia (termasuk Golkar) pendeknya tidak menjadikan dirinya agregator bagi berbagai kepentingan masyarakat dan miskin akan pengalaman dalam menyumbang debat kebijakan." Dengan kata lain, parpol sesungguhnya berada di luar medan perumusan dan pengambilan kebijakan eksekutif. Paling jauh peran yang mampu dilakukannya sekadar menjadi pemberi justifikasi bagi kebijakan yang telah dibuat pemerintah.

Maka, sikap oposisional dari parpol -- dengan senantiasa tidak berprasangka hendak menjatuhkan pemerintah -- memiliki alasan eksistensialnya. Bagaimanapun, kekuasaan eksekutif yang sangat eksesif, tanpa ada sikap oposisional parpol, akan menghilangkan mekanisme *ceck* dan *balance* agar kekuasaan tidak semakin otoritarian. Sementara itu, marginalisasi parpol dalam penentuan kebijakan eksekutif memberi peluang parpol -- melalui lembaga perwakilan rakyat -- melakukan peran kritik. Ini berarti parpol menciptakan spasi bagi debat kebijakan.

Jika parpol mampu menciptakan kultur oposisi dalam sistem kepartaian saat ini, proses demokratisasi bukanlah sesuatu yang muskil. Sudah tentu , hal yang esensial bagi proses pemberdayaan parpol -- kalau boleh disebut demikian -- adalah pembongkaran terhadap UU Parpol dan Ormas. UU ini tidak hanya membatasi , tetapi secara efektif melemahkan peran parpol. Politik " massa mengambang" telah tiba masanya dikubur, lebih dari sekadar ditinjau ulang. impak dari politik ini secara nyata menyapu partisipasi politik yang riil dari masyarakat. Juga, memutuskan afinitas dan dukungan masyarakat terhadap parpol.

Parpol memang bukan agen tunggal bagi proses demokratisasi di Indonesia. Keberadaan berbagai organisasi non-pemerintah patut pula dilihat memberi sumbangan proses demokratisasi. Tetapi, adanya jaminan secara konstitusional memberi dasar legitimasi peran parpol. Parpol semestinya semakin terlibat dan berpihak pada persoalan-persoalan masyarakat. Karena sesungguhnya melalui keterlibatan dan keberpihakannya inilah parpol memiliki *raison d'etre*-nya. Peran parpol dalam meretas kultur oposisi pada akhirnya toh sebuah upaya pemberdayaan masyarakat juga.

Pembesaran kekuasaan eksekutif niscaya tidak hanya inefektif, tetapi juga semakin tidak adaptif terhadap dinamik perubahan masyarakat. Sentralisasi kekuasaan menjadi tampak berlebihan, ketika kepentingan dan kebutuhan masyarakat semakin plural. Sikap politik juga tidak lagi gampang diseragamkan, tatkala tuntutan akan transparansi dan keterbukaan semakin menguat. Sejarah kontemporer bangkrutnya komunisme -- dengan watak kekuasaannya yang sentralistik dan otoritarian -- adalah bukti kuatnya tuntutan demokratisasi. Dan, parpol setidaknya bisa menjadi medium yang melakukan -- meminjam bahasa teknis ilmu politik yang klasik -- artikulasi, agregasi serta konversi kepentingan masyarakat.

**EPILOG**

Indonesia masa depan bisa jadi hanyalah proyeksi harapan-harapan Indonesia hari ini. Ia bisa berarti patahan atau kontinuitas dari sejarah Indonesia masa lalu dan dan kini. Tidak terkecuali politik Indonesia. Apalagi, seperti ungkapan yang populer di kalangan praktisi politik, "Politic is the art of the possible". Politik sering gampang dijelaskan (sudah tentu lewat simpilifikasi yang dibuat para pakar) tetapi perkembangannya sungguh sulit diduga. Politik agaknya mirip cuaca : gampang berubah-ubah dan acapkali menihilkan ramalan yang telah dibuat.

Karena itu, peran parpol sepatutnya memang dilihat dengan sedikit rendah hati. Upaya pemberdayaan parpol -- yang menjadi *concern* tulisan ini -- bukanlah *panacea* bagi pelbagai persoalan pelik politik Indonesia hari ini. Ia memiliki pertautan yang kompleks dengan persoalan politik lain seperti : hubungan sipil-militer, sistem Pemilu yang adil dan demokratis, penegakan hak asasi, penguatan konstitusi dan sebagainya. Tetapi ini tidak berarti upaya pemberdayaan parpol hanya memiliki efek yang terbatas.

Apapun soalnya, kultur oposisi -- dalam praktik politik Indonesia di masa depan -- adalah imperatif bagi sistem politik yang masih memuliakan akal sehat. Dan menghargai harkat manusia untuk berbeda pendapat seraya terus mengupayakan hidupnya dialog.

# Membangun dari Pinggiran

## Suatu Penalaran tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah

**Keluhan seorang petani di Tanah Lot, Bali : " Kalau dahulu Belanda yang menjajah kita, tetapi sekarang orang Jakarta yang menjajah kita".**

### Pendahuluan

Keluhan itu memperlihatkan kepada kita bahwa persoalan dominasi Jakarta sebagai pusat kekuasaan dan pusat kegiatan ekonomi terhadap daerah tetap menjadi persoalan mendasar yang dihadapi di daerah-daerah. Persoalan diatas tentunya akan menyinggung titik pembahasan kita mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

AA.GN Ari Dwipayana
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan
FSIPOL UGM.

Di negara-negara yang sedang berkembang, dilema sentralisasi dan desentralisasi dalam upaya menyelenggarakan pembangunan selalu merupakan isu yang menonjol, khususnya dalam kaitan dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang terbatas. Sentralisasi dan Desentralisasi menjadi mengarah pada persoalan penggalian sumber daya dan pengalokasian kembali sumber daya itu. Ketika terjadi fenomena dimana daerah yang kaya menyumbang sumber daya yang lebih besar, mendapatkan alokasi asset ekonomi yang lebih sedikit. Dimana hal itu cendrung akan menimbulkan ketidakpuasan, yang muara akhirnya adalah meletusnya gerakan saparatisme. Basis pembenaran terhadap tesis ini dapat kita lihat pada fenomena timbulnya gerakan saparatisme sampai bubarnya negara di Yugoslavia, Cekoslowakia dan Uni Soviet.

Di Indonesia sendiri, diskursus mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah ini mengedepan ketika pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh rezim Orde Baru mengalami masalah, yang mengakibatkan terbentuknya struktur ketimpangan, baik ketimpangan antar sektor, ataupun ketimpangan antar daerah. Terjadinya pola ketimpangan tersebut di masa yang akan datang bisa jadi dapat menjadi arus balik yang kuat bagi kelangsungan pembangunan itu sendiri maupun kelangsungan hidup bangsa.

Disamping itu pengangkatan kembali masalah Desentralisasi dan Otonomi daerah dewasa ini, tidak terlepas dari semakin kecilnya dana yang dikuasai oleh pemerintah pusat baik yang berasal dari minyak bumi maupun pinjaman luar negeri. Penurunan pendapatan minyak dan pinjaman luar negeri tersebut mengakibatkan perubahan struktur penerimaan negara, disamping semakin meningkatnya penerimaan pajak sebagai pendorong dan penstabil pertumbuhan ekonomi (Mubyarto:1991). Seperti diketahui pajak-pajak itu sebagian besar digali dari daerah-daerah.

Berkenaan dengan perdebatan tentang konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah, hal yang paling penting untuk dikedepankan adalah keberanian kita untuk memikirkan kembali konsep otonomi daerah dalam kaitannya dengan desentralisasi sebagai salah satu cara untuk melaksanakan demokrasi politik dan ekonomi. Ketika kita berbicara tentang

Desentralisasi kita membayangkan posisi otonomi relatif dari daerah dalam berhadapan dengan pusat. Dengan kata lain pembahasan Desentralisasi dan Otonomi Daerah bukan hanya persoalan dari sisi manajemen pemerintahan semata, tetapi harus dilihat sebagai sebuah

tarik menarik kepentingan antara pusat dan daerah, baik berdemensi politis maupun ekonomi. Dimana yang menjadi permasalahan selama ini adalah di titik mana tarik menarik kepentingan itu mendapatkan posisi yang proporsional, dalam arti terjadi hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah.

Kecendrungan yang terjadi selama ini adalah dikalangan pemerintahan melihat otonomi semata-mata dari sisi ekonomi dan efisiensi disamping *phobia* desentralisasi masa lalu, tanpa memperhatikan aspek demokratisasi dan dinamisasi masyarakat dan pemerintahan daerah. Hal ini mungkin disebabkan oleh kuatnya pengaruh paradigma pembangunan terencana, sehingga pemerintah pusat merasa sepenuhnya bertanggung jawab terhadap pembangunan nasional.

Oleh karena itu tulisan ini akan mencoba mengkaji secara lebih mendalam pola tarik menarik kepenti ngan antara pusat dan daerah, yang mana kuat tidaknya posisi daerah akan ditentukan oleh kebijaksanaan ekonomi-politik yang ditempuh oleh pusat. Tulisan ini juga akan memperlihatkan titik penting dari Desentralisasi dan Otonomi Daerah ketika kita membahas ketimpangan antar daerah, lebih khusus lagi ketimpangan pusat dan daerah yang diakibatkan karena kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang diterapkan oleh rezim orde baru. Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam kerangka ini dapat dilihat sebagai salah satu cara mewujudkan demokrasi eko nomi dan politik.

Tabel 1 .

**NILAI RUPIAH DARI PERDAGANGAN LUARNEGERI: JAWA LUAR JAWA DAN INDONESIA TAHUN 1958**

(dalam jutaan Rupiah)

| | Resmi | Penyesuaian |
|---|---|---|
| **EKSPOR** | | |
| Jawa dan Madura | 1.179 | 3.124 |
| Luar Jawa | 7.835 | 20.763 |
| Indonesia | 9.014 | 23.887 |
| **IMPOR** | | |
| Jawa dan Madura | 3.945 | 4.616 |
| Luar Jawa | 2.258 | 2.642 |
| Indonesia | 6.203 | 7.258 |

Sumber : Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1988, hal. 4.

**Pembangunan Ekonomi Orde Baru**

Pada awal kehadiran rezim orde baru dihadapkan pada kondisi-kondisi krisis ekonomi-politik yang diwariskan oleh rezim orde lama. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kebijaksanaan yang secara ekonomi layak dan secara politis dapat diterima. Strategi ekonomi yang dianggap baik adalah stabilisasi ekonomi yang bersifat drastis , yang memungkinkan perusahan swasta memainkan peranan aktif, kendatipun masih berada dalam pengarahan pemerintah di dalam sistem pasar bebas dan yang memungkinkan pemanfaatan modal asing. Strategi ini menjanjikan hasil yang lebih cepat tanpa memerlukan perubahan sosial ekonomi yang mahal (Mohtar Masoed:1989).

Pilihan strategi ini diarahkan untuk mengembangkan industri subsitusi impor yang berorietasi pada pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Pengembangan industri pengganti impor ini dijalankan dengan memberikan fasilitas-fasilitas fiskal, kredit dan juga perlindungan tarif bagi peengusaha nasional maupun asing. Semua kemudahan yang diberikan itu semata-mata berorientasi pada pertumbuhan, yaitu strategi untuk memberikan layanan yang istimewa kepada kelompok pemilik modal yang dianggap sebagai pencipta surplus. Penerapan sistem ekonomi yang bercorak kapitalistik ini merupakan strategi alternatif untuk dapat segera keluar dari krisis yang melanda Indonesia sebagai warisan pemerintah orde lama.

Dalam perkembangannya ternyata strategi tersebut mampu memberikan hasil yang menakjubkan . Hal ini dapat diketahui dari beberapa indikator yang bersifat makro, misalnya garis eksponensial data Domestik Bruto perkapita selama periode 1967-1977 menunjkan tingkat pertumbuhan sebesar 5,3 % (Sritua Arief:1990). Sementara laju pertumbuhan berkisar antara 7-8 % pada tahun 1967- 1981 (Syahrir: 1988). Yang terakhir Gross Domestik Product mengalami peningkatan yang menakjubkan sebesar 448 milyar rupiah menjadi 1.147 milyar rupiah pada tahun 1980 (Syahrir: 1986). Salah satu peneyebab pertumbuhan yang cukup pesat ini adalah penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.

Meminjam penilaian Hal Hill (1989), tampaknya pembangunan ekonomi Orde Baru sangat mengesankan. Tetapi pengukuran tersebut cendrung bersifat makro dalam dataran level nasional. Artinya keberhasilan pertumbuhan secara makro seringkali mengesampingkan adanya ketimpangan dan distribusi pendapatan . Dengan kata lain pengukuran secara makro terlalu mengesampingkan realitas ekonomi politik pada dataran lokal. Padahal untuk memahami distribusi dan ketimpangan regional yang sangat penting dalam menganalisa struktur ekonomi politik nasional.

**Ketimpangan Antar Daerah di Indonesia**

Pluralitas regional di Indonesia secara alamiah diciptakan oleh iklim yang berbeda-beda dan struktur tanah yang tidak sama diantara berbagai daerah di kepulauan Nusantara. Perbedaan curah hujan dan kesuburan tanah merupakan kondisi yang menciptakan dua macam lingku-ngan ekologis yang berbeda di Indonesia, yakni daerah pertanian sawah dengan sistem pengairan yang terutama dijumpai daerah Jawa serta daerah pertanian ladang yang banyak dijumpai di daerah luar Jawa (Nasikun, 1988). Pemerintahan Hindia Belanda yang berlangsung tidak kurang dari 350 tahun bukannya meniadakan perbedaan Jawa dan luar Jawa itu. Akan tetapi deferensiasi regional akibat faktor alamiah itu menjadi ketimpangan regional sehabis diterapkannya tanam paksa. Penetrasi kolonialisme barat memasukan sistem produksi kapitalistik kedalam struktur ekonomi masyarakat Indonesia. Penetrasi sistem produksi kapitalistik ini diwujudkan ke dalam sektor perkebunan dan sektor pertamba-ngan yang pada waktu itu merupakan sektor modern

berorientasi ekspor. Integrasi struktur ekonnomi Indonesia ke dalam sistem Kapitalisme Internasional menimbulkan struktur ekonomi yang dualistik dan sangat tergantung pada barat. Tetapi penetrasi kapitalisme tidak hanya terjadi pada sektor modern , melainkan terkait pada sektor tradisional. Sebagian besar golongan pribuumi menggantungkan hidupnya. Peranan sektor tradisional terletak pada peran peran pinggiran berupa penyediaan tanah, tenaga kerja dan bahan pertanian yang murah.

Di luar Jawa, penetrasi kapitalisme itu berbentuk lain. Terjadi perkembangan yang terbatas pada sektor agraris. Penduduk di luar Jawa dipusatkan pada usaha penanaman tanaman keras untuk pasaran dunia, disamping sektor pertambangan (Milan J Titus, 1988).

Disamping itu, dari data penyebaran penduduk tahun 1930 memperlihatkan perbedaan yang tajam mengenai jumlah penduduk. Jawa yang luasnya sekitar 131.174 KM2 (6,94%) dengan jumlah penduduk sebesar 68,70 % dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan luar Jawa dengan luas sekitar 1.772.171 KM2 (93 %) memiliki 31,30 % dari jumlah penduduk Indonesia pada waktu itu (Nasikun:1988).

Jumlah penduduk pulau Jawa yang padat memumgkinkan Belanda mendapatkan tenaga kerja yang murah untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja pada sektor perkebunan dan pertambangan di luar Jawa. Sehingga terjadi migrasi buruh-buruh Jawa ke luar Jawa. Begitu pula untuk mencukupi kebutuhan tenaga administratif yang murah bagi kepentingan pemerintahan Hindia-Belanda, maka penduduk pulau Jawa lebih banyak direkrut ke dalam struktur birokrasi daripada yang dialami penduduk di luar Jawa. Dan kebanyakan diantara birokrat tersebut berasal dari golo-ngan aristokrasi Jawa , yang setelah dilaksanakannnya politik etis banyak memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendidikan barat (Nasikun: 1988).

Akibat diterapkannya sistem pemerintahan tidak langsung , memungkinkan penduduk daerah luar jawa tetap mengembangkan pola perdagangan yang telah tumbuh lama, hal ini sangat berbeda dengan di Jawa dimana pemerintahan Hindia Belanda mematikan kegiatan perdagangan penduduk di daerah tersebut. Tetapi disamping sebagai pusat administrasi dan titik berat demografi dari seluruh Indonesia, Jawa tetap merupakan pusat perkembagan eko- nomi dari daerah-daerah di luar Jawa. Kota-kota besar di Jawa menjadi pusat kegiatan ekspor bahan mentah dari daerah luar Jawa ke pasaran dunia. Tentunya hal tersebut mengukuhkan pola ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa.

Pola ketimpangan antar daerah kembali dijumpai pada masa Orde lama. Itu terlihat dari data yang menunjukan bahwa pada tahun 1955-1956 hampir 71 % dari devisa Indonesia dihasilkan oleh ekspor dari pulau Sumatera dan 17 % dari daerah lain di luar Jawa. Sementara lebih dari 80 % dari jumlah devisa tersebut dipergunakan untuk memberi barang-barang kosumsi, investasi , bahan makanan dan bahan dasar bagi penduduk Jawa (Ch.A.Fisher, dalam Nasikun:1988).

Gambaran yang sama juga kita jumpai pada tahun 1958 dalam perdagangan internasional dan antar daerah : Jawa dan luar Jawa. Daerah luar Jawa memberikan kontribusi yang besar bagi ekspor Indonesia ke luar negeri dan mengambil proporsi yang besar di dalam mengimpor barang-barang dari Jawa. Sedangkan Jawa yang memberikan kontribusi yang lebih sedikit bagi penerimaan devisa menyerap impor dari luar negeri dengan proporsi yang cukup besar. Disamping itu Jawa melakukan perdagangan antar daerah (ekspor ke luar Jawa) dimana perdagangan tersebut dapat memberikan nilai keuntungan yang cukup besar (tabel 1). Hal ini menunjukan terjadinya ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa. Surplus dari ekspor Jawa yang terakumulasi di pusat (Jawa) digunakan untuk membeli barang-barang kosumsi bagi penduduk Jawa yang padat, disamping digunakan untuk melakukan investasi di sektor industri. Dan pada akhirnya hasil produksi dari industri tersebut diekspor keluar Jawa.

Ketimpangan ekonomi inilah pada akhirnya berimpitan dengan perasaan kesukuan yag kuat dan dikuatkan dengan kepentingan politik idiologi akan menimbulkan konflik anatara pemerintah pusat yang berada di Jawa dengan daerah-daerah di luar Jawa. Perasaan dendam yang kuat di kalangan penduduk di luar Jawa terhadap Jawa yang disebabkan karena kepentingan ekonomi yang berbeda. Orientasi impor yang teralu kuat di pulau Jawa mengisap sebagian besar devisa yang dihasilkan oleh daerah-daerah di luar Jawa, menyebabkan penduduk di luar Jawa merasa tidak senang terhadap kebijaksanaan pemerintah pusat yang dianggap mengabaikan daerah mereka (Nazaruddin Sjamsuddin:1991).

Pada akhirnya konflik ini menampilkan wujud dalam bentuk perjuangan bersenjata yang bertujuan untuk memisahkan diri dari negara Indonesia. Dalam hal ini PRRI/Permesta dapat dimasukan dalam kategori gerakan yang disebabkan faktor ekonomi ( ketimpangan antar daerah) yang berkaitan dengan etnis.

**Tabel 2**
**KOEFISIEN GINI KETIMPANGAN DAERAH DI INDONESIA 1975-1982**

| Tahun | Koefisien Gini |
|---|---|
| 1975 | 0,469 |
| 1976 | 0,476 |
| 1977 | 0,477 |
| 1978 | 0,443 |
| 1979 | 0,524 |
| 1980 | 0,541 |
| 1981 | 0,518 |
| 1982 | 0,508 |

Sumber: PRISMA Edisi Inggris No. 45.

Pembangunan ekonomi orde baru yang kapitalistik ternyata tidak terlepas dari fenomena ketimpangan antar daerah. Ketimpangan antar daerah yang terjadi di Indonesia dapat dilihat dengan menggunakan koefisien gini. Dari tahun 1975-1982, diketahui bah- wa terjadi tendensi naiknya ketimpangan antar daerah, yang berarti bah wa pendapatan nasional tidak terdistribusikan secara seimbang pada semua propinsi , tetapi terkosentrasikan pada propinsi-propinsi tertentu. Bahkan kecendrungan terkosentrasinya pendapatan nasional itu makin besar. Memang dalam tahun-tahun tertentu terjadi penurunan tingkat koeffisien tersebut , misalnya pada tahun 1978 turun sebesar 0,034 dari tahun sebelumnya, tahun 1981 turun sebesar 0,023 dan pada tahun 1982 turun sebesar 0,010 (Tabel

Tabel 3
**DISTRIBUSI 10 KELOMPOK INDUSTRI TAHUN 1983**
**(% DARI TOTAL NILAI TAMBAH INDUSTRI)**

| INDUSTRI | NILAI TAMBAH (Jutaan Rupiah) | JAWA (%) | LUAR JAWA (%) |
|---|---|---|---|
| 31420 KRETEK | 509.518 | 100 | 0 |
| 37100 LOGAM DASAR | 200.574 | 51 | 49 |
| 33133 PLAYWOOD | 199.368 | 8 | 92 |
| 31181 GULA | 182.754 | 100 | 0 |
| 32112 TENUN | 180.244 | 98 | 2 |
| 35120 PUPUK | 141.050 | 61 | 39 |
| 36310 SEMEN | 129.907 | 61 | 39 |
| 32111 PEMINTALAN | 108.129 | 98 | 2 |
| 38130 PRODUKSI LOGAM | 98.165 | 91 | 9 |
| 38430 KENDARAAN BERMOTOR | 91.354 | 98 | 2 |

Sumber: Stastistik Industri, 1988 dan diolah kembali.

2). Penurunan itu tampaknya tidak cukup berarti , mengingat pada tahun 1975 data tersebut sudah menunjukan adanya ketimpangan antar daerah yang cukup parah, karena batas toleransi bagi ketimpangan yang baik dalam koeffisien gini adalah tidak lebih dari 0,35 (Ibnu Syamsi: 1986).

Indikator lain untuk melihat ketimpangan antar darah di Indonesia adalah dengan melihat tingkat produksi daerah pertahun (PDRB). Berdasakan data pada BPS terlihat bahwa PDRB perkapita pada tahun 1983-1988 tidak termasuk migas dan produk yang dihasilkan darinya, tidak seimbang untuk masing-masing propinsi. Misalnya pada tahun 1988 Jakarta sebagai pusat industri di Indonesia mempunyai porsi yang tertinggi dalam perolehan PDRB perkapita, yaitu sebesar Rp. 1.087.338, sedangkan perolehan PDRB perkapita terendah adalah Timor-Timur sebesar Rp. 138.454, dari ke- 27 propinsi yang ada.

Dengan menggunakan analisa *time series* diketahui bahwa dalam kurun waktu lima tahun berikutnya yaitu tahun 1988, terjadi perubahan konstelasi perolehan PDRB perkapita antar daerah. Satu hal yang patut dicatat adalah terjadi kecendrungan meningkatnya PDRB perkapita untuk semua daerah , tetapi secara relatif ketimpangan dalam perolehan PDRB perkapita antara daerah tetap ada. Bahkan ada kecendrungan meningkat. Hal ini diindikasikan oleh perbandingan antara selisih PDRB perkapita tertinggi dan yang terendah pada tahun 1983, yakni sebesar Rp. 848.884 dengan selisih yang terjadi pada tahun 1988 sebesar Rp. 1.550.516. Dengan demikian selama proses pembangunan ekonomi lima tahun dari tahun 1985-1988 telah terjadi kenaikan tingkat ketimpangan antar daerah yang diindikasikan dengan meningkatnya selisih PDRB perkapita.

Untuk mengetahui tingkat kesejaht eraan penduduk suatu daerah dapat diketahui melalui indikator tingkat kosumsi perkapita masing-masing daerah di Indonesia (*Percapita Expenditure Criterion*). Berdasarkan data SUSENAS 1986, diketahui bahwa besarnya uang yang dikonsumsi oleh satu orang perbulan pada tahun 1976, untuk wilayah Jakarta mencapai Rp. 8.987, sedangkan daerah lain yang memiliki tingkat kosumsi perkapita terendah adalah Sulawesi Tenggara sebesar Rp.3.330. Sedangkan untuk daerah Kalimantan, Maluku, Nusatenggara, Bali dan Irian Jaya rata-rata hanya sebesar Rp. 4.000 perbulannya. Sedangkan untuk daerah Jawa , tingkat kosumsinya perkapita sebulan sebesar Rp. 4.000. Gambaran itu menunjukan tingkat konsumsi yang tidak seimbang antar daerah di Indonesia, yang juga dapat berarti tidak seimbangnya kesejahteraan penduduk antar daerah di Indonesia.

**Mengapa Terjadi Ketimpangan Antar Daerah ?**

Ketimpangan antar daerah , lebih khusus lagi ketimpangan Jawa dan luar Jawa dapat dianalisa dari basis pemahaman tentang peran negara yang otonom. Peran negara yang otonom di negara- negara sedang berkembang dipahami sebagai akibat dari transisi struktur ekonomi suatu negara dari ekonomi yang berorientasi ekspor menuju industri subsitusi impor (Arief Budiman:1990). Dalam kerangka pemikiran ini negara mengambil peranan aktif di dalam proses akumulasi modal dan intervensi ke dalam struktur ekonomi, baik melalui kebijaksanaan ekonomi maupun investasi langsung ke sektor produksi.

Dalam proses akumulasi modal itu, negara yang didukung oleh kelas borjuis oligopolistik nasional dan berkolaborasi dengan masyarakat bisnis internasional. Intervensi negara dalam perekonomian dilakukan untuk memperoleh rente yang nantinya akan dibagi-bagikan pada elemen-elemen pendukungnya. Struktur ekonomi model ini , akan memunculkan apa yang disebut Kapitalis Birokrat dan Pemburu rente.

Dengan memfokuskan analisa pada peran negara maka masalah ketimpangan antar daerah di Indonesia dapat dilihat sebagai pelaksanaan kebijaksanaan negara yang bias. Yaitu suatu kebijaksanaan yang diskrimi-

nan, akan menguntungkan suatu daerah atau satu sektor dan merugikan daerah atau sektor yang lainnya. Kebijaksanaan ini dapat terjadi dalam bentuk strategi industri basis kota dan mengabaikan daerah pedesaan. Serta kebijaksanaan yang sangat ditekankan pada industri skala besar dan pertumbuhan ekonomi yang mengabaikan aspek distribusi pembangunan. Tentunya yang sangat berkepentingan dengan dilaksanakannya kebijaksanaan yang bias ini adalah para birokrat dan elemen-elemen pendukungnya termasuk di dalamnya borjuis nasional dan kapitalis asing.

Artinya para *Politico Bureucrats* menggunakan kekuasaan negara untuk kepentingan pribadi dan akumulasi kekayaan keluarga. Pada akhirnya terjadi kosentrasi pendapatan nasional dalam tangan sedikit orang. Teori Lipton tentang *Urban Bias* dapat digunakan untuk membantu menganalisa terjadinya *regional bias* , yang pada dasarnya merupakan satu disposisi untuk mengambil keputusan pengalokasian sumber daya dalam satu jalan yang tidak dapat dijustifikasi menurut efisien dan pemerataan (Lipton:1984).

Akibat kebijaksanaan ekonomi Orde Baru yang bias maka pola penyebaran penanaman modal (pemerintah-swasta dan asing) menunjukkan pola konsentrasi. Ini dapat dilihat dari investasi modal asing dan modal dalam negeri selama 1967-1990 hampir separuhnya (49,3 %) ada di Jakarta. Dari data Statistik Industri tahun 1971 tentang distribusi regional dari perusahan utama di Indonesia pada tahun 1971, terlihat 74,8 % dari perusahan besar dan menengah didirikan di pulau Jawa . Sementara Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi masing-masing sebesar 14,5%,3,0 % dan 5,4 %. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah pulau-pulau di luar daerah tersebut, dengan investasi sebesar 2,3 % . Gambaran tersebut di samping menunjukan ketimpangan antar daerah terutama antara Jawa dengan luar Jawa, sekaligus untuk menunjukan keterbelakangan daerah. Sebab besarnya investasi pada sektor industri yang ada pada masing-masing daerah adalah salah satu cermin kemajuan daerah.

Disamping itu dari data distribusi sepuluh kelompok industri pada tahun 1983, terlihat bahwa semua jenis industri, kecuali playwood dan industri logam dasar terpusat di Jawa (tabel 3). Ini berarti terpusatnya industri industri pengganti impor di Jawa di satu pihak dan ketergantungan daerah di luar Jawa pada sektor industri pertambangan dan kehutanan , disamping sektor tradisional. Hal ini menyebabkan terjadinya mekanisme perdagangan yang tidak seimbang, dimana elastisitas pendapatan terhadap permintaan bahan mentah dan pangan kurang dari satu (Ian Roxborough, 1986). Artinya suatu pertambahan pendapatan di Jawa (konsumen) akan menghasilkan pertambahan barang-barang tersebut, tetapi dalam derajat yang tidak sama konsumen di Jawa yang menjadi lebih kaya akan menghabiskan proporsi yang semakin sedikit dari pendapatan mereka untuk barang-barang di luar Jawa.

Di lain pihak elastisitas pendapatan terhadap permintaan barang-barang hasil industri yang diserap yang diserap oleh daerah di luar Jawa akan menjadi lebih besar dari satu. Jadi pada saat pendaatan penduduk di luar Jawa meningkat, mereka akan membelanjakan proporsi yang lebih besar dari pendapatannya untuk membeli barang-barang kosumsi yang dihasilkan oleh industri di Jawa. Sehingga barang-barang dari sektor industri ini mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi. Pada akhirnya kan menyebabkan terhisapnya uang dari daerah luar Jawa ke pusat (Jawa).

Pola investasi yang dilakukan di luar Jawa menimbulkan daerah kantong-kantong (*enclave*) industri . Artinya daerah tersebut dikelilingi oleh daerah sektor tradisional, tempat sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya. Karena investasi yang ada di daerah di luar Jawa sebagian besar adalah investasi di sektor pertambangan dan kehutanan. Maka, teknologi yang dikembangkan di sektor modern di daerah kantong itu umumnya merupakan teknologi padat modal .

**Tabel 4**
**PENYEBARAN DANA INPRES PER WILAYAH DALAM REPELITA III,IV,V (% distribusi)**

| Wilayah/regional | Repelita III | Repelita IV | Repelita V |
|---|---|---|---|
| Sumatera | 29,5% | 27,1% | 27,1% |
| Jawa | 39,4% | 36,7% | 33,4% |
| Kalimantan | 9,7% | 10,7% | 11,7% |
| Sulawesi | 11,2% | 10,8% | 11,4% |
| Kepulauan Timur | 13,8% | 14,8% | 11,4% |

Sumber: Bappenas/LTA-97 dalam AFKAR no. 1, 1993, hal. 12.

Tehnologi padat modal sangat terbatas di dalam menyerap tenaga kerja, yang hanya memerlukan sejumlah kecil tenaga terampil. Sedangkan dilain pihak , pada sektor tradisional, kemampuan untuk menyerap tenaga kerja semakin berkurang akibat proses komersialisasi pertanian , akibat penggunaan mesin untuk proses produksi.

Di lain pihak, ledakan jumlah penduduk di sektor tradisional ternyata tidak mampu diserap oleh sektor modern. Hal inilah yang menyebabkan di luar Jawa terjadi ketim- pangan antara sektor modern dan sektor tradisional. Dengan bentuk lain berwujud ketimpangan antara desa dan kota. Sehingga dapat dikatakan bahwa dinding pada daerah kantong sangat tebal sehingga sulit terjadinya tricklee down effect. Bahkan terjadi arus migrasi yang timpang dari luar Jawa ke Jawa, kebanyakan meruapakan tenaga terdidik. Sedangkan terjadi arus migrasi dari Jawa ke luar Jawa dalam bentuk transmigrasi, umumnya merupakan tenaga kerja kurang terdidik yang teralienasi di perkotaan maupun di pedesaan di Jawa (Milan J Titus:1988).

Pola kebijaksanaan negara yang bias juga dapat dilihat dari pola pengalokasian dana APBN. Ini dapat dilihat dari prosentase sebaran Inpres menurut jenisnya dari tiap wilayah pada periode Repelita III,IV dan V. Data sebaran Inpres itu menunjukan adanya tendensi semakin besarnya jenis Inpres yang diterima Jawa relatif terhadap wilayah lainnya, walaupun secara total pangsa masing- masing jenis Inpres telah menunjukan tendensi yang meningkat. Dengan kata lain secara keseluruhan menunjukan masih terkosentrasinya alokasi dan inpres di Jawa, walaupun dengan pangsa yang semakin meningkat di kawasan timur Indonesia (Tabel 4).

Pola ketimpangan pengalokasian dana APBN per wilayah juga dapat dilihat dari data sebaran alokasi dana sektoral APBN (DIP) perwilayah, yang menunjukan bahwa kosentrasi tetap masih berada di wilayah Jawa, walaupun tendensi yang menurun dari Pelita IV ke Pelita V (Tabel 5).

**Fenomena Larinya Dana ke Pusat dan Dominasi Pusat**

Data terakhir yang dapat menerangkan bagaimana investasi di daerah ternyata menyebabkan larinya modal dari luar Jawa ke Jawa, adalah data aliran dana (*flow of fund*) dari tahun 1981-1991 dari daerah luar jawa ke jawa, khususnya Jakarta, terbukti bahwa telah terjadi aliran dana perbankan bersih sebesar 256,2 trilyun atau 23,3 trilyun pertahun. Dalam hal itu 8 propinsi di Sumatera menyumbang 28,2 % atau 6,6 trilyun , diikuti oleh Sulawesi 9,4 %, Bali dan Nusa Tenggara 7,5 %, Kalimanatan 6,9 % dan Maluku-Irian Jaya yang terkecil yaitu 2,7 %. Tentunya cukup menarik juga apabila Timor-Timur yang "paling miskin" di Indonesia , juga mengirim dana bersih sebesar Rp. 256 milyar sejak 1985 atau 38,4 milyar pertahun (Tabel 6).

Apabila pengiriman dana-dana keluar daerah menuju Jakarta ini kita bandingkan dengan nilai PDRB selama satu tahun dari Propinsi yang bersangkutan maka terdapat gambaran yang menarik. Dengan demikian, terlihat bahwa sekitar 28 % dari PDRB semua propinsi (26) pada tahun 1988 tidak dinihmati oleh masyarakat wilayah yang bersangkutan. Tetapi kembali pada investor atau para pemilik dana yang tinggal di Jakarta. Sumatera dan Sulawesi, yang pada tahun 1958 pernah menggerutu karena sebagai penghasil devisa utama kurang diperhatikan, kini terbukti tetap menjadi penyumbang dana terbesar , masing-masing 41 % dan 39 % dari nilai PDRB-nya pertahun.

Adapun untuk data per-propinsi yang tidak disertakan disini, yaitu DI Aceh, ternyata pada tahun 1988 mengalirkan dana yang melebihi nilai PDRB-nya , yaitu 125 % dari PDRB yang berjumlah Rp. 5,9 trilyun, sedangkan dana bersih yang dikirim ke Jakarta tahun itu berjumlah Rp. 7,4 trilyun. Apabila fenomena tersebut berjalan terus menerus , berarti terjadi , proses pemiskinan dari propinsi yang bersangkutan, karena pengiriman dana ke Jakarta diambil dari kekayaan hasil akumulasi PDRB tahun-tahun sebelumnya.

Dalam bentuk lain, seperti dikemukan oleh Prof. Mubyarto, Jakarta sebagai pusat kekuasaan dan kegiatan ekonomi memonopoli sistem ekonomi keuangan nasional semakin dirasakan sejak Pakto 1988 yang merupakan deregulasi perbankan kedua setelah Pakju 1983. Dampak Pakto 88 ini sangat luar biasa dalam memobilisasi dana-dana masyarakat di seluruh Indonesia. Mobilisasi dana itu berakibat pada penarikan dan pemupukan dana-dana di Jakarta. Sehingga kekuasaan ekonomi keuangan Jakarta amat besar, berhadapan dengan kondisi ekonomi keuangan daerah yang justru semakin lesu dan semakin tergantung pada pada ekonomi keuangan Jakarta (Mubyarto dalam Afkar:1993).

**Titik Penting Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

Pada pembahasan sebelumnya telah diuraikan ketimpangan antar daerah, khususnya antara Jawa dan luar jawa . Ketimpangan tersebut pada akhirnya akan menimbulkan stagnasi sosial ekonomi di daerah-daerah luar Jawa, dimana stagnasi tersebut akan membawa pengaruh pada pemenuhan kepentingan ekonomi sebagian besar penduduk di daerah tersebut.

Dari segi keuangan , tampak daerah berada pada posisi pinggiran dan sangat tergantung. Sementara dinamika pembangunan daerah sangat sulit dilaksanakan tanpa adanya dana yang cukup. Pemerintah daerah menjadi lamban menangani masalah-masalah yang muncul di daerah, seperti masalah kemiskinan misalnya. Pendapatan asli daerah yang kecil telah mencabut seluruhnya atribut otonomi daerah yang menyebabkan sulitnya kita bicara otonomi daerah di Indonesia sebagai desentralisasi politik.

Selama Pendapatan asli Daerah hanya menempati posisi pinggiran dan selama pola dominasi subsidi dalam APBD masih diteruskan maka sulit untuk mengharapkan peran aktif dan dinamis dari pemerintah daerah dalam pembangunan. Kondisi tersebut dapat ditunjukan oleh besarnya peranan subsidi dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui dana pembangunan sektoral. Dana pemerintah pusat yang disalurkan secara sektoral mencapai 75 % dari keseluruhan dana bantuan. Ini sejalan dengan hasil penelitian UGM yang mengungkapkan masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yakni sebesar 41 % -92 %. Ini berarti pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah, yang ditunjukan oleh pengeluaran rutin , tiadak dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya subsidi daerah otonom.

Berkenaan dengan dominasi yang kuat dari pusat atas daerah , maka yang paling mendesak yang harus ditangani adalah mewujudkan keadilan ekonomi (Demokrasi ekonomi). Keadilan ekonomi menurut Mubyarto menunjuk pada adanya dan dipatuhinnya aturan main yang etis dalam hubungan ekonomi ( Mubyarto :1991). Dalam hubungannya dengan pembangunan antar daerah dan hubungan antara pusat dengan daerah harus meletakkan keadil- an ekonomi sebagai landasan moral, dimana pemerintah pusat harus berusaha keras

**Tabel 5**

**PENYEBARAN ALOKASI DANA SEKTORAL APBN (DIP) PERWILAYAH PADA REPELITA IV,V (% distribusi)**

| Wilayah/Regional | Repelita IV | Repelita V |
|---|---|---|
| Sumatera | 24,6 % | 25,7 % |
| Jawa | 50,6 % | 47,8 % |
| Kalimantan | 7,6 % | 8,2 % |
| Sulawesi | 8,0 % | 8,6 % |
| Kepulauan Timur | 9,2 % | 9,6 % |

Sumber: Bappenas/LTA-97 dalam AFKAR no.1, 1993, hal. 14.

untuk memahaminya dan berusaha memenuhinya.

Pilihan untuk mewujudkan desentralisasi dan otonomi daerah dibutuhkan karena kebijaksanaan desentralisasi mampu meningkatkan keuntungan-keuntungan yang diterima oleh si miskin dan mengurangi kosentrasi kekuasaan ke pusat (Mubyarto:1991). Ini berarti daerah mendapatkan wewenang : wewenang untuk membuat keputusan dan mengawasi sumber-sumber dana yang telah diserahkan kepada pejabat daerah. Selain itu, pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan partisipasi pemerintah daerah dan rakyat dalam pembangunan di daerahnya. Dan sebaliknya, sentralisasi biasanya lebih menguntungkan badan-badan yang terlibat dalam anggota Birokrasi di bandingkan dengan golongan si miskin.

Memperkuat struktur ekonomi daerah dengan basis industri dan sistem ekonomi keuangan nasional yang tidak terlalu sentralistik tampaknya akan mampu mengangkat daerah untuk lebih berperan aktif dan mandiri tanpa tergantung pada pusat.

Pemerintah pusat melalui APBN memang terus menerus mengembangkan sistem subsidi/ganjaran bagi semua daerah agar pemerataan semakin terwujud. Alasan subsidi sebagai alat pemerataan tidak sepenuhnya benar, terbukti dengan masih terjadinya disparitas antar daerah selama ini. Disamping itu, seperti yang dikemukan oleh Anne Booth, bahwa efektifitas dana sektoral terhadap peningkatan PDRB adalah rendah (Anne Booth, dalam Mubyarto:1991). Namun yang paling diperlukan bagi propinsi-propinsi di luar Jawa ini bukan subsidi , tetapi lebih bersifat imbangan keuangan yang lebih adil. Adapun mengapa kebijaksanaan itu sangat penting adalah karena kondisi terciptanya enklaf--enklaf pembangunan tidak kita kehendaki, karena enklaf - enklaf menciptakan ketegangan dan ketidaktentraman masyarakat setempat (Mubyarto:1991).

Demokrasi ekonomi (keadilan ekonomi) dapat terwujud dengan mengembangkan desentralisasi dan otonomi daerah sedemikian rupa sehingga setiap daerah khususnya daerah-daerah berpotensi tinggi harus lebih cepat mendapatkan kemandirian dalam pengelolaan keuang an daerah, agar juga semakin mampu mengatasi ketimpangan-ketimpangan ekonomi dan sosial di daerahnya masing-masing, disamping mengurangi ketergantungan kepada pusat.

Disamping itu pemerintah daerah sudah seharusnya diserahi kewenangan yang memadai untuk mengambil keputusan serta diberikan sumber-sumber pendapatan sendiri yang cuklup. Kurang tepat apabila pemerintah pusat mengklaim pemerataan, termasuk di dalamnya pengentasan kemiskinan sebagai tanggung jawab pemerintah pusat saja. Sudah saatnya Desentralisasi dan Otonomi Daerah dilengkapi dengan aspek demokratisasi ( demokrasi politik).

**Penutup**

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat kita tarik satu benang merah sebagai suatu format permasalahan yang harus dikedepankan ketika kita berbicara tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Bahwa polarisasi sebagai akibat percepatan pembangunan ekonomi yang berwujud ketimpangan antar daerah , lebih khusus lagi ketimpangan pusat-daerah , dapat menjadi kekuatan potensial disintegratif bangsa.

Dengan diketahui secara laten penyebab dari timbulnya ketimpangan itu, yakni pola kebijaksanaan negara yang bias, maka akan membawa kita pada titik penting untuk mewujudkan desentralisasi dan otonomi daerah secara lebih nyata. Penyelesaian menyeluruh yang berkenaan dengan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, baik berdemensi politis maupun ekonomi diperlukan segera termasuk didalamnya distribusi yang lebih merata terhadap asset ekonomi nasional. Mari kita membangun dari pinggiran.

**Tabel 6**

**PDRB PADA HARGA BERLAKU DAN ALIRAN DANA BERSIH KELUAR PROPINSI, 1988**

| Wilayah | Nilai Total PDRB (dalam Dana Keluar milyar Rp.) | Dana Keluar Bersih (dalam milyar Rp.) | Persentase |
|---|---|---|---|
| Sumatera | 35.075 | 14.639 | 41,0 % |
| Jawa | 60.736 | 12.968 | 21,4 % |
| Bali, Nusa Tengg | 4.323 | 786 | 19,2 % |
| Irja, Maluku | 2.424 | 747 | 30,8 % |
| Sulawesi | 5.800 | 2.264 | 39,0 % |
| Kalimantan | 12.355 | 2.621 | 21,2 % |
| Total | 120.713 | 33.757 | 27,9 % |

Sumber: dikutip dari KOMPAS, 13 April 1992.

# Hak Azasi Manusia dalam Perspektif Paham Integralistik

**Dalam bidang penegakan HAM, apa yang kita saksikan sekarang mulai dari hiruk pikuk kasus Dilli di penghujung tahun 1991 hingga kasus hangat terakhir terbunuhnya Marsinah, aktivis penegakan hak-hak buruh, sangat mungkin merupakan refleksi saja dari suatu yang lebih esensial...**

Refly H.Z.
Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Hukum UGM, Mantan Ketua Umum Senat Mahasiswa FH UGM.

Membicarakan bagaimana prospek Hak Asasi Manusiâ (HAM) Indonesia pada era Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJPT II) bukan berarti kemudian lantas berhenti pada perenungan tentang masa depan, masa mendatang. Karena sebagaimana penganut aliran historisisme yakin, bahwa sesungguhnya apa yang terjadi esok adalah tidak lain karena apa yang terjadi pada saat sekarang. Dan sekarang adalah perpanjangan tangan dari masa silam. Sejarah adalah cikal bakal dari proses alamiah yang dinamakan waktu "sekarang" dan "yang akan datang".

Dalam bidang penegakan HAM, apa yang kita saksikan sekarang mulai dari hiruk pikuk kasus Dilli di penghujung tahun 1991 hingga kasus hangat terakhir terbunuhnya Marsinah, aktivis penegakan hak-hak buruh, sangat mungkin merupakan refleksi saja dari suatu yang lebih esensial yang merupakan bentukan sejarah ketika bangsa kita mengàdakan perjanjian, *contract social,* meminjam Rousseau, pada akhir penjajahan dan di ambang kemerdekaan.

Pada tanggal 31 Mei 1945 Soepomo di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Dokuritsu Junbi Tyoosakai menyatakan pendapatnya :

> Jikalau kita hendak membicarakan tentang dasar sistem pemerintahan yang hendak kita pakai untuk Negara Indonesia, maka dasar sistem pemerintahan itu bergantung kepada staatsidee, kepada "begrip" "staat" (negara) yang hendak kita pakai untuk pembangunan Negara Indonesia. Menurut *dasar apa* Negara Indonesia akan didirikan? *(Yamin, hal. 110).*

Soepomo kemudian memaparkan tiga aliran pikiran tentang negara, yaitu aliran pikiran individualis sebagaimana diajarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke (abad 17), Rousseau (abad ke 18), Herbert Spencer (abad ke 19) dan H.J. Laski (abasd ke 20); aliran pikiran kolektivistis sebagaimana diajarkan opleh Marx, Engels, dan Lenin; aliran pikiran (yang dapat dinamakan) integralistik sebagaimana diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel (abad 18 dan 19).

Soepomo setelah membandingkan ketiga aliran pikiran kenegaraan tersebut melihat bahwa aliran pikiran integralistiklah yang cocok dengan bangsa Indonesia. Menurut aliran pikiran ini negara tidak untuk menjamin kepentingan seorang atau golongan, akan tetapi menjamin

kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan. Negara ialah suatu susunan masyarakat yang *integraal* dimana segala golongan berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis. Ciri-ciri ini dianggap cocok dengan bangsa Indonesia karena semangat kebatinan, struktur kerohanian bangsa Indonesia bersifat dan bercita- cita persatuan hidup, persatuan kawulo dan gusti yaitu persatuan antara dunia luar dan dunia batin, antara mikrokosmos dan makrokosmos, antara rakyat dan pemimpin- pemimpinnya.

Dengan demikian dalam negara yang berpaham integralistik tidak dibutuhkan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia, karena HAM yang didasarkan pada perbedaan antara *state* dan *civil society* bertentangan dengan ide integralistik yang bercirikan persatuan antara kawulo dan gusti. Lagipula dalam negara yang integralistik tidak ada dualisme antara negara dan masyarakat. Dua negara yang ditunjuk Soepomo telah mempraktekkan paham integralistik adalah Jepang dan Jerman.

Pada akhir uraiannya tentang paham integralistik Soepomo mengajukan saran kepada sidang BPUPKI sebagai berikut :

Maka teranglah tuan-tuan yang terhormat, bahwa jika kita hendak mendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran *(staatsidee)* negara yang integralistik, negara yang *bersatu dengan seluruh rakyatnya,* yang mengatasi *seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun. (Yamin. hal. 113).*

Pada sidang-sidang BPUPKI selanjutnya Soepomo tidak pernah lagi menyinggung mengenai soal integralistik. Perkataan senada yang selalu muncul adalah paham kekeluargaan dan paham persatuan. Bung Karno dalam beberapa kesempatan lebih senang menggunakan istilah paham gotong royong yang lebih dinamis dan mencerminkan adanya pengakuan pluralitas atau kebinekaan. Sehingga di kalangan ahli hukum tata negara timbul perbedaan pandangan tentang paham integralistik. Abdul Hamid S. Attamimi beranggapan bahwa *staatsidee* integralistik telah diterima sebagai *staatsidee* Indonesia. Ini merupakan kenyataan sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran di masa-masa yang akan datang Hamid Attamimi kemudian menyarankan untuk lebih baik menggunakan istilah paham kekeluargaan atau paham persatuan, karena istilah integralistik sering berkonotasi dengan totaliterisme akibat Soepomo menggunakan kedua istilah tersebut secara berdampingan.

Hampir Senada dengan Hamid, Padmo Wahjono pun beranggapan bahwa de facto paham integralistik telah diterima. Namun menurutnya bukan integralistik Soepomo *an sich,* melainkan integralistik yang telah bercampur dengan elemen-elemen hak asasinya Hatta. Untuk itu Padmo Wahjono memberikan nama baru bagi sinkretisme tersebut dengan istilah integralistik Indonesia.

Berlainan dengan dua pendapat terdahulu Marsilam Simanjun tak menganggap bahwa paham integralistik telah tertolak sebagai *staatsidee* dengan diakuinya paham kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". Marsilam Simanjuntak yang khusus menyelidiki pengaruh Hegel pada pandangan integralistik Soepomo dalam skripsinya yang berjudul "Unusr Hegelian dalam Pandangan Negara Integralistik" berkesimpulan :

Aliran pikiran negara integralistik dalam pengertian yang utuh dan asli, pada prinsipnya telah tertolak dan dipatahkan di dalam UUD 1945 dengan dilekatkannya asas kedaulatan rakyat sebagai sandingan tak terpisahkan daru pengertian negara Republik Indonesia, ditolaknya bentuk monarkhi dan prinsip turun-temurun bagi Kepala Negara, dengan dicantumkannya jaminan hak-hak dasar dalam konstitusi.

*******

Apa sesungguhnya paham integralistik? Darimana paham ini dintrodusir? Sepanjang yang pernah diketahui tidak ada seorang pun yang pernah mengemukakan pandangannya tentang paham atau pandangan atau teori integralistik. Spinoza, Adam Muller dan Hegel yang ditunjuk Soepomo dalam pidato- nya tanggal 31 Mei 1945 tidak pernah menggunakan istilah tersebut. Istilah ini sangat mungkin merupakan ciptaan Soepomo sendiri yang tercipta pada tempat dan waktu tersendiri. Hamid Attamimi menunjukkan kata, *"....yang dapat dinamakan teori integralistik..."* seperti yang diucapkan sendiri oleh Soepomo ketika menyebutkan tentang adanya paham ini menunjukkan bahwa ia tidak persis benar dengan istilah tersebut. Jadi sangat mungkin bahwa Soepomo menciptakan sendiri istilah baru bagi teorinya. Karena selain menunjuk negara Jepang dan Jerman sebagai negara yang mempraktekkan paham (semacam) integralistik, Soepomo juga menunjuk desa-desa Indonesia sebagai desa yang mempraktekkan paham integralistik.

Sekalipun berkesimpulan bahwa teori integralistik adalah ciptaan asli Soepomo, namun beberapa ahli tata negara dan pakar politik seperti Logeman dan Afan Gaffar menganggap konsep tersebut merupakan derivasi dari konsep *organic state* yang tumbuh subur ketika runtuhnya kekuasaan absolut raja-raja Eropah *(Affan Gafar, 1993).* Konsep *organic state* adalah suatu pandangan bahwa struktur sosial mempunyai fungsi yang sedemikian rupa, saling mengkait satu sama lain, mempunyai fungsi untuk saling menopang, mendukung satu sama lain yang sudah dikaitkan dengan kepentingan yang sudah sedemikian kuat *(vested interest).* Ideologi atau konsep ini menyiapkan suatu sumber legitimasi bagi kekuasaan yang otoriter, dan menolak suatu kekuasaan atau legitimasi di luar dari yang sudah dirumuskan negara. Oleh karena itu konsep ini merupakan sumber yang sangat baik bagi penguasa *(rulling elite)* untuk menentukan kekuasaannya, karena kekuasaannya tidak bersumber dari massa, melainkan bersumber dari struktur kekuasaan yang ada. *(Richard Robison sebagaimana dikutip Affan Gafar, 1993)*

Dengan mengambil konsep integralistik sebagaimana diuraikan Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945 dan juga konsep *organic state*-nya Robison, maka penulis akan mencoba menguraikan mengenai hak asasi manusia dalam negara yang menganut konsep integralistik. Sebelum itu penulis terlebih dahulu akan sedikit membahas mengenai perdebatan mengenai perlunya perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi negara yang akan dibentuk di antara anggota BPUPKI. Secara umum anggota BPUPKI terbagi dua dalam menghadapi isu mengenai hak asasi manusia, yaitu antara mereka yang setuju dimasukkannya rumusan HAM dalam Undang- undang Dasar seperti Ny. Maria Ulfah Santoso, Hatta, dan Yamin dengan mereka yang menolak seperti Soekarno dan Soepomo sendiri tentunya sebagai pencetus in-

tegralistik. Soekarno dalam rapat besar BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 dengan tegas menolak dimasukkan HAM yang dalam konstitusi Prancis disebut dengan *droit de l'homme et du citoyen* karena dianggap mengandung pikiran yang individualistis. Lebih jauh Soekarno menyatakan :

Tuan-tuan yang terhormat! Kita menghendaki keadilan sosial. Buat apa *grondwet* menuliskan, bahwa manusia bukan saja mempunyai hak kemerdekaan suara, kemerdekaan hak memberi suara, mengadakan persidangan dan berapat, jikalau misalnya tidak ada *sociale rechtvaardigheid* yang demikian itu? Buat apa kita membikin *grondwet,* apa guna *grondwet* itu kalau ia tak dapat mengisi perut orang yang hendak mati kelaparan. *Grondwet* yang berisi *droit de l'homme et du citoyen* itu, tidak bisa menghilangkan kelaparannya orang yang miskin yang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itu, jikalau kita betul- betul hendak mendasarkan negara kita kepada paham kekeluargaan, paham tolong menolong, paham gotong royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap paham liberalisme dan individualisme daripadanya. *(Yamin, hal. 296).*

Terhadap pendapat Soekarno, Hatta mengajukan keberatannya bahwa memang betul kita harus menentang individualisme (Hatta sendiri telah berjuang menentang individualisme lebih dari 20 tahun), demikian juga soal memasukkan *droit de l'homme et du citoyen* sebab menurutnya, hal itu semata-mata adalah syarat untuk mempertahankan hak orang- seorang terhadap kezaliman raja-raja di masa lalu. Namun sungguhpun demikian Hatta berpendapat :

Hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin, jangan menjadi negara kekuasaan. Kita menghendaki negara pengurus, kita membangunkan masyarakat baru berdasarkan gotong royong..*(Yamin, hal. 299).*

Oleh karena itulah Hatta memandang perlu memuat salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar yang akan datang tentang hak untuk berkumpul, bersidang atau menyurat dan lain-lain.

Terhadap pernyataan Hatta, Soepomo mengajukan counter pendapat. Menurutnya apa yang diajukan Hatta adalah pertanyaan yang individualistis. Memasukkan hak untuk bersidang, berkumpul dan berpendapat berdasarkan kecurigaan terhadap negara dan ini tidak sesuai dengan sistem Undang-Undang Dasar yang telah ditetapkan. Namun oleh karena banyaknya anggota BPUPKI yang menghendaki agar usulan Hatta dipertimbangkan dalam Undang-Undang Dasar yang akan dibentuk, Soepomo berbesar hati mengajukan usul kompromi yang menurutnya tidak mengubah sistematik Undang- Undang Dasar yang telah ditetapkan. Maka jadilah kompromi tersebut menjadi pasal 28 UUD 1945 sebagaimana kita lihat sekarang.

**Kita menghendaki keadilan sosial. Buat apa grondwet menuliskan, bahwa manusia bukan saja mempunyai hak kemerdekaan suara, kemerdekaan hak memberi suara, mengadakan persidangan dan berapat, jikalau misalnya tidak ada sociale rechtvaardigheid yang demikian itu? Buat apa kita membikin grondwet, apa guna grondwet itu kalau ia tak dapat mengisi perut orang yang hendak mati kelaparan.**

Inilah debat di antara *founding fathers* kita mengenai salah satu rumusan hak asasi manusia dalam UUD 1945. Oleh Hamid Attamimi kompromi antara Soekarno-Soepomo di satu pihak dengan Hatta dan Yamin (Yamin dalam debat tersebut membela Hatta) di pihak lain dijadikan alasan untuk mengatakan bahwa paham integralistik tidak gugur. Tidak betul paham integralistik ditolak oleh Hatta dan Yamin. Kompromi tersebut mencerminkan bahwa Hata dan Yamin semakin memperkuat pandangan integralistiknya Soepomo. Padmo Wahjono menjadikan alasan kompromi ini sebagai lahirnya konsep integralistik Indonesia, yaitu konsep integralistiknya Soepomo ditambah dengan elemen-elemen hak asasinya Hatta.

Namun Buyung Nasution justru melihat bahwa rumusan pasal 28 tersebut sebagai manipulasi HAM karena disitu dimuat kebebasan berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang. Artinya pemerintah bersama DPR-lah yang akan menentukan lebih lanjut mengenai hak ini. Bila kita mengacu pada lima paket undang-undang politik misalnya, ternyatalah apa yang dikatakan Buyung Nasution ada benarnya. Lima paket undang-undang politik tersebut, terutama undang-undang yang mengenai partai politik dan golongan karya justru membatasi kebebasan berkumpul dari warga negara. Di bidang pembangunan pers kita melihat bahwa munculnya lembaga SIUPP justru mengekang bahkan meniadakan arti dari pasal 28.

Persoalannya, apakah undang-undang organiknya yang salah ataukah konstitusi kita secara implisit memang membatasi kebebesan tersebut?

**Paham Integralistik dan Hak Asasi Manusia**

Marsilam Simanjuntak ketika memberikan uraiannya tentang paham integralistik mengatakan bahwa konsep atau paham integralistik muncul kembali setelah berlakunya UUD 1945 melalui Dekrit 5 Juli 1959. Tetapi walaupun UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia telah berlaku kembali sejak Dekrit Presiden tersebut, istilah integralistik tidak muncul atau tidak merupakan paham pokok semasa pemerintahan Soekarno, yaitu sampai tahun 1966.

Lalu mengapa paham integralistik (seolah-olah) masih tetap aktual hingga kini? Marsilam menjawabnya dengan mengatakan bahwa Pemerintah Orde Baru memerlukan jargon yang bernada konstitusionalistis untuk membenarkan konstelasi politik yang berlangsung. Jargon mana sedapat mungkin berbeda dari orde lama. Pada masa Orde Lama Bung Karno lebih suka menggunakan istilah ciptaannya sendiri yang lebih dinamis seperti gotong royong, nasakom, *semenbundeling van alle revolutionaire krachten* untuk membenarkan konstelasi ketatanegaraan pada waktu itu. Konsep mana terlalu besar apabila dihadapkan dengan konsep integralistiknya Soepomo. Dan Soekarno memang tidak memerlukan pembenaran yang bernada konstitusionalistis.

Lain halnya dengan Pemerintah Orde Baru yang jargon awalnya selalu mendengungkan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pembenaran konstelasi ketatanegaraan yang bernada konstitusionaliustis memang diperlukan mengingat trauma masyarakat pada era Orde Lama yang dianggap jauh menyimpang dari amanat konstitusi. Di sisi lain pemerintah Orde Baru memerlukan konsep yang sekalipun konstitusionalistis namun sedapat mungkin memberikan legitimasi yang besar terhadap pemerintah. Paham atau konsep integralistik yang diucapkan Soepomo untuk pertama (dan mungkin terakhir kalinya) pada tanggal 31 Mei 1945 dianggap tepat, karena konsep ini tidak lain adalah derivasi atau ekuivalen dengan konsep *organic state* yang dedefinisikan Robison sebagai konsep yang memberi legitimasi pada kekuasaan yang otoriter.

Konsep atau paham integralistik setelah lama menghilang dan tidak terdengar setelah diucapkan pertamakalinya oleh Soepomo, muncul kembali ketika Abdul Kadir Besar melalui *academic apraisal*-nya yang terdapat di dalam buku putih Ketua MPRS 1972 menyinggung tentang paham ini. Setelah tahun 1972 tersebut, baru pada tahun 1989 lah konsep ini terdengar kembali melalui tulisan Padmo Wahjono pada majalah Forum Keadilan Nomor 09 tahun 1989 yang berjudul, "Hak dan Kewajiban Asasi Berdasar Cara Pandang Integralistik Indonesia", sebagaimana telah disebut di atas merupakan perpaduan konsepnya Sopoemo dan Hatta.

Marsilam Simanjuntak yang membuat skripsi, "Unsur Hegelian dalam Pandangan Negara Integralistik" membuat ramai perdebatan tentang ini. Secara negatif Marsilam menyebutkan bahwa konsep ini telah gugur sebagai *staatsidee* ketika asas kedaulatan rakyat diakui dalam UUD 1945. Hamid Attamimi membantah pendapat Marsilam dengan mengatakan bahwa paham integralistik adalah *staatsidee* yang telah diterima para *founding fathers* dan merupakan kenyataan sejarah yang tidak terelakkan. Ditambahkan oleh Hamid untuk selanjutnya lebih tepat apabila kita menggunakan paham persatuan atau kekeluarga daripada integralistik, karena selain jelas-jelas termaktub dalam UUD 1945 paham persatuan dan kekeluargaan mungkin dapat menghapuskan salah paham di antara kita tentang paham integralistik yang dalam uraian Soepomo bergandeng dengan paham totaliter *(Hamid Attamimi, 1990)*.

Menteri Sekretaris Negara Moerdiono dalam sambutannya pada "Seminar Pancasila Sebagai Ideologi dalam berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara" yang diselenggarakan BP-7 tahun 1989 juga menyinggung tentang paham integralistik. Beliau mengatakan :

Dari segi ideologi, saya akan meminta perhatian kita semua akan pidato Prof. Mr. Dr. Soepomo dalam sidang BPUPKI tertanggal 31 Mei 1945. Soepomo-lah satu- satunya anggota badan tersebut yang secara makro memberikan pilihan ideologi, sebelum masuk kepada substansi ideologi, yang sekarang kita namakan Pancasila. Soepomo menunjukkan tiga pilihan ideologi, yaitu : (1) paham individualisme, (2) paham kolektivisme dan (3) paham integralistik. Beliau dengan sangat meyakinkan menolak paham individualisme dan kolektivisme, dan menyarankan paham integralistik, yang dinilai lebih sesuai dengan semangat kekeluargaan yang berkembang di daerah pedesaan kita. Paham integralistik merupakan kerangka konsepsional makro dari apa yang telah menjiwai rakyat kita di kesatuan masyarakat yang kecil-kecil itu.

Pada tahun 1993 perdebatan tentang paham integralistik ramai kembali. Pada sebuah seminar di Jakarta pada bulan Mei 1993 misalnya, Kasospol waktu itu Letjend Harsudiono Hartas telah berpolemik tentang paham integralistik dengan Dr. Adnan Buyung Nasution. Pada tanggal 13 September 1993 di kampus Fakultas Hukum UGM bahkan telah diselenggarakan Sarasehan Ilmiah yang khusus membahas mengenai paham integralisitik dengan menampilkan beberapa pakar hukum tata negara, pakar politik, dan praktisi.

Melihat meruaknya kembali perdebatan tentang paham integralistik, penulis berpendapat terlepas dari konstitusional atau tidaknya paham ini, secara de facto paham ini masih tetap fungsional. Secara eksplisit ia menjelma sebagai paham integralistik, secara implisit ia muncul dengan baju lain yang dinamakan dengan paham kekeluargaan atau paham persatuan yang menurut hemat penulis mempunyai jiwa yang serupa dengan konsep integralistiknya Soepomo. Bukti dari usaha-usaha untuk mempopulerkan kembali paham ini selain yang telah disebutkan terdahulu, juga dapat kita lihat dalam penerbitan kembali risalah pembuatan UUD 1945 oleh Kesekretariatan Negara RI dimana pada bagian pidato Soepomo sengaja diberikan catatan tambahan bahwa totaliterisme yang dimakudkan oleh Soepomo tidak sama dengan totaliterisme yang kita pahami saat ini.

Seandainya paham ini yang tetap dipakai kira-kira bagaimana pengaruhnya terhadap penegakan hak asasi manusia di Indonesia? Secara dikotomik mereka yang memandang fungsionalnya paham ini terbagi ke dalam dua arus. Arus pertama bernada negatif, sementara arus kedua bernada positif. Buyung Nasution melihat paham ini telah membawa implikasi politik yang membahayakan demokrasi, yaitu pelemahan sistematis terhadap semua kelembagaan kontrol masyarakat. Mulai dari penyederhanaan partai politik; penataan Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan (MPR, DPR, DPRD); pemasu- gan pers dan lembaga peradilan sampai sterilisasi lembaga pendidikan tinggi dan organisasi kemahasiswaan. Dalam hak asasi buruh Buyung menunjukkan contoh adanya HIP (Hubungan Industrial Pancasila) yang dipandangnya tidak realistis. HIP menentukan bahwa antara majikan dan buruh harus terjalin dalam satu ikatan kekeluargaan. Padahal menurutnya, di dalam realitas sosial dimanapun di dunia ini buruh tetap buruh dan majikan tetap majikan, yang merupakan dua kelompok (golongan) sosial yang memiliki kepentingan berbeda bahkan cenderung bertentangan. Paham Integralistik juga telah menyebabkan langgengnya kekuasaan yang ada sekarang. Metafora keluarga yang diintrodusir oleh paham ini, menye-

babkan pemimpin tetaplah pemimpin, bapak tetaplah bapak yang sekalipun sudah tua dan sepuh tidak bisa diganti. *(Buyung Nasution,* 1993).*

Sebaliknya mereka yang optimistis berpendapat lain. Harry Tjan Silalahi umpamanya berpendapat bahwa para pendiri bangsa dan negara Indonesia, termasuk Prof. Soepomo, merupakan orang-orang yang arif dan bersikap demokratik, sehingga sulit diterima bila mereka itu juga dianggap sebagai penganut paham totaliter. Hamid Attamimi bahkan membela bahwa paham integralistik tidak betul anti hak asasi manusia *(Hary Tjan Silalahi, 1991)*. Pendapat yang agak berbeda adalah datang dari Sri Bintang Pamungkas, menurutnya Paham Integralistik itu ibarat pedang bermata dua. Apabila digunakan untuk kebaikan maka baiklah ia, apabila digunakan untuk kejahatan maka jahatlah ia.

Penulis dalam hal ini ingin menyampaikan pendapat sendiri. Memang betul tidak adil mencela Soepomo tanpa ia dapat membela dirinya. Dan (barangkali) betul apa yang diungkapkan Hary Tjan Silalahi tidak mungkin ia berpaham totaliter. Penulis berpendapat Soepomo tidak salah ketika mengemukakan konsep integralistiknya. Karena refleksinya atas realitas masyarakat (ia adalah ahli hukum adat) telah mengantarkannya pada pendirian bahwa yang terbaik adalah model negara integralistik, yaitu negara yang memperhatikan serluruh rakyatnya dan tidak memihak pada segolongan orang atau kelompok terkuat dalam masyarakat. Pemikiran tersebut apabila dilihat dalam konteks pedesaan dan sekitar tahun 1945 mungkin relevan. Meminjam Durkheim, bahwa masyarakat terbagi dua bentuk, yaitu masyarakat yang didasarkan pada *solidaritas organis* dan masyarakat yang didasarkan pada *solidaritas mekanis*. Masyarakat solidaritas organis adalah masyarakat yang didasarkan pada kesamaan, sehingga hukum yang diperlukan adalah hukum yang represif, mengingat keyakinan umum masyarakat hampir serupa. Pada masyarakat solidaritas mekanis pendasarannya bukan persamaan melainkan pada perbedaan sehingga diperlukan hukum yang akomodatif agar kepentingan yang berbeda tersebut dapat tertampung semuanya.

Pada konsep integralistiknya Soepomo penulis melihat lebih tepat apabila diterapkan pada model masyarakat yang didasarkan pada solidaritas organis, yaitu masyarakat pedesaan yang ditunjuk sendiri oleh Soepomo atau masyarakat yang masih agraris. Akan tetapi dalam masyarakat modern sebagaimana kita temukan sekarang ini tidaklah realistis menerapkan konsep atau paham integralistik. Negara (pempin negara) yang kita temukan sekarang ini bukanlah negara (pemimpin negara) yang Soepomo cita-citakan. Dalam susunan masyarakat yang masih sederhana sangat mungkin pemimpin akan senantiasa berpihak pada rakyatnya karena *vested interest* tidak terlalu besar. Dalam negara modern hal tersebut sukar terwujud. Negara atau pemimpin negara senantiasa berhadapan dengan kepentingan yang bervariasi. Kepentingan mana tidak jarang bentrok satu dengan lainnya. Dalam kasus-kasus pembebasan tanah misal- nya, terlihat negara lebih sering memihak pada kelompok yang kuat secara ekonomi. Karena itu penulis berkeyakinan yang kita butuhkan sekarang ini dalam rangka menegakkan dan menjamin hak asasi manusia adalah demokrasi yang bertumpu pada kekuatan masyarakat *(civil society)*, bukan konsep atau paham integralistik yang bertumpu pada kebaikan pemimpin negara (bila mengikuti urai-uraian Soepomo tentang paham integralistik tampak jelas bahwa porsi terbesar diberikan pada pemimpin negara, sehingga dalam perspektif ini ditegakkannya hak asasi manusia sangat tergantung dari *goodwill* penguasa).

**Era PJPT II**

Kembali pada tema yang diberikan kepada penulis mengenai prospek hak asasi manusia pada PJPT II. Pertama- tama penulis ingin mengemukakan bahwa dalam GBHN 1993 tidak ada satu kalimatpun yang menyebutkan penegakkan atau perlindungan hak asasi manusia pada PJPT II, bahkan sepotong kalimat mengenai HAM pun sepanjang pengetahuan penulis tidak terdapat. Ini menunjukkan bahwa pembuat kebijakan di negara kita tidak betul-betul *concern* terhadap hak asasi manusia. GBHN 1993 disibukkan dengan strategi pembangunan yang tidak lagi berorientasi pada *comparative advantage* melainkan pada *kualitative advantage*. Strategi ini menumpuhkan pada daya saing ilmu dan teknologi. Model pembangunan ekonmomi yang demikian ini jelas membutuhkan modal dan tenaga yang tidak sedikit. Pada era pembangunan ekonomi model Wijoyo Nitisastro *(Wijoyonomics)* kita melihat betapa hak asasi tertatih-tatih. Pelanggaran hak asasi manusia pada model pembangunan yang lebih mengutamakan pada pertumbuhan adalah resiko paling rasional. Arief Budiman secara dialektis menggambarkannya sebagai berikut : orientasi pertumbuhan pada model pembangunan ekonomi yang kita anut memprasyaratkan terciptanya stabilitas nasional. Agar stabilitas nasional terjamin maka ruang politik tidak dibuka lebar. Gerakan-gerakan yang dianggap mengganggu stabilitas secepat mungkin direpresi.Pembangunan membutuhkan modal yang tidak sedikit, karena secara teknologi kita kalah, maka dicarilah jalan agar produksi barang bisa bersaing di pasaran internasional. Akibatnya buruh diperas habis-habisan dan pendapatannya ditekan serendah mungkin.

Pada model pembangunan yang kita kenal dengan *habibienomics* sekarang ini resiko untuk tidak dihormatinya hak asasi manusia tentunya semakin bertambah besar. Karena itu meletakkan prospek penegakan hak asasi manusia di tangan penguasa sama artinya menggantang asap di langit. Kasus Marsinah dan Kasus Nipah adalah sekedar contoh saja dari kesalahan esensial yang negara perbuat, yaitu *pertama*, mengaktualkan kembali pikiran integralistik. *Kedua*, menerapkan strategi pembangunan yang salah.

Pada bagian akhir tulisan ini penulis ingin mengajak pada kita semua bahwa untuk menjamin ditegakkannya hak asasi manusia maka prasyarat demokratisasi tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan untuk menciptakan demokratisasi hanya ada satu jalan yang sejati, yaitu memperkuat masyarakat sipil. Sehingga dengan demikian akan tercipta demo- krasi sejati, yaitu *"dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat!"*.

# Arah Kebijakan Pembangunan Hukum dan Otonomi Kekuasaan

**Doktrin trias politika yang diajarkan oleh Montesquieu yang tidak dianut secara mutlak oleh sistem pemerintahan negara kita ternyata membawa akses yang negatif.**

Bambang Soetono
Mahasiswa Fakultas Hukum Jurusan Hukum Tata Negara

Arus modernisasi telah mengakibatkan terjadinya transparasi nilai-nilai (globalisasi) dan akselerasi transformasi informasi, yang berakibat lebih jauh di satu sisi terjadinya meningkatnya frekuensi interaksi antara berbagai nilai dan budaya tetapi disisi lain terjadi benturan-benturan antara berbagai nilai dan budaya tersebut.

Situasi yang demikian akan mengakibatkan terjadinya transformasi sosial yang tentunya menuntut adanya perubahan pula dari berbagai pranata-pranata sosial. Hukum sebagai salah satu pranata sosial juga di tuntut untuk mampu menyesuaikan dengan arah transformasi sosial tersebut. Tetapi hukum itu sendiri sarat dengan berbagai permasalahan yang terjadi pada berbagai perangkat yang ada di dalamnya. Perangkat hukum secara garis besar itu terdiri dari supra struktur yuridis dan infra struktur yuridis. Supra struktur yuridis merupakan perangkat keras dari hukum yaitu baik berupa institusi penegak hukum maupun ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis sifatnya. Sedangkan infra struktur yuridis merupakan perangkat lunak yang mendukug hukum dalam pelaksanan dan penegakkannya, baik masyarakat maupun ketentuan-ketentuan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menurut C.F.G. Sunaryati Hartono, Republik Indonesia sebagai negara hukum wajib mengupayakan hukum berperanan sentral, di mana seluruh pembangunan nasional berlandaskan wibawa hukum. Termasuk di dalamnya pemeliharaan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis diharapkan diciptakan bukan melalui penggunaan kekuasaan belaka melainkan melalui tegaknya hukum dan pembangunan hukum nasional. Selama era Pembangunan Jangka Panjang I, hal - hal tadi, tampak amat diabaikan. Salah satu petunjuk tercermin dari anggaran negara untuk memebenahi sektor hukum kelewat kecil. Cerminan lain ialah sampai sekarang belum ada suatu rencana pembangunan hukum yang komperhensif dan terinci menghadapi Pembangunan Jangka Panjang II mendatang (Analisis CSIS, 1993).

Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa para akademisi dan praktisi hukum tinggal diam dan tidak melakukan respons terhadap keadaan - keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi sebaliknya justru harus dilakukan langkah - langkah strategis untuk mengantisipasi keadaan - keadaan yang bakal terjadi, yaitu dengan melaksanakan pembangunan (hukum) yang lebih terencana, terarah dan berkesinambungan.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Alvin Toffler bahwa "Ketidakmampuan untuk menyatakan dengan tepat dan pasti mengenai masa depan tidaklah dapat dijadikan alasan untuk

berdiam diri". Dalam kerangka perpekstif demikian, dengan nada yang berbeda, Herman Bianchi menulis bahwa *"niet allen regeren maar ook wetenshap bedrijven is vooruit zein"*. Diterjemahkan secara bebas :"Tidak saja dalam memerintah tetapi juga dalam kegiatan ilmiah, orang harus sanggup melihat ke depan" (J.E. Sahetapy, 1993).

**Arah Kebijakan Pembangunan lembaga Hukum**

Pembangunan hukum merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari langkah-langkah strategis yang dituangkan dalam program - program dan proyek - proyek pembangunan hukum, sehingga seluruh kegiatan pembangunan hukum dapat dilaksanakan menurut pola dan mekanisme terarah, sinkron, terpadu dan realistis, serta diharapkan dapat mengantisipasi perkembangan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat untuk jangka waktu 25 tahun yang akan datang (Sunaryati Hartono, 1993).

Berbagai perkiraan keadaan umumnya mengemukakan peningkatan kualitas hukum dalam pembangunan jangka panjang tahap kedua, akan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat dan kompleks daripada sebelumnya. Tantangan ini tentu saja harus diatasi, dan pilihan logis adalah melaui pembangunan hukum secara mendasar dengan strategi yang tepat (H. Anton Djawaku, 1993).

Pembangunan hukum mempunyai pengertian yang lebih menyeluruh dan mendasar, dibandingkan dengan istilah - istilah serupa yang juga biasa digunakan seperti: pembaharuan hukum dan pembinaan hukum. Pembaharuan hukum mengandung pengertian menyusun suatu tata hukum untuk menyesuaikan dengan perubahan masyarakat. Sedangkan pembinaan hukum lebih mengacu pada efisiensi, dalam arti meningkatkan efisiensi hukum (Satjipto Rahardjo, 1983). Pembangunan hukum memang mencakup pembaruan dan pembinaan hukum sebagai suatu proses yang dinamis. Yaitu sesuatu yang terus bergerak dan berubah -- tidak hanya tertuju pada aturan atau substansi hukum, tetapi juga pada struktur kelembagaan hukum (H. Anton Djawamaku, 1993)

Sasaran pembangunan hukum jangka panjang adalah agar hanya ada satu Hukum Nasional yang mencakup baik perangkat, tatanan maupun budaya hukum, khususnya:

1.Penuntasan penggantian perundang-undangan nasional sebagai manifestasi sikap kemandirian bangsa di bidang hukum;

2. Penyempurnaan dan pembaruan lembaga-lembaga hukum, pembentukan hukum, penegakkan hukum dan pelayanan hukum, beserta mekanisme dan prosedurnya;

3. Peningkatan keahlian, kemahiran dan peranan sumber daya manusia (profesi) hukum dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan;

4. Kemantapan budaya hukum Indonesia yang mencerminkan jati diri manusia dan masyarakat Pancasila;

5. Mapannya kehidupan masyarakat dalam pengayoman negara hukum Republik Indonesia serta mantapnya kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah kehidupan antar bangsa (Sunaryati Hartono, 1993).

Dari pernyataan - pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan bidang hukum merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dan sebagai salah satu sasaran utama dari pembangunan hukum adalah pembaharuan dan penyempurnaan lembaga - lembaga hukum. Hal ini berarti bahwa pembangunan lembaga - lembaga hukum dalam artian pembaharuan dan penyempurnaan juga merupakan keharusan untuk dilaksanakan, dalam hal ini yaitu menggunakan jalur pertama dari perencanaan Pembangunan Hukum Nasional

Lembaga-lembaga hukum atau aparatur hukum sebagai bagian dari perangkat hukum adalah para pelaku pembangunan dan pembinaan hukum nasional, lembaga pemerintahan negara, lembaga perwakilan rakyat, serta organisasi dan lembaga hukum lainnya. Pembangunan aparatur hukum diarahkan pada terciptanya aparatur hukum yang memiliki kemampuan untuk mengayomi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional, serta ditujukan pada pemantapan kelembagaan aparatnya (Soehardjo Sastrosoehadi, 1993). Termasuk didalamnya lembaga-lembaga atau aparatur-aparatur hukum disini adalah Mahkamah Agung yang memegang kekuasaan kehakiman.

**Kekuasaan Kehakiman**

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar ini harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zwecmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*) (Sudikno Mertokusumo, 1988).

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia harus dilaksanakan. Pada umumnya kita semua melaksanakan hukum. Bahkan seringkali tanpa kita sadari kita melaksanakan hukum. Hanya dalam hal terjadi pelanggaran hukum atau sengketa, pelaksanaan atau penegakkan hukum itu diserahkan kepada penguasa, dalam hal ini kekuasaan kehakiman (yudikatif). Dalam hal ada pelanggaran hukum pelaksanaan atau penegakannya merupakan monopoli kekuasaan kehakiman (Sudikno Mertokusumo, ibid).

Hanya saja kemudian muncul pertanyaan tentang dimanakah atau bagaimanakah seharusnya eksistensi lembaga yudikatif itu diakui baik secara *de facto* maupun *de jure* didalam sebuah negara. Sebab, dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi maka didalamnya tidak hanya diakui adanya sebuah lembaga saja yang mempunyai kekuasaan tertentu, tetapi biasanya ada lembaga-lembaga lain yang menyelenggarakan pemerintahan atau biasa disebut lembaga eksekutif dan sebuah lembaga pembuat perundang-undangan atau legislatif. Hal ini sebagaimana dikenal dalam doktrin trias politica yang dikemukakan oleh Montesquieu.

Dari pembicaraan tentang trias politica dalam negara-negara demokratis telah kita ketahui bahwa dalam artinya yang asli dan murni, maka doktrin itu diartikan sebagai pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang mutlak di antara ketiga cabang kekuasaan (legislatif, eksekutif, yudikatif), baik mengenai fungsi serta tugasnya maupun mengenai organ yang menjalankan fungsi tersebut. Akan tetapi dari perkembangannya telah kita ketahui bahwa doktrin pemisahan kekuasaan yang mutlak dan murni tersebut tidak mungkin dipraktekkan dalam jaman modern oleh karena tugas negara dalam abad ini sudah demikian kompleksnya, sehingga doktrin itu diartikan hanya se-

bagai pembagian kekuasaan (*distribution of powers*) saja; artinya hanya fungsi pokoknyalah yang dipisahkan, sedangkan untuk selebihnya ketiga cabang kekuasaan itu terjalin satu sama lain (Padmo Wahyono, 1986).

Dalam doktrin Trias Politica, baik yang diartikan sebagai pemisahan kekuasaan, maupun dalam arti pembagian kekuasaan, maka khusus untuk cabang kekuasaan yudikatif prinsip yang tetap dipegang ialah bahwa dalam tiap Negara Hukum badan yudikatif haruslah bebas dari campur tangan badan eksekutif. Ini dimaksudkan agar supaya badan yudikatif itu dapat berfungsi secara sewajarnya demi penegakan hukum dan keadilan serta menjamin hak-hak azasi manusia. Sebab hanya dengan azas kebebasan badan yudikatif itulah dapat diharapkan bahwa keputusan yang diambil oleh badan yudikatif dalam suatu perkara tidak akan memihak dan berat sebelah dan semata-mata berpedoman pada norma - norma hukum dan keadilan serta hati nurani hakim itu sendiri dengan tidak usah takut bahwa kedudukannya terancam (Padmo Wah yono, 1986)

Azas kebebasan yudikatif (*independent judiciary*) juga di kenal di Indonesia. Hal itu terdapat di dalam Penjelasan (pasal 24 dan 25) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kekuasaan kehakiman yang menyatakan: "Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim".

Sejarah Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 bermula pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, yang diundangkan tepat pada tanggal 31 Oktober 1964. Tahun 1964 mengandung makna tersendiri dalam sejarah bangsa Indonesia, karena tahun itu adalah saat di mana bangsa ini sedang dicekam suasana saling curiga mencurigai. Suasana masyarakat yang demikian itu sengaja digalakkan oleh golongan tertentu untuk mencegah persatuan dan kesatuan bangsa. Dan justru pada saat yang tidak menentu itu lahir Undang-Undang yang sangat besar peranannya dalam kehidupan umat dan bangsa. Karena bidang penegakkan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan peradilan, harus diucapkan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Peradilan yang membawa nama Tuhan di dalam suasana bangsa Indonesia seperti tersebut di atas, sangat mustahil. Dengan kata lain, menurut perhitungan akal manusia, di dalam masyarakat yang berada dalam keadaan curiga mencurigai satu sama lain, lahirnya rumusan atas nama Tuhan dalam pelaksanaan peradilan, merupakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi (Bismar Siregar,1986).

Sedangkan pengaturan kekuasaan kehakiman yang berlaku saat ini pengaturanya terdapat di dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 merupakan induk dan kerangka yang meletakkan dasar serta azas-azas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, sedang masing-masing peradilan masih diatur dalam undang-undang tersendiri. Dengan UU. No. 14 Tahun 1970 maka Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman sebelumnya (UU No. 19 Tahun 1964) dinyatakan tidak berlaku.

Kebebasan kekuasaan kehakiman, yang penyelenggaraannya diserahkan kepada badan - badan peradilan, merupakan salah satu ciri khas pada negara hukum (Keputusan Simposium Negara Hukum UI, 1966). Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari setiap peradilan. Hanya batas dan isi kebebasannya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial menurut UU No. 14 Tahun 1970 itupun tidak mutlak sifatnya, karena tugas daripada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta azas-azas yang jadi landasannya, melalui perkara - perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia (Sudikno Mertokusumo, 1988).

Permasalahan yang sering muncul ketika membicarakan lembaga yudikatif adalah berkenaan dengan kemandirian sebuah lembaga legislatif dari berbagai pengaruh kekuasaan yang berada di luar lingkungan kekuasaannya. Padahal secara tegas di dalam Penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945 serta di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yaitu bahwa "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka artinya bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya terutama kekuasaan eksekutif".

Penegasan ini sesungguhnya mengandung dua prinsip yang berhubungan erat dan harus diikuti. Pertama, bahwa kekuasaan peradilan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Kedua, bahwa kedudukan hakim bukan sekedar diatur dengan undang-undang, melainkan bahwa undang-undang menjamin kedudukan hakim yang menunjang kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah (Padmo Wahyono, 1989). Akan tetapi di dalam undang-undang yang kini berlaku, kendatipun telah ditiadakan campur tangan Presiden secara langsung, namun secara tidak langsung tetap terbuka kemungkinan bagi pemerintah melakukan campur tangan itu. Apapun alasannya, pe-ngaturan seperti itu kalaupun tidak sama sekali meniadakan kebebasan hakim, setidak-tidaknya mengurangi kebebasan yang dituntut oleh konstitusi (H. Anton Djawamaku, 1993).

Namun realitas empiris menunjukkan suatu kondisi yang kontradiktif dengan ketentuan normatif yang ada, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Padmo Wahyono yang mengemukakan bahwa "Kekuasaan Kehakiman yang bebas sering dihubungkan dengan pengangkatan dan penggajian hakim. Hal ini tampak dalam Prasaran Seminar Hukum Nasional tahun 1968. Dalam hal pengangkatan yang penting adalah adanya kerja sama antara yudikatif, eksekutif dan legislatif. Hal ini tercermin dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang antara lain menetapkan bahwa," untuk memperoleh hakim seperti tersebut di atas perlu ada kerjasama serta konsultasi antara Mahkamah Agung dan Pemerintah khususnya dalam bidang pengangkatan, pemberhentian, pemindahan, kenaikan pangkat ataupun tindakan/hukuman administratif terhadap Hakim Pengadilan Umum sebelum pemerintah mengadakan pengangkatan, pemberhentian dan lainnya". Dalam Penjelasan dikemukakan pula : " kerjasama yang dapat berupa usul-usul, pertimbangan ataupun saran-saran dapat diberikan oleh kedua badan, setidaknya dapat mengurangi kemungkinan timbulnya subyektivisme, apabila soal yang berhubungan dengan kepegawaian hakim ditentukan dan dilakukan se-

cara ekslusif oleh satu badan dalam soal-soal pengangkatan, pemberhentian dan lain-lain". Adapun pengaturan mengenai penggajian Hakim, karena hakim juga pegawai negeri sipil. Selain itu mereka memperoleh tunjangan jabatan hakim seperti yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Hakim pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum".

Hal ini mengakibatkan adanya dualisme kepemimpinan didalam lembaga yudikatif. Dualisme ini terjadi bahwa secara teknis operasional maka para hakim berada dalam lingkungan Mahkamah Agung, tetapi secara birokrasi dan finansial para hakim berada di bawah Departemen Kehakiman yang notabene merupakan salah satu perangkat dari lembaga eksekutif. Sehingga para hakim sangat tergantung dengan pihak eksekutif dan secara tidak langsung maka Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif berada di bawah Departemen kehakiman yang merupakan perangkat lembaga eksekutif. Dengan demikian maka kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman dipertanyakan kemurniannya sebab secara realitas empiris tingkat kooptasi lembaga eksekutif terhadap yudikatif sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Sehingga kekuasaan kehakiman yang seharusnya mampu untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak terealisir. Hal ini dapat di lihat dari keputusan-keputusan yang dihasilkan yang cenderung memihak dan berat sebelah serta tidak mencerminkan upaya penegakka hukum, keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.

Sebenarnya realitas seperti ini sudah disadari oleh para ahli hukum baik para akademisi maupun para praktisi. Tetapi nampaknya belum ada upaya-upaya konkrit untuk melakukan perubahan-perubahan sehingga kekuasaan kehakiman benar-benar berada pada posisi yang sebenarnya. Hal ini juga tak lepas dari hegemoni dari pihak berkuasa yang cenderung untuk mempertahankan *status quo*.

Pembaharuan - pembaharuan yang harus dilaksanakan pertama-tama adalah harus dilakukan perubahan struktural terhadap kedudukan dan kekuasaan kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai kehendak konstitusi harus ditegaskan dan dijamin secara konsisten dalam undang- undang dan peraturan pelaksaannya.

Kemudian harus dilakukan pula pemberian otoritas kepada kepada kekuasaan kehakiman, dalam hal ini hakim dalam suatu peradilan, secara penuh tanpa adanya campur tangan dari pihak-pihak di luar peradilan tersebut. Sehingga secara ideal maka hanya ada satu kepemimpinan dalam kekuasaan kehakiman yaitu terpusat pada Mahkamah Agung yang melaksanakan semua fungsi. Sehingga semua urusan baik teknik operasional, administrasi, birokrasi maupun finansial hanya tergantung pada satu lembaga yaitu Mahkamah Agung.

Sedangkan Departemen Kehakiman melaksanakan fungsi pembangunan hukum dalam artian pembinaan hukum dan penyiapan perangkat-perangkat yang dibutuhkan hukum di luar kekuasaan kehakiman, dalam artian ia mengurusi persoalan perundang - undangan semata-mata yang sebenarnya hingga saat ini masih terdapat banyak permasalahan.

**Penutup**

Doktrin trias politika yang diajarkan oleh Montesquieu yang tidak dianut secara mutlak oleh sistem pemerintahan negara kita ternyata membawa akses yang negatif. Sebab, apabila doktrin trias politica dianut secara murni dan asli yaitu difahami sebagai pemisahan kekuasaan (*separation of power*), maka kooptasi pihak pemerintah (eksekutif) terhadap kekuasaan kehakiman (yudikatif) dapat dihindari. Tetapi karena yang dianut di Indonesia adalah dalam artian pembagian kekuasaan kekuasaan (*distribution of power*), maka realitas diatas yang terjadi.

Sehingga ada baiknya pemerintah Negara Republik Indonesia meninjau kembali sistem pemerintahan yang dianut selama ini atau paling tidak melakukan reinterpretasi terhadap doktrin trias politica yang dianut secara tidak mutlak selama ini. Sebab sebenarnya permasalahan memang kembali pada permasalahan ketatanegaraan Indonesia yang unik. Hal ini dimaksudkan agar kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman (yudikatif) dari pengaruh kekuasaan diluarnya terutama kekuasaan eksekutif untuk menegakkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat terealisir.

# Judicial Review dan Upaya Demokratisasi

**Hukum merupakan the rule of game yang memperjelas mekanisme demokrasi untuk menghindari akumulasi kekuasaan.**

Sistem pemerintahan yang ditegaskan dalam UUD 194 telah memperjelas prinsip negara hukum. Pertama, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Artinya, di dalamnya tersirat keinginan mewujudkan suatu masyarakat yang berada di bawah the rule of law. Sekaligus hal tersebut dapat dijadikan jaminan adanya penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan human dignity. Hukum merupakan *the rule of game* yang memperjelas mekanisme demokrasi untuk menghindari akumulasi kekuasaan. Kedua, bahwa pemerintahan berdasarkan atas konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Dalam negara yang demokratis maka konstitusi tersebut yang menjadi dasar sistem pemerintahan dan ketatanegaraan serta sistem hukum nasional. Sebagaimana dikatakan oleh Clinton Rossiter dalam "Constitututional Dictatorship" bahwa, "*It cannot be democratic withaout being constitusional*". Walaupun banyak pula negara otokratis yang konstitusional, tetapi yang kita bicarakan adalah penegakan prinsip demokrasi dan bukan sekedar *basic of government.*

Bagus Sukmo Jati
Mahasiswa Fakultas Hukum UGM
dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa
FH-UGM

Di dalam negara hukum maka hukum dan peraturan perundang undangan merupakan alat legitimasi yang paling semp[urna. Dapat dikatakan segala aspek kehidupan bernegara harus berlandaskan hukum yang kontitusional. Bila ternyata banyak terdapat peraturan perundang-undangan yang inskonstitusional maka negara hukum turun derajatnya menjadi negara otoriter belaka dengan hukum sekedar legitimasi kepentingan politik penguasa. Kondisi tersebut menyimpang bagi terciptanya *representative government,* di dalam negara demokratis. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Konperensi Bangkok tahun 1965 dari International Commission of Jurits tentang syarat-syarat dasar dari *representative government under the rule of law* yang salah satunya adalah proteksi konstitusional.

Oleh karena itu dalam negara demokrasi konstitusioanl kita kenal istilah *judical review* atau hak uji materiil terhadap isi suatu peraturan perundang-undangan. Dengan demikian diharapkan adanya kontrol bagi setiap peraturan perundang-undangan sehingga menjamin bahwa tujuan dan maknanya sesuai dengan konstitusi. Judical review dapat dianggap sebagai tindakan melawan *unlawful*. Seorang tokoh teori hukum alam, John Locke yang teorinya banyak dipakai sebagai dasar sistem pemisahan kekuasaan, pernah mengatakan:

> "Whosever in authority exceeds the power given him by law...,ceases in that to be a magistrate, and acting without authority may be opposed, as any other man who by force invades the right of another...."

### Definisi *Judicial Review*

Sebelum melangkah lebih jauh ada baiknya kita perjelas dahulu definisi judical review atau hak uji materiil.

Secara umum hak menguji sebenarnya terbagi menjadi dua yaitu: (a) hak menguji formil, (b) hak menguji materiil.

Hak menguji formil berkaitan dengan masalah prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau tidak. Misalnya, di dalam pasal 5 UUD 1945 telah ditetapkan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan perssetujuan DPR. Kemudian pada pasal 20 ayat 1 UUD 1945 ditetapkan pula, bahwa tiap-tiap Undang-Undang menghendaki persetujuan DPR. Keduanya mengandung maksud, bahwa suatu produk legislatif dikatakan sebagai Undang-Undang apabila merupakan kesepakatan bersama antara Presiden dan DPR (Sri Sumantri. 1972). Dan apabila berlaku tanpa persetujuan tersebut sebellumnya maka harus berwujud Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang yang juga memerlukan persyaratan tertentu lainnya. Hal tersebut diatur dalam pasal 22 ayat 1 UUD 1945. Jadi, apabila suatu perundang-undangan diberlakukan tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan maka hak menguji formil dapat dilakukan.

Sedangkan yang dimaksud sebagai hak menguji materiil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai suatu peraturanperundang-undangan apakah isisnya sesuai atau tidak dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang lebih tinggi derajatnya. Berkaitan dengan hal tersebut, kita dapat menengok teori *Stufenbaudes Recht* dari Hans Kelsen, dikatakan, bahwa sistem hukum merupakan hierarki. artinya suatu ketentuan hukum harus bersumber pada ketentuan yang lebih tinggi; ketentuan yang lebih rendah merupakan konkritisasi dari ketentuan yang lebih tinggi. Sedangkan ketentuan yang lebih tinggi atau tertinggi adalah grundnorm. Ternyata disamping sistem ketatanegaraan dari suatu negara hukum untuk *check and balance,* tetapi juga ilmu hukum mengajarkan suatu sistem hukum yang terpadu dan terintegrasi.

Disamping isi peraturan tersebut, hak uji materiil juga menilai apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordebde macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan (*de door haar vastgestelde regeling tegeven*). (Ph. Kleintjes, 1917). Apabila kemudian terbukti dari isinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau peraturan yang lebih tinggi maka harus dinyatakan tidak mempunyai daya pengikat (*verbindboarbeid*).

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah lembaga apakah yang berhak menguji ataau berwenang untuk melakukan hak menguji. Jawabannya bervariasi dan ternyata tergantung pada sistem ketatanegaraan dan pengalaman historis dan budaya bermasyarakat. Menurut sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, hak menguji tersebut ada pada Supreme Court. Sedangkan menurut konstitusi de Gaulle Perancis hak menguji dipegang oleh The Constituinal Council, dan berdasarkan Konstitusi Stalin (Uni Soviet, 1986) diserahkan pada Presidium Soviet Tertinggi. Sedangkan di Indonesia pernah berlaku hak menguji ada pada Mahkamah Agung menurut Konstitusi RIS.

Kedua macam hak menguji tersebut dapat menjadi kajian menarik bila disangkutpautkan dengan peran badan kehakiman. Namun dalam tulisan ini akan hanya menekankan pada hak uji materiil. Karena ternyata dalam praktek ketatanegaraan maupun secara teoririt pelaksanaan hak uji materiil mempunyai dampak bagi kewenangan dan eksistensi lembaga tinggi negara pemegang kekuasaan negara. Ada pula alasan lain bahwa oleh sementara pihak menganggap pemberian hak uji materiil pada badan kehakiman merupakan sesuatu yang berlebihan.

## II. JUDICAL REVIEW DAN DEMOKRASI

Judical review atau hak uji materiil sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari negara hukum, sehingga dalam teori dapat diterima secara wajar. Akan tetapi dalam praktek politik terdapat banyak improvisasi yang seringkali malah justru menghilangkan makna hak uji materiil itu sendiri. Hal tersebut dapat terjadi apabila hak uji materiil tersebut dipegang oleh lembaga atau kekuasaan yang **sama dengan kekuasaan legislatif.** Adanya hegemoni kekuasaan akan cenderung represif terhadao sikap korektif dari luar kekuasaannya. Akibatnya pula sering terjadi kekuasaan legislatif atau juga eksekutif mengkooptasi peran kekuasaan yudikatif. Misalnya, kedudukan hakim yang mendua, di satu sisi administrasi dibawah Departemen Kehakiman dan di sisi lain di bawah koordinasi Mahkamah Agung. Atau misalnya ketentuan yang tidak mungkin terjadi di negara demokratis yaitu pasal 19 UU No. 1 19/1964 bahwa Presiden boleh campur tangan dengan leluasa dalam tiap tahap proses peradilan demi kelangsungan atau kepentingan nasional.

Walaupun sebetulnya memang tidak mesti negara demokratis selalu memberikan kewenangan menguji secara materiil pada badan kehakiman. Kita bisa ambil contoh di Inggris yang tetap mempertahankan judical review pada parlemen. Namun sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana proses judical review dapat terlaksana melalui mekanisme demokrasi yang realistis. Artinya, harus selalu ada batasan kewenangan yang diperoleh darai hukum sehingga kekuasaan-kekuasaan tersebut tidak menciptakan landasan politiknya sendiri. Akan lebih baik apabila telah terdapat garis pemisah kekuasaan sehingga judical review akan identik pula dengan kontrol kelembagaan yang diperlukan bagi konsistensi suatu konstitusi. Sudah selayaknya bahwa setiap hal yang inkonstitusional tidak belaku.

Mencuplik pendapat salah satu bab dari "Authority" yang berjudul "Authority and Law" tulisan Jerome Hall, dikatakan bahwa:

> "From a democratic perspective, quetion concerning authority must be formulated in relation to problem solving by discus sion and paramount value of self-rule. The objection is the maximation of rational processes and retriction of authority to minimal requirement ... ,It is always possible to challange officia authority and to be supported in that effort by other legal authority"

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah kapan dikatakan bahwa hak uji materiil secara efektif mampu mendorong ke arah demokratisasi. Sasaran ini menjadi penting bagi pendukung hak uji materiil yang ada di luar pemerintahaan. Hal uji materiil yang efektif akan meningkatkan bergaining position mereka terhadap penguasa.

Sedangkan pertanyaan kedua, lembaga apakah yang mempunyai kewenangan menguji secara materiil. Pertanyaan ini sangat berkaitan dengan pertanyaan pertama. Keduanya merupakan timbal balik.

Bagi bangsa Indonesia kedua pertanyaan tersebut penting untuk memberi satu titik penilaian prinsip hukum tatanegara Indonesia. Semua itu dimaksudkan guna mendorong kondisi bagi pematangan sistem pemerintahannya yang harus mengarah pada demokratisasi. Kita tidak bisa menghindar dari pengaruh global dengan berbagai macam tuntuntannya. Dengan demokratisasi akan memberi lebih banyak peluang bagi tumbuhnya partisipasi positif rakyat di berbagai bidang. Dalam demokrasi setiap orang akan mempunyai kesempatan

yang sama dan hak yang sama pula. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memperkuat badan kehakiman dan sistem hukum nasional mengingat bahwa dalam negara hukum maka perundang-undangan adalah alat legitimatisi yang pa- ling sah. Sehingga setiap kebijaksanaan akan selalu berwujud dalam peraturan hukum. maka dari itu sudah sewajarnya hak uji materiil diefektifkan untuk men cegah kewenangan yang melampui batas. Pembangunan ke- hidupan demokratis tidak akan dapat dilakukan tanpa adanya hukum demokratis.

**III. TINJAUAN DIMENSIONAL JUDICAL REVIEW**

Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, pertama kali perlu diuraikan perkembangan konsep hak uji materiil secara dimensional. Meskipun hak uji materiil melekat pada segi yuridis namun akibat yang ditimbulkan dapat mempunyai dampak sosial politis. Sehingga pembahasannya tidak hanya dimensi yuridis te-tapi juga dimensi doktrinal dan dimensi politis konflik (Daniel S. Lev, 1990). Dimensi-dimensi tersebut menjadi dasar analisis konsep hak uji materiil sekaligus analisis terhadap praktek yang berkembang dalam sistem ketatanegaraan, termasuk didalamnya adalah praktek di Indonesia .

**A. Dimensi Doktrinal**

Pembahasan dimensi doktrinil mencakup garis ideologis politik dan hukum yang akan muncul mempengaruhi pola pikir sistem. Dalam hal tersebut, pada saat awal konsep hak uji materiil berkembang sebagian karena pengaruh paham 'hukum alam' yang tumbuh pada abad XVII di Eropa Barat. Suatu teori yang mengikuti perubahan orientasi dasar pemikiran masyarakat dari bersifat teologis menjadi rasional dan hipotesis. Pokok pemikirannya negara dimana manusia masih dalam keadaan alamiah bebas atau *state of nature*. Sering pula disebut inabstracto yang telah mempunyai hak-hak dasar alamiah. Aspek dasar kebebasan individu menjadi dasar pemikiran beberapa konstitusi Amerika Serikat. Andrew C. Mc Laughlin dalam bukunya "Foundation of American Constitutionalism" menegaskan konsep individualisme tersebut bahwa:

"... the idea of individual right whichs are not created by goverment or society but exist in a state of nature before goverment are institude..."

Konsep tersebut secara tegas menekankan pada perlindungan individu. Bahkan warga masyarakat dimungkinkan untuk tidak mematuhi hukum yang bertentangan dengan hak-hak yang dilindungi oleh konstitusi.

Judical review lantas diperlukan untuk menjaga konsistensi konstitusi dan juga hak-hak dasar manusia pada umumnya.

Sedangkan mengenai kewenangan apakah yang dapat dijalankan dalam Judical Review masih selalu timbul permasalahan. Namun untuk mengetahui gambarannya kita lihat krwenangan hak menguji materiil pada Supreme court di Amerika Serikat. Ada dua pandangan yang muncul yaitu:

1. Judical Review sebagai *automatic power of Supreme Court*. Artinya, kewenangan Judical review pada Supreme Court bukanlah semata untuk mengawasi Conggres, tetapi untuk menjada kelangsungan konstitusi sebagai hukum tertinggi, terhadap peraturan perundang-undangan dibawahnya.

2. Judical review sebagai *discetionary power of Supreme Court*. Artinya, menjadi tugas bagi hakim untuk memberi penafsiran dan kejelasan terhadap ketentuan-ketentuan dalam konstitusi yang masih samar-samar.

Dalam kenyataannya pola tersebut dapat hidup dengan baik apabila disertai pemerintahan dan hukum yang juga mendukung. Konsep tersebut di atas mempunyai kecenderungan pada perspektif liberalisme yang menuntut pembatasan kekuasaan, kemandirian badan kehakiman, dan hak-hak pribadi. Ketiga hal tersebut banyak diperjuangkan oleh golongan menengah yang mempengaruhi ideologi *rule of law* di Inggris. Berbeda dengan rechtsstaat Eropa Daratan yang tumbuh di wilayah kekuasaan birokrasi sentral yang kuat yang tidak dapat di OBRAK oleh borjuasi tetapi dapat dihimbau agar memberi konsesi. Sebagai akibatnya, kecenderungan prosedural common law adalah menguntungkan pihak swasta sedang *civil law* cenderung menguntungkan negara (Merryman, 1969). Jelasnya, *common law* lebih liberal daripada civil law. dalam perspektif lain, mengikuti pendapat Weber, konsep patrionial lebih berpengaruh pada civil law dari pada common law. Karena titik berat civil law yang mengutamakan lembaga birokrasi dan kepentingan negara. Dan sesuatu yang menarik bahwa Indonesia sampai saat ini masih mewarisi *rechtstaat* tradisional dari pemerintah Hindia Belanda yang merupakan kokondrasi dari Nederland. Sedangkan gerakan hukum termasuk usulan hak uji materiil condong pada perspektif liberal mengacu konsep *rule of law* Inggris, terutama konsep Amerika Serikat.

**B. Dimensi Yuridis**

Di dalam pasal-pasalnya, UUD 1945 tidak menyebut secara tegas tentang hak uji materiil. Berbeda dengan dua konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia yaitu Konstitusi RIS dan UUD 1950 yang setidak-tidaknya memberi batasan terhadap hak menguji. Dalam konstitusi RIS misalnya ditegaskan oleh pasal 130 ayat 2 Konstitusi RIS yang berbunyi bahwa pasal 1 ayat 2 Konstitusi RIS yang berbunyi bahwa kekuasaan berkedaulatan Republik Indonesia DPR dan Senat. Sedangkan menurut pasal 127 ayat 1 kekuasaan perundang-undangan federal dilakukan oleh:

1. Pemerintah, bersama-sama dengan DPR dan senat sekadar hal itu mengenai peraturan-peraturan tentang hal-hal khusus mengenai satu, beberapa atau semua daerah bagian atau bagian-bagiannya ataupun yang khusus mengenai perhubungan antara republik Indonesia Serikat dan daerah-daerah yang tersebut dalam pasal 2.

2. Pemerintahan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam seluruh lapangan pengaturan sebaliknya.

Oleh karena Undang-undang federal dibentuk oleh pemegang kedaulatan maka tidak ada lagi lembaga yang lebih tinggi lagi yang dapat menguji ketentuan-ketentuan didalamnya. Sementara itu, pengaturan hak uji materiil terhadap Undang-undang di daerah bagian diatur dalam pasal-pasal 156, 157, dan 158. Untuk kewenangan menjalankan hak uji diberikan kepada Mahkamah Agung menurut ketentuan pasal-pasal di atas.

Ketika UUDS 1950 berlaku maka perubahan terhadap sistem ketatanegaraan tidak dapat dihindari. Konstitusi RIS yang bersifat federal menuju negara kesatuan. Sebagaimana Konsitusi RIS maka peran Mahkamah Agung tereduksi dalam UUDS 1950, pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan Republik Indonesia adalah ditangan rakyat dan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan DPR.

Lalu bagaimana dengan UUD 1945. Apabila mengacu pendapat Prof. Soepomo bahwa hak uji materiil melekat pada Trias Politica dan UUD 1945 tidak menerapkan Trias Politika sehingga hak uji materiil menjado tidak berlaku. Namun demikian secara tegas tidak ada pengaturan tentang hak uji materiil dalam pasal-pasalnya. Paling tidak, hambatan yuridis bagi pemberlakuan hak uji materiil tidak ada. Sementara apabila melihat pada sistem ketatanegaraan, pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan dilakukan sepenunya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian pasal 4 ayat 1 menegaskan bahwa Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ditambah lagi ketentuan pasal 5 ayat 1 yang berbunyi presiden memegang kedaulatan membentuk Undang- undang dengan persetujuan DPR. Maka sebenarnya tetap ada proses dalam menghasilkan suatu Undang- Undang. Bagaimana akhirnya tetap harus terlaksana.

Namun dalan UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, pembentuk Undang-Undang berpendapat bahwa hak menguji tersebut apabila diberikan kepada mahkamah Agung seharusnya merupakan ketentuan konstitusional. Suatu ketentuan yang formalitis belaka. Secara jelas kewenangan menguji dipersempit lagi bagi Mahkamah Agung. Pasal 26 ayat 1, membatasi hak uji hanya dapat dilakukan oeh Mahkamah Agung pada peraturan perundangan yang lebih rendah dari Undang-Undang. Sedangkan pasal 26 ayat 2 menyatakan hal tersebut hanya dapat dilakukan pada tingkat kasasi.

Selanjutnya pasal 31, menyatakan bahwa wewenang mencabut peraturan perundang-undangan tersebut adalah pada instansi yang berwenang. Ketentuan-ketentuan tersebut diperkuat kemudian dengan TAP IV/MPR 1973 pasal 11 ayat 4 bahwa hak menguji Mahkamah Agung hanya pada peraturan di bawah Undang-Undang.

Secara jelas dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan itu bersifat pancingan formalitas saja. Bobot Mahakamah Agung sebagai pemegang kuasa badan kehakiman terdegradasi, sehingga perannya lebih merupakan bagian dari birokrasi, sehingga peranannya lebih merupakan bagian dari birokrasi pemerintahan karena sebenarnya badan ini tidak mempunyai wewenang lebih kecuali mengkoordinasi badan-badan peradilan dibawahnya. Bahkan itupun masih harus berbagai dengan Departemen Kehakiman.

**C. Dimensi Politis Konflik dan Sosial Budaya**

Keinginan untuk memasukkan hak uji materiil dalam Undang-Undang Dasar sebenarnya telah menjadi pendekatan dalam sidang-sidang BPUPKI. Moh. Yamin, yang merupakan salah satu tokoh pemikir tananegara di Indonesia kala itu, berkeinginan menerapkan hak uji materiil dalam lingkup kewenangan Mahkamah Agung. Tantangan yang muncul berasal dari Prof. Soepomo yang berasumsi bahwa hak uji materiil identik dengan Trias Politika dan Liberalisme yang tidak cocok di Indonesia.

Kemudian dengan berganti-gantinya konstitusi juga membawa perubahan pandangan tentang hak uji materiil. Hanya saja yang penting diantaranya terletak pada kewenangan siapa hak uji materiil tersebut. Maka dari itu, dari kalangan orang-orang hukum banyak berjuang melakukan perubahan dan peningkatan peran badan kehakiman terutama Mahakamah Agung. Salah satu upayanya adalah mendesak agar Mahkamah Agung diberikan hak menguji peraturan perundang-undangan produk legisletif. Jadi, sebenarnya hak uji materiil sebagai suatu isu hukum bukanlah suatu yang baru. Apalagi bila mengingat konflik-konflik yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin (1959-1968) atau di masa - masa awal Orde Baru yang diwarnai oleh dukungan meluas.

Akan tetapi perubahan yang disodorkan tetap dianggap hal yang baru bagi masyarakat yang bercorak patrimonial semacam masyarakat di Indonesia bagi masyarakat patrimonial. Hal tersebut dapat mengacu pendapat Max Weber dengan dua kategori bentuk-bentuk kekuasaan yaitu bersifat patrimonial dan bersifat legal rasional. Kekuasaan patrimonial cenderung pada sentralisasi kekuasaan pada suatu figur. Sedangkan kepemimpinan politiknya lebih mengarah pada tindakan-tindakan yang lebih besar yang dianggap sebagai konsekuensi wajar kekuasaan. Sementara itu kekuasaan legal rasional memihak pada suatu pemisahan kekuasaan yang jelas. Hukum sifatnya impersonal dan merupakan hasil proses demokrasi serta prinsip check and balance. Kecenderungannya memang menjadi lebih liberal dan banyak menonjolkan hak-hak pribadi, kemdirian badan peradilan, dan kontrol kelembagaan terhadap kekuasaan politik. Kesimpulannya, jika desakan budaya politik di samping sistem politik dan ketatanegaraan yang menekankan pada kekuasaan eksekutif yang kuat. Kondisi ini secara serius diamati oleh para sarjana yang salah satunya mencoba dengan pendekatan kultural. Misalnya, Emmerson yang telah menulis "The Bureucracy in Indonesia" dan "Indonesia's Elite: Political Culture and Culture Politics". DI dalamnya mengungkap birokrasi yang mendasarkan pada hubungan personal atau patroni-client. Atau bisa juga dianalisa menurut model 'politik birokrasi' yang dikemukakan oleh Karl D. Jakson dimana pembuatan keputusan politik ada sepenuhnya pada para pengusaha negara, terutama perwira militer dan pejabat tinggi birokrasi. Harold Crouch turut pula memberi kesimpulan terhadap ciri-ciri model tersebut. Pertama, lembaga politik didominasi oleh birokrasi; kedua, lembaga-lembaga politik lain semacam parlemen, parpol, dan kelompok-kelompok kepentingan berada dalam keadaan lemah; ketiga, masa di luar birokrasi secara politik. Akibatnya, tidak ada secara riil lembaga yang mampu mengimbangi peran politik dan kekuasaan birokrasi.

Apabila kita tengok lagi pengalaman dari negara yang dicontohkan semula ada beberapa hal yagn dapat kita petik. Pertama, hak uji materiil dapat diterapkan oleh karena kondisi masyarakat secara umum yang telah egaliter. Atau kedua, sebenarnya telah ada pengalaman-pengalaman ketatanegaraan sebelumnya yang bisa telah terdokumentasi dalam bentuk tertulis atau ada kebiasaan yang dimunculkan. Kondisi yang pertama dapat kita ambil contoh misalnya Amerika Serikat. Sedangkan yang kedua misalnya Inggris dengan Bill of Right dan Magna Charta-nya. Sehingga keinginan mempertahankan status quo penguasa dan budaya belum egaliter semacam budaya patrimonalisme tentu menjadi batu sandungan yang tidak mudah dihilangkan.

Namun itu semua bukan berarti usaha-usaha menuju ke arah itu dari lembaga-lembaga negara tidak ada. Ketika masa-masa awal orde melalui Panitia Ad Hoc II MPRS yang bertanggung jawab pada reorganisasi pemerintah telah merumuskan hasil sementara yang berisi rekomendasi-rekomendasi yagn salah satunya mengenai hak uji mteriil. Dan menurut Daniel S.Lev kondisi dimana ba-

nyak rekomendsi yang mendukung penyebaran kekuasaan kala itu dianggap sebagai puncak pengaruh liberalisasi dalam Orde Baru. Hambatan kemudian datang dari pemerintah melalui menteri kehakiman Umar Seno Adji waktu itu yang berpendapat bahwa rekomendasi tersebut akan menempatkan Mahkamah Agung di ata Parlemen dan MPR. Selain itu disertai penolakan terhadap sendi-sendi Common Law dan juga model Supreme Court yang dianggap tidak cocok di Indonesia. Akhirnya tidak pernah ada kesepakatan dengan adanya perbedaan yang komplek dalam garis ideologi politik dan konflik-konflik politik kekuasaan.

Wewenang menguji yang ada pada Mahkamah Agung akhirnya menurut pasal 26 ayat 2 jo. psl. 51 UU No. 14 tahun 1970 dibatasi pada peraturan dibawah Undang-Undang. Batasan semacam ini bagi kalangan penganut unintegralistik merupakan degradasi peran Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan yudikatif. Asumsi yang muncul kemudian coba dikaitkan dengan teori "hegemonik birokratik" yang menurut Mochtar Mas'oed bercirikan diantaranya yaitu kebijaksanaan yang diambil didominasi oleh pendekatan tekhnokratik-birokratik dan menjauhi proses bargaining yang bertele-tele antara kelompok-kelompok kepentingan. Pemerintah juga condong mengambil tindakan represif untuk mengontrol oposisi. Lebih lanjut sebetulnya dapat dikatakan meski menurut pasal 26 UU No. 14 tahun 1970 hanya mengatur kewenangan menguji peraturan di bawah Undang-Undang, itupun masih belum dapat dilakukan secara optimal. Terbukti masih banyaknya permintaan peninjauan kembali terhadap peraturan yang menyimpang belum terselesaikan tuntas. Misalnya, Permempen No. 01/1986: No. 438/1992 dan Permenaker No. 03/1993 yang dinilai melanggar kebebasan buruh yang telah diratifikasi menjadi UU No. 18 tahun 1956 jo. UU No. 8 tahun 1985 dan UU No. 14 tahun 1969 (Kompas, 8-10-1993).

Perkembangan terbaru tentang langkah Mahkamah Agung terhadap hak uji materiil adalah dengan dikeluarkanya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1993. Namun isinya hanya berkaitan dengan masalah prosedur pengajuan peraturan yang hendak diuji, yang sebelumnya dibatasi hanya bisa dilakuan melalui kasasi. Setelah Perma No. 1 tahun 1993, pengajuannya dapat pula dilakukan langsung ditujukan pada Mah kamah Agung. Tetap saja Mahkamah Agung masih berposisi menunggu dan pasif.

**IV. PRAKTEK HAK UJI MATERIIL DI BEBERAPA NEGARA**

.Melakukan perbandingan pelaksanaan hak uji materiil dari beberapa negara menjadi penting untuk menjawab pertanyaan bagaimana kewenangan tersebut diberikan dan dijalankan serta kepada siapa wewenang itu diberikan. Terutama pertanyaan sebagaimana tersirat di atas yaitu apakah bila wewenang ada pada kekuasaan pengadilan berarti dapat dianggap dia lebih berkuasa dibanding kekuasaan legislatif. Alexander Hamilton, tokoh nasional Amerika, dalam salah satu majalah terkemuka di Amerika Serikat "The Federalist" mengemukakan pendapat bahwa tidak ada suatu dalil yang lebih kuat daripada yang menyatakan bahwa tiap- tiap perbuatan dari orang yang diwakilkan harus dianggap batal apabila perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan kekuasaan yang diberikan kepada wakil- wakil. Kekuasaan menetapkan Undang-Undang yang dilakukan oleh wakil-wakil itu adalah tugas yang diserahkan oleh Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar adalah perumusan kehendak rakyat. Kesimpulannya, tidaklah sah suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Bagaimanapun yang mewakilkan, dalam hal ini adalah rakyat, harus tetap lebih berkuasa daripada yang mewakilinya.

Pengaturan hak uji materiil sebenarnya dalam konstitusi Amerika Serikat tidak dapat kita jumpai dialamnya. Namun demikian di dalam praktek jelas keberadaanya. Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah itu dibenarkan atau tidak? Yang jelas tidak ada landasan hukum yang secara pasti mengaturnya. Alternatif jawaban juga ditawarkan oleh Robert K. Carr dalam bukunya "American Democracy in Theory and Practice" yang menyatakan sebagai berikut:

> "There has been much cotroversy concerning the origin of judical review in the United States. It is very clear that the con stitution it self does not in so many words authorise the courts to declare acts of congress unconstitutonal".

Selain itu dalam Article VI Section 2 Konstitusi Amerika Serikat menegaska bahwa para hakim dalam tiap-tiap negara bagian harus terikat pada Konstitusi Amerika Serikat dan undang-undangnya.

Hak uji materiil ini diberlakukan pertama kali di Amerika oleh Ketua Supreme Court yaitu John Marshal pada tahun 1803 dalam kasus Marbury vs Madison. Ketika itu John Marshal menyatakan bahwa suatu ketentuan dalam Undang-Undang Federal bertentangan dengan konstitusi. Sejak saat itu pula hak uji materiil secara praktek dianggap sah keberadaannya.

Sementara itu hak uji materiil dalam praktek ketatanegaraan di Perancis dapat dijumpai dalam Konstitusi de Gaulle pasal 61 yang menyatakan bahwa sebelum suatu Undang-Undang dinyatakan berlaku, terlebih dahulu harus disampaikan pada Constitutional Council untuk mengetahui apakah peraturan tersebut bertentangan dengan konstitusi ataukah tidak. Timbulnya lembaga penguji Undang-Undang di Perancis berkaitan dengan perjalanan sejarahnya yang bermula dari Revolusi Perancis. Pada abad 18, pengadilan-pengadilan di Perancis dianggap sebagai pencipta dan pembela hak-hak istimewa yang bertentangan dengan hak-hak kodrat rakyat. Akibatnya, pandangan bahwa lembag peradilan adalah lembaga terhormat pemegang keadilan sebagaimana tradisi negara-negar Anglo Saxon jatuh martabatnya di Perancis. Bahkan kemudian muncul Decreet tanggal 15 Agustus 1790 yang mencabut hak pengadilan untuk menguji isi Undang-Undang.

Lembaga semacam Constitutional Council di Perancis terdapat pula di Jerman dengan nama Federal Constitutional Court. Lembaga ini mempunyai kewenangan dan kekuasaan antara lain, "*covers the compativility of federal or lander legislation with the Basic Law and the compatibility of Lander legislation with that of the Bund.*" Jadi, konstitusi di Jerman lebih dikenal sebagai the Basic Law. Walaupun banyak pengaruh luar yang mempengaruhi sistem ketatanegaraan Jerman seperti dari Napoleon dan Woodrew Wilson, tetapi berbeda dengan sistem Amerika, Basic Law tidak menganut pemisahan kekuasaan. Bahkan cenderung mengikuti pola Inggris yaitu *parliamentary executive* dimana terjadi "*fusion of legislature and executive*". Meskipun demikian sebagai negara demokratis maka penyebaran kekuasaan lebih banyak dilakukan. Sedangkan pelaksana utama kekuasaan ada pada lembaga legeslatif, perdana menteri (kanselier) dan pemerintah federasi, Bundessrat dan pemegang kekuasaan judisiil.

Oleh karena hak uji materiil selalu mengacu pada konstutusi dalam hal ini Undang-Undang Dasar, maka bagaimana negara yang tidak mempunyai Undang- Undang Dasar? Untuk hal ini dapat diambil contoh yaitu Inggris. Sistem konstitusi yang bulat serta pasti tidak dikenal di Inggris. Sistem ketatanegaraannya lebih mengenal asas "Kedaulatan Parlemen" sebagai *foundation stone* yang tidak mempunyai pembatasan. Sehingga tidak mungkin lembaga lain semacam pengadilan membatalkan keputusan parlemen oleh karena dianggap parlemen anggotanya terpilih secara langsung oleh rakyat. Namun demikian cukup banyak norma-norma dasar baik yang tertulis maupun tidak yang mendasari sistem ketatanegaraan di Inggris untuk secara terbuka memberi kesempatan politik pada rakyatnya. Tidak tertulis Hukum Tata Negaranya dalam suatu dokumen menyebabkan Inggris lebih mudah menyesuaikan dengan kenyataan-kenyataan di masyarakat.

Bervariasinya faktor-faktor dalam sistim ketatanegaraan menyebabkan sulit diambil kesimpulan aspeknya yang paling berpengaruh terhadap suatu negara dalam menerapkan hak menguji materiil. Yang jelas bahwa kondisi ketatanegaraan yang memperlakukan hak menguji materiil tidak mesti lahir bersamaan dengan konstitusi itu sendiri. Perjalanan sejarah dan dinamika pemikir ketatanegaraan dari negara itu sendiri yang terus mematangkan sistemnya. Perubahan menjadi bukan sesuatu yang tabu, bahkan sekalipun untuk konstitusi. Mengambil contoh Perancis, Konstitusi de Gaulle dengan hak menguji materiilnya sebenarnya merupakan konstitusi baru hasil referendum yang mulai berlaku 4 Oktober 1958.

**V. ALTERNATIF-ALTERNATIF**

Secara jelas telah digambarkan bahwa hak uji materiil bukan masalah sepele dalam sistem ketatanegaraan. Wewenang dan eksistensi para pemegang kekuasaan negara ikut tersangkut didalamnya. Hak uji materiil tidak akan hanya menyangkut keabsahan konstitusional suatu peraturan tetapi juga sekaligus didalamnya menyangkut kontrol kewenangan kelembagaan.

Dari pembicaraan di atas perlu dirumuskan kapan hak uji materiil dapat turut pula mendorong upaya demokratisasi. Setidaknya kita dapat menggunakan pendekatan dimensional sebagai acuan sekaligus mengingat pula pengalaman beberapa praktek hak uji dibeberapa negara. Secara doktrinal maka jelas bahwa hak uji materiil harus dapat sebagai sarana perlindungan terhadap ketentuan-ketentuan yang inskontitusional. Konsep negara hukum harus mengejawantahkan dalam wujud peraturan yang tetap mengacu pada hak-hak dasar manusia. Upaya tersebut juga harus merupakan jaminan bagi: (1) hak ikut serta di dalam menetapkan peraturan hukum yang mengikat masyarakat; (2) adanya persamaan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Artinya, pemerintah tidak boleh memperlakukan rakyat sebagi mahluk yang tidak mempunyai kemauan dan hak, (3) hak atas kebebasan mengurus kehidupan dan kebahagiaan sendiri, lepas dari kehendak sewenang-wenang orang lain, semata-mata atas dasar hak dan kekuatan sendiri sebagai anggota masyarakat.(Dessauvagie dan MR. R. Tresna, 1956)

Sedangkan secara yuridis, harus ditetapkan secara tegas siapa yang berwenang melakukan hak uji materiil terhadap Undang-Undang. Oleh karena kekuasaan perundang-undangan dijalankan oleh Presiden bersama-sama dengan DPR menurut ketentuan UUD 1945, maka sudah sewajarnya kontrol produknya dilakukan oleh lembaga di luar keduanya, dan yang lebih tepat adalah Mahkamah Agung. Ditinjau dari sudut pandang politis maka posisi Mahkamah Agung condong apolitik, netral, dan peran utamanya dapat meningkatkan sebagai penjaga konstitusi. Jelas bahwa posisi tersebut akan meningkatkan wibawa badan kehakiman yang selama ini lebih banyak dilecehkan. Sementara MPR berperan melingkupi ketiga ketiga lembaga tersebut dan sekaligus menjalankan kontrol kelembagaan secara meluas. Hal tersebut dengan mengingat perannya sebagai pelaksana kedaulatan rakyat yang fungsi-fungsi teknis operasionalnya terjabarkan pada ketiga lembaga tinggi negara.

Secara empiris yang seringkali justru menjadi kendala utama adalah dimensi politis konflik dengan diwarnai oleh unsur budaya politik dan sosial. Hampir dipastikan amatlah sulit mengubah struktur masyarkat patrimonial menjadi masyarakat legal rational. Hasil maksimal yang dapat dicapai paling mengubah kecondongan masyarakat menjadi lebih pada legal rasional. Perombakan msyarakat yang menekankan pada struktur saja atau budaya tidak akan menyelesaikan masalah. Disinilah perlunya dukungan komprehensif kelas masyarakat pendukung. Apalagi sebenarnya peranan yang dimainkan hukum sebagai pranata dan sebagai mitos politik sangat tergantung pada hasil pertentangan politik, (Daniel S. Lev).

Pada saat ini kita tidak dapat mengandalkan aspek formalitas hukum untuk menguji peraturan perundang-undangan. Karena mengingat kelemahan sistem hukum dan lembaganya. Sumbangan yang dapat diberikan adalah dengan mengembangkan doktrin ilmu hukum sebagaimana pengalaman Amerika Serikat dalam memperjuangkan hak menguji dari Supreme Court. Tindakan semacam itu bukanlah sesuatu yang inskonstitusional untuk mampu menjamin hak-hak kemerdekaan rakyat.

Untuk memperkuat posisi Mahkamah Agung sebaiknya TAP No. IV/MPR/1973 ditinjau kembali. Kalau perlu diciptakan ketetapan MPR yang menjelaskan posisi dan kewenangan Mahkamah Agung termasuk hak menguji produk legislatif. Demikian .juga sama halnya dengan ketentuan-ketentuan dalam UU No. 14 tahun 1970.

**VII. PENUTUP**

Demi peningkatan Mahkamah Agung maka perlu pula diambil tindakan-tindakan pro aktif. Sehingga tidak perlu menunggu permasalahan-permasalahan yang diajukan masyarakat. Sekaligus diharapkan sebagai rangsangan positif partisipasi rakyat untuk berani memberikan respon terhadap produk perundang-undangan. Disamping itu, setiap peraturan perundangan akan selalu dipaksa untuk memperhatikan ketiga asas Undang-Undang secara proporsional yaitu, asas kepastian hukum (*rechtsikerheit*), asas kemanfaatan (*zwegmassigkeit*), dan asas keadilan (*gerechtigkeit*).

Dalam negara demokrasi yang konstitusional adalah wajar peran Mahkamah Agung tidak hanya sebagai *the agent of justice* tetapi juga sebagai *the agent of democracy.* Mahkamah Agung juga akan mampu mendorong proses demokratisasi asalkan perannya bisa dioptimalkan untuk mampu memberikan masukan-masukan yuridis maupun koreksi-koreksi yuridis. Dan bukannya tunduk pada kekuasaan pemerintah. disinilah arti suatu lembaga yudikatif yang efektif, disamping legislatif yang efisien, dan *clean goverment.*

persoalan-persoalan intern dari LSM, meskipun hal itu secara riil ada dan mungkin memberikan pengaruh pada kerja-kerja yang harus dilakukan.

Tulisan ini juga, secara dini bermaksud menghindari pretensi analisis (baca: akademis), sebab ia membutuhkan data atau hasil riset yang panjang. Posisi yang hendak diambil tulisan ini adalah menyodorkan pandangan ke depan tentang kontribusi yang dapat diberikan LSM dalam rangka demokratisasi dan penguatan masyarakat sipil.

Untuk keperluan itu, pembahasan atas persoalan-persoalan dalam realitas sosial politik ekonomi yang kini berjalan dan kaitan ke belakangnya, menjadi penting dan hendak di kedepankan. Sebab dari sana diperoleh gambaran tentang tantangan yang bakal dihadapi LSM dan agenda yang harus dilahirkan.

# Berenang dalam Banjir Bandang

**"Yang dipertaruhkan demi kemerdekaan bukan cuma martabat suatu bangsa (yang direndahkan oleh bangsa lain), tetapi lebih lagi, yaitu hak rakyat untuk mengendalikan kekuasaan (dari manapun asalnya).**

*Hanya atas dasar hak itu, arti kewarganegaraan memperoleh makna sepenuhnya. Sebaliknya, bila rakyat masih menyimpan rasa takut terhadap negara, maka pastilah kemerdekaaan telah dirampas (lagi) darinya."* (Abdurrahman Wahid, pada peringatan 17 Agustus 1993)

Dadang Juliantara
Mantan PU/Pemred Majalah DINAMIKA; Ketua LPM FMIPA; Kabid Minat Bakat BPM FMIPA 1988-1990; Sek.Um Keluarga Mahasiswa Fisika UGM; Ketua Himpunan Mahasiswa Geofisika UGM.

Tulisan singkat ini, tidak hendak membahas, apa dan bagaimana LSM/LPSM (Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat, istilah ini sebetulnya memperhalus istilah NGOs, Non-Goverenmental Organizations atau Organisasi Non Pemerintah, Ornop--dalam tulisan ini, untuk mempermudah saya gunakan istilah LSM); dengan asumsi sidang pembaca telah cukup mengenal LSM. Ia juga tidak memberi perhatian pada

## Negeri Sejuta Pagar

Negara Orde Baru (NOB) lahir difasilitasi oleh sebuah krisis ekonomi dan politik yang cukup akut. Di masa Rejim Soekarno, hantu inflasi telah mencabik-cabik legitimasi masyarakat atas negara dan secara riil menggencet ekonomi rakyat. Angka inflasi yang mencapai 732% pada tahun 1964-1965, membuat negara kelimpungan. Apalagi ketika itu juga terjadi kelangkaan pangan yang serius, akibat kegagalan panen dan kenaikan harga beras di pasaran internasional. Di sisi politik, pertentangan antara pihak militer dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) kian meruncing, menanti momentum untuk meledak. Polarisasi antara PKI dan militer menjadi sangat sulit untuk ditangani, bahkan bagi seorang politikus seperti Presiden Soekarno. Pada akhirnya, apa yang disebut Gerakan 30 September serta upaya kudeta, telah memberikan dalih bagi pihak militer untuk masuk secara efektif ke dalam kancah politik (Sjahrir, 1992).

Proses reformasi kekuasaan atau rekonfigurasi kekuatan sospol ini, bukan tanpa biaya sosial. Tragedi di penghujung '65 tersebut, telah menelan korban jiwa yang besar. Sebagian mereka adalah pihak yang tak mengerti apa-apa, entah itu perempuan atau laki-laki, anak-anak atau

dewasa, orang kecil atau orang besar, tapi toh harus menanggung penderitaan paksa: kematian keji. Kelak politik menjadi 'barang' haram, yang bukan saja dijauhi, tapi juga diusahakan untuk dijauhi.

Sebagaimana dilukiskan Arief Budiman (1991), NOB yang baru lahir ini pada dasarnya merupakan pemerintahan yang didukung oleh aliansi negara (yang didominasi oleh kekuatan militer) dan kelompok borjuasi. Dengan bermodal pada pinjaman luar negri, NOB berusaha menekan inflasi dan memulai program kerja yang kemudian dikatakan sebagai pembangunan. Titik tekan dari program pembangunan ini pada bidang ekonomi, dengan target pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Guna mencapai itu semua, pintu politik masyarakat ditutup; jika sebelumnya politik menjadi panglima, maka NOB meletakan ekonomi sebagai panglima. Dengan dalih pembangunan, proses depolitisasi pada massa rakyat dijalankan secara intensif dan represif.

Peristiwa Malari (1974) dan berbagi gejolak di tahun-tahun sebelumnya; Peristiwa tahun 1978, dll, merupakan contoh-contoh bagaimana keuatan-kekuatan sospol di masyarakat menolak praktek politik NOB yang dinilai tidak demokratis dan melahirkan ketimpangan sosial. Pada tahun yang disebutkan inilah, kalangan mahasiswa terlibat secara cukup intens, menjadi aktor kritis yang bisa diandalkan "suara"-nya.

Yang terjadi kemudian memang tak diluar dugaan. Karena justru setelah muncul sejumlah desakan politik dari bawah itu, proses pembatasan justru ditingkatkan. Di kampus saja, setelah peristiwa '78, terjadi pembreidelan pers mahasiswa dan pembubaran Dewan Mahasiswa (DEMA), yang sebelumnya menjadi organ terdepan dari kampus dalam masyarakat tuntutan rakyat bagi keadilan dan kebebasan. Tidak saja itu, tahun 1985, sejarah politik nasional seperti ditekan hingga titik nol, dengan munculnya 5 perundang-undangan politik: UU no. 1 tentang Pemilu; UU No. 2 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD; UU No. 3 tentang Parpol dan Golkar; UU No. 5 tentang Referendum; dan UU No. 8 tentang Ormas (Arbi Sanit, 1985). Lahirnya UU Pembangunan Politik ini secara riil telah memagari ruang - ruang politik rakyat untuk mengajukan aspirasi maupun tuntutan politik.

Semua perangkat yang mengendalikan dinamika politik massa rakyat sebetulnya tidak lepas dari diadopsinya doktrin pendekatan keamanan, yang menjadi "paradigma" pengendalian politik. Secara praktis, pengendalian ini tidak saja di tingakt desa, yang dilengkapi aparat-aparat seperti Babinsa, Binmas --pembina masyarakat, dari polisi, Satgas Hansip, dll, juga di tingkat atas.

Hasil dari praktek kekuasaan yang demikian itu tidak lain dari sebuah sentralisasi kekuasaan, yang tidak saja didukung oleh perangkat-perangkat yang menyebar seperti kaki-kaki oktopus, tapi juga hadir dalam bentuk-bentuk yang lebih koersif dan refresif. Dinas inteljen, Bakortanas, dll, menjadi kekuatan handal buat penertiban, pembersihan, pengucilan dan penyingkiran. Wajah negara menjadi begitu "menakutkan" masyarakat, yang seakan-akan negara senantiasa berada di sekeliling mereka, mengontrol gerak langkah mereka.

"Ketakutan" rakyat memang bukan tanpa alasan. Penangkapan yang dikenakan pada aktivis mahasiswa yang kritis (terakhir yang dialami Nuku Soleiman, Yenni Damayanti dkk, di Jakarta, Kompas 11 Desember 1993), pengadilan atas aktivis Golput di Semarang, pembreidelan media massa, budaya telpon, pencekalan dll, mau tidak mau menjadi momok yang menghantui pikiran-pikiran alternatif yang tumbuh di masyarakat. Pelarangan buku, pentas teater, pembacaan puisi, diskusi, rapat-rapat, dan berlaksa perijinan yang harus dilewati masyarakat dalam melakukan aktivitas ataupun mengaktualisasi pikirannya, adalah hal yang kian lama kian akrab (lihat laporan Hak Asasi YLBHI, *Demokrasi Di Balik Keranda).*

Selain represi kognisi, rakyat juga dipertontonkan digunakannya kekerasan dalam menghalau apa yang secara sepihak dilihat "kekuasaan" sebagai potensi instabilitas. Kisah *Petrus* (penembak misterius) yang menyikat habis kaum bromocorah,. Tanjung Priok, Way Jepara Lampung, Insiden Dili, Kasus Marsinah, Haur Koneng (Jawa Barat), hingga Tragedi Nipah (Madura) yang menelan nyawa empat orang penduduk, merupakan contoh aktual digunakannya "politik kekerasan", dalam menghadapi tuntutan-tuntutan dari masyarakat. Dan bahwa "politik kekerasan" amat siap menelan korban.

Di mata rakyat kekerasan tidak saja tampak sebagai anak bebal, yang tak peduli kritik atau kecamaan dan terus mengulang - ulang kesalahannya, tapi juga lambat laun telah menjadi atmosfer dalam semesta pengetahuan rakyat. Ia laksana sejuta pagar yang makin membatasi ruang gerak rakyat. Disini pula kita menangkap urgensi dan relevansi peringatan Gus Dur yang dikutip di awal tulisan ini.

**Timpang**

Modal asing dan pembatasan politik, memang membuahkan hasil ekonomi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional selama dasawarsa 70-an mencapai sekitar 7,5% per tahun. Pada dasawarsa 80-an meski situasi perekonomian dunia dalam keadaan tak menentu, rata - rata pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mampu mencapai 5,2% per tahun. Dan pada awal dassawarsa 90-an, yaitu tahun 1990, pertumbuhan tercatat cukup tinggi: 7,4% (BPS, 1992).

Di lain sisi, laju pertumbuhan sektor industri kian lama kian menggantikan posisi sektor pertanian atas kontribusinya dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Malah sektor industri, terutama industri tekstil, garmen dan sepatu, makin memperlihatkan prospek yang cerah. Hal ini berkaitan dengan ambisi untuk melepaskan ketergantungan terhadap migas. Nilai ekspor yang melambung, menunjuk tanda-tanda bergesernya tumpuan pemasukan devisa, dari sektor migas ke sektor non migas.

Tepat di sebelah hiruk pikuk kegembiraan atas capaian angka-angka dari statistik ekonomi tersebut, kita dibenturkan oleh realitas lain dari kehidupan masyarakat luas, yang ternyata tak terwakili oleh kisah sukses di atas. "Pembangunan" memang tak bisa dilukiskan secara sederhana oleh angka-angka, sebab ia meliputi kehidupan dan pengalaman hidup warga masyarakatnya. Bagi masyarakat sendiri, soalnya tidak berhenti pada, seberapa jauh negara mampu mempertahankan angka pertumbuhan yang tinggi, namun apakah angka pertumbuhan itu secara langsung berkait dengan segi-segi pemerataan dan keadilan.

Benar NOB telah berhasil menurunkan angka kemiskinan absolut hingga 15% atau 27 juta jiwa. Menurut Prof. Mubyarto (1993), jumlah ini merupakan bagian yang paling sulit dari kemiskinan yang telah dapat ditangani dalam PJP I . Kita pun dapat membayangkan bagaimana kondisi dan tingkat hidup dari 27 juta saudara-saudara kita itu, jika dikatakan mereka adalah golongan yang berpendapatan kurang dari Rp 450,- perharinya. Hal yang diluar dugaan,

ketika standar pendapatan tersebut dinaikkan hingga Rp 1.000,- maka jumlah mereka, seperti yang dikatakan Sri Bintang Pamungkas melonjak menjadi lebih kurang 110 juta jiwa. Padahal dengan penghasilan Rp 1.000,- perhari, yang untuk masa sekarang nyata-nyata tak cukup untuk membeli 2 liter beras, tentu tak cukup buat menutup pengeluaran yang kian hari makin membumbung. Apa artinya?

Ada yang sulit disembunyikan bahwa struktur ekonomi kita sesungguhnya menyimpan kerapuhan yang cukup serius. Jika dilihat dari proses transformasi perekonomian, tampak bahwa peningkatan kontribusi sektor industri pada PDB yang menggeser posisi sektor pertanian, sebetulnya dibarengi oleh alokasi tenaga kerja ke sektor tersebut. Padahal akibat masuknya teknologi pertanian ke desa-desa, telah membawa dampak yang serius pada peluang kerja petani. Sejumlah peran petani tergusur oleh mekanisasi pertanian yang memaksa mereka meninggalkan desa, mengadu nasib ke kota. Sebagian mereka terserap ke sektor informal dan jasa, sebagian menjadi penganggur.

Selain masalah dalam penyediaan lapangan kerja, sistem yang berjalan juga mengandung titik rawan dalam pembagian aset dan akses ekonomi. Direbutnya sekitar 95% dari total sirkulasi kredit oleh usaha-usaha besar, menjadi salah satu bukti. Gambaran singkat tentang Ibnu Sutowo, yang ditulis oleh Yoshihara Kunio dalam bukunya yang dilarang, Kapitalisme Semu Asia Tenggara (1990, hal. 103), kiranya dapat dipakai sebagai salah satu rujukan dalam memahami adanya "cacat" distribusi aset dan akses ekonomi.

Pertemuan Tapos yang terkenal, sebetulnya juga bukti kenyataan ketimpangan penguasaan aset dan akses ekonomi. Kekuasaan tiba-tiba sadar bahwa kelompok-kelompok bisnis yang teelah berkembang secara tidak wajar. Ada keinginan untuk mengurangi kekuatan memadai (Kuntowijoyo, 1991).

Kelompok-kelompok bisnis raksasa yang menguasai mayoritas dari aset ekonomi nasional, memang kian sulit dikendalikan oleh negara. Bahkan sebaliknya, mereka secara efektif dapat menekan negara untuk melayani paket-paket yang mereka inginkan (Kuntowijoyo, ibid). Keluarnya deregulasi dan debirokratisasi, selain dapat dilihat sebagai upaya untuk memacu gerak ekonomi dan produktivitas nasional, tapi sulit diingkari bahwa pembukaan ruang ekonomi itu sangat dominan memberikan keuntungan pada mereka dan bukan pada golongan lemah yang jumlahnya terus membengkak.

Ekonomi negara memang kian tergencet. Kelangkaan sumber pemasukan negara, memaksa diluncurkannya penghapusan subsidi atas BBM. Dilain pihak, hutang (atau yang lebih suka disebut bantuan) luar negeri telah mencapai titik kritis. Untuk tahun ini saja, pembayaran bunga dan cicilan utang telah mencapai angka 45 dari pengeluaran rutin pembangunan atau 16.711,9 milyar rupiah, naik 5,1 dari anggaran tahun sebelumnya yang hanya 15.902,1 milyar rupiah. Tentu saja jika dibandingkan dengan nilai hutang yang kita terima, maka sebetulnya pengaliran devisa bersih ke luar negeri sedang terjadi.

Mudah diduga apa yang bakal terjadi dalam mengatasi kelangkaan pemasukan negara: menggenjot pemasukan pajak. Komitmen pemerintah yang dikemukakan ketika mengumumkan RAPBN 1993/1994, bahwa penerimaan dari sektor pajak akan ditingkatkan, menjadi petunjuk mutakhir atas dugaan tersebut. Artinya, rakyat juga yang terpaksa menanggung beban, meskipun secara riil mereka sangat kecil mendapatkan aset ekonomi nasional. Inilah wajah pembangunan kita, yang terasa diberi gincu angka statistik capaian pertumbuhan ekonomi.

**LSM**

Berbagai persoalan yang berkembang di lapangan ekonomi dan politik, sebagaimana yang dijabarkan secara amat sederhana di atas, kiranya telah membangkitkan sejumlah usaha-usaha untuk "membuka" jalan bagi lahirnya suatu tatanan yang lebih adil dan demokratik. LSM sebagai salah satu bentuk organisasikemasyarakatan yang ada, yang juga punya runtut historis dengan gerakan kemerdekaan, harus diakui merupakan organ yang paling mungkin tumbuh dalam suatu sistem yang cenderung monolitik dan otoriter. Apa yang harus disadari bahwa LSM hadir dengan wajah yang amat beragam, yang ditandai oleh beragamnya perspektif serta paradigma yang digunakan dalam menganalisa masalah-masalah yang dihadapi rakyat.

Oleh sebagian LSM, masalah kemiskinan, lebih dipandang sebagai proses teknis internal (bukan pemiskinan) yang disebabkan oleh lemahnya motivasi, tidak tertatanya manajemen, kurangnya modal, rendahnya ketrampilan dan kurangnya teknologi. Karena itulah "*community development*" diambil sebagai kegiatan utama, yang dilakukan dalam bentuk motivasi, latihan manajemen, latihan keterampilan, bantuan modal baik hibah maupun pinjaman dan bantuan teknologi. Ratusan juta rupiah dihabiskan untuk memberikan skill, milyaran rupiah dihabiskan untuk apa yang dinamakan modal usaha.

Dalam perjalanannya, usaha-usaha yang dilakukan LSM yang memegang ideologi "developmentaslisme", tidak mengalami hambatan birokrasi (bahkan sebagian memperoleh dukungan), tapi secara riil upaya tersebut tidak mampu membawa mereka yang berada di bawah garis kemiskinan ke dalam situasi yang lebih baik, kecuali "kegembiraan-kegembiraan" sesaat--yang lebih diakibatkan oleh bantuan kongkrit yang mereka terima.

Meskipun secara de facto, pola yang digunakan melalui pendekatan "developmentalisme" tidak memberikan hasil sebagaimana diharapkan, namun pola ini ternyata masih dipertahankan, bahkan negara bermaksud memakainya guna memerangi (mengentaskan) kemiskinan. Program IDT (Inpres Desa Tertinggal), merupakan contoh tetap dipergunakannya pendekatan "developmentalisme" dalam memerangi kemiskinan. Program ini berupa bantuan ke desa-desa yang dianggap atau dikategorikan miskin (tertinggal).

Dengan memberikan sekitar 20 juta setahun, diharapkan desa yang bersangkutan dapat berkembang dan mengembangkan modal kerja tersebut untuk pertumbuhan desa. Model ini tentu saja persis dengan pola kerja yang dipakai sebagian LSM, yang sesungguhnya masih berasumsi bahwa sumber kemiskinan adalah kelangkaan modal dan skill manusianya dan bukan persoalan-persoalan struktural yang melingkupinya.

Model serupa sesungguhnya telah banyak dijalankan. Kita bisa mencatat beberapa diantaranya:

(1) pentransferan sumber - sumber pembangunan dari pusat ke daerah dalam bentuk Inpres yang dimaksudkan untuk mendorong kegiatan ekonomi di daerah;

(2) peningkatan akses kaum miskin kepada berbagai pelayanan

sosial, seperti pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, air bersih, sanitasi, dsb.

(3) perluasan jangkauan lembaga perkreditan untuk rakyat kecil (Kupedes, KURK, BKK, KCK, Kredit Bimas dll);

(4) pengembangan kelembagaan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan , seperti program pengembangan wilayah (PPW), Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT), Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4KT), dsb (Prof. Moeljarto Tjokrowinoto, 1993).

Justru untuk tidak mengecilkan arti program-program yang telah dijalankan. Kita hendak mengatakan, mengapa program yang demikian canggih masih menyimpan (melahirkan) kantong-kantong kemiskinan. Dan sebagian daerah lain dalam kelimpahan sumber- sumber ekonomi. Tentu saja masalah ini tidak perlu dijawab dengan mengatakan bahwa pembangunan adalah proses yang berjalan secara bertahap. Pernyataan ini bukan saja tak menjawab inti soalnya, tapi juga telah menutup pintu diskusi bagi ditemukannya hakekat masalah yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di suatu daerah.

Disinilah pentingnya dibuka sebuah wawasan baru dalam memandang kemiskinan yang dihadapi rakyat, baik di desa-desa maupun di kota. apa yang digambarkan secara agak berpanjang-panjang di bagian depan, sesungguhnya masalah yang dihadapi rakyat tidak sekedar hal-hal yang bersifat teknis internal, yang dapat diatasi dengan menyuntik motivasi maupun penyediaan sejumlah modal kerja. Saling kait mengkait antara kendala ekonomi dan politik, kiranya telah menempatkan rakyat, bukan saja tersudut secara ekonomi, tapi juga tak berdaya secara politik.

Memang patut diakui bahwa tidak semua LSM yang terlibat dalam aktivitas sosial tersebut secara dogmatik meyakini kebenaran model pendekatan "developmentalisme". Sebagian lain telah mencoba mengadopsi pemikiran baru, yang lebih berorientasi pada suatu pendekatan struktural sifatnya. Orientasi jangka pendek dari bentuk yang menggunakan pendekatan struktural ini ialah menciptakan perubahan struktural dan menciptakan perubahan struktur kelembagaan di bidang ekonomi, politik dan sosial (M.M Billah dan AHG Nusantara, Prisma 4, 1988).

Lewat pemahaman yang lebih komprehensif, kiranya cara berpikir dikotomis di kalangan LSM, yang saling menganggap benar model pendekatan yang diambil, sudah saatnya diakhiri. Persoalan makro yang dihadapi rakyat nampaknya menuntuk kehadiran LSM secara 'lebih' yang tidak saja bekerja di lapangan ekonomi melalui proyek-proyek peningkatan pendapatan, tapi juga membangun kesadaran kritis masyarakat. Karena proses pembangunan tidaklah semata- mata bermakna fisik, tapi juga menyangkut martabat manusianya. LSM sebagi kekuatan alternatif dalam masyarakat, tentu saja mengemban tugas tersebut, yakni memperjuangkan tegaknya demokrasi dan penghargaan atas martabat manusia.

Untuk bisa mewujudkan agenda besar tersebut, nampaknya LSM bakal dihadang oleh kesulitan yang cukup besar (lihat bagian *Negeri Sejuta Pagar)*. Berbagai hambatan, baik birokrasi mapun yang lain, harus dihadapi secara kreatif, agar tidak mudah hanyut dalam arus besar tersebut. Disinilah kita melihat makna penting bagi LSM untuk meneguhkan komitmen sebagai mitra rakyat dan bukan sebaliknya. Dari sini pula seyogyanya dilahirkan agenda, yang tidak saja mendesakkan agar ruang demokrasi diperlebar, tapi juga memberikan pendidikan politik pada massa rakyat di kota dan di desa, agar seluruh rakyat "melek politik". Dengan tumbuhnya kesadaran politik yang sejati dari massa rakyat, niscaya apa yang dikatakan oleh Gus Dur (kutipan - red), bakal bisa terwujud. Yakni rakyat memiliki cukup kekuatan untuk mengendalikan kekuasaan. Proses ini pula yang pada gilirannya menjadi jaminan berlangsungnya demokrasi dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia. Demikian.

**Bagaimana jika seekor burung tidak mau berkicau ?**
**Nobunaga menjawab :**
**"Bunuh burung itu "**
**Hideyoshi menjawab :**
**"Buat burung itu ingin berkicau"**
**Ieyasu menjawab : "Tunggu"**

# Membuat Burung Berkicau

Percakapan di atas adalah bagian dari sajak yang dihapal oleh setiap anak sekolah di Jepang. Menceritakan tentang perbedaan mencolok dari falsafah yang dianut oleh tiga tokoh besar Jepang menjelang pertengahan abad ke-enam belas, ketika keshogunan Ashikaga ambruk.

Seperti jawaban Hideyoshi itulah salah satu yang ingin dilakukan oleh BALAIRUNG. Membuat burung yang tidak mau menjadi ingin berkicau. Menyegarkan, juga merangsang dinamika kehidupan mahasiswa ke arah yang lebih demokratis, dinamis, ilmiah, dan juga kental dengan kepedulian sosial.

Iklim dunia kemahasiswaan di tahun 80-an, terimbas oleh NKK/BKK. Berbagai saluran aktivitas dan kreativitas kemahasiswaan dibubarkan rupanya mampu menumbuhkan apatisme, serta menumpulkan kepedulian sosial mahasiswa.

Berawal dari seminar Pers Mahasiswa yang diselenggarakan Clapeyron, majalah mahasiswa Teknik Sipil tanggal 29 Oktober 1985, sekelompok aktivis yang tak ingin hanya menunggu seperti Ieyasu, dimotori oleh Abdulhamid Dipopramono mendirikan majalah mahasiswa tingkat universitas di UGM, yaitu BALAIRUNG. Selain bertujuan untuk mewadahi aspirasi mahasiswa, juga untuk menyegarkan iklim dunia kemahasiswaan yang terasa beku sejak diberlakukannya NKK/BKK .

Seperti halnya Hideyoshi yang ingin membuat burung berkicau, kami pun mengalami berbagai kendala. Pasang-surut datang silih berganti. Terutama bila berbenturan dengan upaya pihak-pihak tertentu yang bersikap sebagai Nobunaga.

Seperti yang terjadi ketika kami mengupas ideologi sebagai laporan utama dalam edisi 18/TH.VII/1993 lalu. Ideologi negara yang cenderung tertutup dan berharga mati menggugah kami untuk mencoba membuka katup-katup keterbukaan.

Tak disangka, niat baik ini mendapat tanggapan yang sangat hebat dari berbagai pihak. Tak kurang dari Pangdam Diponegoro memberi pernyataan pada salah satu media massa bahwa ada pihak ketiga yang menunggangi.

Lantaran Laporan Utama yang menyoal ideologi nasional ini pula, Prof. Dr.Ir. Mohammad Adnan, yang juga berperan sebagai pelindung BALAIRUNG sempat dibuat repot. Ketika beliau berada di Jakarta, telepon berdatangan dari beberapa pihak yang "berkepentingan", menanyakan kejelasan, apa sebenarnya yang dilakukan BALAIRUNG.

Tak pelak lagi, situasi seperti ini membuat "sport jantung" yang cukup seru di kalangan pengurus. Betapa tidak, persoalan ini berhadapan dengan resiko tuduhan subversif, yang sering kali tak jelas batasannya.

"Ketegangan" di kalangan pengurus sudah mulai meninggi hingga kerap dilakukan rapat serius. Beberapa pihak bahkan mengusulkan agar tema Laporan Utama segera diganti dengan tema yang "aman-aman" saja. Namun segera saja usulan seperti ini dimentahkan. Betapapun, ini adalah bagian dari upaya kami mencoba membuka katup keterbukaan. Dan, kami ingin pula membuktikan bahwa tak ada pihak ketiga yang ada di balik layar, apalagi menunggangi.

Lain lagi persoalannya ketika kami mempersiapkan edisi kali ini. Isu demokratisasi kampus yang kami angkat dipicu oleh mekanisme pemilihan rektor yang kurang demokratis. Polling pendapat pun kami sebar Kami mencoba menampung aspirasi mahasiswa yang nota bene adalah pihak yang paling berkepentingan dengan sosok rektor.

Menjelang terbit, spanduk promosi pun kami gelar. Sayangnya, spanduk promosi yang berisi hasil polling tersebut kurang berkenan di kalangan rektorat. Alasannya, spanduk yang bertuliskan : "Hasil Polling BALAIRUNG : Boma Wikan Tyoso - Rektor Pilihan Mahasiswa" dinilai tidak sesuai dengan tradisi UGM.

Keberatan pihak rektorat ini membuat kami bertanya-tanya, apakah keterbukaan dan kehidupan demokratis harus terganjal oleh tradisi *ewuh-pekewuh* ?

Tentu saja pasang-surut yang kami alami tak bisa tercermin seutuhnya lewat tulisan ini. Namun setidaknya dua peristiwa tersebut mampu menggambarkan bahwa memang,membuat burung berkicau tidaklah semudah membalik telapak tangan. Dan, kami tak ingin hanya menunggu seperti Ieyasu. Kami lebih memilih Hideyoshi, kami ingin membuat burung berkicau.

Mardiyah

**Perjalanan sebuah majalah tidak semudah membacanya. Liku-liku persoalan dihadapi. Demikian pula BALAIRUNG yang telah berkiprah selama delapan tahunan. Apa sesungguhnya jurus-jurus rahasia mahluk ini hingga mampu eksis di belantara pers mahasiswa yang *ngos-ngosan* dan tarik menarik kekuasaan?**

# MEMBUKA JENDELA MEMANAH REMBULAN

## orientasi redaksional sebuah majalah mahasiswa

Ruang itu kecil, cuma 3 X 4 meteran, berdiam diri di pojok Barat Laut Gelanggang Mahasiswa yang selalu riuh rendah oleh mahasiswa yang selalu berkegiatan setiap harinya. Namun ruangan itu memancarkan nuansa lain. Ada keseriusan dan kerutan di jidat sebelas kepala yang membahas edisi perdana majalah BALAIRUNG. Dari kantor kecil mungil yang tak pernah sepi dan tak mengerti hari libur itu mengalir BALAIRUNG edisi demi edisi. Tiap rapat penentuan tema bisa muncul *guyon* atau *ngotot-ngototan* sebagai suatu hal yang lumrah. Suasana demikian tak jauh berubah ketika kantor berpindah di markas B-21, sebuah rumah bekas gudang Dharma Wanita UGM di kompleks perumahan Bulaksumur.

"Mereka ingin membawa aroma orisinalitas dan kemurnian, entah diterima segera oleh orang lain atau tidak. Racikan filsafati sudah mereka kaji dengan daya yang maksimal. Lewat paradigma yang diangkat dari keprihatinan panjang, yang begitu membosankan. Dari sini mereka berharap kearifan yang agresif," tulis redaksi BALAIRUNG pada edisi ulang tahunnya yang pertama. Inilah pijakan dasar para pengurusnya yang terekspresi dalam tema-tema yang diangkat per edisinya.

Dari sini akan dicoba diuraikan orientasi redaksional majalah ini yang tercermin dalam laporan utamanya. Fokus pembahasan terletak pada pilihan tema untuk laporan utama tersebut. Juga sedikit disinggung beberapa rubrik lain yang turut mewarnai BALAIRUNG dari edisi ke edisi. Tulisan ini bukanlah suatu *content analysis* tapi sekedar deskrpsi singkat dari bentang sejarah BALAIRUNG dan mencoba menemukan -- meminjam istilah Michel Foucault -- "retakan- retakan" pada tipologi bangun sejarahnya.

### PANAH-PANAH INTELEKTUAL

BALAIRUNG sebagai pers mahasiswa tak jauh beda dengan pers mahasiswa lain. Mungkin satu kekhususan yang menjadi warna media ini adalah sikap intelektualnya yang eksplisit termaktub pada mottonya: **Nafas Intelektualitas Mahasiswa.** Penekanan pada sikap ini konsisten dilakukan dengan mengambil pola Temu Wicara dalam pembahasan tema sentralnya. Temu wicara ini pada intinya adalah dialog lintas ilmu antara pihak - pihak yang berkompeten dalam kaitan dengan tema, baik itu pakar maupun mahasiswa. Kekentalan intelektualitas ini diperkuat lagi dengan beberapa artikel seputar

tema yang sifatnya ilmiah. Dapatlah disimpulkan bahwa intelektualitas adalah panah-panah BALAIRUNG dalam membidik setiap tema yang menjadi sasarannya.

Meminjam jurus yang dipakai Wiro Sableng -- tokoh rekaan Bastian Tito -- dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembahasan tema di BALAIRUNG adalah "Membuka Jendela, Memanah Rembulan". BALAIRUNG mengangkat suatu tema dengan membentang permasalahanya ("Membuka Jendela") sehingga dapatlah diurai kesemrawutan benang- benang persoalan yang meliputinya. Selanjutnya dapatlah dibidik sasaran yang sesungguhnya ("Memanah Rembulan"), syukur-syukur kalau dapat ditemukan alternatif pemecahannya.

Melihat hal diatas secara sederhana bisa dikatakan bahwa BALAIRUNG bukanlah majalah "murni" (seperti Tempo, Editor, atau Forum Keadilan). Dia lebih bisa dikatakan suatu bentuk transisi antara majalah mahasiswa dan jurnal ilmiah. Orientasi filofi redaksionalnya merupakan ketegangan antara jurnalistik dan keilmiahan.

Majalah ini bukanlah majalah *tentang* mahasiswa, meskipun disebut majalah mahasiswa. Tema-tema kemahasiswaan yang pernah diangkat menjadi laporan utama hanya mencapai sepertiga (30-an %) dari 18 edisi (sampai Januari 1994). Bukan berarti kajian itu tidak dilakukan. Tema- tema kemahasiswaan dapat dijumpai di rubrik-rubrik lain. Rubrik Laporan Khusus misalnya pernah mengangkat soal Gelanggang Mahasiswa, KKN, Pers Mahasiswa, atau Mahasiswa yang Menjadi Tahanan Politik. Juga -- yang pasti -- rubrik Kemahasiswaan dan artikel - artikel yang tersebar di halaman - halaman lain.

Isi lebih didominasi oleh wacana politik di urutan pertama,dan mahasiswa dan Perguruan Tinggi (baca: pendididkan) di urutan berikutnya. Sehingga adalah suatu konsekuensi logis bila perubahan-perubahan kebijakan sosial-politik pemerintah amat berpengaruh dalam penentuan tema. Hal ini nampaknya tak jauh beda dengan orientasi pers mahasiswa era 60 dan 70-an yang hidup di tengah-tengah kancah politik yang sedang bergolak.
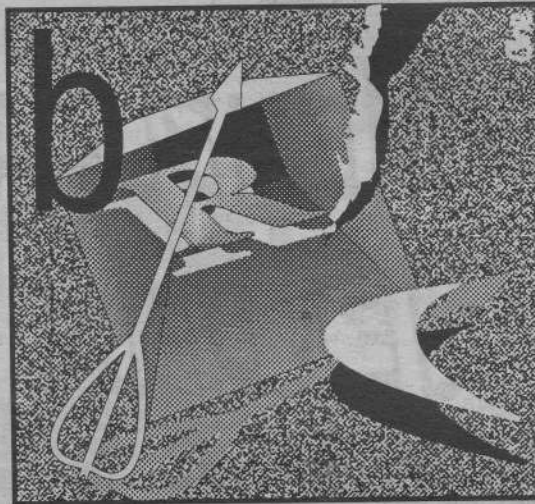
**MENEROPONG PEMBANGUNAN**

Adalah benar apa yang dikatakan T. Jacob bahwa jikalau sesuatu berjalan dengan baik, maka pers mahasiswa merupakan *preview* masa depan, apa yang dipikirkan oleh pendukung-pendukung masa yang akan datang, bagaimana sentuhan pendidikan terhadap mereka, bagaimana pengaruh masyarakat pada mereka. Maka tidaklah mengherankan kalau BALAIRUNG sendiri bersenggama dengan ide-ide besar, semisal menelaah Amal dan Pembangunan (Balairung No. 1/1986), Demokrasi dan Budaya Politik (Balairung No. 5/1986), dan Kaum Muda dan Pembangunan (Balairung No. 6/1987). Media ini mencoba meneropong semesta, menyimak masa lalu, melihat masa kini, dan kecenderungan masa depan.

Pada edisi-edisi awal, idealisme bidang redaksi tampak sekali berorientasi pada ide-ide besar yang berpijak pada fakta yang dihadapi masa itu: Indonesia Sedang Membangun. Pembangunan yang sedang berjalan tidaklah semulus yang direncanakan. Banyak dampak negatif yang muncul yang harus segera dicari solusinya. Pembangunan menuntut modernisasi yang secara riil berupa indusstrialisasi. Hal ini berimbas pada perguruan tinggi, moralitas, tenaga kerja, dan unsur-unsur kehidupan lainnya. Satu persatu masalah ini dikupas secara kritis. "Memang, industrialisasi tidak sekedar menawarkan harapan-harapan, ada bentuk kekhawatiran menyertai didalamnya dan mensyaratkan sikap waspada kita," tulis Muhammad Afariz mewakili sikap redaksi (Balairung No.

1/1986). Dalam wacana pembangunan ini tema-tema BALAIRUNG bergerak.

Kekhawatiran atas krisis yang terjadi dalam proses transisi kebudayaan di Indonesia, yaitu pola kehidupan masyarakat agraris menuju industrialis, terekspresikan di lembar-lembar majalah BALAIRUNG. Kekhawatiran ini menstimulasi kepedulian terhadap pembangunan yang sedang berjalan. Menimbulkan semacam evaluasi kritis atas pembangunan. Baik itu unsur-unsur yang turut bergulir bersama roda pembangunan seperti industri dan ekonomi, maupun unsur-unsur yang terkena imbas dari tuntutan pembangunan seperti kepemudaan, etika, dan kebudayaan.

Meski demikian, nampaknya secara prinsip pembangunan bisa diterima seperti terungkap dari tulisan Ana Nadhya Abrar pada Balairung No. 5/1987 ini: "Dalam usaha membiasakan bermusyawarah berdasarkan mufakat sesuai dengan Pancasila dan UUD'45, barangkali yang perlu ditekankan adalah disiplin masyarakat, bahkan dengan disiplin secara nasional untuk mengamankan hasil-hasil pembangunan yang sudah kita capai sejak 18 tahun lalu. Musyawarah yang tidak memberi peluang yang bisa dimanfaatkan oleh unsur-unsur yang tidak setuju dengan pembangunan". Terlihat bahwa iklim keterbukaan, dialog, dan demokrasi yang sebenarnyalah yang menjadi persoalan intinya.

Tidak itu saja, sesekali dilakukan pula refleksi atas dunia mahasiswa sendiri. Baik peran sosialnya ("Partisipasi Sosial Mahasiswa", Balairung No.2/1986), maupun gerakan mahasiswa ("Kemana Gerakan Mahasiswa Pergi", Balairung No.9/1988). Cukup unik bahwa laporan utama sampai edisi 9/1988 mengandalkan rubrik Temu Wicara yang tidak lain catatan dialog antara beberapa pakar dan mahasiswa. Rubrik Berita Tema yang ditulis oleh redaksi sendiri dan menguraikan fakta, data, atau deskripsi tema utamanya dimunaculkan belakangan sejak edisi 10/1989. Sebelumnya laporan utama terdiri dari "Isu" sebagai semacam editorialnya, "Temu Wicara", dan "Artikel Tema" yang merupakan sumbangan tulisan ilmiah dari luar.

**BACK TO CAMPUS**

Pemunculan rubrik Berita Tema sejak edisi 10/1989 ternyata punya pengaruh cukup besar dalam pemilihan tema-tema. Ada semacam tuntutan untuk melakukan reportase lapangan sebagai bahan untuk rubrik tersebut. Hal ini sangat berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya yang cukup menyelenggarakan temu wicara saja sebagai bahan laporan utama. Sehingga sejak itu laporan utama diangkat dengan mengacu pada atas data kongkrit di lapangan, entah suatu peristiwa atau data angket (yang belakangan cukup disukai pengelolanya dalam menjaring opini publik).

Salahsatu yang disebut-sebut tonggak sejarah BALAIRUNG adalah edisi 10/1989. Perlu juga rasanya diberi sedikit catatan khusus yang berkaitan dengan edisi ini. Edisi 10 mengangkat judul "Prostitusi Mahasiswa" dengan subjudul cukup menyengat: "Mahasiswa Itu Sampai Mencium Kaki Saya". Inilah untuk pertama kalinya BALAIRUNG mengangkat problematika moralitas seksual dengan fokus pada mahasiswa dan pelacur. Menurut teori jurnalistik, memang nilai berita terbesar dipegang oleh seks dan politik menempati urutan kedua. Dari pengakuan beberapa mantan pengurusnya, edisi ini memang cepat sekali habis terjual di pasaran. Bisa dibayangkan seberapa besar ketertarikan pembaca atas tema ini. Bagi BALAIRUNG sendiri nampaknya memang edisi ini patut disebut tonggak sejarah, mengingat: pertama, sejak edisi inilah dimunculkan rubrik Berita Tema yang sedikit banyak mengawali peralihan orientasi redaksionalnya, dan kedua, sejak edisi ini pula teknik *investigative reporting* dilakukan dan ditulis dengan gaya feature. Perlu ditambahkan pula bahwa sampai sekarang pun beberapa pembaca yang mengetahui perihal edisi ini masih sering mencari di kantor BALAIRUNG, namun sayang edisi ini termasuk edisi langka disamping edisi 3-4/1987 dan edisi 13/1991.

Selanjutnya tema-tema

bergeser kembali ke kampus. Tema-tema seperti strategi pendidikan tinggi, lembaga kemahasiswaan, dan peran (politik) mahasiswa pun diangkat. Penyempitan ladang garap ini tidak terjadi begitu saja. Hal ini juga dipengaruhi secara kuat oleh faktor- faktor ekstern yang bersingungan dangan dunia Pendidikan Tinggi. Terutama kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Keluarnya UU No.2/1989 tentang Pendidikan Nasional, PP No.30/1990 tentang Pendidikan Tinggi, dan SK Mendikbud No.0475/1990 tentang SMPT.

Hal ini memang bisa diimaklumi, mengingat tahun-tahun itu terjadi perubahan-perubahan besar dalam dunia kampus dengan digulirkannya kebijakan- kebijakan pemerintah tersebut. Hal ini memaksa mahasiswa-mahasiswa yang berpandangan kritis untuk menganalisa dan menyikapi keadaan ini. Saat itu bermacam-macam respon mahasiswa bermunculan, entah dalam bentuk aksi turun ke jalan, diskusi, maupun polemik di media massa. Tak berbeda dengan BALAIRUNG yang turut mengkritisi dengan caranya sendiri.

**MENYOAL (KEMBALI) NEGARA**

Nampaknya setelah isyu seputar kampus menyurut, sejak edisi 16/1992 BALAIRUNG kembali melebarkan fokus garapannya. Tema pertama yang dilempar ke pasar adalah soal Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir. Sebuah kebijakan baru negara atas atas kebutuhan listrik masa depan yang menimbulkan pro dan kontra. Sekarang pun isyu ini masih tetap hangat didiskusikan dan presiden sendiri merasa perlu menanggapinya. Namun karena prinsip "membuka jendela" yang ingin diterapkan memberi konsekuensi bahwa redaksi harus memaparkan persoalan PLTN sesungguhnya yang sangat kompleks dan dilematis . Sayangnya redaksi kekurangan tempat dalam "memanah rembulan"- nya, permasalahan sosial yang (mungkin) akan muncul. Mestinya tidak lagi mempersoalkan apakah teknologi akan mampu mencegah radiasi nuklir yang mungkin timbul, karena itu sudah sangat teknis sifatnya, tapi kegelisahan yang menghinggapi sebagian masyarakat. Selanjutnya tema klasik tapi aktual (karena berdekatan dengan SidangUmum MPR 1993) adalah Dominasi Lembaga Eksekutif. Nampaknya BALAIRUNG hanya ingin membuktikan hipotesanya bahwa sistem kenegaraan kita yang dirasa kurang sehat disebabkan oleh dominasi eksekutif dan mencoba "menggebrak" dengan hasil polling tentang lembaga kenegaraan. Artinya hanya membuktikan apa yang sudah lama terbuktikan, bahkan relatif transparan itu.

ONE

Terakhir tema yang banyak mendapat sorotan -- terutama pemerintah dan aparatnya -- adalah ideologi negara, Pancasila. Lagi-lagi BALAIRUNG tidak menawarkan perspektif baru atas persoalan, kecuali tawaran keterbukaan terhadap persoalan ideologi negara.

Pada masa ini ada keinginan dari BALAIRUNG untuk menjadikan dirinya sebagai pers alternatif dengan menawarkan tema-tema yang (dianggap) belum berani diangkat pers umum. Ini tantangan baru bagi BALAIRUNG yang masih mampu bertahan selama delapan tahun. Tapi patut dipertanyakan apakah BALAIRUNG sendiri sudah merumuskan apa itu pers alternatif sehingga dari konsep tersebut dapat diturunkan tema-tema yang memang "berani" dan "menantang" dibanding pers umum. Konsep itu tentulah harus matang dan melihat - katakanlah - tiga edisi terakhir itu dapatlah diajukan pertanyaan: apakah yang demikian itulah yang dimaksud pers alternatif.

Usaha "membuka jendela, memanah rembulan" ini nampaknya sudah coba dilakukan dan sedikit banyak telah berjalan. Namun nampaknya satu persoalan mendesak harus dilakukan adalah mengevaluasi secara total seluruh isi perut redaksionalnya (yang tidak mungkin dibahas tuntas pada kesempatan ini). Bukan sekedar mengevaluasi apa yang baru saja dilakukan, tapi menelaah pergeseran- pergeseran orientasi redaksional majalah ini dan merumuskan orientasi baru dalam menghadapi situasi dan kondisi kekinian ini. Artinya profesionalisme di bidang redaksi harus mendapatkan porsi yang cukup. Baik penggarapan tema maupun sumber daya yang dimiliki, karena hal ini akan tercermin dalam tulisan-tulisan yang ditampilkan. Persoalan amatirisme-profesionalisme ini adalah persoalan klasik pers mahasiswa, tapi bukan berarti diterima begitu saja (*taken for granted*), tapi perlu dicari bentuk pemecahan yang paling tepat.

Kurniawan
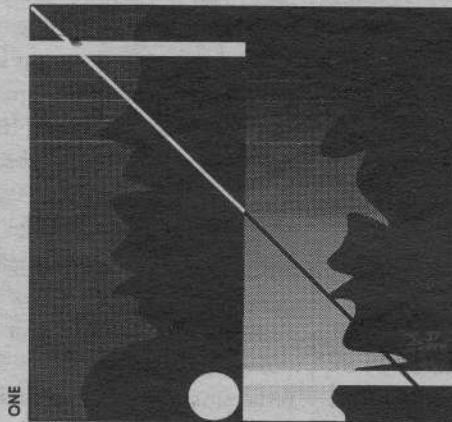
# Di'BACA' Atau Di'KENALI'?

SELEMBAR uang pada bagian atas, sisi kanan bawah sebuah apel dan sisi kiri bawah adalah sepotong bibir wanita. Komposisi gambar diletakkan disela-sela kalimat: "Mahasiswa itu sampai mencium kaki saya". Lempengan terkoyak simbol reaktor nuklir ditindih bola lampu dan seuntai padi menguning. Dipadu dengan sepotong teks berita tema permasalahan nuklir. Itulah dua buah contoh gambar kulit muka BALAIRUNG yang sempat laris manis diserbu pembaca.

Mengingat salah satu fungsi penting diatas, memang gambar kulit muka termasuk yang kami prioritaskan. Apa yang tergambar harus sesuai *outline* berita tema dan dirancang matang memenuhi *deadline*. Sehingga tampil mengesankan dan memikat konsumen.

Selebihnya, tanpa peran bagian produksi, mewujudkan sebuah majalah adalah mustahil.

Berbicara mengenai 'bentuk' penerbitan, kembali ke tanggal 29 Oktober 1985. Dalam sebuah Seminar Pers Mahasiswa UGM tercetus sebuah kesepakatan untuk memilih sebuah majalah bagi penerbitan tingkat universitas. Mengapa? Karena disamping frekuensi penerbitannya tidak sering, juga memungkinkan bentuk yang lebih 'monumental', baik dari segi isi maupun visual.

Sejak penerbitan perdana, 8 Januari 1986, kami terus menyusun identifikasi, menciptakan pola pengelompokan berita, merencanakan bentuk halaman yang indah dan menarik disamping berupaya menambah keterbacaan berita. Untuk itulah dinamisasi proses produksi terus kami maksimalkan, baik pada kulit muka maupun halaman isi.

Pada awalnya, logotype BALAIRUNG berdiri miring (italic) dengan kaki-kaki melengkung. Namun sejak 1989, oleh Ponang Praptadi, logo itu diganti menjadi tegak (normal) dengan kaki-kaki menyudut, memberi kesan lebih gagah. Motto dialihkan ke dalam daftar isi. Sedang *background* warna gelap pada logo dihapuskan sama sekali. Sifat protektif juga makin kami tonjolkan, dengan pemakaian sistem *glossy* sejak 1990. Selanjutnya Amir Fatah Sofyan menggarap visual kulit muka dengan teknologi komputer pada 1993.

Dinamisasi yang atraktif lebih banyak terjadi pada halaman isi, dimana keinginan *lay outer*-lah yang lebih terpuaskan, baik dari perubahan *font setting*, pembagian dan lebar kolom, serta pola desain secara keseluruhan. Melihat kondisi tersebut, maka sejak 1991 kami mencoba membakukan segala hal pada patron desain halaman isi. Tentu dengan mempertimbangkan segi ekspresif sang *lay outer*. Pemakaian kertas CD dan *art paper* mulai kami lalukan, meski masih sederhana, guna pembagian halaman berwarna. Kembali Amir menghadirkan teknologi komputer guna membantu kerja produksi, pada 1992. Akibat masih belajar, maka edisi 'percobaan' saat itu menjadi 'kurang enak' dibaca, karena banyak kelokan sungai dan danau yang terbentuk.

Sedang untuk proses cetak, kami tidak banyak melakukan pindah tempat. Rencana sangat awal, kami ingin agar BALAIRUNG selalu dapat dicetak di GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS. Namun kondisi mengatakan lain, terpaksa sejak BALAIRUNG lahir harus dicetak diluar, yakni BAYU INDRA GRAFIKA dan beberapa tahun ini beralih ke LIBERTY.

Membicarakan proses produksi secara keseluruhan, ia harus dapat menampilkan *posterlikeness* dan *eyecatching* serta visual yang baik, selalu baru, inovatif dan segar dengan teknik pembuatan yang genial dan prima serta selalu mengikuti perkembangan desain dan ilustrasi. Kesemuanya itu tak lain adalah untuk menciptakan kepuasan dan kenyamanan pembaca serta diusahakan agar ia tidak di'baca' tapi untuk di'kenali' konsumen. Dan diusia sewindu ini, sudahkah BALAIRUNG mencapai tujuannya?

**Sisdaryono**

KALAU kuas lembut sejarah boleh mengoleskan merah, biru, putih, kuning, maka perjalanan hidup seorang **Pramoedya Ananta Toer** adalah pekat sempurnanya jelaga. Delapan belas tahun hidupnya dihabiskan dalam

**dunia paling kelam produk lalim kekuasaan, penjara.**

Secara bergiliran dicicipinya nyinyir terali

**besi tiga rejim kekuasaan; tiga tahun**

dalam tawanan Belanda, setahun (1960) dalam penjara ORLA, dan

**14 tahun yang melelahkan dalam penjara ORBA.**

Dua tahun setelah keluar (1981), satu persatu bukunya dilarang
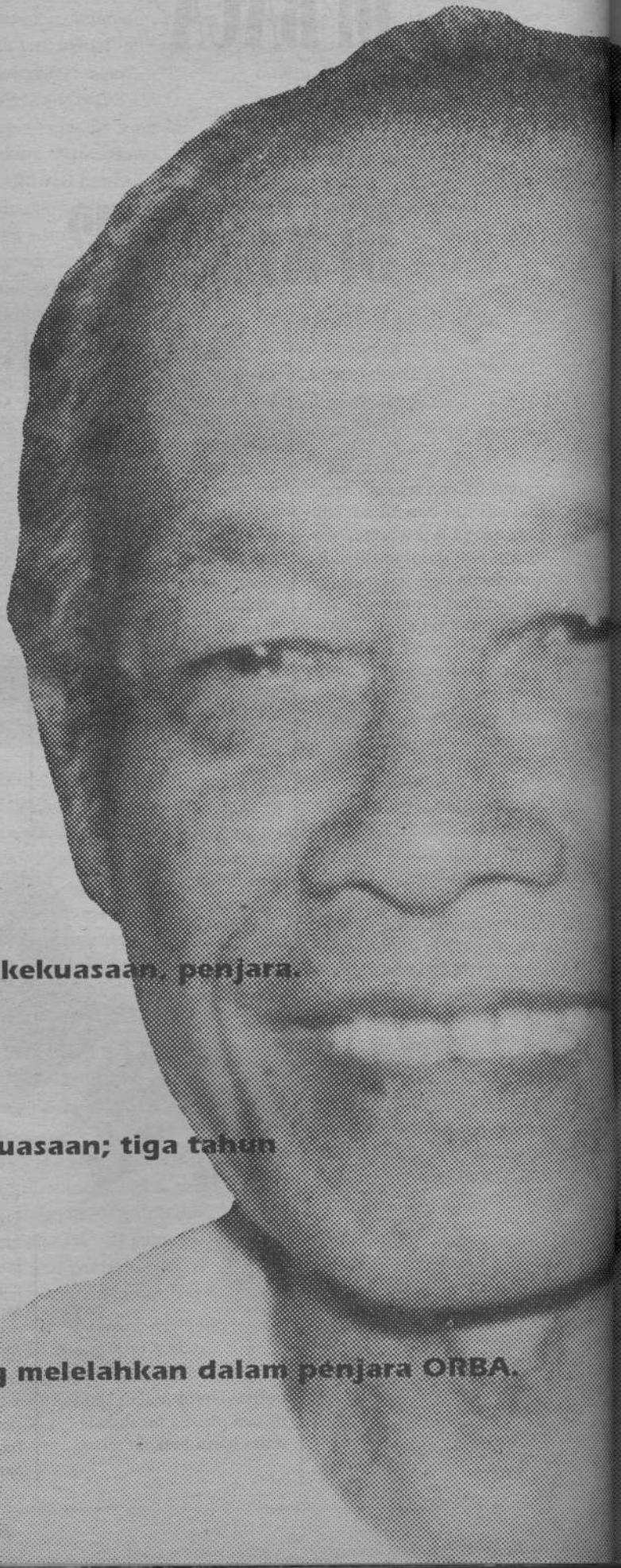
Sejak itu lingkungannyapun mulai mengambil sikap.Nama 'Pramoedya Ananta Toer' menjadi kian suram,menakutkan dan makin disingkiri. Kemudian iapun sadar, memasuki 'penjara' yang lain. Dalam sisa hidupnya kini, dia makin dianak-tirikan bangsanya, bangsa dimana dulu dia mati-matian mempertahankan kemerdekaan dan membelanya dari serangan Inggris, Belanda dan Jepang.

Pramoedya memang sosok kontroversial negeri ini. Ditakuti anak sekolahan ujung kampung sampai kaum muda harapan bangsa yang berkepentingan dengan selembar kertas 'bersih diri-lingkungan'. Ia dikecam oleh kelompok Manikebu -- kelompok yang dulu ditindasnya -- sebagai 'tukang ganyang'. Ikranegara misalnya menulis, "Dia bukan hanya penganut dan penyebar aliran realisme-sosialis (baca: stalinisme dibidang kesenian) melainkan yang

# Saya pupuk bawang di Lekra

juga berjuang dengan garang untuk menindas aliran kesenian di luar yang diyakininya ...". Andre Harjana dalam 'Sastra Partai : dari Lenin ke Lektra' dengan sangat meyakinkan menunjukkan kesamaan antara Lekra (dimana Pram disebutnya sebagai Ideolog organisasi tsb), dengan organisasi kesenian di Rusia yang melakukan fungsi propaganda bagi rezim komunis.

Begitupun Goenawan Mohamad, buru buru menerbitkan tulisan panjangnya dalam 'refleksi' (dengan kearifannya) dengan maksud 'meluruskan sejarah' ketika Keith Foulcher pada tahun 1986 mengeluarkan monogramnya, *'Social commitment in literature and the arts; the indonesian of people's culture'* yang mengedepankan Lekra.

Lepas dari noda masa lalu, Pram adalah pengarang besar negeri ini. Karyanya mendapatkan kehormatan dalam khasanah kesusasteraan dunia. Dialah satu-satunya pengarang Indonesia yang masuk nominasi hadiah Nobel.(dia masuk nominasi penerima nobel setiap tahun sejak 1984 sampai sekarang). Melalui tetralogi novelnya yang ditulis di pulau Buru, Pram dinilai berjasa dalam mengungkap sejarah Pergerakkan pada awal abad 19, kurun waktu yang belum banyak disentuh para sejarawan kita. Jacob Sumarjo misalnya menulis menanggapi 'Bumi Manusia', "... Pramoedya melukiskan sekeping kehidupan rakyat, tapi sebenarnya dia menyuguhkan gambaran sebuah jaman yang hilang. Sebuah jaman yang dihuni oleh bapak-bapak bangsa yang meletakkan dasar-dasar perjuangan

besar melawan kolonialisme dan penindasan yang kelak apinya akan berkobar dan membakar rumah penjajah yang kotor dan *massif*."

Saat ini Pram hidup tenang dengan keterpencilannya, bersama istri dan beberapa anaknya di bilangan Rawamangun, Jakarta. Oleh istrinya, Maimunah (dia adalah keponakan pahlawan nasional Husni Thamrin) ia dikaruniai 8 orang anak, 7 diantaranya perempuan. "Tahun 1965 waktu ditangkap dia berumur 2 bulan, sehingga saya tak sempat mendidik dia" katanya tentang bungsu laki-laki satu-satunya. Hari-harinya dilewatkan dengan membaca buku, berkebun dan membersihkan rumah. Sejak keluar dari Buru tahun 1979 dia sepenuhnya hidup dari *royalty* buku-bukunya yang bertebaran diterbitkan di luar negeri.

Omong-omong BALAIRUNG dengan Pramoedya mengalir pelan lengkap dengan *joke* dan gurauan di sana-sini. Berlangsung selama hampir 6 jam dalam dua kali kesempatan wawancara. Pertanyaan terpaksa terlontar dengan 'agak berteriak' dengan sesekali mengulang dan mendekatkan mulut ke telinganya. Memang selama hampir 30 tahun terakhir, pendengaran Pram kurang begitu baik, "Ini karena pukulan *Tomygun* sewaktu saya ditangkap".

Sore itu langit Jakarta mendung sehingga ruangan 4x4 m di lantai dua rumahnya yang apik agak remang.Dinding ruangan lengang oleh lukisan maupun hiasan, hanya ada tiga kursi dan meja kayu bundar dengan asbak kaleng bikinan Pram dan beberapa novel Pram yang baru diterbitkan di luar negeri tercecer di lantai. Pram duduk santai dengan hanya mengenakan kaos dan celana pendek *Bermuda*. Sorot matanya masih tajam, bicaranya masih tangkas dan galak.

*Beberapa waktu lalu anda ceramah di LBH, kesan kesannya gimana.*

Oh sambutan baik, cuma habis bicara saya langsung pergi, karena kalau mereka ngomong saya nggak dengar.

*Usul anda di LBH waktu itu tentang tapol dan napol.*

Ya dianjurkan supaya diberi Amnesti, tapi saya menolak, lho kami tidak merasa apa-apa. Saya mau mengatakan bahwa yang memberiAmnesti itu saya pada ORBA. Apa yang tidak dirampas dari saya. Hidup saya, masa muda saya yang kreatif.

*Waktu diskusi di studio Oncor agustus 1993 anda datang ?*

Ndak datang. Saya sudah menduga tak akan ada orang yang mulai ngomong masalah sumber-sumber konflik. Jadi toh akan melayang di permukaan saja karena kalau mengenai latar belakang terjadinya soal itu orang tidak menguasai. Apalagi orang orang Manikebu nggak mau tahu.

*Menurut anda perbedaan mendasar konsep kesenian Lekra dan Manikebu.*

Lekra menghendaki kesenian yang terlibat dengan perjuangan nasional. Si Ariel

*Disela-sela waktu luangnya Pramoedya menyempatkan diri menulis perjalanan hidupnya. Berikut ringkasan otobiografinya.*

Blora, 6 Febuary 1925

Aku dilahirkan di kota kecil Blora, di tengah-tengah keluarga nasionalis-non kooperatif. Ayah seorang guru sekolah Boedi Oetomo dan ibu seorang aktivis gerakan perempuan.

Blora, 1930-1940

Menyelesaikan sekolah dasar selama 10 tahun dengan mengulang 3 tahun. Karena ayah menganggapku bodoh , dia menolak pembiyaan untuk melanjutkan di SMP. Kemudian aku menganggur.

Blora, 1941-1942

Aku memelihara ibu yang sakit, sampai meninggalnya. Mulai menjadi pencari penghidupan bagi seluruh keluarga yang terdiri dari orang tua dan 7 adik. Umur 17 tahun aku diharuskan meninggalkan rumah, pergi ke jakarta.

menamakannya Sastra Kontekstual. Sedangkan Manikebu menghendaki kebebasan mutlak, jadi ndak punya tugas nasional. Jadi gelandangan waktu negara dalam keadaan genting.

Pramoedya semula adalah pengarang lepas, tapi kemudian berhasil dipengaruhi untuk masuk Lekra. Sejak masuk Lekra dia berubah. Dia sudah seperti layaknya politikus ketimbang pengarang. Mengenai ini Prof. Teeuw menulis, "...Nampaknya sang pengarang telah mencapai suatu babakan dimana dia sudah siap menggantikan impian-impian dengan tindakan -- karena kepahitan dengan dunia sekitar, karena kesia-siaan terhadap dirinya sendiri, terhadap kegagalan tulisan-tulisannya, dan terhadap tidak cukupnya rasa kemanusiaan yang ada padanya."

Dalam menghadapi konsep kesenian lain (Manikebu) waktu itu Lekra tidak demokratis hingga ada istilah *ngganyang* segala.

Tentu saja *ngganyang*, dan saya tidak merasa salah. Kami buka suatu diskusi dan polemik secara

# PRAM tentang seorang PRAM

Jakarta 1942-1945

Tahun pertama di Jakarta melanjutkan sekolah di taman dewasa, sampai kelas 2. Kemudian aku bekerja sebagai tukang ketik di kantor berita 'Domei' sampai 1945. . Pada kurun itu aku mulai menulis dan mulai mengirimkan ke koran 'Pemandangan' tapi tak pernah dimuat.

Jakarta 1945-1946

Bergabung dengan aksi para pemuda dan mendaftarkan diri ke markas TKR yang mengirimku ke markas divisi Siliwangi Resimen Cikampek. Menjadi prajurit resmi dari mulai serdadu tanpa pangkat sampai Letnan II. Pengalaman mengesankan dalam menghadapi Inggris, Jepang dan Belanda terjadi awal 1946 dimana pasukan front kami terkepung di bawah berondongan mitraliur serdadu Sikh, sehingga harus menerobos di sebelah utara Kranji-Bekasi, mengesankan karena setelah seluruh pasukan lolos, komandan front memerintahku untuk kembali menyusup guna mengambil alat komunikasi yang tertinggal.

Jakarta 1947

Menjadi guru stenografi dan redaktur majalah'Sadar' terbitan *The Voice of Free Indonesia*. 22 Juli ditangkap oleh marinir Belanda yang menemukan dokumen gerakan bawah tanah yang menginstruksikan aku untuk mencetak dan menyebarkan pamflet perlawanan terhadap aksi militer Belanda ke- I . Kemudian dijebloskan ke penjara Bukit Duri, Jatinegara.

Jakarta 1947-1949

Menjadi tawanan Belanda, melakukan kerja paksa pembersihan seluruh Jakarta. Di penjara ini aku belajar bahasa Prancis (gagal karena kekurangan teks) dan bahasa Inggris yang langsung digunakan untuk menterjemahkan Steinbeck Filsafat, Ekonomi dan kursus *midderstand*. Dalam penjara ini pula aku menulis novel Perburuan dan Keluarga Gerilya yang naskah-naskahnya dibawa keluar penjara oleh Prof. Mr. G.J. Resink, mahaguru fakultas Hukum UI, seorang Belanda yang belakangan menjadi warga negara Indonesia.

Jakarta 1950

Keluar dari penjara aku langsung mendapatkan nama sebagai pengarang dari cerpen Blora yang sekaligus terbit dalam bahasa Indonesia, Belanda, Spanyol dan Jepang. Menerbitkan Keluarga Gerilya, juga kumpulan cerpen Percikan Revolusi. Aku juga menjadi redaktur sastra Indonesia moderen pada penerbit Balai Pustaka.

Jakarta 1951-1952

Menerbitkan novel kecil Bukan Pasar Malam dan Di Tepi Kali Bekasi berdasar pada pengalaman militer 1945-1946. Tahun ini aku keluar dari Balai Pustaka. Pada 1952 aku menerbitkan cerpen Cerita dari Blora, yang sampai saat ini diterjemahkan dalam 18 bahasa (22 bahasa menurut Prof. Ben Anderson)

Holland 1953-1954

Bermukim di Belanda aku mendapat hadiah untuk kumpulan cerpen Cerita dari Blora dari Badan Musyawarah Kebudayan Nasional Jakarta.

Jakarta, 1954-1955

Menerbitkan novel "Korupsi" dan "Midah Si Manis Bergigi Emas".

Jakarta, 1956

Melawat ke Cina atas sponsor Mentri PPK Dr. Priono untuk menghadiri peringatan penulis besar Cina Lu Hsun. Sepulang dari dari perlawatan, umum menganggapku telah menjadi komunis Penerbit, surat kabar dan majalah mulai menolak mengumumkan karya-karyaku. Ini berlangsung sampai tahun 1959.

Jakarta 1957

Aku memberikan sokongan pada konsepsi presiden di masa Indonesia mendapat tekanan keras dari negeri barat dan menggelumbangnya perpecahan di dalam negeri. Menjadi juru bicara seniman menghadap presiden untuk menyatakan dukungan.

Jakarta 1958

Melawat ke pelbagai negara: India, Mesir, Roma, Cekoslovakia, Jerman, Polandia, Soviet, Tiongkok. Melawat ke Sumatra Barat sebagai sukarelawan membantu Angktan Bersenjata untuk memadamkan pemberontakan PRRI Permesta. Sebagai tamu pada kongres nasional I Lekra di solo aku dibombardir sebagai anggota pleno organisasi tersebut.

Jakarta 1959

Aku memprotes tingginya pajak pengarang. Mengetuai "discusi club Simpat Sembilan" (diskusi 9 orang terdiri dari wartawan, pengarang, ekonom, mahasiswa) diantaranya mencetuskan 'kembali ke UUD 45' untuk mengatasi perpecahan Konstituante. Dan sepanjang diketahui

terbuka, jawab kalau mau jawab, tapi mereka tak mau jawab

*Mengapa kata-kata anda di Lentera demikian keras dan kasar.*

Saya pegang *Lentera* setelah keluar dari penjara Cipinang tahun 1961. Sebelumnya saya dipanggil PEPERTI untuk diinterogasi karena kasus "Hoakiu di indonesia", kemudian saya diculik dan disekap di RTM (rumah tahanan militer). Istri saya hamil tua waktu itu, saya dicari kemana-mana baru sebulan tahu kalau saya di RTM. Waktu itu saya sangat marah pada militer dan semua yang diperalat oleh militer. Oleh karena itu *Lentera* itu penuh dengan kemarahan saya. Jadi itu memang persoalan pribadi yang menyebabkannya. Kemarahan itu terbawa dalam tulisan tulisan saya.

*Menurut kelompok Manikebu, dalam Lentera dulu anda menganjurkan agar mereka ditangkap, antara lain HB Yassin, Hamka dll.*

Omong kosong saja. Kertas dan dokumen saya telah dihancurkan semua, saya nggak bisa pelajari lagi. Nanti saya mau dapat kiriman copy *lentera* dari Amerika akan saya buktikan. Tapi kalau toh

satu-satunya saran semasanya. Melahirkan novel kecil, Sekali Peristiwa di Banten Selatan. Aku diangkat menjadi anggota dewan penasehat kementrian PETERA

Jakarta 1960

Tampil sebagai satu-satunya pribadi yang menentang PP10/60 yang rasialis. Suatu peraturan presiden yang menghalau minoritas cina dari usahanya di pedalaman wilayah RI. Kemudian artikel-artikelku dibukukan dalam, Hoakiu di Indonesia. Sebagai akibat tantangan terhadap PP10/60 dan terbitnya Hoakiu di Indonesia oleh PEPERTI (penguasa perang tertinggi) aku dipanggil untuk diwawancarai yang ternyata di interogasi oleh Mayor Sudharmono, BcHk dan selanjutnya aku diculik dan disekap di RTM (Rumah Tahanan Militer), tanpa proses hukum. Menerbitkan cerita bersambung Gadis Pantai.

Jakarta 1961

Waktu pers mengetahui aku disekap, juga disiarkan radio ABC Australia, dengan alasan 'mengacau' di RTM, aku dipindah ke penjara Cipinang. Di sini aku baru menerima surat penahanan yang ditanda tangani A.H. Nasution. Penahanku berlangsung hampir setahun, dibebaskan bersama kelompok pemberontak PERMESTA. Di penjara Cipinang ini aku menulis buku harian tentang kehidupan para hukuman di blok tempat aku dikucilkan di belakang dua pintu besi terkunci.(catatan harianku ini hancur dalam peristiwa 1965, hanya beberapa bagian terselamatkan karena termuat di Lentera).

Jakarta 1961

Setelah bebas dianjurkan teman-teman di redaksi surat kabar Bintang Timur, dari pada hanya 'terlanjur basah' lebih baik 'nyebur sekalian'. Redaksi memberiku kesempatan untuk membuka rubrik kebudayaan yang kunamai Lentera, yang semula hanya 1/4 halaman kemudian berkembang menjadi 1 halaman. aku dimintai Prof. Dr. Tjan Soe Siem mengajar di Universitas Res Publika untuk mata kuliah sastra Indonesia dan sejarah Indonesia.

Jakarta 1963

Lentera kubentuk menjadi medan polemik untuk mendapatkan jawaban terbaik dalam mengantisipasi tekanan barat yang semakin keras terhadap Indonesia. Nampaknya undangan untuk berpolemik praktis gagal, tidak terjawab.

Jakarta, 1965

"Lentera menjadi semakin populer. Isu-isunya tidak jarang menjadi bahan pembicaraan sampai berbulan dalam media massa. Materi dan sorotan baru atas sejarah modern semakin banyak dimuat, juga pandangan baru atas sejarah sastra indonesia, juga pengkoreksian atas pandangan tradisional sejarah sastra. Oleh segolongan pembaca kadang dianggap sebagai teror terhadap pandangan lama yang sudah mapan dibidang sastra,budaya dan sejarah. Pada 13 oktober malam ditangkap, naskahku yang belum diterbitkan,koleksi dokumen 1918-1948, koleksi majalah sejak abad lalu dan koleksi buku yang mencaapai 5000 jilid. Dalam penculikan /penahanan para penguasa Negara gaya baru ini menyaksikan betapa brutal sistem dan aparat teror beraksi. Praktis semua metode penganiayaan diterapkan pada setiap tangkapan. sementara tenagaku diperas untuk bertanam sayur baik untuk ditanam sendiri maupun untuk kepentingan penjaga.Dengan jatah makan yang minim hampir tiap hari terjadi kematian.

Nusakambangan juli-agustus 1969

Bersama para tapol dikirim ke Nusakambangan, sedang ditransitkan untuk dibawa ke pulau Buru.

Buru agustus 1969-november 1979

Melakukan kerja paksa perintisan dan pembangunan jalan, membabat hutan, mencetak sawah sampai menjadi penggodam pada bengkel pandai besi. Membangun irigasi, bendungan dan perumahan, semua tanpa imbalan. Sampai 1973 dijenguk oleh berbagi pihak yang terpenting adalah kunjungan Pangkopkamtip Jendral Soemitro yang memberiku ijin menulis.

Buru 1973-1979

Menulis sejumlah novel yang kuketik dengan sejumlah tembusan, juga satu kopi kudepositokan pada gereja katolik di pelabuhan Namlea. Yang terakhir ini kemudian diperbanyak dengan seijinku, yang ternyata disebarkan ke Eropa, Amerika dan Australia. Karya karya yang kuhasilkan di sini adalah ; Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, Rumah Kaca, Nyanyi Tunggal Seorang Bisu (Catatan Buru), Arus Balik, Mangir, Mata Pusaran.

Jakarta,1981-1992

Novel Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa dilarang beredar oleh Jaksa Agung tahun 1981. tahun 1982 aku memberikan ceramah di UI memenuhi undangan Senat Mahasiswa UI, karena ceramah tersebut, aku diinterogasi selama seminggu. Tahun 1985 dua bukuku Jejak Langkah dan Sang Pemula dilarang beredar. Tahun ini pula aku menerbitkan antologi Tempoe Doeloe satu-satunya bukuku yang tidak dilarang sampai sekarang. Tahun 1987 aku menerbitkan Hikayat Siti Maria yang dilarang beredar tahun 1988. Tahun 1988 aku menerbitkan Rumah Kaca yang langsung dilarang beredar. Pada tahun ini aku menerima penghargaan *Freedom to Write Award* (Amerika). Tahun 1990 aku menerima penghargaan *The Fund for Free Expression Award* (Washington). 7 desember 1992 aku mengeluarkan pernyataan sehubungan dengan hari hak-hak asasi Dunia yang disiarkan ke seluruh dunia termasuk PBB dan UNESCO.

saya menganjurkan itu dalam hubungan dengan revolusi, kondisi nasional waktu itu.

*Mengenai Hamka bagaimana sebenarnya persoalannya sampai dia dituduh plagiat.*

Ia dituding plagiat oleh orang-orang yang mengetahui sastra arab. Namanya Abdullah SP, lantas saya lansir di *Lentera.* Lantas ada jawaban dari masyarakat bahwa itu betul. Ada laporan dari UGM, dia pernah ceramah di UGM, lantas seseorang mengatakan bahwa sejarah islam di Indonesia, buku pak Hamka yang jilid I itu plagiat. Pak Hamka bilang, "Oh saya menghargai anak muda sekarang yang begitu kritis," itu pernyataan Hamka. Sebenarnya persoalan Hamka waktu itu sederhana, dia tidak mengerti hak cipta, tapi dia tak mau mengakui.

*Sampai dia ditangkap permasalahannya bagaimana.*

Dia ditangkap dulu ada dugaan dia terlibat peristiwa Idul Adha. Ada sembahyang Idul Adha di Istana, waktu itu hadir presiden. Presiden ditembak tapi meleset. lantas terdengar orang-orang menyebut "allahu Akbar" terus bubar. Dia diduga terlibat dalam persoalan ini, nah benar tidaknya saya tidak tahu.

*Di Lentera tahun 1961 anda menulis tentang adanya gejala 'skisma' pada pengarang kita waktu itu. Bisa dijelaskan sedikit.*

Pada jaman Pujangga Baru orang menulis dalam hubungannya dengan perjuangan kemerdekaan. Apakah itu Salah Asuhan, Layar Terkembang, maupun karya sastrawan yang tak masuk dalam sejarah sastra indonesia resmi Marco, Sumantri. Tapi mengapa pada tahun 1960-an dalam keadaan negara dalam bahaya, orang tidak lagi mengingat persoalan negara. Ini saya anggap sebagai gejala 'skisma'. Itu pandangan pribadi saya, bisa saja salah. Saya bukan bermaksud supaya sastra menjadi sastra negara.

*Hubungan Anda sekarang dengan anggota kelompok Manikebu.*

Dulu Rendra, Goenawan Mohamad pada tahun-tahun pertama setelah kembali dari Buru (1980), datang ke sini dua kali. Yassin juga datang begitu juga Mochtar Lubis. Setelah buku saya dilarang tahun 1981 ndak ada yang datang lagi, ndak apa-apa saya tidak punya perasaan dendam.

*Dalam hal proses kreatif menulis, ketika kreatifitas diberi frame misi politis, yang oleh Lekra waktu itu disebut dengan istilah Realisme-Sosialis apakah ini tidak membelenggu proses kreatif penulis.Pendapat anda?*

Kreatifitas itu pada dasarnya berdasarkan tuntutan realisme sosial dengan tujuan memenangkan tujuan rakyat. Itu suatu kerangka teori. Orang boleh menolak tapi dalam keadaan negara dalam bahaya sebaiknya begitu. Seniman juga punya andil pada perkembangan negara, pada waktu itu lho.

*Kemenangan rakyat tersebut dalam kerangka paradigma komunis sosialis?*

Oh nggak, itu artinya yang dirumuskan oleh Soekarno sosialisme itu apa? Keadilan dan kemakmuran, tanpa keadilan tak ada kemakmuran, itu kami terima. Itu bukan sosialisme sebagai sistem politik, tapi sosialisme seperti yang dirumuskan dalam Pancasila, keadilan sosial and *so on... and so on.*

*Bukan perjuangan pembentukan masyarakat tanpa kelas.*

Masyarakat tanpa kelas itu kan teori komunis. Di sini Indonesia, untuk menjadi menjadi negara saja baru, bagaimana bisa mempraktekan dalam hubungan negara-negara kapitalis berlapis-lapis, itu kan utopi, sebab mempraktekan keadilan sosial saja belum bisa.

*Andre Harjana menulis, bahwa Realisme-Sosialis yang digunakan lekra memiliki kesamaan dengan Realisme-Sosialis yang digunakan di Rusia, pendapat anda?*

Lekra sendiri tak punya formula yang jelas, misalnya si Bakri (Prof. Bakri Siregar --red) lain, si Jubar (Joebar Ayub, Red) lain, saya lain, itu tidak mewakili Lekra, itu masih dalam suatu pemikiran.Tapi pada garis besarnya membantu kebangkitan rakyat, membantu emansipasi rakyat. Itu yang saya ketahui waktu itu.

*Lepas dari Realisme-Sosialis seperti didekritkan Zhdanof tahun 1934.*

Lepas sama sekali. Itu kebutuhan Indonesia semasa negara dalam bahaya. Saya sendiri nggak pernah baca Zhdanof, masih terpusat pada problem yang hidup di Indonesia waktu itu.
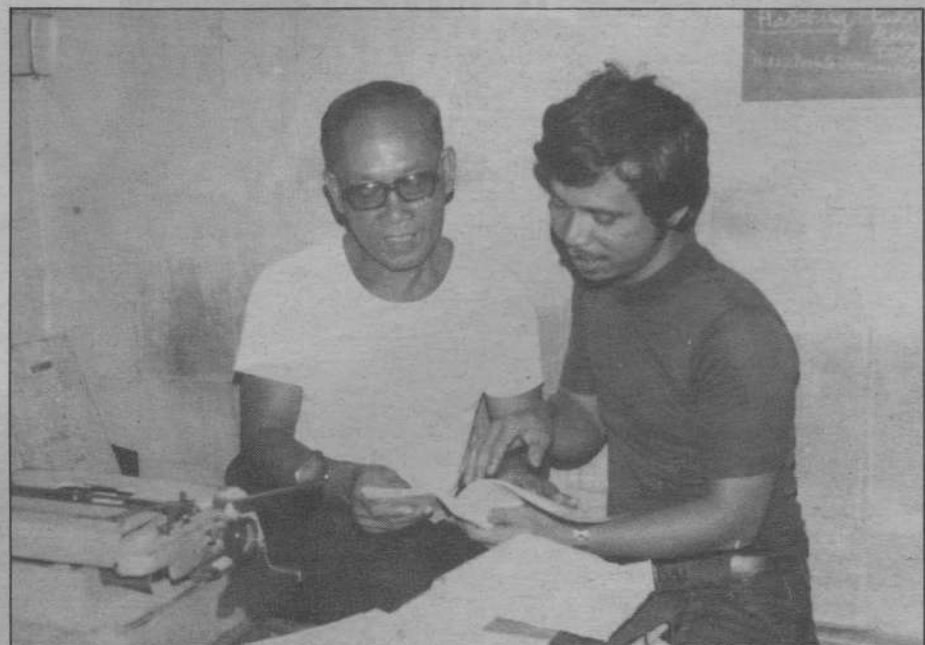
Menulis atas ijin Soemitro

*Tahun 1961 Lekra pernah menetapkan semacam 'standart keindahan'karya dan pedoman bagi para penulisnya.*

Ya pernah memang tapi saya nggak ingat rumusnya.

*1.5.1 maksud anda?*

Ya saya ingat itu.

Bisa diterangkan sedikit.

Saya tidak ingat secara rinci, sebab di Lekra saya tidak kenal organisasi. Saya itu terbang sendirian, dari Lekra itu saya diundang hadir pada kongres Nasional I di Solo. Saya diminta memberikan sambutan, setelah itu keputusan kongres Lekra saya diangkat jadi anggota pleno. Jadi saya tidak mengikuti detil-detil. Saya bukan orang organisasi, kalau ditanya tentang putusan organisasi nggak tahu saya, *pupuk bawang* saya di Lekra.

*Setelah keluar dari pulau Buru masih menulis.*

Selama 8 tahun belakangan ini praktis tidak menulis, Saya kehilangan konsentrasi. Dalam pemeriksaan terakhir sebulan lalu saya lakukan *general check-up*, ternyata gula darah saya 500. Lantas melakukan diet turun 250, mulai bisa kerja lagi. Dengan gula darah 500 saya kehilangan kemauan untuk menulis, masuk ruang kerja saya tak mau. Mesin ketik sudah tertutup debu tak karuan.

*Mengenai proses kreatif penulisan,*

Itu soal dorongan dari dalam untuk menulis. Penumpukkan masalah yang harus dilepas, seperti penimbunan yang meledak begitu.. Jadi sudah tak berpikir apa-apa, terus jalan mengeluarkan timbunan.

*Seperti terhipnotis, nggak sadar begitu?*

Bukan nggak sadar. itu sadar, itu saya kehendaki. Materi-materi tertimbun dan tertumpuk dalam gentong. Materi itu saya peroleh dari pengalaman badani, indrawi, dan intelektual. Lalu ditetesi dengan apa yang saya kehendaki, lantas berproses. Nah proses itu tulisan saya; antara materi dan tetesan yang saya kehendaki. Seperti proses kimia begitu. Pengalaman indrawi, badani dan intelektual adalah pondasi-pondasi penulisan. Kalau pengalaman itu tak ada atau tak bisa menghayati pengalaman sendiri, nggak bisa nulis. Hasil dari reaksi kimia itu adalah novel saya.

*Oleh Orde Baru anda dinilai sebagai penganut dan penyebar paham komunisme melalui karya-karya anda, pendapat anda?*

Saya nggak pernah mempelajari Marxisme-leninisme, nggak pernah. Sejak SMP adik saya sekian banyak menjadi tanggungan saya. Saya sempat belajar hanya sampai kelas dua SMP. Belajar bahasa inggris di penjara, bahasa jerman di Buru. Saya nggak sempat studi apalagi filsafat. Saya harus menghidupi keluarga, jadi nggak sempat mempelajari marxisme-leninisme.Itu secara jujur bukan menutup-nutupi. Karena itu waktu diperiksa Satgas Intel tahun 1980 setelah diusir dari UI , saya bilang saya belum pernah mempelajari komunisme. Kalau ada persamaan pendapat saya dengan pendapat Marx-Lenin, itu jelas Marx-Lenin belajar dari saya, bukan sebaliknya.

Sebagian besar karya-karya Pram lahir di penjara. Novel Keluarga Gerilya, Perburuan, dan kumpulan cerpen Cerita dari Blora lahir di penjara Bukit Duri sewaktu dia menjadi tawanan Belanda 1947-1949. Di penjara P. Buru 1973-1976 dia menghasilkan tetralogi Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah kaca. Juga, Nyanyi Tunggal Seorang Bisu (Catatan Buru), Arus Balik, Mangir dan Mata Pusaran.

*Karya anda banyak lahir di Penjara, mungkin suasana penjara cukup baik bagi anda untuk menulis.*

Bukan begitu, di penjara itu kan permasalahannya lebih sederhana untuk pribadi saya. Paling-paling pribadi berhadapan dengan kekuasaan, atau kalau ada konfrontasi kecil-kecilan dengan sesama. Kalau di luar masalahnya macam-macam, makan-lah, pajak-lah dst.

*Anda diprbolehkan menulis di penjara.*

Saya dapat ijin dari Jendral Soemitro waktu itu Pangkopkaptib. Dia berjanji akan membebaskan kami sesegera mungkin. Sebelum bebas silakan melatih kembali menulis, dia bilang begitu. Tapi rencana dia gagal karena peristiwa Malari. Sebelum itu saya dapat surat dari Harto (presiden sekarang, Red.)

**Pram** bersama istri

yang pada pokoknya memberikan restu pada janji Mitro.

*Di luar negeri anda mendapat banyak dukungan untuk dicalonkan sebagai nominator Nobel.*

Yang pertama kali menyarankan itu, Parakitri waktu meresensi buku saya Bumi Manusia tahun 1984 kalau nggak salah. Kemudian Prof. Teeuw di Belanda sana. Wah, kemudian saya memang masuk nominasi tahun 1984 sampai tahun terakhir ini.

Kekuasaan selalu saja membutuhkan simbol dan monumen; Soekarno yang membakar dan patriotik, kartini yang lembut-mencerahkan , mungkin juga Pramoedya yang pekat-menakutkan.Dengan pelicin simbol-simbol tersebut kekuasaan menggelincir tenang. Terakhir, pelarangan tetralogi novelnya dan penahanan tiga mahasiswa yogya menegaskan simbolisasi itu.

*Anda cukup luas dikenal di luar negeri sementara di negara anda sendiri buku anda dilarang, pendapat anda.*

Itu saya tak pedulikan.mereka boleh melarang buku saya, saya hidup dari luar negeri. Saya anti kapitalis tapi saya hidup dari negara kapitalis. Yang terakhir buku saya dikontrak Kanada dan pangkalan Amerika di Kanada. Novel saya Perburuan bulan depan akan dipentaskan di Prancis.

*Ada pendapat karya anda dikenal di dunia internasional karena buku anda dilarang dan anda sendiri pernah dipenjara, tanggapan anda.*

Tidak juga. Karya saya kumpulan cerpen Cerita Dari Blora sudah diterjemahkan ke dalam 18 bahasa sebelum saya ditangkap tahun 1965. ya mungkin itu faktor tambahan saja.

*Sastrawan yang anda kagumi dan mempengaruhi proses kreatif penulisan anda .*

Semua sastrawan besar dunia itu guru saya. Multatuli mengajarkan saya tentang kemanusiaan dan bahwa kemanusiaan itu tak dapat berdiri sendiri, harus direbut. Dari Gorky saya mempelajari kekuatan bagaimana menggoyang sistem yang tidak kita sukai. Saya belajar dari Steinbeck bagaimana menulis secara plastis. William Saroyan saya belajar bahwa detik-detik yang mengharukan adalah hubungan elementer antar manusia, antara ayah,ibu, dan anak dsb. Tolstoy, Gogol, Chekov saya juga mengikuti tahun 50-an tapi yang paling banyak berpengaruh ya yang diatas tadi.

*Pendapat anda tentang kesenian kita sekarang*

Ya, kesenian formil kita sekarang ini memasuki dunia subsistem kekuasaan. Umumnya pengarang masuk dalam kerangkeng subsistem kekuasaan, misalnya; tak mau melihat kekejaman mereka, penipuan-penipuan mereka. Memang tak semua memiliki pribadi terbelah.

*Tentang pengarang kita saat ini?*

Saya tidak mengikuti perkembangan sastrawan indonesia setelah saya ditahan. Hanya saya melihat Seno Gumiro (Adjidarmo, red), kalau dia mau belajar dan pribadinya tidak terbelah saya yakin ia akan menjadi pengarang besar.

*Di kampung tanggapan warga gimana.*

Waktu saya datang dari Buru penuh itu sambutan. Di Buru selalu dibilangi setiap minggu kalian tak akan diterima kembali oleh masyarakat. Saya pulang, penuh.

*Suka ngumpul-ngumpul di kampung.*

Nggak pernah ngumpul lagi. Setelah ada pelarangan, mereka pada ambil sikap.

*Kumpul-kumpul RT begitu.*

Nggak mau, ke tetanggapun nggak. Kuatir nanti ada yang pikir macam-macam. lebih baik nggak datang.

# Romo Mangun tentang Pram

*Pendapat Romo tentang karya Pramoedya?*

Karya-karya Pram berdasarkan riset yang serius dan mendalam. Jarang pengarang kita melakukan ini. Bahasanya memukau, tema novelnya tak pernah kecil, tetek bengek, tapi tema nasional , tema perjuangan bangsa, tema fase sejarah, tema besar, epik. itu pekerjaan besar.

*Novel paling bagus menurut Romo?*

Menurut saya Bukan Pasar Malam , yang tetralogipun saya kira kalah. Keluarga Gerilya terlalu dramatis, seperti *soap opera*. Karya-karya Pram tahun 50-an lebih *nyastra* dan baik ketimbang setelah itu.

*Anda salah seorang yang mengusulkan pencekalan Pram dicabut. Alasannya?*

Pertama, bahwa karya Pram tidak ada hubungannya dengan Marxisme, kecuali jika dicari-cari. Kedua, Ini memang karya berkualitas yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Betapa aneh dan memalukan bila dunia mengenal karyanya, sementara bangsanya sendiri tak kenal. Ketiga, dia diusulkan menerima hadiah Nobel. Suatu saat mungkin akan gol. Kalau dia mendapat Nobel dalam keadaan dicekal siapa yang malu? Kita-kita sendiri. Merugikan Orde Baru. Ingat juri Nobel itu tak lepas dari politik, lebih-lebih humanisme dan kemerdekaan manusia.Tapi payahnya belum apa-apa ibu Edi Sedyawati sudah bilang, "Memang karya-karya Pram ada unsur Marxisme...", waduh!!!

# NKOTB... !

New Kids On The Blocks ternyata tak hanya pintar menyanyi, tapi juga berkiprah di organisasi politik. *Lho ?* Memang yang dimaksud bukan NKOTB yang grup musik dari Amerika itu. Tapi jajaran orang-orang dekat yang muncul di teras elite kepemimpinan Golkar, organisasi politik terbesar di negeri ini.

Fenomena menarik ini dilansir oleh **Daniel Dhakidae**, staf Litbang KOMPAS dalam seminar sehari "Menuju Masa Depan Indonesia yang Berkeadilan dan Demokratis" di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Acara yang dimaksudkan sebagai refleksi awal tahun 1994 ini digelar oleh DIAN (Dialog Antar Iman) bekerja sama dengan harian KOMPAS.

"Belum pernah Golkar mengalami masa seperti ini, masa yang bertabur begitu banyak orang dekat. Ada anak, anak klien, anak sahabat dekat, anak saudara. Seperti NKOTB," ungkapnya bersemangat.

Lebih lanjut, Daniel menjelaskan, lepas dari mampu atau tidaknya para "anak" tersebut, fenomena ini jadi menarik karena menjurus pada *personalization powering*, pemusatan kekuasaan pada pribadi tertentu. Yang tentunya berimbas kurang baik bagi kehidupan demokrasi.

ISTIMEWA

Masih menurut Daniel, demokrasi sangat penting bagi semua orang. Itu sebabnya, semua orang bicara tentang demokrasi. Susahnya, semakin banyak orang *ngomong*, semakin kabur pengertian demokrasi. Konsep demokrasi jadi terlalu besar, luas, dan total. Alhasil, dalam realitas operasionalnya, *power game* sangat berpengaruh. Termasuk NKOTB, pak?

**(Diyah)**

# MEMANG CERDAS

Film yang baik ternyata tak hanya mengundang pujian, tapi juga kritikan. Itulah yang terjadi pada Surat Untuk Bidadari, film terbaru **Garin Nugroho**. Bapak dua anak ini membawa filmnya secara khusus untuk peserta Pendidikan Praktis Apresiasi Film (PPAF), sebuah acara yang digelar oleh Korp Mahasiswa Komunikasi UGM.

"Film ini kurang realistis, Si Lewa -- tokoh dalam film itu -- terlalu pandai untuk anak seusia dia", kritik sebagian penonton yang juga peserta PPAF. Apa komentar Garin?

"Masyarakat kita rupanya tidak menyadari dan tidak siap untuk melihat anak Indonesia

ISTIMEWA

yang cerdas. Bandingkan dengan 'Home Alone' misalnya, bukankah film itu juga tidak realistis. Tapi toh kita mau menerimanya. Kenapa...?, karena datangnya dari luar negeri. Selama ini kan kita menganggap orang luar pandai sementara kita sendiri bodoh".

Garin rupanya sadar betul dengan apa yang diucapkannya. Itu sebabnya ia sama sekali tak kaget ketika menghadapi kritik yang menyebut filmya kurang masuk akal. Padahal, "Windy, -- pemeran Lewa -- saya temukan satu minggu menjelang shooting. Saya hanya mengarahkan beberapa saat pada saat shooting. Dan... ,jadilah ia melakukan peran yang natural. Jadi, sebenarnya ia memang cerdas", tambah sutradara muda yang juga mengajar di IKJ ini.

**(Timbul)**

# INTEGRITAS

Suatu ketika, seorang dosennya menanyakan mengapa tamatan PT Yogyakarta enggan bekerja di Jakarta. Tantangan sekilas itu pun mendapat sambutan **Sumandari Sunarwinto**. Mulanya, alumnus Sastra Inggris dan Filsafat Barat

# TERHARU

Bukan penyesalan namanya bila tak datang terlambat. Begitu pula yang dialami **Ratmini Gandasubrata**, janda almarhum Soedjatmoko, ilmuwan kaliber internasional yang pernah dimiliki Indonesia.

Sesal yang dialami nenek seorang cucu yang masih tampak cantik ini bermula dari keinginannya untuk hadir pada dua momen penting yang bersamaan harinya. Yang pertama, menghadiri acara pernikahan *sekar kedhaton*, putri Sultan Hamengkubuwono X. Dan, yang kedua, menghadiri acara Diskusi Panel dalam rangka memperingati 4 tahun wafatnya Soedjatmoko. Acara yang terakhir ini diselenggarakan oleh BALAIRUNG bekerjasama dengan Yayasan Soedjatmoko, juga LSPPA (Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak). Tema diskusi yang digelar adalah Quo Vadis Inteleketual Indonesia, sosok Soedjatmoko yang relatif mampu berperan ganda, sebagai birokrat juga sebagai intelektual besar digunakan sebagai cermin.

Tentu saja , wanita yang juga staf pengajar Sekolah Kepribadian John Robert Power ini tak bisa berada di dua tempat pada waktu bersamaan. Alhasil, acara di keraton pun didahulukan. Kemudian, ditemani Soedarpo Sastrosatomo, Mien Soedarpo, dan Rosihan Anwar, Ratmini menuju Gedung

TIMBUL

UGM ini bekerja di Asosiasi Eksportir Indonesia pada Bursa Valuta Asing Jakarta. "Bagi saya dunia kerja memang tidak harus *in line* dengan pendidikan formal yang didapat", ujar wanita yang pada 1993 lalu masuk pada 100 Wanita Eksekutif pilihan Warta Ekonomi.

Kini Ibu Sum, begitu panggilan akrabnya, menjadi satu-satunya wanita yang duduk di jajaran direksi eksekutif Bank Umum Nasional, juga duduk sebagai ketua Foreign Exchange Association Indonesia.

Ibu rumah tangga tanpa anak ini mengawali karir tahun 1968 ketika ia bergabung dengan American Express Jakarta. Kemudian berturut-turut beralih ke Citibank, Bank Niaga, dan BUN sampai sekarang.

25 tahun bekerja dalam satu 'dunia' baginya tidaklah membuat jenuh. Justru dari situ ia berharap bisa menyelesaikan setiap persoalan yang ada. "Dunia perbankan memberi tantangan untuk belajar lebih, dan yang terpenting adalah bahwa integritas kita dituntut tinggi. Bank dipercaya masyarakat untuk mengelola dana mereka. Kepercayaan itu harus dijaga", katanya menjelaskan. "Untunglah, *Simbok* saya , dengan bahasa sederhana telah menanamkan integritas sejak saya masih kecil,"ujarnya menutup pembicaraan.

**(Frans)**

PRAYUDI

Pertemuan UGM, tempat diskusi berlangsung.

"*Waduh*, sayang sekali. Mestinya tadi saya ke sini dulu Toh, acara "*setor muka*" di keraton tadi tak banyak berarti. *Rame, umpek-umpekan*, sampai kaki saya diinjak orang," sesalnya. Ratmini yang melewati hari-harinya dengan berbagai kegiatan sosial untuk tetap menjaga semangat ini mengaku tak menduga kalau peringatan almarhum suaminya mendapat perhatian begitu banyak pihak. "Saya sangat terharu, juga terkesan atas penghargaan kepada suami saya," ungkapnya sambil berkaca-kaca.

**(Diyah)**

# SAYA SUKA AWAN

Orang tidak akan menyangka kalau pria berkacamata berperawakan kecil, *imut-imut* ini adalah fotografer yang sedang berpameran. Tidak membawa tas kamera, tidak memakai rompi, lebih berkesan sebagai mahasiswa. "Saya senang begitu. Nggak kelihatan seperti fotografer", pengakuan **Yudhi Suryoatmodjo**, 30. kepada BALAIRUNG ditengah pameran foto Paris Metro yang digelar di Bentara Budaya, Yogyakarta.

Putra seorang diplomat ini belajar fotografi di sekolah fotografi Paris. Mendapat beasiswa dari pemerintah Inggris untuk belajar fotografi di Inggris. Selama lima tahun bekerja di Tempo. Bergabung dengan agen foto Etnodata dan sekarang menjadi *curator* di Galeri Foto Jurnalistik Antara serta mengajar fotografi di Institut Kesenian Jakarta.

Yudhi kecil senang menggambar. Juga sangat menyukai awan. Ia sering membayangkannya seperti kelinci, kereta, atau bahkan wajah ayahnya sendiri. Lewat kegemarannya ini, Yudhi belajar tentang komposisi.

Yudhi kecil pernah bercita-cita menjadi wartawan, terpengaruh oleh tokoh Tintin dalam komik yang suka berpetualang. "Orang tua saya sebenarnya kurang mendukung cita-cita saya menjadi wartawan", komentarnya. Maka ketika di Paris ia pun belajar bisnis dan ekonomi, walaupun akhirnya tertarik juga untuk belajar fotografi di sana. "Inilah yang saya cari-cari selama ini", katanya bangga. Melalui fotografi, suami wartawati Leila S. Chudori ini mengaku belajar tentang dunia, juga tentang dirinya sendiri.

Sebagai orang yang hidup dari foto jurnalistik, ia tidak tertarik untuk memotret produk atau iklan karena hanya menjual sesuatu supaya

TIMBUL

orang tertarik pada produk tersebut dan membelinya. "*Nggak* ada pemikiran lain. *Nggak* ada usaha untuk membuka mata orang. Hanya membuka dompet orang saja", kilahnya.

Ia ingin fotografi tidak hanya sebagai hobi karena mahal, juga bukan sebagai satu-satunya sumber penghasilan karena tidak cukup. Apalagi sekedar sebagai *seni-senian*. Ia menawarkan satu fungsi lagi yang lebih idealis yaitu sebagai alat komunikasi. Membuka mata orang untuk menyadari sesuatu yang sebelumnya belum disadari. Semoga tidak sekedar utopia.

**(Kelik S.)**

## PENGHISAPAN

Di pinggir sebuah jalan protokol, terpampang sebuah billboard iklan film yang cukup mencolok. Gambarnya sepasang muda-mudi yang sedang berciuman.Namun yang menarik justru *caption* yang ada dibawah gambar tersebut yang bertuliskan *Exploitation du l'home par l'home* ( penghisapan oleh satu terhadap yang lain).

**Narto**

## DEMOKRASI

Dalam sebuah seminar tentang demokrasi, dimana sebagian besar peserta sangat optimis dan menyokong penuh proses demokratisasi di Indonesia seorang pemrasaran tiba-tiba melontarkan pendapat, "Kalau saya percaya, bahwa di Indonesia ini tidak ada demokrasi". Tentu saja para peserta jadi terhenyak, namun buru-buru ditambahkannya,"Yang ada adalah Demokrasi Pancasila".

**Diyah**

## ATRAKSI

Pariwisata sekarang tidak lagi terbatas pada wisata alam dan budaya, tapi telah merambah wilayah kampus.

Agar wisata kampus ini kian marak ada usulan sebaiknya unjuk rasa dimasukkan dalam agenda atraksi wisata.

**Narto**

## KYAI

Ini cerita dari Gus Dur. Suatu saat dia didatangi seorang kyai yang mengeluh, "Wah, bagaimana ini Gus, santri putri saya ada yang dilamar oleh seorang perwira ABRI." Gus Dur langsung menjawab, "Lho, malah bagus itu. Makin banyak perwira ABRI yang menikahi santri itu makin baik." "Kok bisa begitu?" tanya Sang Kyai "Lhah, biar para perwira ABRI bisa sholat semua." sahut Gus Dur. Sang Kyai tertawa terbahak-bahak. Tetapi kemudian dia termenung. "Kalau semua santri putri menikah dengan ABRI, bagaimana nasib para bujang calon kyai?" Gus Dur terdiam sejenak, lalu menjawab "Suruh cari mertua yang Cina, biar para kyai bisa kaya semua."

**Bimo Nugroho**

## REFERENSI

Referensi ternyata punya arti yang berbeda bagi mahasiswa dan bagi pejabat tinggi. Bagi mahasiswa, referensi berarti sederet buku tebal yang harus dijadikan acuan untuk menggarap skripsi atau paper. Sedangkan bagi pejabat tinggi, referensi bisa membocorkan dana negara sebesar 1,3 trilyun rupiah.

**Diyah**

## SUKSESI

Sebuah media massa lokal melansir berita hangat, "Di Pasar Kembang, kawasan paling 'romantis' di Yogya, ada SUKSESI." Ternyata setelah dicek ulang yang ada adalah *Sus...seksi !*

**Bimo Nugroho**

## SAPI PEJANTAN

Di suatu dusun kecil di leeng merapi tinggallah Haji Toha yang memelihara sapi jantan yang perkasa. Tiap hari berduyun-duyunlah penduduk desa datang ingin mengawinkan sapi betinanya. Suatu sore Pak Lurah datang dan berkata, "Karena sapimu sudah menyangkut hajat hidup orang banyak maka sayalah yang berhak untuk memeliharanya." Tak lama kemudian sapi itupun pindah di kelurahan. Penduduk sekarang menuju kelurahan, tetapi sapi jantan itu tidak bergairah lagi. loyo. Dengan tersenyum Pak Haji berguman, "Pantesan sapinya nggak dinamis lagi, sudah jadi KORPRI sih !.

**Kelik Supriyanto**